



BAPPEDA
KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NO 5 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2026

RPD

KOTA PONTIANAK

TAHUN 2024-2026





WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD Kota Pontianak tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Pontianak untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sistematika RPD;
- b. pengendalian dan evaluasi; dan
- c. perubahan rencana pembangunan daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPD

Pasal 5

(1) Sistematika RPD Kota Pontianak tahun 2024 -2026 meliputi:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
- e. BAB V : Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- i. BAB IX : Penutup.

(2) RPD Kota Pontianak Tahun 2024 -2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kota Pontianak Tahun 2024 -2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 7

- (1) Perubahan RPD Kota Pontianak Tahun 2024 -2026 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. perubahan RPD Kota Pontianak tahun 2024 -2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD Kota Pontianak Tahun 2024 -2026.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Maret 2023



WALI KOTA PONTIANAK,

EDY RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.5. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II. GAMBARAN UMUM	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Letak Geografi, Luas dan Batas Wilayah Administratif	II-1
2.1.2. Topografi	II-2
2.1.3. Geologi	II-2
2.1.4. Hidrologi	II-2
2.1.5. Klimatologi	II-4
2.1.6. Penggunaan lahan	II-4
A. Kawasan Lindung	II-5
B. Kawasan Budidaya	II-8
2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah	II-9
2.1.8. Wilayah Rawan Bencana	II-12
2.1.9. Demografi	II-12
A. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	II-13
B. Kepadatan Penduduk	II-14
C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	II-15
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak	II-16
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-16
A. Pertumbuhan Ekonomi	II-16
B. Laju Inflasi	II-16
C. PDRB Per Kapita	II-17
D. Indeks Gini	II-18
E. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	II-19
F. Rasio Kesenjangan Kemiskinan	II-20
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-21
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-21
B. Pendidikan	II-22
1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	II-22
2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	II-22
C. Kesehatan	II-23
1. Angka Usia Harapan Hidup	II-23
2. Persentase Balita Gizi Buruk	II-24
D. Ketenagakerjaan	II-24
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-24
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-25
3. Rasio Penduduk yang Bekerja	II-26
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-27
2.3. Aspek Daya Saing Rendah	II-28
2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-28
A. Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	II-28
2.3.2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	II-28
A. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB	II-29
B. Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum	II-30

2.3.3.	Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah	II-31
A.	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	II-31
B.	Jumlah Bank Dan Cabang	II-31
C.	Ketersediaan Listrik dan Air Bersih	II-32
2.3.4.	Fokus Iklim Investasi	II-33
A.	Angka Kriminalitas yang Diselesaikan	II-33
B.	Jumlah Surat Izin Usaha yang Diterbitkan	II-34
2.3.5.	Fokus Sumber Daya Manusia	II-34
A.	Presentase Lulusan SD/SMP/SMA	II-34
B.	Rasio Ketergantungan.....	II-35
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	II-36
2.4.1.	Pelayanan Urusan Wajib Dasar	II-36
A.	Urusan Pendidikan	II-36
B.	Urusan Kesehatan	II-42
C.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-51
D.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-56
E.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	II-57
F.	Urusan Sosial	II-58
2.4.2.	Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar	II-59
A.	Urusan Tenaga Kerja	II-59
B.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-60
C.	Urusan Pangan	II-62
D.	Urusan Pertanahan	II-64
E.	Urusan Lingkungan Hidup	II-65
F.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-67
G.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-69
H.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-70
I.	Urusan Perhubungan	II-70
J.	Urusan Komunikasi dan Informatika	II-71
K.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-73
L.	Urusan Penanaman Modal	II-73
M.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	II-75
N.	Urusan Statistik	II-76
O.	Urusan Kebudayaan	II-76
P.	Urusan Perpustakaan	II-78
Q.	Urusan Kearsipan	II-79
2.4.3.	Pelayanan Urusan Pilihan	II-79
A.	Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian	II-79
B.	Urusan Pariwisata	II-80
C.	Urusan Perdagangan	II-81
D.	Urusan Perindustrian	II-82
2.4.4.	Pelayanan Unsur Pendukung.....	II-82
A.	Unsur Sekretariat Daerah	II-82
B.	Unsur Sekretariat DPRD	II-86
2.4.5.	Pelayanan Urusan Penunjang	II-86
A.	Urusan Perencanaan	II-86
B.	Urusan Keuangan	II-87
C.	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	II-87
D.	Urusan Penelitian dan Pengembangan	II-88
2.4.6.	Pelayanan Urusan Pengawasan	II-89
2.4.7.	Pelayanan Urusan Kewilayahan	II-89
2.4.8.	Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	II-93

2.5. BUMD yang Berkontribusi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ...	II-93
2.5.1. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak	II-94
2.5.2. Perumda Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak	II-95
2.6. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kota Pontianak	II-98
2.6.1 Tahun 2020	II-98
2.6.2 Tahun 2021	II-103
2.7. Kerja Sama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020 - 2021.....	II-108
2.8. Rekapitulasi Permasalahan Kota Pontianak	II-114
2.9. Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2020 dan 2021	II-127
BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1 Pendapatan Daerah	III-2
3.1.2 Belanja Daerah	III-8
3.1.3 Pembiayaan Daerah	III-11
3.2. Neraca Daerah	III-17
3.3. Kerangka Pendanaan	III-22
3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 – 2026	III-23
3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024 – 2026	III-27
3.3.3 Proyeksi Rencana APBD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026	III-33
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1. Permasalahan dari aspek Geografi dan Demografi	IV-1
4.1.2. Permasalahan dari aspek Kesejahteraan Masyarakat	IV-3
4.1.3. Permasalahan dari aspek Daya Saing Daerah	IV-4
4.1.4. Permasalahan dari aspek Pelayanan Umum	IV-4
4.2. Isu Strategis	IV-9
BAB V. TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi dan Misi RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005 0 2025	V-1
5.2. Analisa Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025	V-1
5.3. Isu Strategis Aktual.....	V-2
5.4. Tujuan dan Sasaran	V-3
5.5. Penyelarasan Indikator Makro	V-18

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS	VI-1
6.1. Strategi Pembangunan	VI-1
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan	VI-8
BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	VII-1
7.2. Rencana Program Perangkat Daerah	VII-3
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX. PENUTUP	IX-1

DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN GAMBAR**BAB II. GAMBARAN UMUM**

Tabel 2.1.	Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak	II-1
Tabel 2.2.	Sungai/Parit Menurut Kecamatan di Kota Pontianak.....	II-3
Tabel 2.3.	Perkembangan Penggunaan Lahan di Kota Pontianak Tahun 2010 - 2017	II-4
Tabel 2.4.	Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Pontianak Tahun 2021.....	II-7
Tabel 2.5.	Daftar Cagar Budaya Tahun 2022	II-8
Tabel 2.6.	Lokasi Rawan Bencana Tahun 2022	II-8
Tabel 2.7.	Potensi dan Keunggulan Ekonomi Wilayah serta Interaksi Ekonomi Antar Wilayah.....	II-9
Tabel 2.8.	Tingkat Risiko di Kota Pontianak	II-12
Tabel 2.9.	Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2018-2022.....	II-13
Tabel 2.10.	Jumlah, Persentase dan Sex Ratio Penduduk Kota Pontianak Menurut Kecamatan Tahun 2022	II-13
Tabel 2.11.	Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Menurut Kecamatan Tahun 2022	II-14
Tabel 2.12.	Laju Inflasi Gabungan (Nasional) di Kota Pontianak Menurut Kelompok Pengeluaran	II-17
Tabel 2.13.	PDRB, PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Kota Pontianak	II-18
Tabel 2.14.	Gini Ratio Kota Pontianak	II-19
Tabel 2.15.	Angka dan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Pontianak	II-20
Tabel 2.16.	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Pontianak	II-27
Tabel 2.17.	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan/Pangan dan Non Makanan/Non Pangan Per Kapita Sebulan di Kota Pontianak Tahun 2018-2022.....	II-29
Tabel 2.18.	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Pontianak (Km)	II-31
Tabel 2.19.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kota Pontianak Tahun 2018 & 2022	II-32
Tabel 2.20.	Jumlah Pelanggan PLN Area Pontianak Menurut Jenisnya Tahun 2022	II-32

Tabel 2.21.	Banyaknya Pelanggan Air PDAM Menurut Jenis Konsumen	II-33
Tabel 2.22.	Jumlah Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Satuan Kepolisian di Kota Pontianak Tahun 2018-2022..	II-34
Tabel 2.23.	Jumlah Pengeluaran Surat Izin Menurut Jenisnya di Kota Pontianak.....	II-34
Tabel 2.24.	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kota Pontianak Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2022	II-35
Tabel 2.25.	Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kota Pontianak	II-51
Tabel 2.26.	Panjang Saluran Drainase Kota Pontianak 2022.....	II-53
Tabel 2.27.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-57
Tabel 2.28.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Ketenagakerjaan..	II-59
Tabel 2.29.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-60
Tabel 2.30.	Data Pengaduan Kasus Anak Kota Pontianak.....	II-61
Tabel 2.31.	Data Pengaduan Kasus Perempuan Kota Pontianak.....	II-62
Tabel 2.32.	Capaian Lingkungan Hidup	II-65
Tabel 2.33.	Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2018 hingga 2022.....	II-67
Tabel 2.34.	Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2021 dan 2022.....	II-67
Tabel 2.35.	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2022.....	II-70
Tabel 2.36.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika	II-71
Tabel 2.37.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-73
Tabel 2.38.	Indikator Kinerja Urusan Statistik	II-76
Tabel 2.39.	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	II-84
Tabel 2.40.	Nilai LPPD Kota Pontianak.....	II-85
Tabel 2.41.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	II-86
Tabel 2.42.	Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2017-2019	II-87
Tabel 2.43.	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	II-89

Tabel 2.44.	Perkembangan Kondisi Keuangan dan Kinerja Perumda BPR Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun 2017 – 2021	II-95
Tabel 2.45.	Perkembangan Kondisi Keuangan dan Kinerja Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun 2017 – 2021	II-96
Grafik 2.1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022.....	II-15
Grafik 2.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak	II-16
Grafik 2.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (<i>Poverty Gap Index</i>) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (<i>Poverty Severity Index</i>) Kota Pontianak	II-20
Grafik 2.4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak	II-21
Grafik 2.5.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Di Kota Pontianak	II-22
Grafik 2.6.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Di Kota Pontianak	II-23
Grafik 2.7.	Angka Usia Harapan Hidup di Kota Pontianak	II-23
Grafik 2.8.	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pontianak	II-24
Grafik 2.9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pontianak	II-25
Grafik 2.10.	Tingkat Pengangguran di Kota Pontianak	II-25
Grafik 2.11.	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Pontianak	II-26
Grafik 2.12.	Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Masyarakat Kota Pontianak	II-28
Grafik 2.13.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB Kota Pontianak Tahun 2018-2022	II-29
Grafik 2.14.	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum Kota Pontianak	II-30
Grafik 2.15.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2022 (km)	II-31
Grafik 2.16.	Rasio Ketergantungan Kota Pontianak	II-36
Grafik 2.17	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Pontianak	II-37
Grafik 2.18	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Pontianak	II-38
Grafik 2.19	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	II-39
Grafik 2.20.	Angka Putus Sekolah di Kota Pontianak	II-40
Grafik 2.21.	Angka Kelulusan Sekolah di Kota Pontianak	II-40
Grafik 2.22.	Angka Melanjutkan (AM)	II-42
Grafik 2.23.	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	II-42

Grafik 2.24. Trend Kasus Kematian Ibu Kota Pontianak	II-43
Grafik 2.25. Angka Kematian Bayi Kota Pontianak per 1.000 KH	II-43
Grafik 2.26. Trend Kasus Kematian Bayi Kota Pontianak	II-44
Grafik 2.27. Angka kematian Balita per 1.000 KH	II-44
Grafik 2.28. Angka Kematian Neonatal per 1.000 KH Kota Pontianak	II-45
Grafik 2.29. Capaian Indikator Persentase Orang terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	II-45
Grafik 2.30. Trend Persentase Orang Terduga TBC	II-46
Grafik 2.31. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	II-46
Grafik 2.32. Trend HIV di Kota Pontianak	II-47
Grafik 2.33. Capaian Indikator Insiden Rate DBD Kota Pontianak.....	II-47
Grafik 2.34. Trend DBD di Kota Pontianak	II-48
Grafik 2.35. Capaian Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pengobatan Standar	II-48
Grafik 2.36. Trend Prevalensi Penderita Hipertensi Di Kota Pontianak	II-49
Grafik 2.37. Capaian Indikator Angka Stunting Balita	II-49
Grafik 2.38. Capaian indikator Angka wasting Balita Kota Pontianak	II-50
Grafik 2.39. Capaian Indikator Angka Underweight Balita Kota Pontianak	II-50
Grafik 2.40. Capaian Indikator Akreditasi Fasilitas Kesehatan	II-51
Grafik 2.41. Indeks Infrastruktur Kota Pontianak	II-51
Grafik 2.42. Trend Rasio Infrastruktur Jalan Kota Pontianak	II-52
Grafik 2.43. Trend Rasio Infrastruktur Saluran Drainase Kota Pontianak	II-53
Grafik 2.44. Persentase Warga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	II-54
Grafik 2.45. Persentase Kesesuaian Bangunan dan Lingkungan dengan RTRW	II-55
Grafik 2.46. Persentase Ruang Terbuka Hijau.....	II-55
Grafik 2.47. Persentase Rumah Layak Huni.....	II-56
Grafik 2.48. Persentase Kawasan Tidak Kumuh.....	II-56
Grafik 2.49. Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	II-58

Grafik 2.50. Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).....	II-58
Grafik 2.51. Angka Kemiskinan.....	II-59
Grafik 2.52. Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	II-62
Grafik 2.53. Ketersediaan Energi dan Protein.....	II-63
Grafik 2.54. Persentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	II-63
Grafik 2.55. Produktivitas Tanaman Pangan	II-64
Grafik 2.56. Persentase Penurunan Konflik, Sengketa dan Masalah Pertanahan	II-65
Grafik 2.57. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk.....	II-70
Grafik 2.58. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	II-72
Grafik 2.59. Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/ PMDN)	II-74
Grafik 2.60. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan DPMTKPTSP.....	II-74
Grafik 2.61. Peningkatan Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi dan Nasional	II-75
Grafik 2.62. Peningkatan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	II-75
Grafik 2.63. Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga yang Berprestasi di Tingkat Kota/Provinsi/Nasional	II-76
Grafik 2.64. Persentase cagar budaya yang dilestarikan	II-77
Grafik 2.65. Persentase Pengunjung Pada Perpustakaan dan Tempat Baca di Kota Pontianak	II-78
Grafik 2.66. Nilai Hasil Pengawasan Eksternal Kearsipan Indeks Kearsipan	II-78
Grafik 2.67. Indeks Kearsipan.....	II-79
Grafik 2.68. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (%)	II-79
Grafik 2.69. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%).....	II-80
Grafik 2.70. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%).....	II-81
Grafik 2.71. Tingkat Inflasi	II-81
Grafik 2.72. Kontribusi Sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-82
Grafik 2.73. Indeks Reformasi Birokrasi	II-83
Grafik 2.74. Nilai SAKIP Kota Pontianak	II-84
Grafik 2.75. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Pontianak	II-85

Grafik 2.76. Persentase Nilai Perencanaan Kinerja	II-86
Grafik 2.77. Persentase Nilai Pengukuran dan Capaian Kinerja	II-87
Grafik 2.78. Realisasi Indeks Profesionalisme ASN	II-88
Grafik 2.79. Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan dalam Urusan Kebijakan	II 88
Grafik 2.80. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi	II-89
Grafik 2.81. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Tenggara	II-90
Grafik 2.82. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Kota....	II-90
Grafik 2.83. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Timur..	II-91
Grafik 2.84. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Utara..	II-91
Grafik 2.85. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Barat...	II-92
Grafik 2.86. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Selatan	II-92
Grafik 2.87. Angka Konflik.....	II-93
Grafik 2.88. Perkembangan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Bank Kalbar Tahun 2017 – 2021	II 97
Grafik 2.89. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dari Dividen Bank Kalbar Tahun 2017 – 2021	II 97
Gambar 2.1. Peta Lokasi Gambut Kota Pontianak dan Sekitarnya.....	II-6
Gambar 2.2. Peta Penggunaan Lahan di Kota Pontianak	II-9

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.1. Realisasi pendapatan daerah Kota Pontianak Tahun 2018-2022 ...	III-2
Tabel 3.2. Proporsi Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018-2022	III-2
Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak Tahun 2018-2022	III-2
Tabel 3.4. Proporsi Pembentuk PAD Kota Pontianak Tahun 2018-2022	III-4
Tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Transfer Kota Pontianak Tahun 2018-2022 .	III-5
Tabel 3.6. Proporsi Pembentuk Dana Transfer Kota Pontianak Tahun 2018-2022	III-6
Tabel 3.7. Realisasi Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2018-2022	III-8

Tabel 3.8.	Proporsi Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2018-2022	III-9
Tabel 3.9.	Realisasi APBD Kota Pontianak Tahun 2018-2022.....	III-14
Tabel 3.10.	Neraca Aset Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2019 – 31 Desember 2021	III-18
Tabel 3.11.	Neraca Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2019 – 31 Desember 2021	III-21
Tabel 3.12.	Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026	III-25
Tabel 3.13.	Proyeksi pengeluaran yang sifatnya wajib dan mengikat Tahun 2024 - 2026	III-29
Tabel 3.14.	Kapasitas Rill Keuangan Daerah Tahun 2018-2022	III-31
Tabel 3.15.	Proyeksi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayan Daerah Tahun 2024 - 2026.....	III-31
Tabel 3.16.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayan Daerah Tahun 2024 - 2026	III-33
Grafik 3.1.	Kinerja Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2018-2022..	III-1
Grafik 3.2.	Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018-2022	III-7
Grafik 3.3.	Kinerja Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 – 2022	III-13

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB V. TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 5.1.	Proses Penyandingan Dasar Muatan Tujuan dan Sasaran	V-4
Tabel 5.2.	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026	V-6
Tabel 5.3.	Definisi Operasional Indikator Tujuan dan Sasaran	V-12
Tabel 5.4.	Formulasi Indikator Tujuan dan Sasaran	V-15
Tabel 5.5.	Penyelarasan Target Indikator Makro	V-19

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel 6.1.	Strategi Pembangunan sebagai Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 – 2026	VI-2
------------	---	------

Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2024-2026....VI-8

Tabel 6.3. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 VI-12

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 VII-2

Tabel 7.2. Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 VII-4

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026VIII-2

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 VII-4

BAB IX. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, keuangan, politik, pendidikan, perdagangan dan jasa, serta pintu masuk ke semua wilayah di Kalimantan Barat. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembangunan Kota Pontianak mempunyai tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain, disamping menyimpan potensi yang sangat besar.

Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki arti sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah daerah harus menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

RPJMD Kota Pontianak 2020 – 2024 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Pontianak semestinya sampai dengan Tahun 2024, namun demikian dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada Tahun 2024, maka Walikota Pontianak yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir Tahun 2023 diamamatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan

Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pontianak sampai dengan Tahun 2025; (3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024; (4) isu-isu strategis yang berkembang termasuk mengenai pembangunan yang responsif gender dan mengedepankan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan; (5) kebijakan nasional; dan (7) regulasi yang berlaku.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
 25. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
 26. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
 27. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 49);
 28. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kota Pontianak Nomor 171);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPD Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJM Nasional, RPJPD 2005-2025 dan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 serta RTRW 2013 - 2033. Selanjutnya RPD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahunan sebagai berikut:

1. RPJM Nasional

Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Pontianak.

2. RPJPD 2005 – 2025

RPD Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025. RPD Tahun 2024-2026 merupakan bagian tahap kelima dari perencanaan pembangunan Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD.

3. RTRW 2013 - 2033

Penyusunan RPD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013 – 2033 melalui penyelarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan indikasi program.

4. RPJMD 2020 – 2024

Penyusunan RPD berpedoman pada RPJMD yang juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5. RKPD

RPD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

6. Renstra Perangkat Daerah

RPD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPD Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Menjaga kesinambungan pembangunan menjelang Pilkada serentak Tahun 2024;
2. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Kota Pontianak pada periode Tahun 2024-2026;
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Pontianak selama periode Tahun 2024-2026.

Tujuan disusunnya RPD Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan periode Tahun 2024-2026 lingkup Perangkat Daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Substansi penulisan RPD Tahun 2020-2024 secara garis besar dibagi menjadi 9 (sembilan) bab, dengan ringkasan isi masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan RPD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2023-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan berbagai permasalahan terkait pembangunan yang berkembang serta menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang telah disepakati serta nilai pengertian yang terkandung di dalamnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, menjelaskan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Kerangka pendanaan sendiri menjelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara umum serta alternatif pendanaan pembangunan lainnya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur publik. Selanjutnya program perangkat daerah berisi muatan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak selama periode 2024-2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, baik yang bersifat program prioritas, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPD yang telah ditetapkan dan berisi penjelasan tambahan yang dianggap perlu.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1. Letak Geografi, Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat secara astronomis terletak diantara 0° 02' 24" Lintang Utara dan 0° 05' 37" Lintang Selatan dan antara 109° 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 109° 23' 04" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, Kota Pontianak berada tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi dan kelembaban yang tinggi pula. Sesuai Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 55 Tahun 2008, secara administrasi Kota Pontianak dibagi menjadi 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat diperoleh luas wilayah administratif Kota Pontianak mencapai 118,31 Km². Luas wilayah untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Pontianak Barat memiliki luas wilayah 16,24 Km², Kecamatan Pontianak Kota memiliki luas wilayah 16,02 Km², Kecamatan Pontianak Selatan memiliki luas wilayah 16,52 Km², Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki luas wilayah 16,17 Km², Kecamatan Pontianak Timur memiliki luas wilayah 12 Km², dan Kecamatan Pontianak Utara memiliki luas wilayah 41,36 Km². Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak

No	Uraian	Batas Wilayah
1	Bagian Utara	Berbatasan dengan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah
2	Bagian Selatan	Berbatasan dengan Desa Pal IX dan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dan Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah
3	Bagian Timur	Berbatasan dengan Desa Mega Timur dan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Desa Kapur dan Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
4	Bagian Barat	Berbatasan dengan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. "Pontianak Dalam Angka 2023"

2.1.2. Topografi

Dilihat dari sisi topografinya, Kota Pontianak terletak di Delta Sungai Kapuas dengan kontur topografis yang relatif datar dengan ketinggian permukaan tanah berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,5 meter di atas permukaan laut. Hampir seluruh wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya dalam radius 15 km dari muara sungai Landak terletak pada daratan rendah yang secara rata-rata ketinggian tanahnya adalah 1-2 meter di atas permukaan laut dan kelandaian kurang dari 2 persen. Kota Pontianak terdiri dari tiga daratan yang dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar masing-masing kurang lebih 400 meter. Kedalaman sungai-sungai tersebut berkisar antara 12 sampai dengan 16 meter. Sedangkan cabangnya mempunyai lebar 250 meter. Sungai-sungai ini selain sebagai pembagi wilayah fisik kota juga berfungsi sebagai pembatas perkembangan wilayah yang mempunyai karakteristik berbeda dan menjadi jalur transportasi orang dan barang.

2.1.3. Geologi

Kondisi geologi di Kota Pontianak termasuk ke dalam kategori wilayah peneplant dan sedimen alluvial yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Jenis tanah ini berupa gambut bekas endapan lumpur Sungai Kapuas. Dengan kondisi tersebut, tanah yang ada sangat labil dan mempunyai daya dukung sangat rendah. Kondisi geologi di Kota Pontianak terdiri dari jenis batuan endapan Alluvium dan Litoral yang masing-masing memiliki karakteristik sedikit berbeda. Batuan endapan alluvium tersusun dari sediment, clastic dan alluvium dan merupakan hasil dari endapan terrestrial alluvium. Sedangkan batuan endapan litoral tersusun dari sediment, clastic dan fine dan merupakan hasil dari endapan litoral dan estuary. Dari tabel dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah kota tersusun dari formasi jenis batuan alluvial, hanya bagian Pontianak Utara yang sebagian wilayahnya tersusun dari formasi tanah litoral.

Jenis-jenis tanah disepanjang sungai-sungai baru merupakan pengendapan yang menghasilkan daerah tropaquent dibarengi dengan tropofluevent dan dalam kondisi tersaturasi permanen fluvaquent. Tropofluevent dan fluvaquent berasal dari endapan akresi baru dari berbagai komposisi dan bentuk termasuk materi organik. Sabuk tropaquent melebar ke arah selatan mencapai pusat Kota Pontianak dan Sungai Kapuas di dekatnya. Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah organosol, gley, humus dan aluvial dengan karakteristik masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1 – 6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian.

2.1.4. Hidrologi

Kota Pontianak terdiri dari tiga daratan yang dipisahkan oleh sistem jaringan drainase regional yang terbentuk oleh 3 sungai besar yakni Sungai Kapuas Besar,

Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar masing-masing kurang lebih 400 meter. Bagian utara meliputi wilayah Kecamatan Pontianak Utara, bagian timur meliputi wilayah Kecamatan Pontianak Timur dan bagian selatan meliputi wilayah Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat. Kedalaman sungai-sungai tersebut berkisar antara 12 sampai dengan 16 meter, sedangkan cabangnya mempunyai karakteristik berbeda dan menjadi jalur transportasi orang dan barang, dimana dalam wilayah Kota Pontianak sungai dan parit keseluruhannya berjumlah 61 sungai/parit yang sebagian besar masih dipergunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Adapun dalam sistem drainase regional bagian selatan terdapat saluran primer yang cukup banyak, maka dibagian selatan dibagi menjadi 4 subsistem jaringan drainase yaitu subsistem Sungai Beliang, subsistem Sungai Jawi, subsistem Sungai Tokaya dan subsistem Sungai Raya.

Subsistem Sungai Beliang adalah subsistem paling barat yang berbatasan dengan subsistem Sungai Jawi disebelah timurnya. Batas antara subsistem ini dengan subsistem Sungai Jawi adalah Jl. Hasanuddin, Jl. HRA Rahman dan Jl. Husein Hamzah. Subsistem Sungai Jawi ini berbatasan dengan subsistem Parit Tokaya disebelah timurnya yang mana batasnya adalah Jl. HA Salim, Jl. Gst Sulung Lelanang, Jl. Sultan Abdurahman, Jl. Sutan Syahril dan Jl. Prof. M. Yamin. Batas antara subsistem Parit Tokaya dengan subsistem Sungai Raya adalah pertengahan lahan Universitas Tanjungpura dan terusnya.

Tabel 2.2.
Sungai/Parit Menurut Kecamatan
di Kota Pontianak

No	Pontianak Selatan	Pontianak Tenggara	Pontianak Timur	Pontianak Barat	Pontianak Kota	Pontianak Utara
1	Parit Bansir	Parit Bangka	Parit Bating	Sungai Nipah Kuning	Parit Besar	Parit Jawa
2	Parit Besar	Parit Haji Husin	Parit Daeng Lasibek	Parit Sungai Jawi	Parit Sungai Jawi	Parit Makmur
3	Parit Tokaya	Sungai Raya	Parit Haji Yusuf Karim	Parit Sungai Kapuas	Sungai Bangkong	Parit Mayala
4	Sungai Kapuas Kecil		Parit Jepon	Sungai Kapuas Besar	Parit Sungai Kakap	Parit Nanas
5			Parit Kongsi	Parit Labala	Sungai Kapuas Besar	Parit Pangeran
6			Parit Langgar	Sungai Sero		Parit Sungai Kunyit
7			Parit Mayor	Parit Tengah		Parit Sungai Putat
8			Parit Pangeran Pati	Sungai Beliang		Parit Sungai Sahang
9			Parit Semerangkai	Sungai Selamat		Parit Sungai Selamat
10			Parit Tambelan			Sungai Kuning
11			Parit Wan Bakar Kapur			Parit Pak Kacong
12			Parit H. Yusuf			Sungai Durhaka
13			Parit Jalil			Parit Pekong
14			Parit Norman			Parit Lie
15			Sungai Kapuas Kecil			Parit Belanda
16			Sungai Landak			Parit Cekwa

17			Sungai Kapitan			Sungai Pandan
18			Sungai Jenggot			Parit Pangeran II
19			Sungai Kapuas Besar			Parit Wan Salim
20						Sungai Kapuas Besar
21						Sungai Landak

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. "Pontianak Dalam Angka 2023"

2.1.5. Klimatologi

Pada Tahun 2022, keadaan iklim Kota Pontianak berdasarkan catatan dari Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak sumber Statistik Daerah Kota Pontianak-BPS Kota Pontianak bahwa temperatur rata-rata di Kota Pontianak berkisar antara 27,3°C dengan temperatur minimum rata-rata 23,1°C dan temperatur maksimum rata-rata 34,3°C. Rata-rata kelembaban udara 82,8% dengan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 86% dan kelembaban udara paling rendah 80% pada bulan Maret. Disisi lain, jumlah hari hujan terbanyak adalah pada bulan Oktober yakni sebanyak 26 hari dengan curah hujan sebanyak 350 mm. Dan curah hujan terbesar terjadi pada bulan April yaitu 383 mm.

2.1.6. Penggunaan Lahan

Data penggunaan lahan Kota Pontianak yang tersedia masih dengan luas 107,82 km², dari luas wilayah 43,62% merupakan lahan terbangun dengan berbagai fungsi. Dari tabel dapat dilihat bahwa lahan dominasi perkembangan penggunaan lahan kota adalah dengan fungsi permukiman dan perkembangan di wilayah Kota Pontianak. Data tersebut masih menggunakan data dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 yang sampai saat sekarang belum direvisi.

Tabel 2.3.
Perkembangan Penggunaan Lahan di Kota Pontianak
Tahun 2010-2017

No	Jenis Penggunaan Lahan	2010	2017	Perkembangan (%)
1.	Permukiman	3.685,72	3.975,15	7,85%
2.	Perdagangan dan Jasa	458,4	696,08	51,85%
3.	Perkantoran Pemerintah dan Pelayanan Umum	39,74	113,26	185,00%
4.	Militer	17,04	17,04	0,00%
5.	Industri dan Pergudangan	156,46	266,1	70,08%
6.	Pariwisata, Rekreasi dan Seni Budaya	10,41	72,06	592,22%
7.	Pertanian dan Peternakan	2.263,47	926,21	-59,08%
8.	Fasilitas Kesehatan	22,69	35,27	55,44%
9.	Fasilitas Pendidikan	195,18	295,41	51,35%
10.	Fasilitas Peribadatan	27,23	27,23	0,00%
11.	Fasilitas Sosial	3,73	3,73	0,00%
12.	Lapangan Olahraga	68,24	69,25	1,48%

No	Jenis Penggunaan Lahan	2010	2017	Perkembangan (%)
13.	Pemukaman Umum	35,71	57,52	61,08%
14.	Taman	19,39	390,68	1914,85%
15.	SPBU	4,41	358,09	8019,95%
16.	Pembangkit Listrik	6,05	6,05	0,00%
17.	Prasarana Transportasi/Terminal	10,85	5,93	-45,35%
18.	Pelabuhan ²	46,55	46,55	0,00%
19.	Tempat Pengolahan Akhir Sampah	4,22	16,91	300,71%
20.	Semak	3061,51	2758	-9,91%
21.	Sungai	645	645	0,00%
Jumlah		10.782 Ha		

Sumber : Hasil Survey Lapangan Tahun 2017, Tahun 2010 Hasil Perhitungan Basis Data Arc GIS PT. Krinotek

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan kawasan terbangun diantaranya perkembangan kawasan permukiman meningkat sebesar 7,85%; kawasan perdagangan dan jasa meningkat sebesar 51,85%; kawasan industri dan pergudangan meningkat sebesar 70,08%; serta kawasan pariwisata, rekreasi dan seni budaya meningkat sebesar 592,22%. Perkembangan penggunaan lahan terbangun mengindikasikan bahwa kegiatan penduduk Kota Pontianak meningkat cukup pesat.

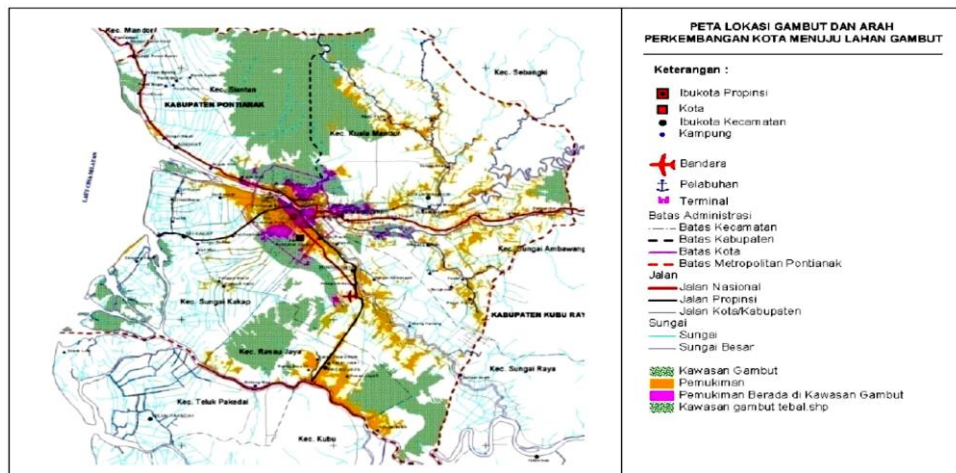
A. Kawasan Lindung

Pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH) Kota, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2012-2033, pengembangan kawasan lindung di Kota Pontianak yang direncanakan adalah:

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya, meliputi kawasan bergambut dengan kedalaman gambut lebih dari 4 (empat) meter seluas kurang lebih 641 (enam ratus empat puluh satu) hektar. Kawasan yang termasuk dalam kawasan lindung gambut di Kota Pontianak kurang lebih sebesar 1.607 hektar atau sekitar 14,9 persen dari luas keseluruhan Kota Pontianak yang meliputi kawasan lindung gambut di Kelurahan Batu Layang dan Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, dan Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Adapun peraturan zonasi untuk rencana pengelolaan penggunaan lahan pada kawasan bergambut disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan rehabilitasi lahan pada kawasan yang telah rusak;
2. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
3. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik;
4. Pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.

Gambar 2.1.
Peta Lokasi Gambut Kota Pontianak dan Sekitarnya



Sumber: Dokumen PMA-Pontianak Metropolitan Area

Kawasan Perlindungan Setempat, yakni kawasan-kawasan yang harus dilindungi karena fungsinya yang sangat penting untuk menjaga kelestarian unsur alamiah tertentu seperti garis sempadan sungai, sempadan pantai, daerah sekitar waduk atau danau dan daerah sekitar mata air. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung bahwa kriteria yang dipakai untuk menentukan batas kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang sungai sekurang-kurangnya 15 meter di tepi kanan-kiri sungai besar dan 10 meter di tepi kanan-kiri sungai kecil dihitung dari titik pasang terendah sungai tersebut.

Sebagaimana kriteria tersebut di atas, kawasan yang termasuk kawasan sempadan sungai di Kota Pontianak adalah kawasan sepanjang tepi kanan-kiri Sungai Kapuas, Sungai Landak, Sungai Malaya dan parit-parit primer seperti Sungai Nipah Kuning, Sungai Jawi, Sungai Raya dan lain-lain. Mengingat sudah banyaknya permukiman penduduk yang berada pada kawasan sempadan sungai, maka kawasan terbangun pada sempadan sungai dan parit primer direkomendasikan sebagai kawasan dengan intensitas kegiatan rendah dengan pembangunan terbatas misalnya pembangunan jalan inspeksi pada sempadan sungai serta pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air. Sedangkan untuk lahan kosong yang berada pada kawasan sempadan sungai diarahkan sebagai jalur hijau yang bebas dari pembangunan kecuali untuk pembangunan yang mendukung fungsi perlindungan setempat misalnya penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau serta penataan, pengamanan dan penertiban pemanfaatan lahan pada sempadan sungai sesuai peruntukannya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH), yakni area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH Alami (habitat liar alami, kawasan lindung dan

taman-taman nasional) serta RTH Non Alami atau Binaan (taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan).

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033, RTH Kota terbagi menjadi dua yaitu RTH Privat dan RTH Publik. RTH Privat meliputi perkarangan rumah, halaman perkantoran, pelayanan umum, pertokoan, tempat usaha dan taman atap bangunan. Sedangkan RTH Publik meliputi taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, jalur hijau pada median jalan dan tepi jalan, pemakaman umum, serta agrowisata/kawasan Sentra Agro Bisnis. Untuk Kota Pontianak terdapat rimba kota/hutan Kota Pontianak dengan luas 2.56 km² di tetapkan di:

1. Pendopo Gubernur Kalimantan Barat
2. Arboretum Untan
3. Hutan kota Siantan Hulu dan Siantan Hilir
4. Hutan kota pulau Batu Layang
5. Rencana hutan kota Delta bekas Sungai Malaya
6. Rencana hutan Bukit Reel
7. Rencana hutan kota Kelurahan Parit Mayor

Adapun jenis dan luas RTH publik di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
di Kota Pontianak

No	Jenis RTH	Luas		Persentase (%)
		Wilayah Kota Pontianak (Km ²)	RTH (Km ²)	
1	Taman Kota	107,82	4,9	4,5
2	Jalur Hijau	107,82	1,6	1,5
3	Lapangan Olah Raga	107,82	0,65	0,6
4	Pemukaman Umum	107,82	0,45	0,4
5	Hutan Kota	107,82	2,56	2,4
6	Agrowisata/KSA	107,82	10	9,3
Jumlah			20,16	18,7

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2023

Kawasan Perlindungan Cagar Budaya, yaitu kawasan yang melindungi kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan lestarian demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan maksimal. Sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Berikut ini penjelasan dari nama cagar budaya beserta nomor keputusan wali Kota Pontianak tentang penetapan cagar budaya di Kota Pontianak.

Tabel 2.5.
Daftar Cagar Budaya Tahun 2022

No	Nama Cagar Budaya	No Kep.Wali Kota
1	Makan Sultan Syarif Abdurrahman Alqadrie	No.591.1/Disdikbud/Tahun 2021
2	Tugu Khatilstiwa	
3	Banguna Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak	
4	Bangunan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Suster Pontianak	
5	Istana Kadriyah Kesultanan Pontianak	No.504/Disdikbud/Tahun 2021
6	Mesjid Jami' Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie	
7	Kantor Pos Divisi Ekspedisi Pontianak	No.28/DIsdikbud/Tahun 2022
8	Surau Haji Naim (Baitannur)	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,2023

Kawasan Rawan Bencana meliputi kawasan rawan banjir dan genangan, kawasan rawan kebakaran permukiman dan kawasan kebakaran hutan dan lahan serta kawasan rawan bencana puting beliung, Secara geografis Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas dan secara topografinya sebagian besar wilayah Kota Pontianak merupakan lahan yang datar dengan kemiringan lahan 0-2 persen, sehingga tidak tergambarkan kawasan rawan bencana longsor, akan tetapi terdapat beberapa lokasi yang memiliki potensi tergenang air yakni:

Tabel 2.6.
Lokasi Rawan Bencana Tahun 2022

No	Kecamatan	Lokasi Rawan Bencana Kelurahan	Jenis Ancaman
1	Pontianak Selatan	Parit Tokaya	KARHUTLA
		Kota Baru	
2	Pontianak Tenggara	Bansir Darat	
		Bangka Belitung Darat	
3	Pontianak Utara	Siantan Hulu	
		Siantan tengah	
		Batulayang	
4	Pontianak Timur	Banjar Serasan	ANGIN PUTING BELIUNG
		Saigon	
		Tanjung Hulu	
		Dalam Bugis	
		Tambelan Sampit	
5	Pontianak Barat	Sungai Beliung	
6	Pontianak Utara	Siantan Hulu	BANJIR

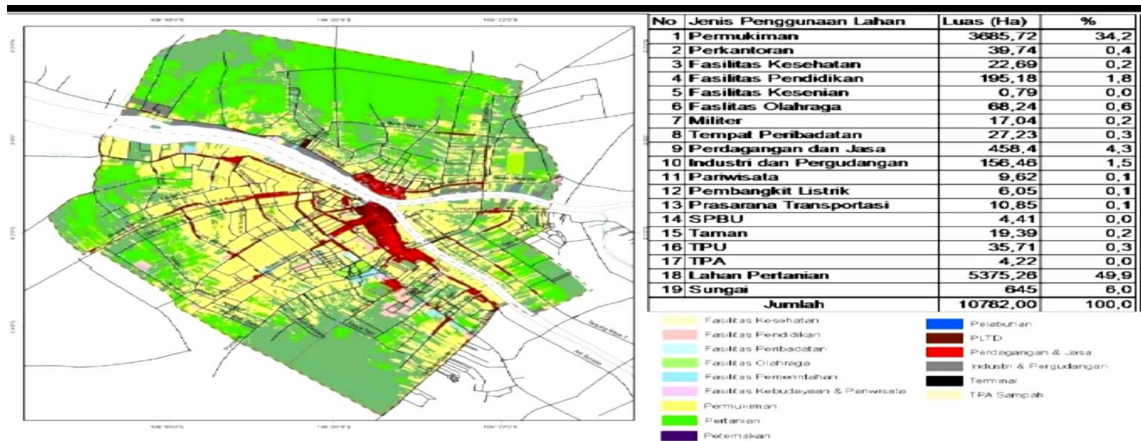
Sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak,2023

B. Kawasan Budidaya

Sebagai salah satu implementasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kota, Pemerintah Kota Pontianak menaruh perhatian lebih terhadap pengembangan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kawasan Budidaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya. Adapun rencana pengembangan kawasan budidaya di Kota Pontianak adalah diarahkan pada upaya untuk mengendalikan alih fungsi guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah

ditetapkan dalam RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033, dimana kawasan budidaya tersebut adalah terdiri dari kawasan perumahan, pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, industri dan pergudangan, pariwisata dan rekreasi serta militer. Secara garis besar, kondisi penggunaan lahan Kota Pontianak dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.2.
Peta Penggunaan Lahan di Kota Pontianak



Sumber: RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa kawasan budidaya didominasi untuk peruntukan lahan pertanian dengan luas 49,9% dari total luas wilayah Kota Pontianak, kemudian diikuti dengan peruntukan perumahan dan permukiman yang luasnya mencapai 34,2%, dan sisanya kurang lebih 15,9% terbagi untuk peruntukan fasilitas perkantoran, perdagangan dan jasa, kesehatan, pendidikan, kesenian dan olahraga, rumah ibadah, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, serta sarana dan prasarana perkotaan.

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan hasil analisis sektor unggulan diatas didapatkan hasil bahwa masing-masing kecamatan memiliki sektor unggulan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah sektor unggulan dari masing-masing kecamatan yang ada di Kota Pontianak.

Tabel 2.7.
Potensi dan Keunggulan Ekonomi Wilayah serta Interaksi Ekonomi Antar Wilayah

Kecamatan	Sektor			Arahan RPJMD
	Sektor Unggulan	Sektor Potensial	Sektor Berkembang	
1	2	3	4	5
Pontianak Selatan	1. Pengadaan Listrik dan Gas	1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	Pengembangan kegiatan Jasa, Perkantoran pemerintah dan swasta, pendidikan tinggi dan
	2. Konstruksi	2. Transportasi dan Pergudangan		

	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			perdagangan serta kawasan-kawasan permukiman
	4. Informasi dan Komunikasi			
	5. Jasa Perusahaan			
Pontianak Tenggara	1. Konstruksi	1. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1. Pengadaan Listrik dan Gas	Pengembangan kegiatan Jasa, Perkantoran pemerintah dan swasta, pendidikan tinggi dan perdagangan serta kawasan-kawasan permukiman
	2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2. Jasa Keuangan dan Asuransi	2. Transportasi dan Pergudangan	
	3. Informasi dan Komunikasi	3. Real Estate		
	4. Jasa Perusahaan	4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		
		5. Jasa Pendidikan		
		6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		
		7. Jasa Lainnya		
Pontianak Timur	1. Pengadaan Listrik dan Gas	1. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1. Transportasi dan Pergudangan	Pengembangan Kegiatan Utama pada kegiatan Wisata Alam, Budaya dan sejarah dengan didukung pengembangan simpul-simpul
	2. Konstruksi	2. Jasa Keuangan dan Asuransi	2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
	3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3. Real Estate	3. Informasi dan Komunikasi	
		4. Jasa Pendidikan	4. Jasa Perusahaan	
		5. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		
		6. Jasa Lainnya		
Pontianak Barat	1. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Kecamatan Pontianak Barta diarahkan untuk pengembangan kawasan perdagangan dan pergudangan untuk mendukung sector jasa dan perdagangan
	2. Konstruksi		2. Industri Pengolahan	
	3. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		3. Transportasi dan Pergudangan	
	4. Jasa Keuangan dan Asuransi		4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
	5. Real Estate		5. Informasi dan Komunikasi	
	6. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		6. Jasa Perusahaan	
	7. Jasa Pendidikan		7. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	

			8. Jasa Lainnya	
Pontianak Kota	1. Konstruksi		1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa untuk menciptakan pusat-pusat pelayanan kota dengan didukung pengembangan kawasan permukiman terpadu sebagai hinterlandnya
	2. Transportasi dan Pergudangan		2. Industri Pengolahan	
	3. Informasi dan Komunikasi		3. Pengadaan Listrik dan Gas	
	4. Jasa Keuangan dan Asuransi		4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	
	5. Real Estate		5. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	
	6. Jasa Perusahaan		6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
	7. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		7. Jasa Pendidikan	
	8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial			
	9. Jasa Lainnya			
Pontianak Utara	Pengadaan Listrik dan Gas	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1. Industri Pengolahan	Dikembangkan Sektor Industri dan Sektor Pertanian Kota, Agro Industri dan Kegiatan pergudangan untuk mendukung Kegiatan Industri dan Perdagangan
		2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2. Konstruksi	
		3. Jasa Pendidikan	3. Transportasi dan Pergudangan	
			4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
			5. Informasi dan Komunikasi	
			6. Jasa Perusahaan	
			7. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	
			8. Jasa Lainnya	

Sumber: Rencana Revisi RTRW Kota Pontianak Tahun 2018

Berdasarkan data dibawah terlihat bahwa sektor yang banyak menjadi sektor yang unggulan di Kota Pontianak adalah sektor konstruksi. Hal ini dikarenakan sektor ini merupakan sektor unggulan di 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Sedangkan sektor yang mayoritas menjadi sektor yang potensial di Kota Pontianak adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta sektor jasa pendidikan karena sektor ini merupakan sektor potensial di 3 (tiga) kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Sektor yang merupakan sektor berkembang di Kota Pontianak adalah sektor transportasi dan pergudangan. Hal ini dikarenakan sektor tersebut merupakan sektor berkembang di 4 (empat) kecamatan yang ada di Kota Pontianak.

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana Kota Pontianak diketahui berdasarkan sejarah kejadian bencana yang menurut pencatatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Dari pencatatan tersebut, bencana berpotensi terjadi di Kota Pontianak adalah cuaca ekstrim, banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Namun, tidak menutup kemungkinan bencana lain dapat terjadi di Kota Pontianak mengingat faktor-faktor kondisi daerah yang berkaitan dengan bencana yang diketahui berdasarkan pengkajian risiko bencana. Secara keseluruhan, identifikasi potensi bencana tersebut diperoleh dari pengkajian risiko bencana dan kesepakatan di daerah. Bencana yang berpotensi di Kota Pontianak tersebut adalah kekeringan, cuaca ekstrim, banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk ancaman gempa bumi dikarenakan memiliki potensi bahaya rendah dan kecendrungan kejadiannya kecil maka berdasarkan kesepakatan daerah, jenis bahaya tersebut tidak dilakukan pengkajian lebih lanjut dalam penyusunan kajian risiko bencana Kota Pontianak. Keseluruhan potensi bencana di Kota Pontianak berjumlah 4 (empat) bencana. Lima potensi bencana di Kota Pontianak tersebut dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana Kota Pontianak untuk Tahun 2017 sampai Tahun 2021.

Tingkat risiko bencana didapatkan berdasarkan perolehan bahaya, kerentanan, dan kapasitas di Kota Pontianak. Hasil dari penggabungan ketiga komponen tersebut sebagai dasar menentukan kelas tingkat risiko bencana. Data yang disajikan adalah kondisi data Tahun 2021, karena untuk Tahun 2022 tidak ada anggaran untuk melakukan kajian tingkat risiko bencana di Kota Pontianak. Tingkat risiko setiap bencana di Kota Pontianak Tahun 2021 di tampilkan sebagai berikut.

Tabel 2.8.
Tingkat Risiko di Kota Pontianak
Tahun 2021

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Resiko
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang
3	Cuaca Ekstrim	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kota Pontianak Tahun 2017-2021

Tingkat risiko bencana berdasarkan Tabel 2.8 adalah tingkat risiko tinggi untuk bencana banjir, cuaca ekstrim, dan kebakaran hutan dan lahan, tingkat risiko sedang untuk bencana kekeringan. Dominan tingkat risiko tinggi pada setiap bencana di Kota Pontianak membutuhkan perencanaan matang dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan seluruh masyarakat untuk dalam menjalankan upaya pengurangan risiko bencana di Kota Pontianak.

2.1.9. Demografi

A. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Pertumbuhan jumlah penduduk selama kurun waktu lima tahun terakhir, dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Pontianak meningkat dari 665.694 jiwa pada Tahun 2018 menjadi 673.400 jiwa pada Tahun 2022, meningkat sebesar 1,16 persen. Penduduk laki-laki meningkat dari 334.083 jiwa pada tahun 2018 menjadi 336.695 jiwa pada tahun 2022, meningkat sebesar 0,78 persen. Sementara itu, penduduk perempuan meningkat dari 331.611 jiwa pada tahun 2018 menjadi 336.705 jiwa pada tahun 2022, meningkat sebesar 1,54 persen. Peningkatan jumlah penduduk Kota Pontianak disamping disebabkan oleh kelahiran, tentu juga disebabkan oleh migrasi yang dalam hal ini urbanisasi. Secara komposisi jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan hampir berimbang.

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	%	Perempuan	%
1	2018	665.694	334.083	50,19	331.611	49,81
2	2019	669.169	335.731	50,17	333.438	49,83
3	2020	671.598	336.195	50,06	335.403	49,94
4	2021	672.727	336.420	50,01	336.307	49,99
5	2022	673.400	336.695	49,99	336.705	50,00

Sumber : Diolah dari Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Semester 2 Tahun 2023"

Jumlah persentase dan rasio jenis kelamin penduduk Kota Pontianak Menurut Kecamatan Tahun 2022, jumlah penduduk Kecamatan Pontianak Barat merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 150.558 jiwa atau sekitar 22,37 persen dari total penduduk Kota Pontianak. Kemudian jumlah penduduk terbanyak kedua adalah Kecamatan Pontianak Utara yaitu sebanyak 146.130 jiwa atau sekitar 21,71 persen dari total penduduk Kota Pontianak. Wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 48.947 jiwa atau sekitar 7,27 persen dari total penduduk Kota Pontianak.

Tabel 2.10.
Jumlah, Persentase dan Sex Ratio Penduduk Kota Pontianak Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase	
Pontianak Selatan	45.879	46.794	92.673	13,77	98,04
Pontianak Tenggara	24.297	24.652	48.949	7,27	98,56
Pontianak Timur	54.264	53.633	107.897	16,03	101,18
Pontianak Barat	75.294	75.264	150.558	22,37	100,04
Pontianak Kota	62.950	64.243	127.193	18,90	97,99
Pontianak Utara	74.011	72.119	146.130	21,71	102,62
Kota Pontianak	336.695	336.705	673.400	100,00	99,99

Sumber : Hasil Olahan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Semester 2 Tahun 2022

Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. *Sex Ratio* penduduk Kota Pontianak pada Tahun 2022 adalah 99,99 persen. Arti dari angka tersebut adalah terdapat sekitar 100 perempuan dari 100 laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Pontianak relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan. *Sex rasio* penduduk tiap kecamatan juga menunjukkan hal yang tidak berbeda, dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki relatif berimbang dengan jumlah penduduk perempuan. Walaupun demikian, jika dilihat dari rinci, maka kecamatan Pontianak Pontianak kota adalah kecamatan yang perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan terkecil sebesar 97,97 persen. Sementara itu kecamatan yang *sex rasio* yang paling besar adalah kecamatan Pontianak utara yaitu sebesar 102,62 persen.

B. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk Kota Pontianak Tahun 2022 adalah 5.691 jiwa per km². Naik sedikit 0,088 persen jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk Kota Pontianak Tahun 2021 adalah 5.686 jiwa per km² dengan luas wilayah Kota Pontianak yaitu 118,31 km², sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

Kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Pontianak relatif tidak merata. Dilihat dari kepadatan menurut kecamatan, kecamatan Pontianak Barat merupakan kecamatan paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya dan kecamatan Pontianak Tenggara merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah. Dengan luas wilayah 16,24 km², kecamatan Pontianak Barat dihuni oleh 150.558 jiwa sehingga tingkat kepadatan penduduk mencapai 9.270 jiwa tiap km². Sedangkan kecamatan Pontianak tenggara dengan luas wilayah 16,17 km² di huni oleh 48.949 jiwa sehingga tingkat kepadatan penduduk mencaai 3.027 jiwa tiap km².

Tabel 2.11.
Kepadatan Penduduk Kota Pontianak
Menurut Kecamatan Tahun 2022

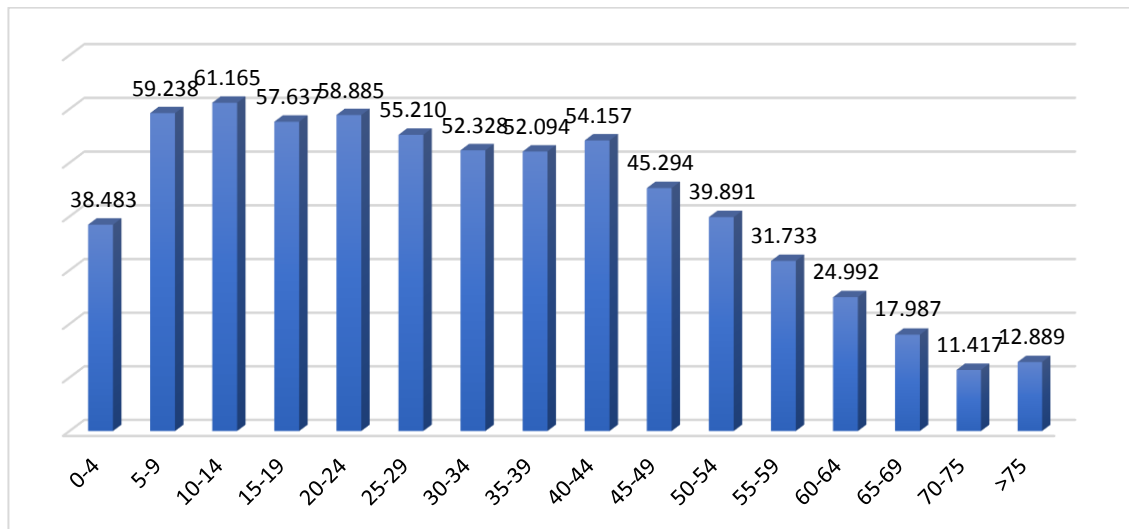
No	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
		Km ²	%	Jumlah	%	
1	Pontianak Selatan	16,52	13,96	92.673	13.77	5.609
2	Pontianak Tenggara	16,17	13,67	48.949	7.27	3.027
3	Pontianak Timur	12	10,14	107.897	16.03	8.991
4	Pontianak Barat	16,24	13,73	150.558	22.37	9.270
5	Pontianak Kota	16,02	13,54	127.193	18.90	7.939
6	Pontianak Utara	41,36	34,96	146.130	21.71	3.533
Kota Pontianak 2022		118,31	100	673.400	100	5.691
Kota Pontianak 2021		118,31	100	672.727	100	5.686
Kota Pontianak 2020		118,31	100	671.598	100	5.567
Kota Pontianak 2019		107,82	100	646.661	100	5.998
Kota Pontianak 2018		107,82	100	637.723	100	5.915

Sumber : Hasil Olahan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Penduduk menurut kelompok umur menggambarkan distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur. Untuk negara-negara berkembang, seperti Indonesia, penduduk cenderung banyak di usia muda dan semakin kecil seiring dengan kelompok umur di atasnya. Kota Pontianak, sebagai wilayah dari Indonesia, distribusi penduduk juga mengikuti kecenderungan penduduk muda. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Pontianak dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2023

Penduduk usia 10-14 Tahun adalah kelompok umur dengan jumlah terbanyak yaitu 61.165 jiwa, Kelompok umur dengan jumlah terbanyak kedua adalah kelompok umur 5-9 Tahun dengan jumlah 59.238 jiwa, Kelompok umur 20-24 Tahun dengan jumlah 58.885 jiwa merupakan kelompok umur terbanyak ketiga. Kelompok umur dengan jumlah terkecil adalah kelompok umur 70-75 Tahun dan lebih dengan jumlah sebanyak 11.417 jiwa. Grafik penduduk Kota Pontianak juga menggambarkan dinamika penduduk berdasarkan kelompok umur. Dari grafik dapat diamati bahwa kelompok umur produktif (usia 15-64 Tahun) mendominasi jumlah penduduk Kota Pontianak, jumlahnya mencapai 472.221 jiwa atau sebesar 70,12 persen. Sedangkan kelompok umur tidak produktif yaitu kelompok 0-14 tahun dan kelompok diatas 64 tahun berjumlah 201.179 jiwa atau 29,88 persen.

Beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif sebesar mencapai 42,60 persen, artinya secara rata-rata 100 orang produktif menanggung 43 orang tidak produktif. Komposisi umur penduduk yang demikian menunjukkan bahwa Kota Pontianak sudah memasuki bonus demografi dimana angka beban ketergantungan dibawah 50, yang berarti setiap lebih dari dua orang produktif menanggung satu orang usia tidak produktif.

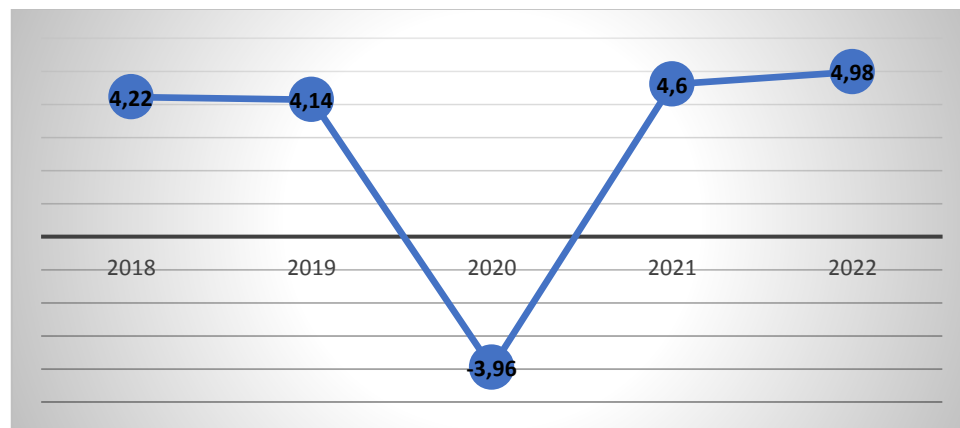
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Grafik 2.2.
Pertumbuhan Ekonomi
Kota Pontianak



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, Tahun 2023, diolah

Selama kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 perekonomian Kota Pontianak menunjukkan pertumbuhan dengan tren yang berfluktuatif. Pada Tahun 2020, perekonomian Kota Pontianak mengalami kontraksi yang sangat mendalam seiring dengan merebaknya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Dampak yang dialami Kota Pontianak menyebabkan perekonomian tumbuh negatif hingga mencapai -3,96%. Pada Tahun 2021 dan 2022, perekonomian Kota Pontianak sudah menunjukkan adanya pemulihan yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang kembali positif hingga masing-masing mencapai 4,60% dan 4,98%. Dari 17 lapangan usaha, 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2022 adalah Transportasi dan Pergudangan (16,41%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor (12,09%), dan Jasa Perusahaan (11,90%). Sementara 3 (tiga) lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah yakni Administrasi Pemerintahan, Pertanian dan jaminan Sosial Wajib (-2,59%), Jasa Keuangan dan Asuransi (0,08%) dan Real Estat (0,50%).

B. Laju Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus dan menyebabkan kecenderungan turunnya nilai mata uang di suatu wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks

Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perkembangan inflasi Kota Pontianak dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021 cenderung mengalami penurunan dari 3,99% pada Tahun 2018 turun menjadi 1,16% pada Tahun 2021. Namun pada Tahun 2022 inflasi Kota Pontianak mengalami lonjakan cukup signifikan menjadi 6,35%. Angka inflasi Tahun 2022 merupakan inflasi tertinggi selama lima tahun kebelakang. Tingginya inflasi pada Tahun 2022 disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat akibat mulai pulihnya perekonomian pasca pandemi covid-19, serta terganggunya rantai pasok pangan dunia sebagai dampak perang antara Rusia dan Ukraina, mengingat Rusia dan Ukraina merupakan salah satu produsen pangan dunia.

Apabila dilihat dari inflasi tahunan perkelompok pengeluaran, hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hanya kelompok pengeluaran kesehatan yang mengalami penurunan. Kelompok pengeluaran yang mengalami lonjakan tertinggi adalah kelompok transportasi, dari 1,68% di Tahun 2021 menjadi 18,89% di Tahun 2022. Sedangkan kelompok pengeluaran kesehatan mengalami penurunan dari 0,48% pada Tahun 2021 menjadi -0,75% di Tahun 2022.

Tabel 2.12.
Laju Inflasi Gabungan (Nasional) di Kota Pontianak
Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umum	3,99	2,64	2,119	1,16	6,35
2. Bahan Makanan	3,82	-	-	-	-
3. Makanan Jadi	2,59	-	-	-	-
4. Perumahan	3,51	-	-	-	-
5. Sandang	2,84	-	-	-	-
6. Kesehatan	4,31	0,39	5,26	0,48	-0,75
7. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	5,49	-	-	-	-
8. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	6,09	-	-	-	-
9. Makanan, Minuman, dan Tembakau	-	0,99	5,17	0,79	5,43
10. Pakaian dan Alas Kaki	-	0,20	-0,22	0,09	0,49
11. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya	-	0,11	0,67	0,71	5,73
12. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-	0,08	0,50	1,99	6,73
13. Transportasi	-	0,16	-1,30	1,68	18,89
14. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-	-0,04	-0,65	0,05	0,17
15. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-	0,00	0,82	2,87	2,64
16. Pendidikan	-	0,14	0,92	0,53	1,16
17. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	-	0,16	2,93	1,85	3,82
18. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-	0,22	1,98	4,07	9,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2023

C. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita atau juga sering disebut Pendapatan per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dalam suatu

daerah sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan perkapita ini sering digunakan oleh para ahli perencanaan wilayah, pengembangan wilayah, studi pembangunan, ekonomi, dan lainnya untuk mengkaji kemajuan suatu wilayah. Semakin besar pendapatan perkapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan wilayah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Pontianak dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022.

Tabel 2.13.
**PDRB, PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Jumlah Penduduk
Pertengahan Tahun Kota Pontianak**

URAIAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
PDRB (Juta Rupiah)	36.075.298,95	38.708.215,95	37.648.509,68	40.200.359,04	44.320.310,50
PDRB per Kapita (Rupiah)	56.568.916	60.236.031	57.257.217	60.568.889	66.169.963,2
Jumlah Penduduk (orang)	637.723	646.661	658.685	663.713	669,795

Sumber: BPS Kota Pontianak, Tahun 2023 *) Angka Sementara**) Angka sangat sementara

Sepanjang Tahun 2018 hingga Tahun 2022, jumlah penduduk Kota Pontianak senantiasa mengalami peningkatan. Namun demikian tidak halnya dengan PDRB dan PDRB per kapita yang menunjukkan adanya fluktuasi. PDRB dan PDRB per kapita Kota Pontianak sempat mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Seiring dengan pulihnya perekonomian pasca pandemi, pada Tahun 2021 Kota Pontianak berhasil membalikkan keadaan dengan mencatatkan PDRB dan PDRB per kapita sedikit di atas capaian pada masa sebelum pandemi (Tahun 2019). Kondisi ini diperkuat dengan raihan capaian PDRB pada Tahun 2022 yang mencapai 44,32 triliun rupiah, naik 4,1 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Sementara PDRB per kapita Kota Pontianak juga mengalami peningkatan cukup signifikan pada Tahun 2022 hingga 5,6 juta rupiah dari Tahun 2021.

D. Indeks Gini

Peningkatan PDRB Perkapita serta pertumbuhan ekonomi yang positif tidak menjamin adanya sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengukur peningkatan pembangunan suatu daerah selain melihat dari faktor pertumbuhan ekonomi perlu dilihat pula tingkat pemerataannya yang dapat dilihat salah satunya melalui Indeks Gini (Gini Rasio). Indeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan. Cara untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan adalah menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dengan persentase pendapatan yang mereka terima. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal (pemerataan sempurna), maka semakin tinggi pula derajat ketidakmerataan ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya

diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan.

Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini rasio mendekati 1 maka menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Berdasarkan nilai gini rasio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini rasio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Gini Rasio Kota Pontianak selama Tahun 2018-2022 menunjukkan nilai yang cenderung berfluktuatif dari kisaran 0,37 hingga 0,36 yang bila dilihat dari pengelompokan ketimpangannya masih tergolong dalam kategori sedang. Gini rasio Kota Pontianak tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada Tahun 2018 hingga mencapai 0,37. Pada Tahun 2019 dan 2020 rasio tersebut dapat diturunkan kembali menjadi 0,34 dan 0,33, Namun sejak Tahun 2021 rasio ini kembali mengalami peningkatan menjadi 0,34 pada Tahun 2021 dan 0,36 pada Tahun 2022. Adanya kecenderungan peningkatan pada rasio gini menggambarkan semakin bertambahnya kesenjangan di Kota Pontianak. Rasio tersebut diharapkan dapat diturunkan kedepannya sehingga peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak.

Tabel 2.14.
Gini Ratio Kota Pontianak

TAHUN	INDEKS GINI
2018	0,37
2019	0,34
2020	0,33
2021	0,34
2022	0,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2023

E. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan setiap Kabupaten dan Kota berbeda satu dengan yang lain, mengingat setiap kabupaten kota memiliki harga bahan pokok makanan dan non makanan yang berbeda-beda sehingga uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan juga akan menjadi berbeda di setiap kabupaten dan kota yang ada di seluruh NKRI.

Kemiskinan di Kota Pontianak cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari Tahun 2018-2022. Hal ini tentu sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan yaitu penurunan kemiskinan. Pada Tahun 2018 angka kemiskinan menunjukkan 5,00% dan cenderung menurun di Tahun 2022 menjadi 4,46% atau berjumlah 29,61 ribu jiwa.

Tabel 2.15.
Angka dan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Pontianak

KEMISKINAN	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	402.349	523.736	567.432	578.615	622.735
Jumlah Penduduk Miskin(ribu jiwa)	31,76	31,46	30,70	30,11	29,61
Angka Kemiskinan (persen)	5,00	4,88	4,70	4,58	4,46
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan (persen)	95,00	95,12	95,30	95,42	95,54

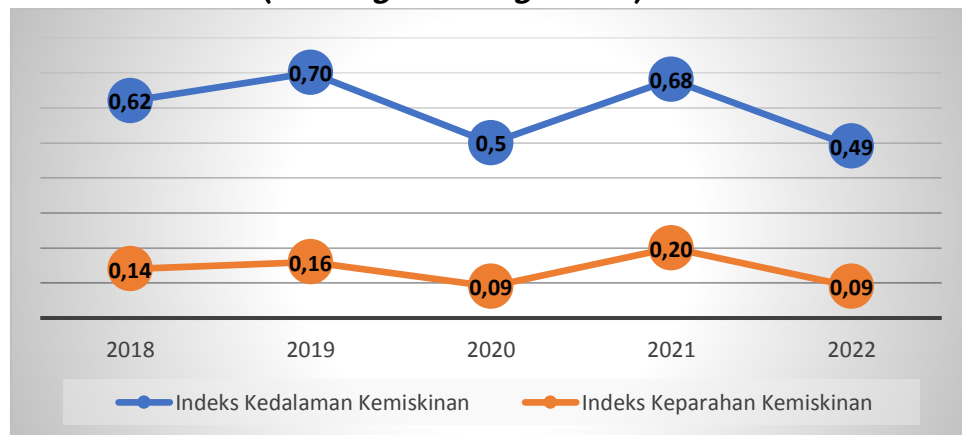
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2023

Untuk mengetahui Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan dapat dilihat dari angka kemiskinannya, yakni dengan mengurangkan angka 100 dengan angka kemiskinan. Hasilnya menunjukkan Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan di Kota Pontianak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 95,00% pada Tahun 2018 meningkat menjadi 95,54% Tahun 2022, atau meningkat sebesar 0,54 poin selama lima tahun terakhir.

F. Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin dalam tingkat kemiskinan karena semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pontianak selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Pada Tahun 2018 indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan angka 0,62 dan turun di Tahun 2022 menjadi 0,49.

Grafik 2.3.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) Kota Pontianak



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2023

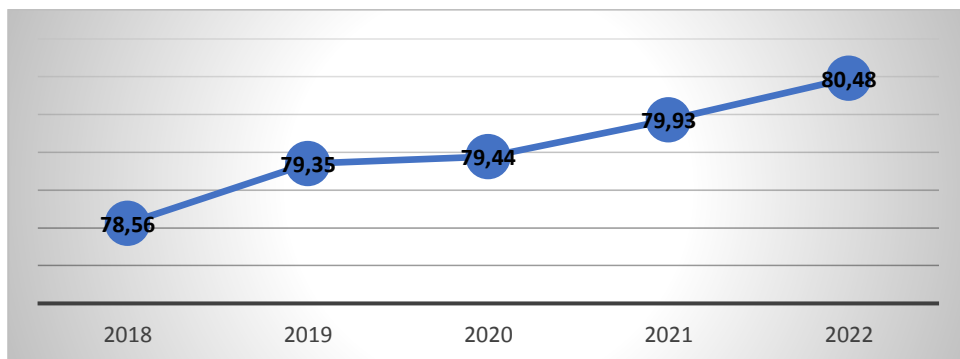
Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) merupakan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada Tahun 2018 Indeks Keparahan Kota Pontianak berada pada angka 0,14 dan sempat mengalami peningkatan pada Tahun 2019 menjadi 0,16 dan 0,20 pada Tahun 2021. Namun indeks ini berhasil diturunkan kembali pada Tahun 2022 menjadi 0,09. Hal ini menggambarkan semakin berkurangnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kota Pontianak.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga aspek, meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek hidup layak melalui pengukuran kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. IPM merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat dan menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

Grafik 2.4.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Pontianak



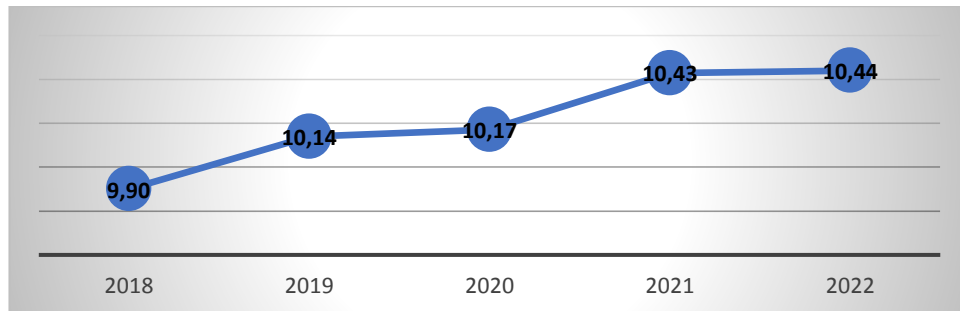
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2023

IPM Kota Pontianak menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2018, IPM Kota Pontianak sebesar 78,56 meningkat menjadi 80,48 pada Tahun 2022. Nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat semakin baik dan pembangunan Kota Pontianak semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Barat, Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak berada pada peringkat pertama, indeks ini bahkan berada di atas IPM Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional yang masing-masing hanya mencapai 68,63 dan 72,91 pada Tahun 2022.

B. Pendidikan

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Grafik 2.5.
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Di Kota Pontianak



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2023

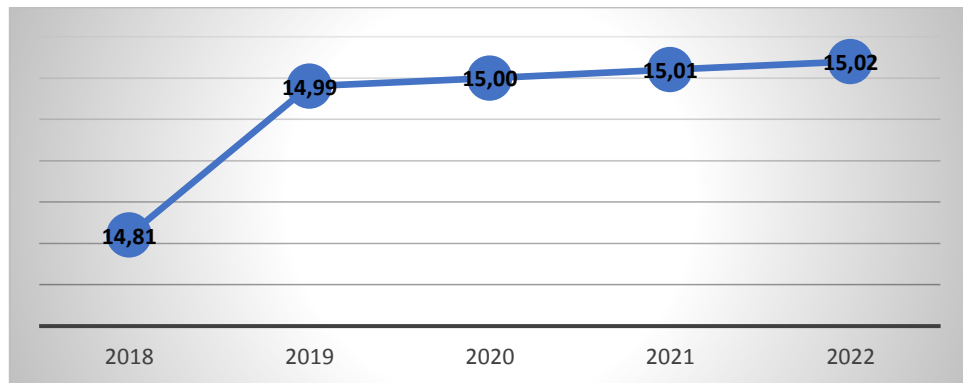
Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years School*) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat Sekolah Dasar diperhitungkan lama sekolah selama 6 (enam) tahun, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) diperhitungkan lama sekolah selama 9 (sembilan) tahun, tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) diperhitungkan lama sekolah selama 12 (dua belas) tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pontianak mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 9,90 pada Tahun 2018 meningkat menjadi 10,44 Tahun 2020 meningkat menjadi 10,17. Tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi 10,43 dan 10,44. yang artinya secara rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Kota Pontianak (usia 25 tahun ke atas) dalam menjalani pendidikan formal sebanyak/hingga 10,44 tahun, atau jika dirata-ratakan pada jenjang pendidikan setara dengan SMA dikelas sebelas.

2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berumur 7 tahun ke atas, dimana angka tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 2.6.
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Di Kota Pontianak



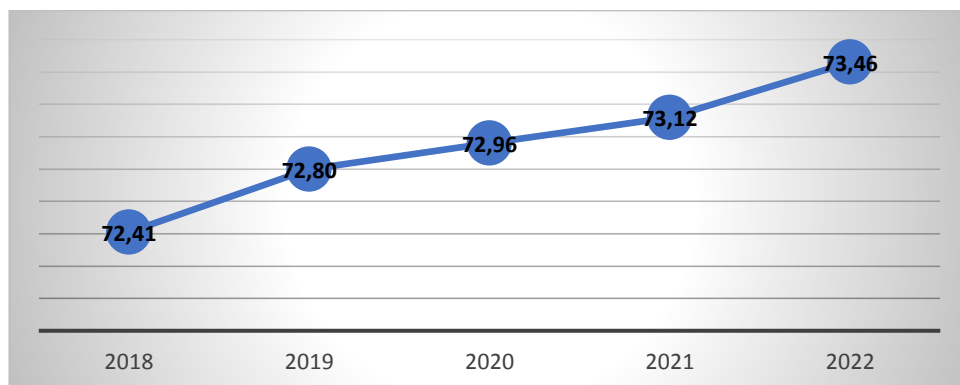
Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2023

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pontianak mengalami peningkatan 0,21 poin selama kurun waktu lima tahun, yaitu dari 14,81 pada Tahun 2018 menjadi 15,02 pada Tahun 2022. Hal ini berarti secara rata-rata anak berusia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 15 tahun atau setara Diploma III.

C. Kesehatan

1. Angka Usia Harapan Hidup

Grafik 2.7.
Angka Usia Harapan Hidup
di Kota Pontianak



Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2023

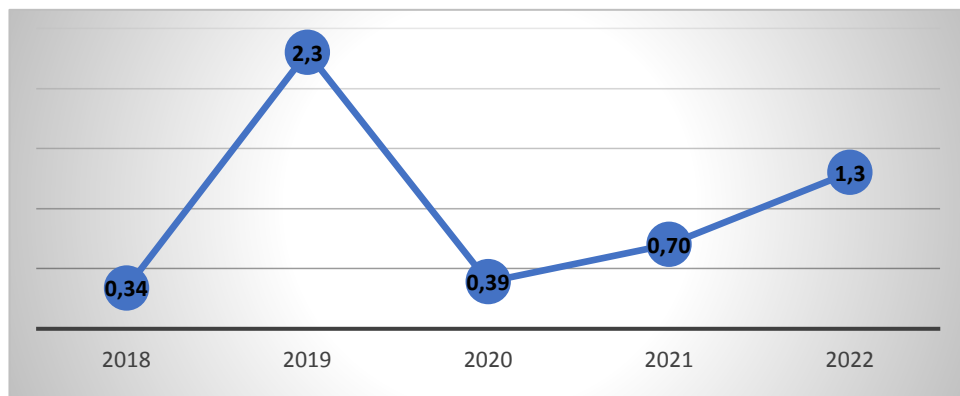
Angka Usia Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tersebut dalam situasi kematian yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Semakin tinggi kematian maka semakin rendah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup dapat digunakan sebagai indikator pembangunan ekonomi. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup di suatu wilayah, maka semakin baik pembangunan ekonominya. Selama periode Tahun 2018 hingga Tahun 2022, angka usia harapan hidup Kota Pontianak menunjukkan tren peningkatan dari 72,41 tahun di Tahun 2018

meningkat menjadi 73,46 tahun di Tahun 2022. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pontianak.

2. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi gizi kurang hingga tingkat yang berat dan disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama.

Grafik 2.8.
Persentase Balita Gizi Buruk
di Kota Pontianak



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2023

Persentase balita gizi buruk di Kota Pontianak selama empat tahun terakhir menunjukkan tren berfluktuatif. Pada Tahun 2018, persentase balita gizi buruk sebesar 0,34%. Pada Tahun 2019 persentase balita gizi buruk di Pontianak kembali mengalami peningkatan, namun peningkatan ini lebih dikarenakan semakin baiknya sistem surveilans gizi sehingga semakin banyak kasus yang bisa dilaporkan.

Surveilans gizi adalah proses pengamatan masalah dan program gizi secara terus menerus baik situasi normal maupun darurat, meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian data secara sistematis serta penyebarluasan informasi untuk pengambilan tindakan sebagai respon segera dan terencana. Pada Tahun 2021 persentase balita gizi buruk di Kota Pontianak dapat diturunkan menjadi 0,70%, namun kembali mengalami peningkatan menjadi 1.3% pada Tahun 2022.

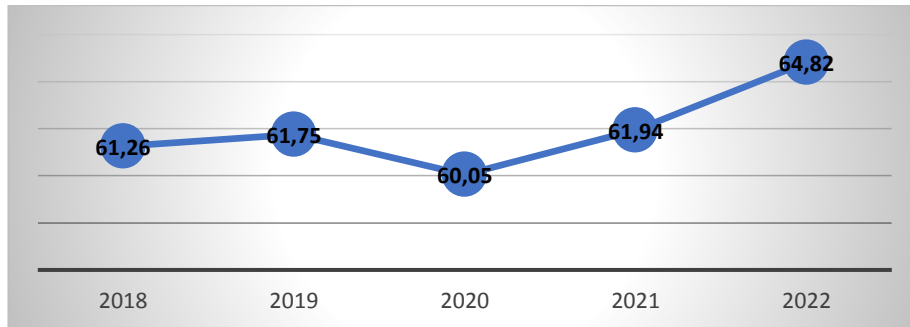
D. Ketenagakerjaan

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour*

supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Grafik 2.9.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kota Pontianak



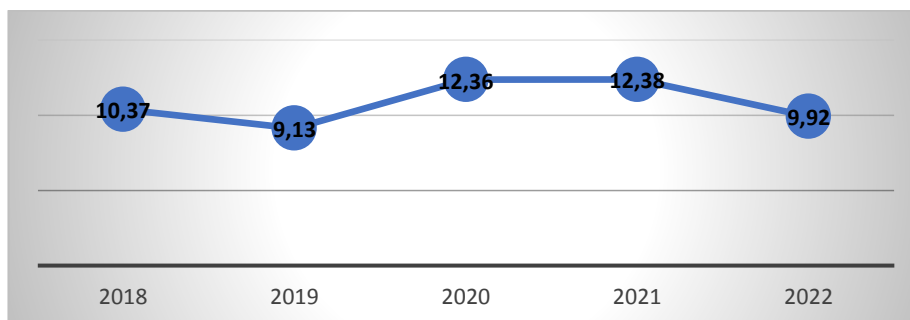
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2023

Data Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan ekonomi di Pontianak dalam beberapa tahun belakangan bersifat fluktuatif. TPAK Kota Pontianak pada Tahun 2018 sebesar 61,26%. Pada Tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan TPAK sebesar 0,49 poin, dan kembali turun pada Tahun 2020 sebesar 1,66 poin menjadi 60,05%. Pada Tahun 2021 dan 2022 TPAK Kota Pontianak kembali mengalami peningkatan menjadi 61,94% dan 64.82%.. Angka ini menunjukkan dari 100 penduduk Kota Pontianak usia 15 tahun ke atas, sebanyak 65 orang tersedia untuk memproduksi pada Tahun 2022.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terjadi karena berbagai macam faktor, diantaranya karena terbatasnya lapangan kerja sementara jumlah penduduk tinggi, pendidikan dan keterampilan yang rendah, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja, teknologi yang semakin modern, dan berbagai macam faktor lain.

Grafik 2.10.
Tingkat Pengangguran
di Kota Pontianak



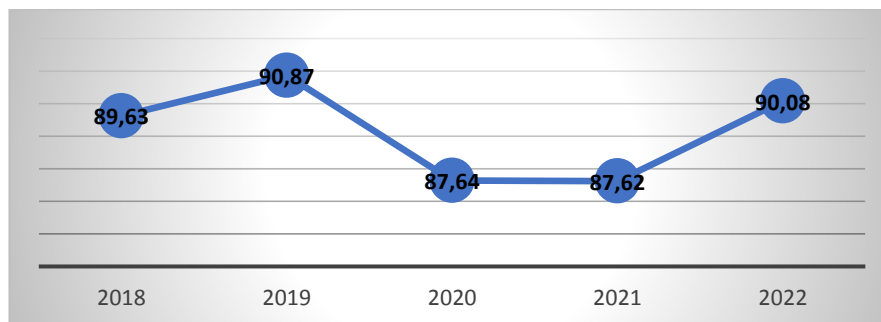
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pontianak beberapa tahun kebelakang juga menunjukkan adanya fluktuasi. Berbeda dengan TPAK, pada Tahun 2019 justru terjadi penurunan di Tingkat Pengangguran Terbuka yakni turun sebesar 1.24 poin dari tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pontianak mengalami lonjakan pada Tahun 2020 sebesar 3,23 poin menjadi 12,36%, dan meningkat kembali pada Tahun 2021 menjadi 12,38%. Tingginya lonjakan TPT ini sebagai akibat tingginya pemutusan hubungan kerja dampak dari pandemi Covid-19. Namun di Tahun 2022 tingkat pengangguran di Kota Pontianak mengalami penurunan sebesar 9.92% salah satu penyebab turunnya angka pengangguran tersebut disebabkan pemerintah telah mencabut pemberlakuan PPKM.

3. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio Penduduk yang Bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Grafik 2.11.
Rasio Penduduk yang Bekerja
di Kota Pontianak



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2023

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 sangat berfluktuasi. Pada Tahun 2018 rasio penduduk yang bekerja berada pada angka 89.63%. kemudian meningkat lagi sebesar 1,24 poin pada Tahun 2019 sebesar 90.87%. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Pontianak kembali mengalami penurunan drastis pada Tahun 2020 dan 2021 menjadi 87,64% dan 87,62%. Angka ini menjadi yang terendah selama beberapa Tahun belakangan. Namun di Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,46 poin dengan capaian menjadi 90.08%. Dengan rasio tersebut dapat diartikan bahwa 90.08% dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membangun watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai media untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kota Pontianak

No	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kebudayaan						
1.1	Jumlah Kelompok Seni Budaya	Kelompok	137	137	137	137	195
1.2	Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Buah	2	2	2	0	11
1.3	Dokumentasi Budaya	Buah	1	2	3	10	14
1.4	Pagelaran/Festival Seni Budaya yang Dilaksanakan	Kegiatan	13	16	3	5	6
1.5	Kelompok Seni/Budaya yang berpartisipasi dalam Pagelaran/Festival	Kelompok	12	33	18	10	20
2	Kepemudaan dan Olahraga						
2.1	Jumlah Organisasi Pemuda	Organisasi	175	72	81	88	134
2.2	Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	37	72	72	72	72
2.3	Jumlah Atlet	Orang	710	637	968	968	817
2.4	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	36	26	26	26	26
2.5	Lapangan Olahraga	Unit	118	253	253	305	305

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, 2023, diolah

Data di atas menunjukkan jumlah kelompok seni budaya di Kota Pontianak cenderung berfluktuatif pada beberapa tahun terakhir. Jumlah kelompok seni budaya meningkat jika dibandingkan ditahun sebelumnya Tahun 2021 sejumlah 137 kelompok dan meningkat di Tahun 2022 sejumlah 195 kelompok. Di Tahun 2022 ada cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan yaitu 11 cagar budaya warisan budaya tak benda (1 kamus Bahasa melayu dan 2 jepin), sementara Dokumentasi Budaya dan Kelompok Seni/Budaya yang Berpartisipasi dalam Pagelaran/Festival cenderung mengalami peningkatan. Pagelaran/Festival Seni Budaya yang Dilaksanakan sempat mengalami peningkatan pada Tahun 2018 dan 2019, namun pada Tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan, demikian halnya dengan Kelompok Seni/Budaya yang Berpartisipasi dalam Pagelaran/Festival. Penurunan ini disebabkan adanya pembatasan aktivitas/kegiatan yang dapat menyebabkan adanya kumpulan massa pada masa

pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022 kelompok seni/budaya yang berpartisipasi dalam pergelaran /festival.

Dari indikator kepemudaan dan olahraga, jumlah organisasi pemuda pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 46 organisasi dari tahun sebelumnya, namun jumlah ini mengalami penurunan. Jumlah organisasi, atlet, yakni masing-masing sebanyak 72 organisasi, 817 atlet. Jumlah Gedung olahraga dan lapangan olah raga dari tahun sebelumnya hingga Tahun 2022 masing-masing mencapai nilai yang sama dari tahun sebelumnya yaitu 26 unit dan 305 unit.

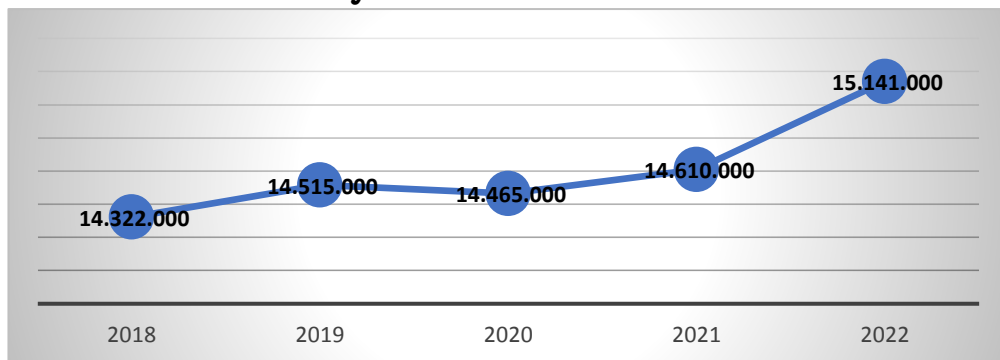
2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan.

Untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pengeluaran perkapita masyarakat Kota Pontianak mengalami peningkatan dari 14.322.000 rupiah per tahun pada Tahun 2018 menjadi 15.141.000 rupiah per tahun pada Tahun 2022.

Grafik 2.12.
Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan
Masyarakat Kota Pontianak



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2023

2.3.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per kapita

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Tabel 2.17.
Persentase Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan/Pangan dan Non Makanan/Non Pangan Per Kapita Sebulan di Kota Pontianak Tahun 2018-2022

Jenis Konsumsi	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Makanan	42,52	44,27	44,31	44,15	45.32
II. Non Makanan	57,48	55,73	55,69	55,85	54.68
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

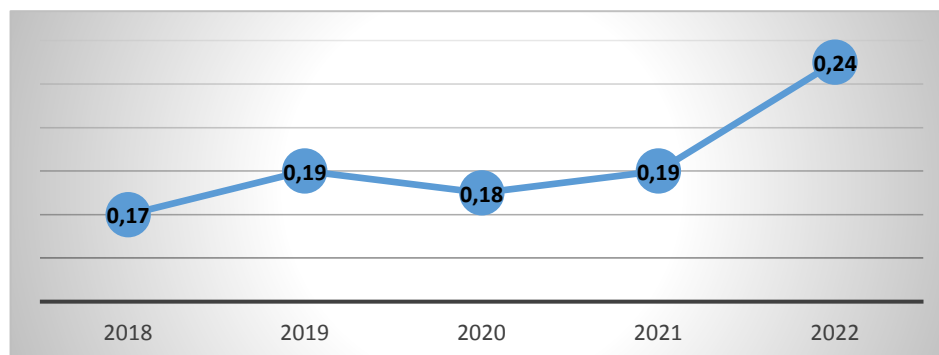
Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2023

Pengeluaran non makanan penduduk Kota Pontianak lebih besar dari pengeluaran untuk makanan. Selama lima tahun terakhir, kebutuhan untuk makanan rata-rata berkisar 44.11%, sedangkan untuk kebutuhan Non Makanan rata-rata berkisar 55.89%. Melihat kondisi ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berpendapatan sedang dan tinggi sudah semakin banyak dibandingkan penduduk berpendapatan rendah sebab yang berpendapatan rendah akan cenderung terlebih dulu memenuhi kebutuhan makanannya.

A. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB

Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan keterbukaan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi rasio ekspor + impor terhadap PDRB menunjukkan semakin terbuka pulalah perekonomian suatu daerah terhadap perdagangan internasional. Rasio ini dapat juga dipandang sebagai indikator globalisasi ekonomi suatu daerah. Data menunjukkan bahwa dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 rasio ekspor + impor terhadap PDRB Kota Pontianak cenderung mengalami peningkatan dari 0,14 pada Tahun 2017 naik menjadi 0,17 pada Tahun 2018 dan 2019, kemudian meningkat lagi pada Tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 0,18 dan 0,21. Adanya tren peningkatan Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB Kota Pontianak mengindikasikan semakin terbukanya ekonomi Kota Pontianak terhadap perdagangan internasional.

Grafik 2.13.
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB Kota Pontianak tahun 2018-2022



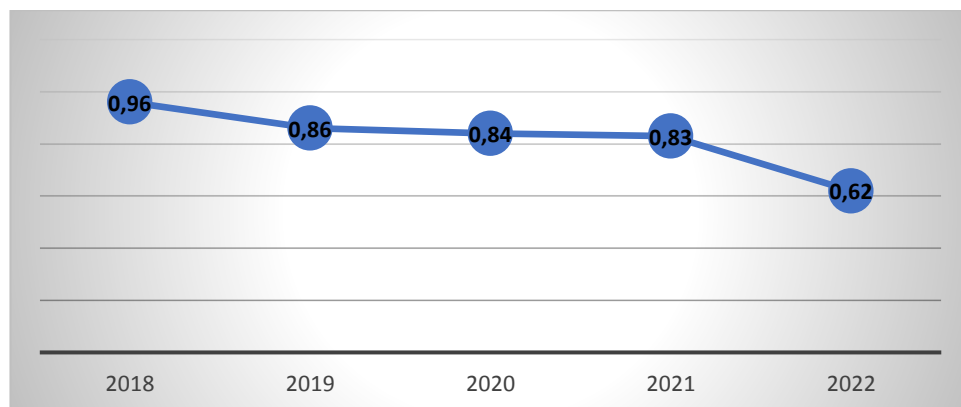
Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2022 (diolah)

B. Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak. Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum atau disebut juga dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yang menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Dilihat dari banyaknya dana yang berhasil dihimpun oleh Bank Umum di Kota Pontianak pada Tahun 2022, simpanan berbentuk tabungan rata-rata berjumlah 17,96 triliun rupiah turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 22,35 triliun rupiah. Sementara dana yang berasal dari deposito pada tahun 2022 hanya sebesar 11,30 triliun rupiah, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 13,42 triliun rupiah. Dana yang berasal dari giro mengalami peningkatan dari 6,15 triliun rupiah pada Tahun 2021 meningkat menjadi 6,19 triliun rupiah pada Tahun 2022. Untuk posisi dana pinjaman yang berhasil disalurkan oleh Bank Umum pada Tahun 2022 mencapai 22,19 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 21,02 triliun rupiah.

Grafik 2.14.
Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum
Kota Pontianak



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2023 (diolah)

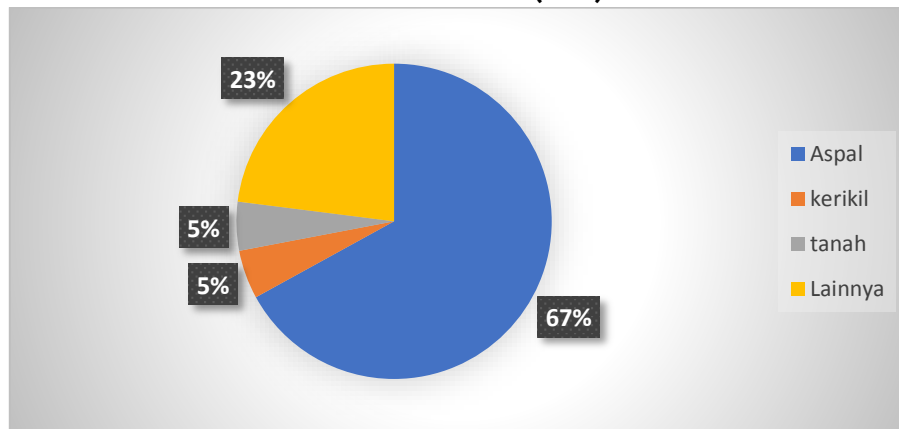
Rasio Pinjaman terhadap simpanan di Bank Umum di Kota Pontianak dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup berfluktuasi. Rasio tertinggi terjadi pada Tahun 2018 hingga mencapai 0,96. Namun pada tahun berikutnya cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2022 rasio pinjaman terhadap simpanan di Bank Umum Kota Pontianak adalah sebesar 0,62.

2.3.3 Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah

A. Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

Panjang jalan di Kota Pontianak pada Tahun 2022 tercatat sepanjang 286,08 km, angka ini meningkat dari Tahun 2018 yang hanya sepanjang 286,07 km. Sebagian besar permukaan jalan berupa aspal (189,52 km) meskipun masih terdapat jalan dengan permukaan tanah sepanjang 14,83 km. Kondisi jalan di Kota Pontianak dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari Tahun 2018 ke tahun 2022 yakni dari 216,14 km meningkat menjadi 226,62 km. Sementara itu, panjang jalan yang mengalami rusak ringan dan rusak berat mengalami peningkatan dari yang sebelumnya di Tahun 2018 sepanjang 5,59 km dan 4,66 km menjadi 11,98 km dan 17,41 km saja pada Tahun 2022. Secara umum kerusakan jalan disebabkan karena kendaraan bermuatan berat dan struktur tanah yang sebagian besar merupakan tanah lunak.

Grafik 2.15.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan
Tahun 2022 (km)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2023

Tabel 2.18.
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
di Kota Pontianak (Km)

Kondisi Jalan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Baik	216,14	167,85	213,90	220,15	226,62
Sedang	59,68	84,45	38,08	33,75	30,07
Rusak Ringan	5,59	21,79	19,22	16,55	11,98
Rusak Berat	4,66	11,99	14,88	15,63	17,41
Total	286,07	286,08	286,08	286,08	286,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2023

B. Jumlah Bank dan Cabang

Industri perbankan di Kota Pontianak selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari bertambahnya jumlah Kantor Bank dengan berbagai bentuk pelayanannya, dimulai dari Kantor Pusat hingga Kantor Unit. Jumlah Kantor Pusat Bank di Kota Pontianak tidak mengalami peningkatan antara Tahun 2018 dan Tahun 2022, berbeda halnya

dengan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas Payment Point dan Unit yang mengalami penurunan jumlahnya pada tahun 2022 dibandingkan Tahun 2018. Dimana kantor kas Tahun 2018 dan 2022 mengalami penurunan dari 48 menjadi 3. Sedangkan payment point dari Tahun 2018 dan 2022 sangat mengalami penurunan dari 26 menjadi 0 di Tahun 2022. Sedangkan unit dari 3 unit di tahun 2018 menjadi 1 unit di Tahun 2022.

Tabel 2.19.
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kota Pontianak
Tahun 2018 & 2022

No	Jenis Bank	Tahun/Status Pelayanan											
		KP		KC		KCP		KK		PP		UNIT	
		2018	2022	2018	2022	2018	2022	2018	2022	2018	2022	2018	2022
1	Bank Umum Pemerintah	0	0	7	7	24	19	22	0	7	0	2	0
2	Bank Umum Swasta	0	0	36	26	6	35	8	0	9	0	0	0
3	Bank Pemerintah Daerah	1	1	3	3	5	29	17	1	10	0	1	1
4	Bank Perkreditan Rakyat	13	13	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0
	Jumlah	14	14	46	47	65	83	48	3	26	0	3	1

Sumber: OJK Provinsi Kalimantan Barat, 2023

Keterangan: KP = Kantor Pusat; KC = Kantor Cabang; KCP = Kantor Cabang Pembantu; KK = Kantor Kas; PP =Payment Point

C. Ketersediaan Listrik dan Air Bersih

Ketersediaan listrik merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung aktivitas rumah tangga, baik untuk keperluan penerangan maupun mengakses kebutuhan lain. Semakin berkembangnya sektor kelistrikan akan sangat memberikan pengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak. Tercatat sebanyak 359.888 pelanggan PLN sampai dengan Desember 2022 yang meliputi pelanggan rumah tangga, industri, pemerintah dan layanan khusus, bisnis dan sosial.

Tabel 2.20.
Jumlah Pelanggan PLN Area Pontianak
Menurut Jenisnya Tahun 2022

Bulan	Rumah Tangga	Industri	Pemerintah dan Layanan Khusus	Bisnis	Sosial	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
Januari	312.700	195	2.319	29.377	4.616	349.207
Februari	313.526	195	2.331	29.458	4.634	350.144
Maret	314.844	197	2.352	29.536	4.660	351.589
April	315.535	196	2.357	29.573	4.675	352.336
Mei	315.820	196	2.365	29.601	4.676	352.658
Juni	316.907	197	2.376	29.654	4.681	353.815
Juli	318.175	198	2.384	29.733	4.701	355.191
Agustus	318.679	201	2.384	29.758	4.714	355.736
September	320.237	200	2.391	29.807	4.726	357.361

Bulan	Rumah Tangga	Industri	Pemerintah dan Layanan Khusus	Bisnis	Sosial	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
Oktober	321.068	202	2.398	29.821	4.741	358.230
Nopember	321.618	203	2.399	29.822	4.746	358.788
Desember	322.627	205	2.407	29.883	4.766	359.888

Sumber : PT. PLN (Persero) Kalimantan Barat Area Pontianak. BPS Kota Pontianak, 2023

Tabel 2.21.
Banyaknya Pelanggan Air PDAM
Menurut Jenis Konsumen

Jenis Konsumen	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sosial	1.406	1.487	1.546	1.625	1.668
Non Niaga	106.157	114.655	120.956	126.456	132.297
- Rumah Tangga	105.693	114.180	120.476	125.959	131.777
- Instansi Pemerintah	464	475	480	497	520
Niaga	11.819	12.236	12.556	13.482	13.924
Industri	74	72	70	71	71
Khusus	3	3	3	3	3
TOTAL	119.459	128.453	135.131	141.637	147.963

Sumber : PERUMDA Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, 2023

Selama Tahun 2018-2022 jumlah pelanggan air PDAM di Kota Pontianak terus mengalami peningkatan dari 119.459 pelanggan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 147.963 pelanggan pada Tahun 2022. Pelanggan terbesar berasal dari Non Niaga yakni rumah tangga dan instansi pemerintah yakni sebesar 89,41% pada Tahun 2022, jumlah pelanggan dari konsumen ini mengalami peningkatan dari 106.157 pelanggan pada Tahun 2018 menjadi 132.297 pada Tahun 2022.

2.3.4. Fokus Iklim Investasi

A. Angka Kriminalitas yang Diselesaikan

Kriminalitas merupakan segala bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan baik secara ekonomis maupun psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas adalah suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu.

Pada Tahun 2022 jumlah laporan atas tindakan kriminalitas menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya, tercatat jumlah pelaporan atas tindak kejahatan/pelanggaran di Kota Pontianak Tahun 2022 adalah 1.079 laporan, ini lebih rendah dari jumlah pelaporan atas tindak kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan di Tahun 2021 yang berjumlah 1.113 laporan. Dari 1.079 laporan di Tahun 2022, jumlah kriminalitas yang diselesaikan oleh Poltabes Kota Pontianak adalah 1.007.

Tabel 2.22.

Jumlah Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Satuan Kepolisian di Kota Pontianak Tahun 2018-2022

No	SATUAN KEPOLISIAN	2018		2019		2020		2021		2022	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Polsekta Pontianak (Sat Reskrim)	1.075	652	855	699	438	416	444	423	450	431
2	Polsekta Pontianak (Sat Narkoba)	97	85	116	102	121	115	137	148	129	126
3	Polsekta Selatan	197	194	131	135	141	126	90	83	99	88
4	Polsekta Timur	200	158	183	133	168	143	113	115	96	100
5	Polsekta Utara	134	102	122	100	81	76	93	82	92	88
6	Polsekta Barat	222	164	163	143	118	124	116	95	100	73
7	Polsek Pontianak Kota	137	104	135	105	73	56	120	131	113	101
8	KP3L	3	3	4	1	2	2	-	-	-	-
JUMLAH		2.065	1.462	1.709	1.418	1.142	1.058	1.113	1.077	1.079	1.007

Sumber: Polresta Kota Pontianak, BPS Kota Pontianak, 2022, diolah

Keterangan: L =Dilaporkan; S = Diselesaikan

B. Jumlah Surat Izin Usaha yang Diterbitkan

Beberapa surat izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Izin usaha/NIB dan Fasilitas Kesehatan (FASKES). Secara umum pada Tahun 2020, jumlah surat izin yang diterbitkan mengalami penurunan yang cukup drastis dari kondisi tahun-tahun sebelumnya, hanya sebanyak 4.189 surat izin saja. Hal ini disinyalir sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya penurunan aktivitas perekonomian masyarakat terutama untuk membuka usaha. Seiring dengan pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat, jumlah surat izin yang diterbitkan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 7.646 surat izin. Pada tahun 2022 mencapai 8.394.

Tabel 2.23.

Jumlah Pengeluaran Surat Izin Menurut Jenisnya di Kota Pontianak

Jenis Izin	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IMB/PBG	2.146	2.001	1.414	1.739	716
Izin Usaha/NIB	3.152	5.215	2.720	5.878	7.655
FASKES	47	89	55	29	23
TOTAL	5.345	7.305	4.189	7.646	8.394

Sumber : Dinas Penanaman Modal, dan PTSP Kota Pontianak; BPS Kota Pontianak 2023. Diolah

2.3.5. Fokus Sumber Daya Manusia

A. Persentase Lulusan SD/SMP/SMA

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait persentase penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kelamin dan ijazah Kota Pontianak dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.24.

Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kota Pontianak Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Tahun 2022

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki	Jenis Kelamin		Jumlah %
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak punya Ijazah SD	8,96	11,54	10,27
SD dan Sederajat	15,89	14,65	15,26
SMP dan sederajat	17,48	15,30	16,38
SMA ke atas dan sederajat	57,67	58,51	58,09
Jumlah	100,00	100,00	100,00

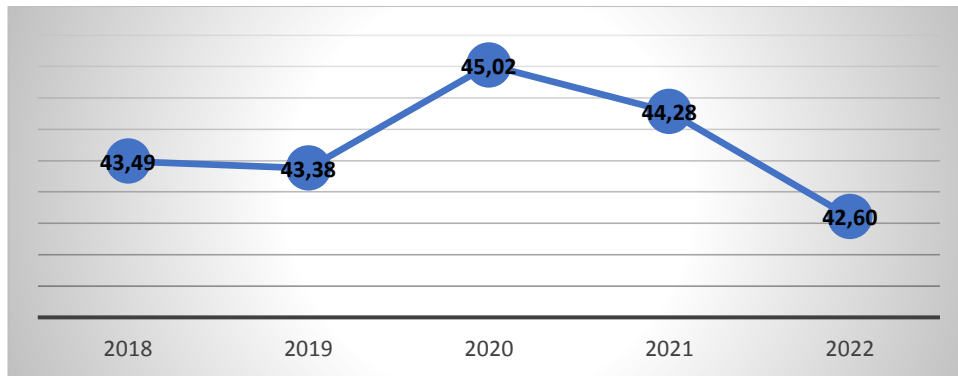
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2022

Berdasarkan tabel di atas, Penduduk 15 tahun keatas yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat Pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, jika suatu daerah memiliki banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, maka kualitas sumber daya manusia daerah Kota Pontianak akan cenderung baik. Kota Pontianak salah satu pusat Pendidikan yang relative baik. Dari data diatas menggambarkan atau menginformasikan bahwa di Tahun 2022 58,09 persen penduduk usia diatas 15 tahun keatas telah berijazah SMA ke atas dan sederajat. Angka tersebut membuktikan bahwa lebih dari setengah penduduk yang berusia 15 tahun keatas telah menamatkan Pendidikan minimal SMA. Dan terdapat 10,27 persen penduduk yang tidak memuyai ijazah SD menunjukkan masih ada penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak tamat SD.

B. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya. Berikut digambarkan kondisi rasio ketergantungan di Kota Pontianak dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021.

Grafik 2.16.
Rasio Ketergantungan Kota Pontianak



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2023 (diolah)

Rasio ketergantungan di Kota Pontianak dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 menunjukkan adanya fluktuasi, dari 43,49 pada Tahun 2018 menurun menjadi 43,38 pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 rasio ketergantungan di Kota Pontianak mengalami lonjakan sangat signifikan menjadi 45,02, namun pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dikurangi masing-masing menjadi 44,28 dan 42,60. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin bertambahnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada Tahun 2022, dari setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Pelayanan Urusan Wajib Dasar

A. Urusan Pendidikan

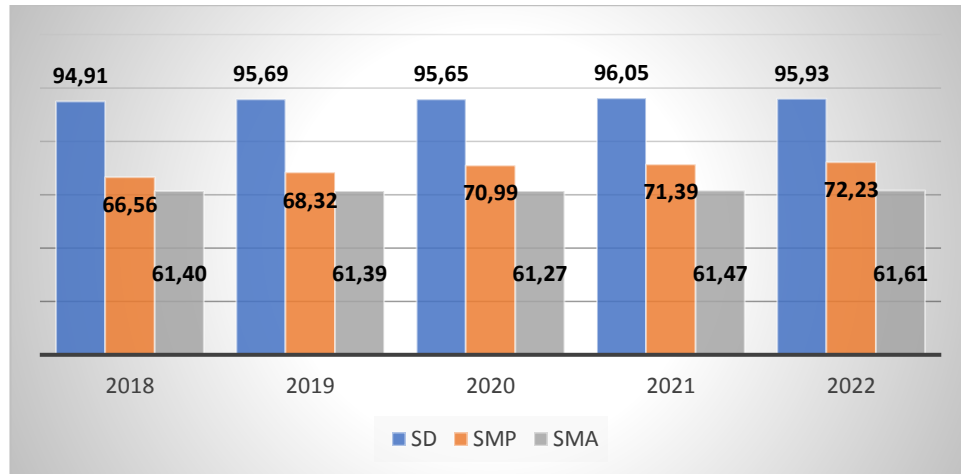
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak, pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan seperti: Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Melek Huruf, Angka Putus Sekolah, dan Angka Lulus Sekolah.

A.1. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Sejak Tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan.

Grafik 2.17.
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Pontianak



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. "Pontianak Dalam Angka 2023"

Angka Partisipasi Murni di Kota Pontianak untuk tingkat SD/MI selama 5 tahun terakhir cukup stabil dengan angka 94,91% di Tahun 2018, dan sedikit meningkat pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 masing-masing dengan angka 95,69% dan 95,65%, dan Tahun 2021 sedikit meningkat menjadi 96,05% pada tahun 2021, tahun 2022 mencapai angka 95,93% yang artinya ada sekitar 95,93% penduduk di Kota Pontianak yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD/MI.

Angka Partisipasi Murni di Kota Pontianak untuk tingkat SLTP/MTs 66,56% di Tahun 2018, dan sedikit meningkat pada Tahun 2019 menjadi 68,32%. kembali meningkat di Tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi 70,99% pada tahun 2020 meningkat di Tahun 2021 dengan capaian 71,39% dan 72,23%, yang artinya ada sekitar 72,23% penduduk di Kota Pontianak yang berusia 13 -15 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SLTP/MTs.

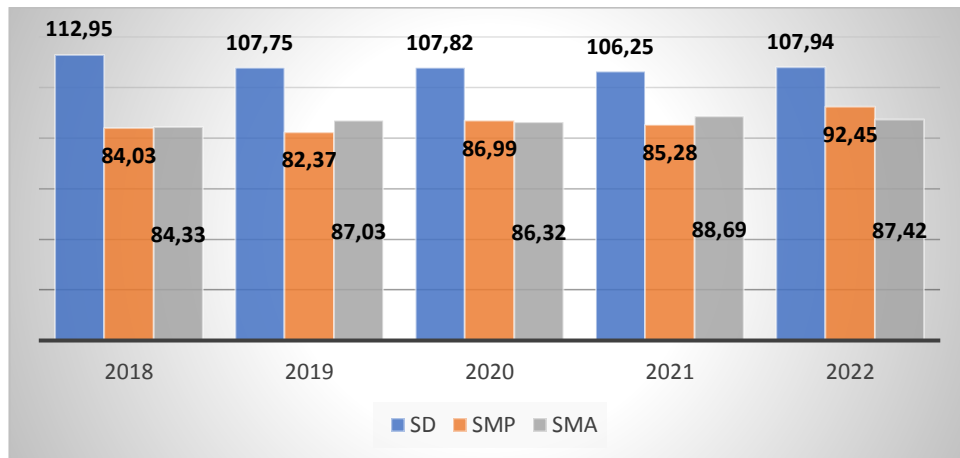
Sedangkan Angka Partisipasi Murni di Kota Pontianak untuk tingkat SMA/SMK/MA pada Tahun 2018 menjadi 61,40%, dan berturut-turut sedikit menurun Tahun 2019 dan 2020 menjadi 61,39% dan 61,27%, dan kembali meningkat Tahun 2021 dan 2022 menjadi 61,47% dan 61,66%, yang artinya ada sekitar 61,66% penduduk di Kota Pontianak yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMA/SMK/MA.

A.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar adalah Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah dijenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia

sekolah dijenjang pendidikan yang sama. Sejak Tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Grafik 2.18.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kota Pontianak



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. "Pontianak Dalam Angka 2023"

Guna dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah sebagai pelengkap dari indikator angka partisipasi murni (APM) sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari sekolah usia yang seharusnya. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Pontianak untuk jenjang SD/MI selama 5 tahun berturut turut dari Tahun 2018 dan 2022 telah mencapai angka diatas 100%. Tahun 2020 telah mencapai angka 107,82% sedikit menurun di Tahun 2021 mencapai angka 106,25% dan Kembali meningkat di Tahun 2022 mencapai angka 107,94% artinya pada Tahun 2022 di jenjang SD/MI ada kemungkinan pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat sekolah atau pengulangan kelas pada jenjang SD/MI dengan asumsi ada penduduk diluar Kota Pontianak.

Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Pontianak untuk jenjang SLTP/MTs selama 5 tahun mengalami fluktuasi Tahun 2018 APK pada jenjang SLTP/MTs mencapai 84,03%, di Tahun 2019 menurun dengan capaian 82,37% dan meningkat di Tahun 2020 yang mencapai angka 86,99%. Di Tahun 2021 turun mencapai angka 85,28% dan meningkat di Tahun 2022 mencapai angka 92,45% artinya pada Tahun 2022 di jenjang SLTP/MTs adanya kemungkinan pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat sekolah atau pengulangan kelas pada jenjang SLTP/MTs dengan asumsi ada penduduk diluar Kota Pontianak.

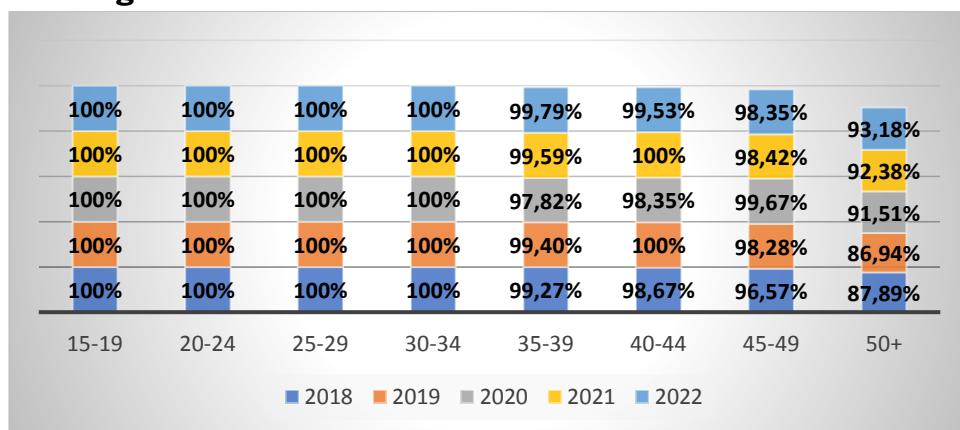
Sedangkan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Pontianak untuk jenjang SMA/SMK/MA di Tahun 2018 dengan angka mencapai 84,33%, di Tahun 2019 meningkat dengan angka mencapai 87.03%. di Tahun 2020 dan 2021 menurun masing-masing mencapai angka 86,32% dan 88,69% di Tahun 2022 meningkat mencapai angka 87,42% artinya di Tahun 2022 pada jenjang

SMA/SMK/MA adanya kemungkinan pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat sekolah atau pengulangan kelas pada jenjang SMA/SMK/MA dengan asumsi ada penduduk diluar Kota Pontianak.

A.3. Angka Melek Huruf

Pemerintah memberlakukan program wajib belajar yang mengharuskan penduduk usia sekolah 6-17 tahun untuk mengikuti pendidikan formal SD sampai SLTP. Program Pemerintah tersebut membuat angka melek huruf menjadi semakin tinggi. Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latindan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca dan ditulisnya.

Grafik 2.19.
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas



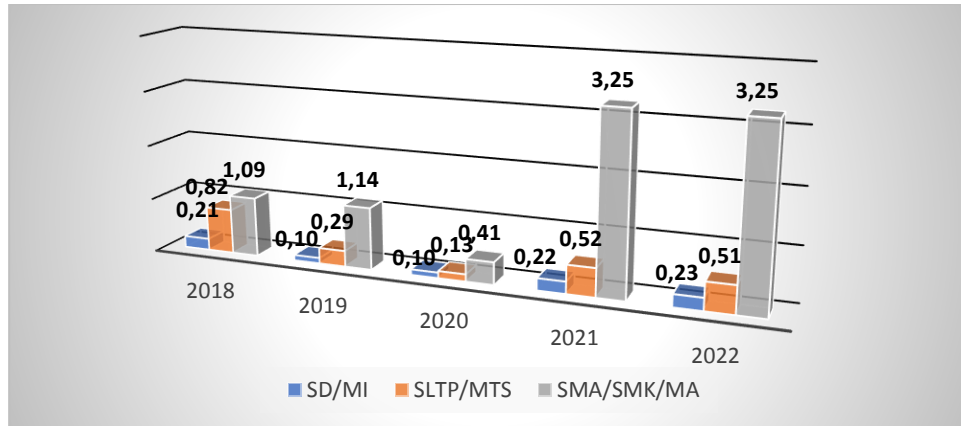
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. "Pontianak Dalam Angka 2023

Sebenarnya angka melek huruf ini sudah tidak lagi sensitif untuk menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan di bidang pendidikan karena sebagian besar di Indonesia termasuk Kota Pontianak angka melek huruf Tahun 2019 untuk usia 15-34 tahun sudah mencapai 100 persen, sedangkan angka melek huruf untuk usia 35-49 tahun mencapai rata-rata diatas 99,59% persen. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada lagi penduduk usia produktif yang buta huruf, dan hanya tersisa sedikit saja yang belum melek huruf untuk penduduk usia tua (50+) dan jumlahnya tersebut sedikit yaitu 92,38% pada Tahun 2021.

A.4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen.

Grafik 2.20.
Angka Putus Sekolah di Kota Pontianak



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, 2023

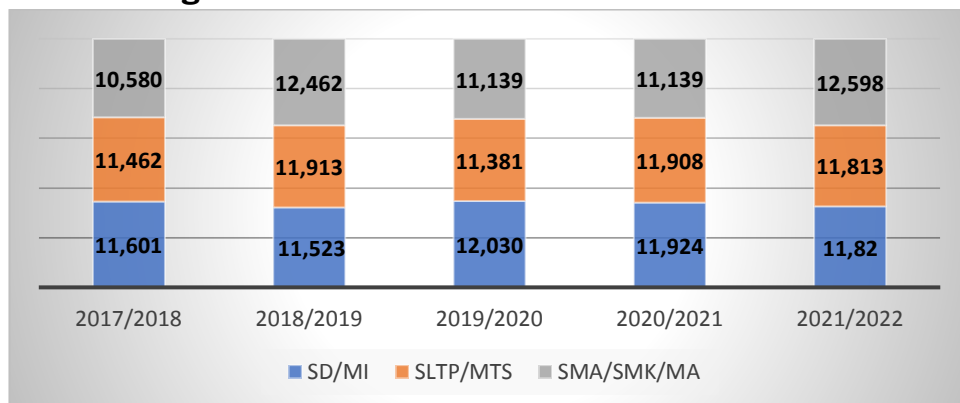
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI di Kota Pontianak pada Tahun 2018 mencapai angka 0,21% dan sedikit menurun di Tahun 2019 dan 2020 masing-masing dengan angka yang sama mencapai 0,10% dan di Tahun 2021 dan 2022 masing-masing capaian 0,22% dan 0,23%, yang artinya angka putus sekolah pada jenjang umur 7-12 tahun sebesar 0,23%.

Angka Putus Sekolah di Kota Pontianak pada jenjang SLTP/MTs di Kota Pontianak pada Tahun 2018 dengan capaian angka 0,82%. Di Tahun 2019 dan 2020 menurun masing-masing mancapai angka 0,29% dan 0,13% dan sedikit meningkat di Tahun 2021 dan 2022 dengan capaian 0,52% dan 0,51%, artinya angka putus sekolah pada jenjang umur 13-15 tahun sebesar 0,51%.

Angka Putus Sekolah di Kota Pontianak pada jenjang SMA/SMK/MA di Kota Pontianak pada Tahun 2018 dan 2019 dengan masing-masing angka mencapai 1,09% dan 1,14%. Di Tahun 2020 mencapai angka 0,41% dan Tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan dengan masing-masing sama mencapai angka 3,25%, artinya angka putus sekolah pada jenjang umur 16-18 tahun sebesar 3,25%.

A.5. Angka Kelulusan

Grafik 2.21.
Angka Kelulusan Sekolah di Kota Pontianak



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak,, 2023

Grafik diatas memperlihatkan Tahun 2017/2018 mencapai angka 11.601 siswa. Dan di tahun ajaran 2018/2019 mengalami penurunan mencapai angka 11.523 siswa. Ditahun ajaran 2019/2020 mengalami peningkatan dengan capaian angka 12.030 siswa, dan terjadi penurunan kembali di Tahun 2021 dan 2022 mencapai 11.924 siswa dan 11.82 siswa, artinya ada sekitar 11.82 siswa penduduk di Kota Pontianak yang jenjang 7-12 tahun minimal tamat/lulus SD/MI.

Angka kelulusan SLTP/MTs pada tahun ajaran 2018/2019 mencapai angka 11,913 siswa, penurunan kembali ditahun ajaran 2019/2020 mencapai angka 11,381 siswa dan meningkat ditahun ajaran 2020/2021 dengan capaian 11,908 siswa, artinya ada sekitar 11,908 siswa penduduk di Kota Pontianak yang jenjang umur 13-15 tahun minimal tamat/lulus SLTP/MTs.

Angka kelulusan SMA/SMK/MA pada tahun ajaran 2017/2018 dengan capaian 10,580 siswa dan meningkat ditahun ajaran 2018/2019 mencapai angka 12,462 siswa. Penurunan Kembali ditahun ajaran 2019/2020 dan ditahun ajaran 2020/2021 dengan masing-masing sama mencapai 11,139 dan Tahun 2022 angka kelulusan meningkat menjadi 12,598 siswa, artinya ada sekitar 12,598 siswa penduduk di Kota Pontianak yang jenjang umur 16-18 tahun minimal tamat/lulus SMA/SMK/MA.

A.6. Angka Melanjutkan (AM)

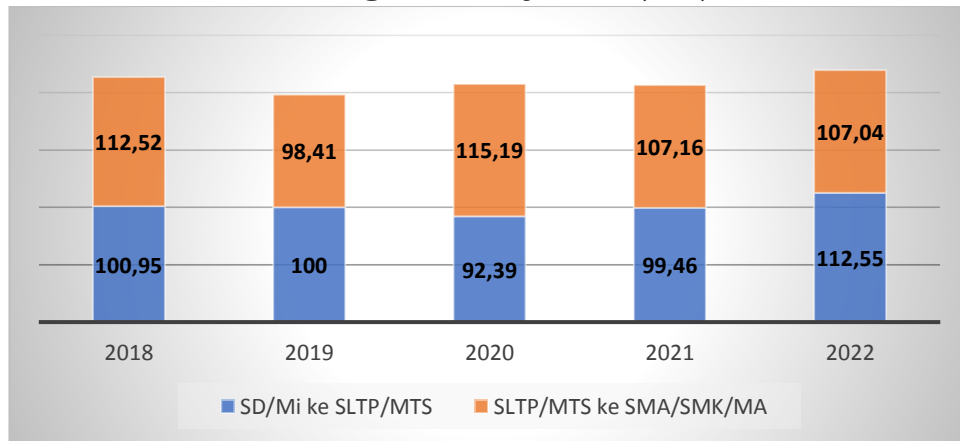
Angka melanjutkan pada jenjang siswa SD/MI ke SLTP/MTs mencapai angka 100,23%, pada Tahun 2018 sedikit meningkat mencapai 100,95%. Tahun 2019 mengalami sedikit penurunan dengan capaian angka 100%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan capaian 92,39%. Pada Tahun 2021 sedikit meningkat mencapai 99,46% dan Tahun 2022 meningkat capaian menjadi 100,95% artinya ada 100,95% jumlah siswa yang duduk pada kelas 1 SLTP/MTs di Tahun 2022.

Angka melanjutkan siswa SLTP/MTs ke SMA/SMK/MA di Tahun 2018 dan 2019 masing-masing mencapai 112,52% dan 98,41% dan kembali meningkat di Tahun 2020 mencapai angka 115,19% namun menurun di Tahun 2021 dan 2022 masing-masing mencapai angka 107,16% dan 107,04%, artinya ada 107,04% jumlah siswa yang duduk pada kelas 1 SMA/SMK/MA di Tahun 2022.

Besarnya Angka melanjutkan jenjang SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA juga akibat kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan bagi masa depan anaknya walaupun jumlah sekolah di jenjang SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA yang ada belum cukup memadai seperti halnya dengan jenjang SD/MI.

Namun, kondisi di Kota Pontianak agak berbeda karena Angka Melanjutkan ke SMP dan SMA lebih besar dari 100% karena adanya siswa dari daerah lain yang bersekolah di Kota Pontianak atau sekolah yang terletak di daerah perbatasan.

Grafik 2.22.
Angka Melanjutkan (AM)



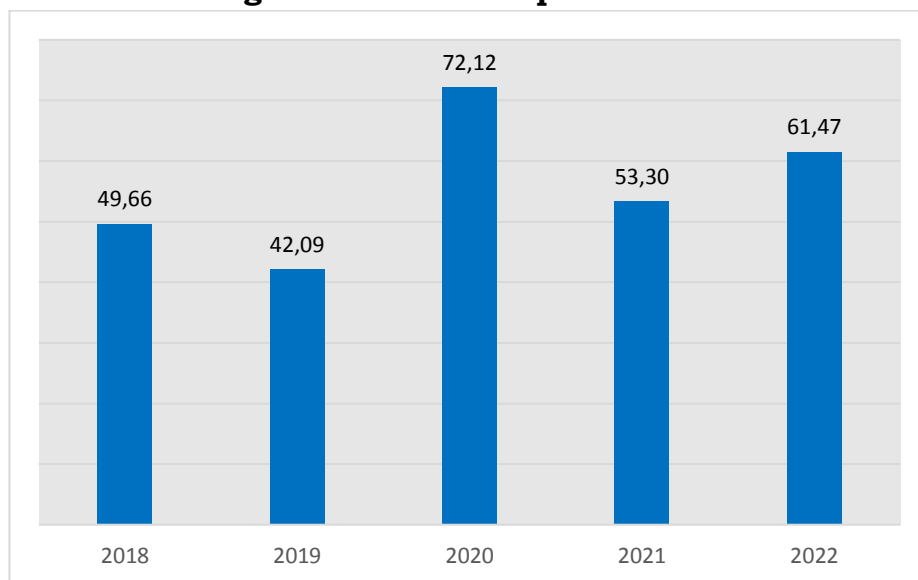
Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, 2023

B. Urusan Kesehatan

B.1. Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

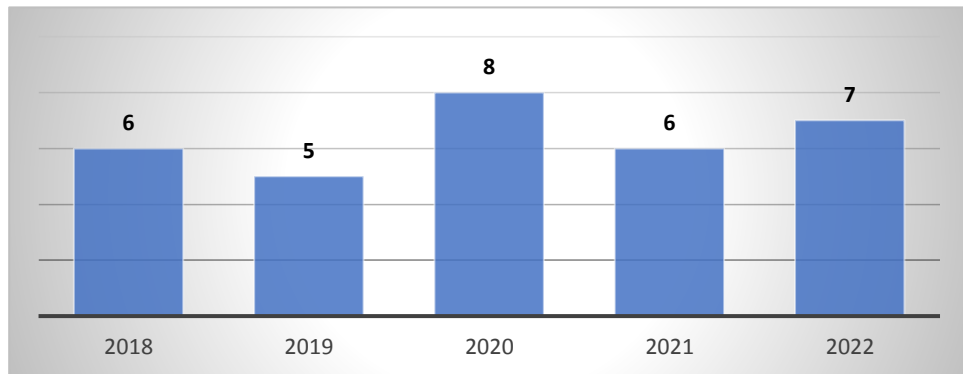
Capaian Indikator Kinerja pada angka kematian ibu per 100.000 KH Tahun 2018 sebesar 49.66 per 100.000 KH, menurun di Tahun 2019 sebesar 42,09 per 100.000 KH, Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 72,12 per 100.000 KH. dan di Tahun 2021 menurun sehingga mencapai 53,30 per 100.000 KH. Namun di Tahun 2022 kembali meningkat sebesar 61.47 per 100.000 KH.

Grafik 2.23.
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

Grafik 2.24.
Trend Kasus Kematian Ibu
Kota Pontianak



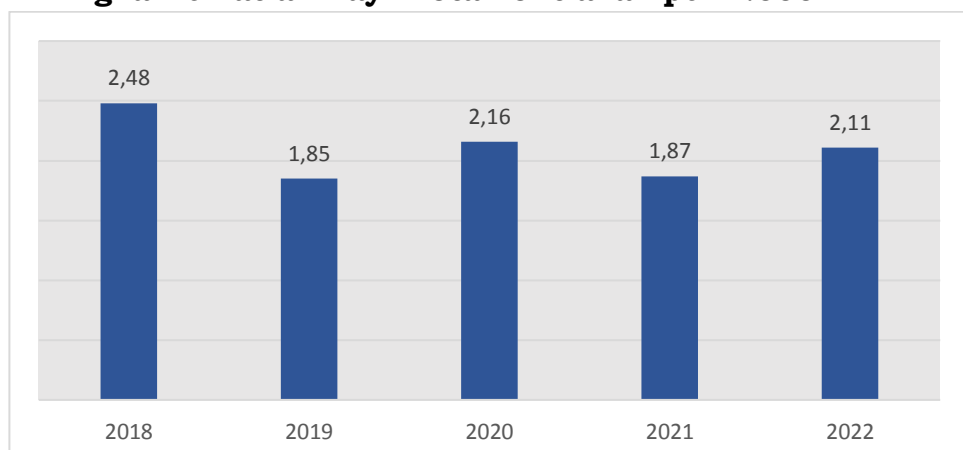
Sumber: Seksi KIA Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

Berdasarkan dari grafik trend kasus kematian Ibu Kota Pontianak Tahun 2018 terdapat 6 kasus, Tahun 2019 angka kasus kematian mencapai 5 kasus dan 8 kasus meningkat di Tahun 2020. Di Tahun 2021 kasus kematian ibu menurun menjadi 6 kasus. Terjadi peningkatan 1 kasus jika dibandingkan di Tahun 2022 yaitu 7 kasus. Penyebab kematian ibu tersebut adalah Jantung, Pendarahan dan eclampsia / Hipertensi.

B.2. Angka Kematian Bayi per 1000 KH

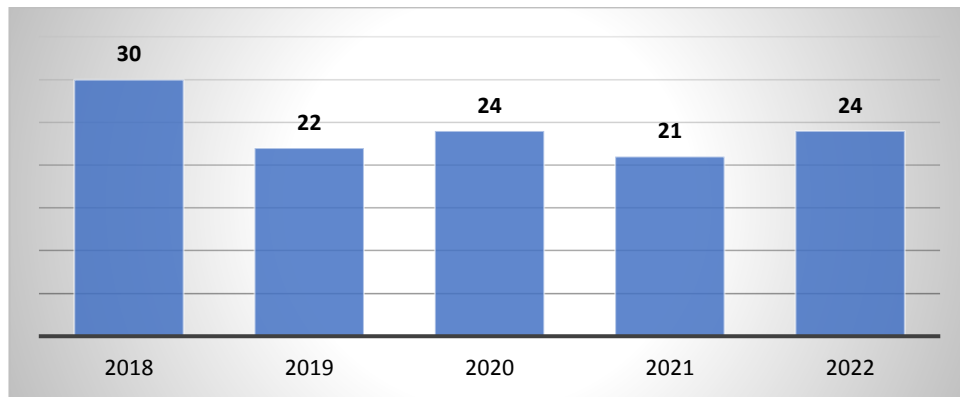
Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian per 1000 KH dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 mengalami fluktuasi dimana Tahun 2018 angka kematian bayi sebesar 2,48 per 1000 KH. Kembali menurun di Tahun 2019 sebesar 1,85 per 1000 KH. Namun tahun 2020 angka kematian bayi Kembali meningkat sebesar 2,16 per 1000 KH. di Tahun 2021 angka kematian bayi kembali menurun sebesar 1,87 per 1000 KH, namun di Tahun 2022 angka tersebut kembali meningkat sebesar 2,11 per 1000 KH dan lebih rendah dari Target yang ditentukan yaitu 2,30 per 1000 KH.

Grafik 2.25.
Angka Kematian Bayi Kota Pontianak per 1.000 KH



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

Grafik 2.26.
Trend Kasus Kematian Bayi
Kota Pontianak



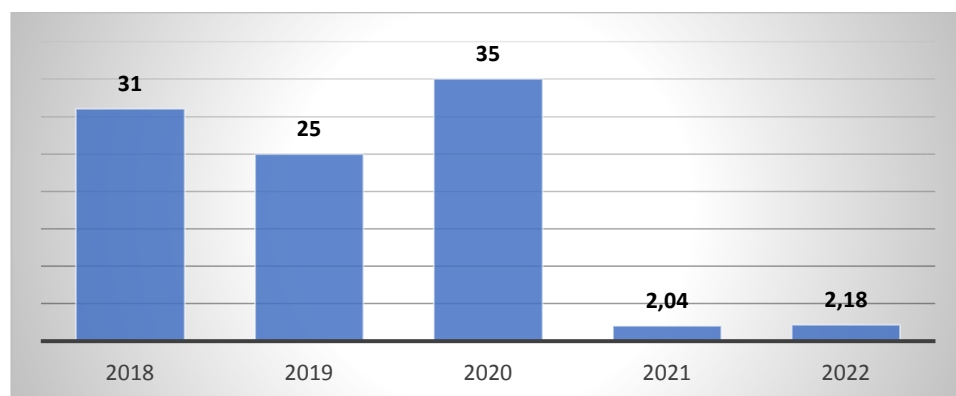
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2023

Berdasarkan trend kasus kematian bayi Kota Pontianak dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 angka kasus sangat fluktuatif, Tahun 2018 trend kasus kematian bayi mencapai angka 30. Trend tersebut kembali menurun di Tahun 2019 mencapai angka 22, namun di Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 24. Tahun 2021 dan 2022 kasus kematian bayi tercatat masing-masing sebesar 21 dan 24. Kematian bayi terbanyak disebabkan oleh bayi dengan berat badan lahir rendah, asfeksia, kelainan kongenital, covid dan lain-lain.

B.3. Angka kematian Balita per 1.000 KH

Angka Kematian Balita Kota Pontianak Tahun 2018 berada pada angka 31 per 1.000KH, sedikit menurun di Tahun 2019 menjadi 25 per 1.000KH. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 angka kematian balita meningkat tajam menjadi 35 per 1.000KH. Sedangkan di Tahun 2021 dan 2022 masing-masing mencapai angka 2,04 per 1.000KH dan 2,18 per 1.000 KH.

Grafik 2.27.
Angka kematian Balita per 1.000 KH

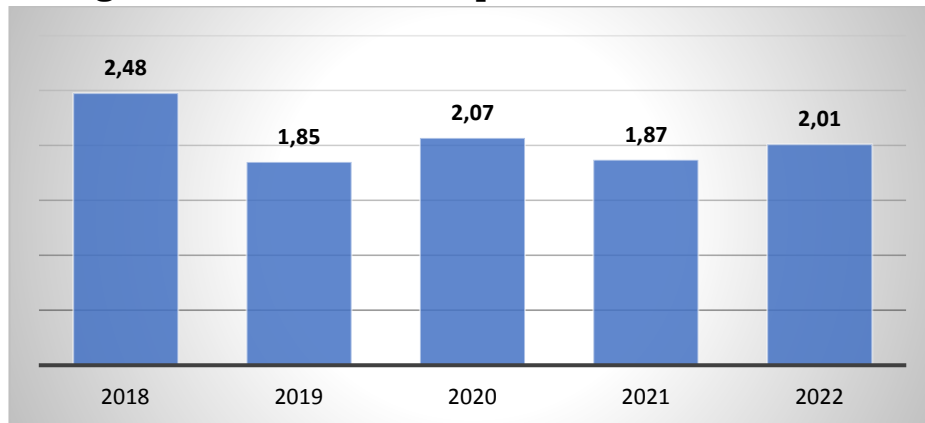


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

B.4. Angka Kematian Neonatal per 1.000 KH

Angka Kematian Neonatal per 1.000 KH Kota Pontianak Tahun 2018 hingga Tahun 2022 cukup fluktuatif, mulai dari 2,48 per 1.000 KH di Tahun 2018 menurun menjadi 1,85 per 1.000 KH pada Tahun 2019. dan meningkat menjadi 2,07 per 1.000 KH pada Tahun 2020, dan sedikit menurun antara di Tahun 2021 dan 2022 menjadi 1,87 per 1.000 KH dan 2.01 per 1.000 KH.

Grafik 2.28.
Angka Kematian Neonatal per 1.000 KH Kota Pontianak

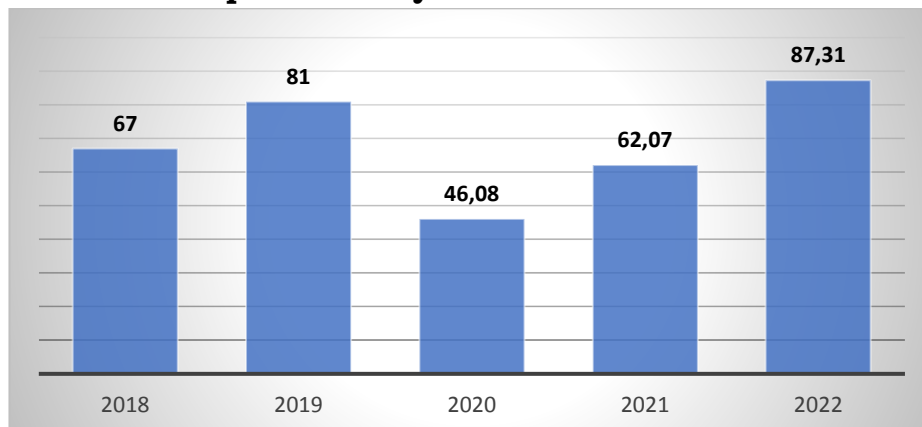


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

B.5. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Capaian Indikator persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar itu cukup fluktuatif dimana Tahun 2018 mencapai 67% dan kembali meningkat di Tahun 2019 mencapai 81%. Tahun 2020 persentase tersebut turun mencapai 46.08%. namun di Tahun 2021 dan 202 masing-masing mencapai 62.07% dan 81.73%.

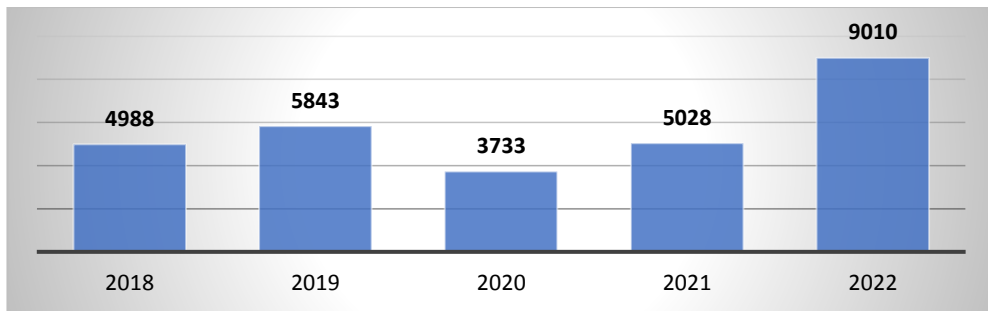
Grafik 2.29.
Capaian Indikator Persentase Orang terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

Berikut grafik persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kota Pontianak.

Grafik 2.30.
Trend Persentase Orang Terduga TBC

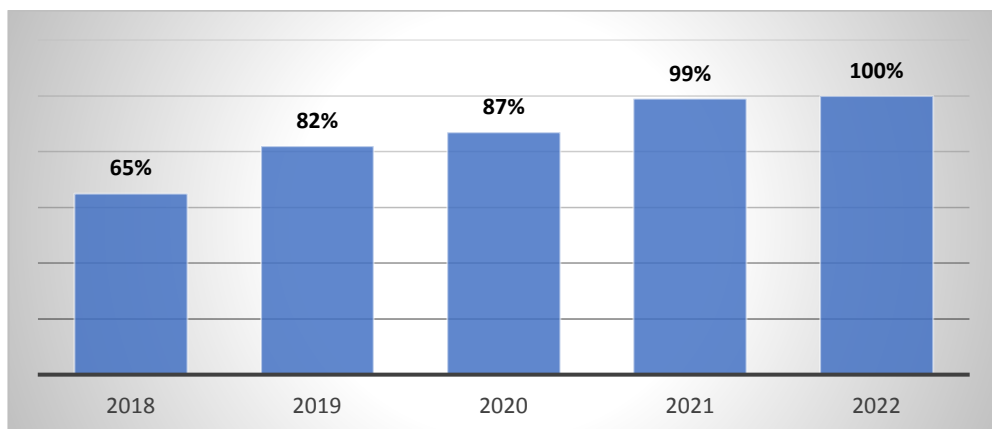


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

B.6. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Capaian Indikator persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar setiap tahun mengalami peningkatan. dimana Tahun 2018 mencapai 65% dan kembali meningkat di Tahun 2019 mencapai 82%. Tahun 2020 persentase tersebut meningkat mencapai 87%. namun di Tahun 2021 dan 2022 masing-masing mencapai 99% dan 100%. Yang artinya semakin baik kesadaran orang untuk memeriksakan diri pada layanan kesehatan.

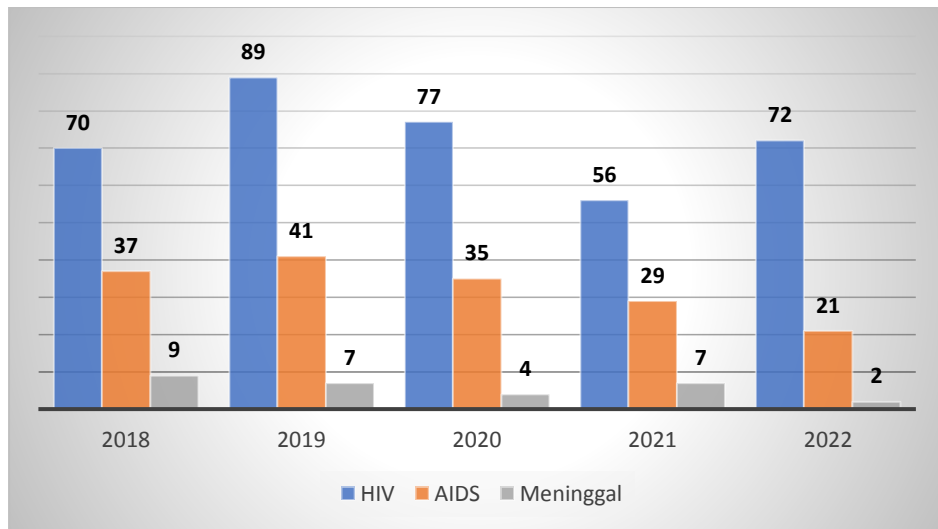
Grafik 2.31.
Persentase orang fengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

Berikut grafik trend insiden rate HIV di Kota Pontianak, dimana dari tahun-tahun sebelumnya mengalami tren naik dan turun. Tahun 2022 HIV mengalami kenaikan sebesar 72 dari tahun sebelumnya dan menurun pada AIDS dan yang meninggal masing-masing dengan angka 21 dan 2 di Tahun 2022.

Grafik 2.32.
Trend HIV di Kota Pontianak

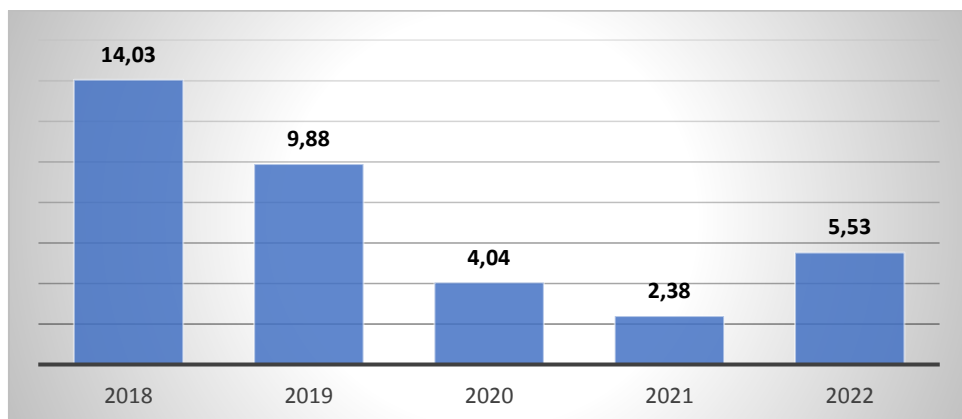


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

B.7. Insiden Rate DBD Per 100.000 penduduk

Capaian Indikator Insiden Rate DBD Tahun 2018 mencapai 14.03% kembali menurun di Tahun 2019 mencapai 9.88% dan menurun kembali berturut-turut di Tahun 2020 dan 2021 masing-masing 4.04% dan 2.38%. Tahun 2022 insiden rate DBD kembali meningkat mencapai 5.53%

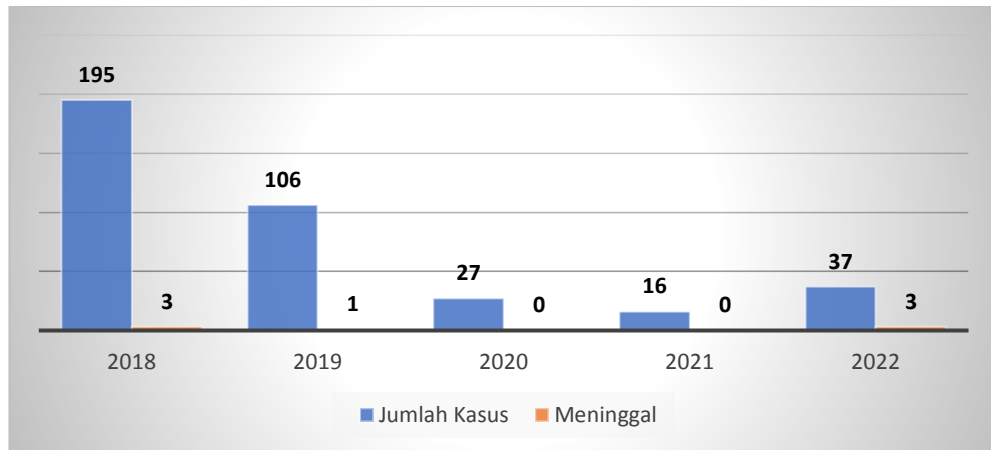
Grafik 2.33.
Capaian Indikator Insiden Rate DBD Kota Pontianak



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

Berikut trend DBD di Kota Pontianak dengan jumlah kasus Tahun 2018 mencapai 195 kasus, meninggal 3 kasus. Namun kembali menurun di Tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan masing-masing (106 kasus, 1 meninggal), (27 kasus, 0 meninggal), dan (16 kasus, 0 meninggal). Untuk Tahun 2022 kasus trend DBD kembali meningkat mencapai 37 kasus dan 3 meninggal.

Grafik 2.34.
Trend DBD di Kota Pontianak

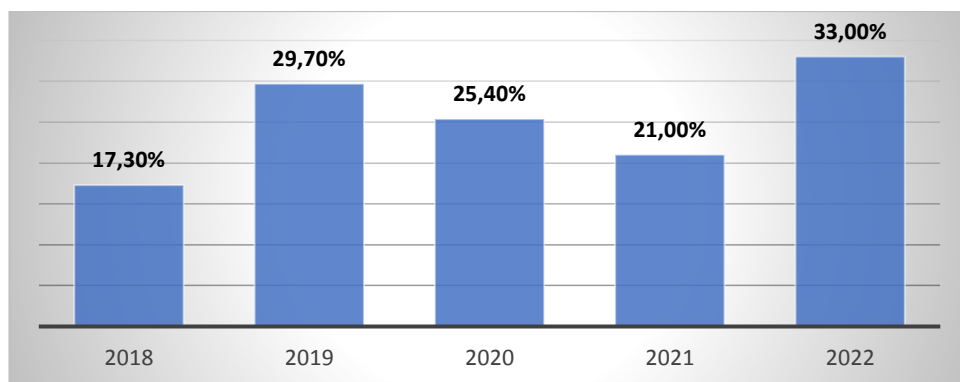


Sumber: Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

B.8. Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pengobatan Standar

Capaian Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pengobatan Standar di Tahun 2018 mencapai angka 17.30%, di Tahun 2019 sedikit meningkat mencapai 29.70% dan Kembali menurun berturut-turut di Tahun 2020 dan 2021 masing-masing mencapai 25.40% dan 21%. Namun kembali meningkat di Tahun 2022 mencapai 33%.

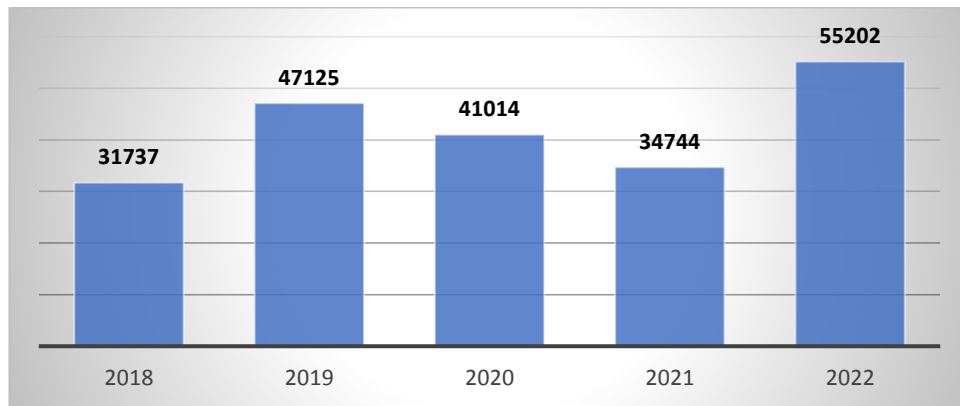
Grafik 2.35.
Capaian Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pengobatan Standar



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

Berikut trend Prevalensi penderita hipertensi di Kota Pontianak mempunyai angka yang befluktuatif dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022. Tahun 2018 mencapai sebesar 31.737 kembali meningkat ditahun 2019 dan 2020 masing-masing mencapai angka 47.125 dan 41.014. Namun menurun di Tahun 2021 sebesar 34.744. Tahun 2022 kembali meningkat sebesar 55.202.

Grafik 2.36.
Trend Pravalensi Penderita Hipertensi
Di Kota Pontianak

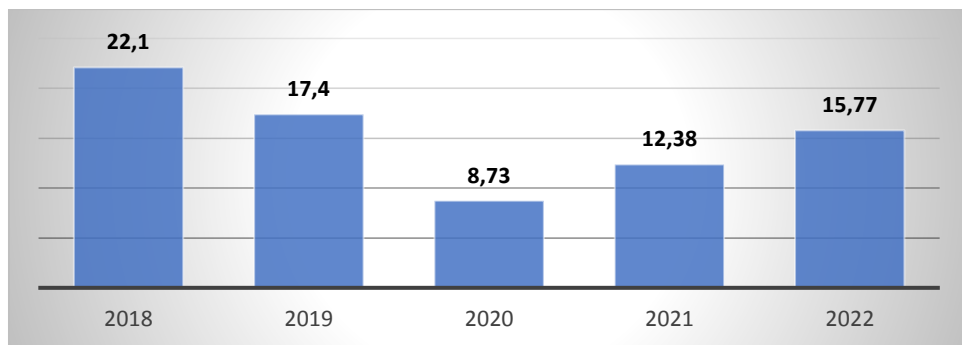


Sumber: Seksi pencegahan penyakit dinas kesehatan Kota Pontianak, 2023

B.9. Angka Stunting Balita

Capaian Indikator pada Tahun 2018 mencapai 22,1% dan mulai menurun pada Tahun 2019 hingga Tahun 2020 mencapai 17,4% dan 8,73%, dan kembali meningkat di Tahun 2021 dan 2022 mencapai angka masing-masing 12,38% dan 15,77%.

Grafik 2.37.
Capaian Indikator Angka Stunting Balita

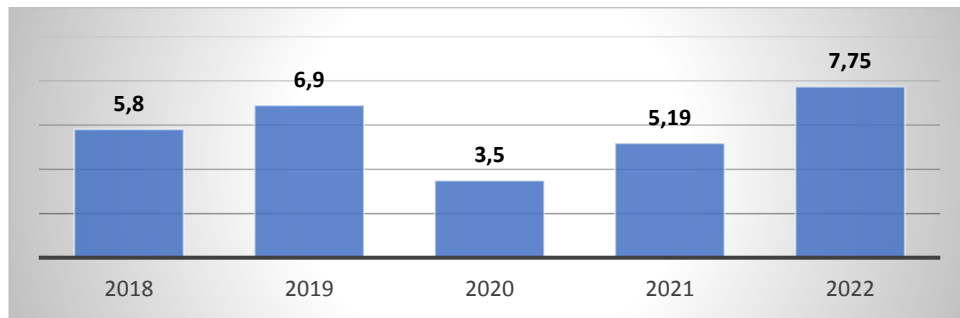


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

B.10. Angka Wasting Balita

Capaian indikator angka wasting balita Kota Pontianak Tahun 2018 hingga Tahun 2022 mengalami fluktuatif. Dimana pada Tahun 2018 mencapai 5,8% dan meningkat di Tahun 2019 mencapai angka 6.9%. namun di Tahun 2020 dan 2021 tercatat sebesar 3,5% dan 5,19%. Tahun 2022 angka wasting balita kembali meningkat mencapai 7,75%

Grafik 2.38.
Capaian indikator Angka Wasting Balita
Kota Pontianak

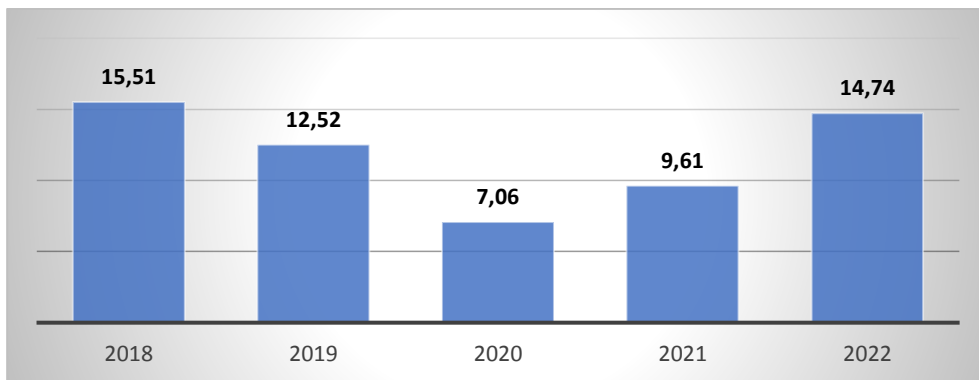


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

B.11. Angka Underweight Balita

Capaian indikator Angka Underweight Balita di Kota Pontianak cukup fluktuatif. Pada Tahun 2018 mencapai 15,51% kemudian turun menjadi 12,5% Tahun 2019 dan menurun hingga mencapai 7,06% di Tahun 2020, sedangkan untuk Tahun 2021 berada pada capaian 9,61% namun meningkat di Tahun 2022 mencapai 17,74%.

Grafik 2.39.
Capaian Indikator Angka Underweight Balita
Kota Pontianak

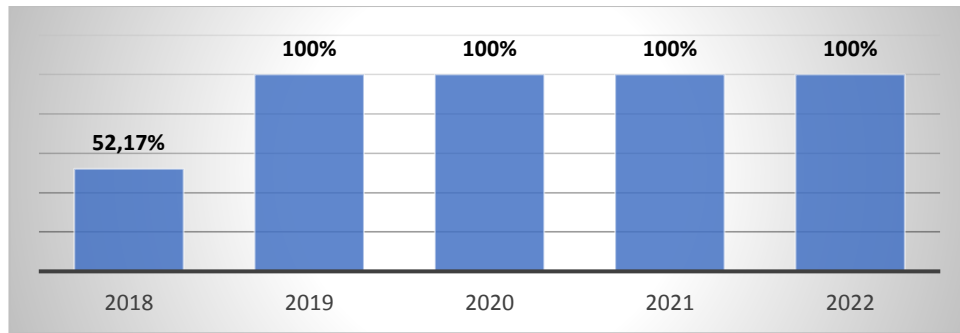


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

B.12. Akreditasi Fasilitas Kesehatan

Indikator Akreditasi Fasilitas Kesehatan sejak Tahun 2019 telah mencapai 100% hingga Tahun 2022. Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Pontianak berjalan baik didukung oleh komitmen manajemen dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Pembinaan yang dilakukan kepada seluruh Fasilitas Kesehatan dengan terus mendorong upaya mempercepat proses peningkatan mutu dan pelayanan Fasilitas Kesehatan di Kota Pontianak.

Grafik 2.40.
Capaian Indikator Akreditasi Fasilitas Kesehatan



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

Dari Table 2.25 ketersediaan fasilitas di Kota Pontianak, rumah sakit ada 6 jenis fasilitas kesehatan di Kota Pontianak diantaranya.

Tabel 2.25.
Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kota Pontianak

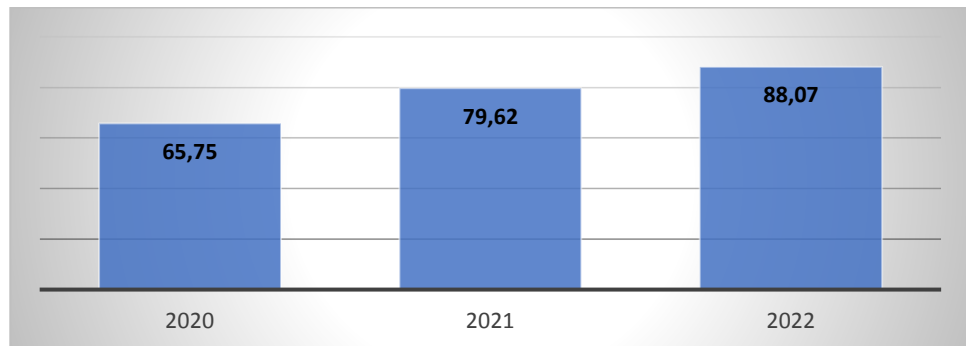
JENIS FASILITAS KESEHATAN	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Sakit Umum	10	10	10	10	12
Rumah Sakit Khusus	1	1	1	0	0
Rumah Sakit Bersalin	2	2	2	2	2
Puskesmas	23	23	23	23	23
Klinik/Balai Kesehatan	38	36	36	36	36
Posyandu	290	293	294	293	293

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. "Pontianak Dalam Angka 2023"

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C.1. Indeks Infrastruktur

Grafik 2.41.
Indeks Infrastruktur Kota Pontianak



Sumber: Diolah dari data Dinas PUPR dan Dinas PRKP, 2023

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen *City Development Index* (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki

akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik.

Indeks infrastruktur Kota Pontianak berada dalam tren meningkat. Pada Tahun 2020 telah mencapai 65,75 namun meningkat 13,87 poin pada Tahun 2021 menjadi 79,21. Pada Tahun 2021 indeks insfratraktur Kota Pontianak naik 8,45 poin menjadi 88,07. Tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya dan telah melampaui target RPJMD sebesar 79,22 di Tahun 2022.

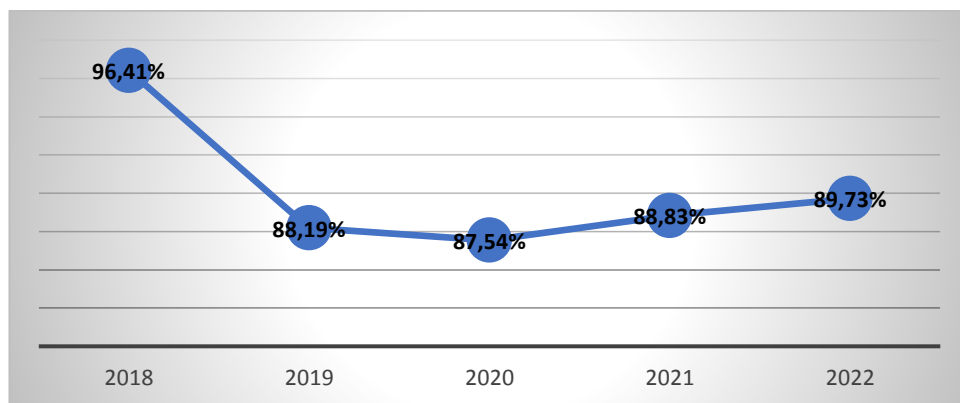
C.2. Rasio Infrastruktur Jalan

Berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Rasio Infrastruktur Jalan Kota Pontianak di Tahun 2018 mencapai angka 96,41%, untuk Tahun 2019 mengalami penurunan dengan angka 88,19% sedangkan Tahun 2020 menurun dengan capaian angka 87,54% dan kembali sedikit meningkat di Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan masing-masing capaian 88,83% dan 89,73%. Indikator ini diukur dari persentase panjang jalan Kota Pontianak dalam kondisi baik dan kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat terhadap total panjang jalan kota.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat Meningkatkan Rasio Infrastruktur Jalan di Kota Pontianak adalah:

- Mengoptimalkan perbaikan perbaikan jalan secara rutin, berkala dan periodic
- Meningkatkan Kualitas kinerja jalan
- Mengoptimalkan pemeliharaan jembatan
- Membangun trotoar
- Membangun akses jalan-jalan baru

Grafik 2.42.
Trend Rasio Infrastruktur Jalan
Kota Pontianak

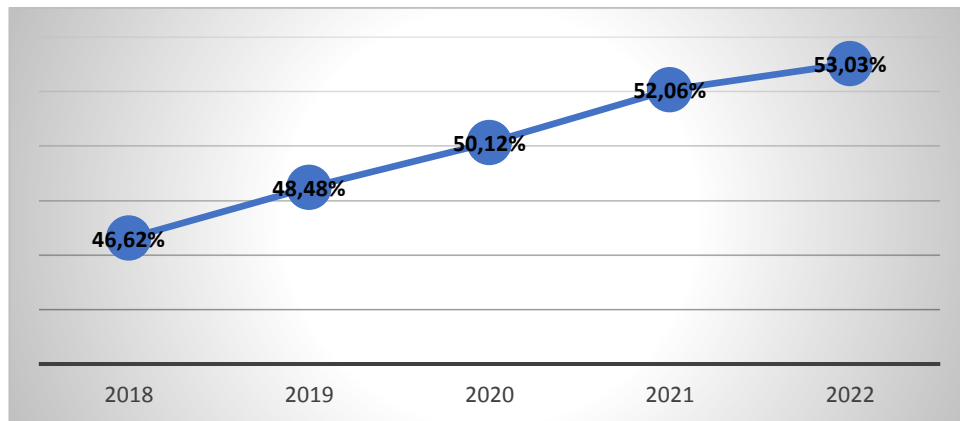


Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2023

C.3. Rasio Infrastruktur Saluran Drainase

Untuk Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Rasio Infrastruktur Saluran Drainase Kota Pontianak Tahun 2018 mencapai angka capaian 46,62% dan sedikit meningkat di Tahun 2019 mencapai angka 48,48%. Ada peningkatan di Tahun 2020 dan 2021 dengan capaian angka sebesar 50,12% dan 52,06%. Sementara di Tahun 2022 kembali meningkat mencapai angka 53,03%. Indikator ini diukur dari persentase Panjang saluran drainase dengan kualitas baik atau rata-rata capaian pelayanan insfratraktur drainase perkotaan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat meningkatkan Rasio Infrastruktur Saluran Drainase di Kota Pontianak adalah melalui prioritas yang berimbang antara pembangunan saluran drainase/koker dengan pembangunan turap.

Grafik 2.43.
Trend Rasio Infrastruktur Saluran Drainase Kota Pontianak



Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2023

Tabel 2.26.
Panjang Saluran Drainase Kota Pontianak 2022

No	Nama Saluran	Panjang	KONSTRUKSI				
			Tanah	Pasangan	Beton	Turap Beton	Turap Kayu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRIMER	131.870,00	81.773,68	2.806,00	373,00	14.747,32	32.170,00
2	SEKUNDER	127.220,00	61.009,62	43.575,75	15.476,80	3.197,83	3.960,00
3	TERSIER	345.715,00	146.369,19	65.695,75	117.123,13	16.526,93	-
	PANJANG SELURUHNYA	604.805,00	289.152,49	112.077,50	138.273,72	34.472,08	36.130,00

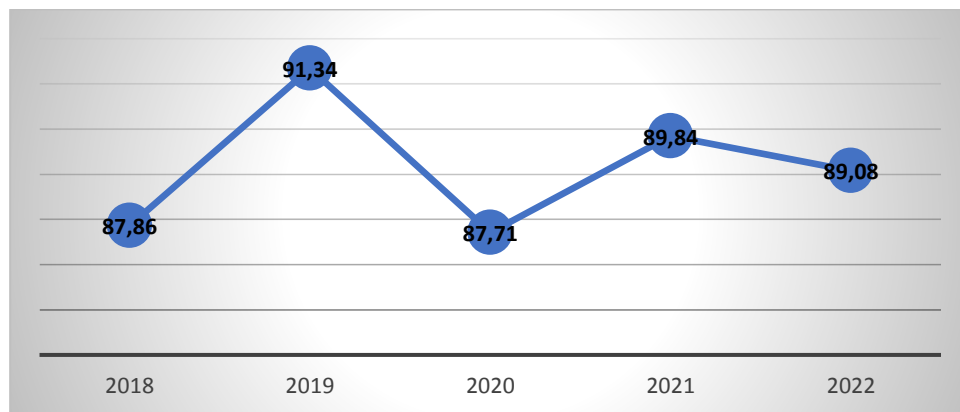
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2023

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat meningkatkan Rasio Infrastruktur Saluran Drainase di Kota Pontianak adalah melalui prioritas yang berimbang antara pembangunan saluran drainase/koker dengan pembangunan turap.

C.4. Persentase Warga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Pada Tahun 2018-2022 Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggunakan indikator Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Dan capaian target indikator Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari Tahun 2018 telah mencapai 87,86% terus meningkat hingga mencapai 91,34% pada Tahun 2019. Dan menurun di Tahun 2020 mencapai Angka 87,71%, dan meningkat capaian persentase warrga yang memperoleh air minum sehari-hari Tahun 2021 mencapai 89,84%. Sementara untuk Tahun 2022 penurunan kembali mencapai 89,08%.

Grafik 2.44.
Persentase Warga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2023

C.5. Persentase Kantor Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik

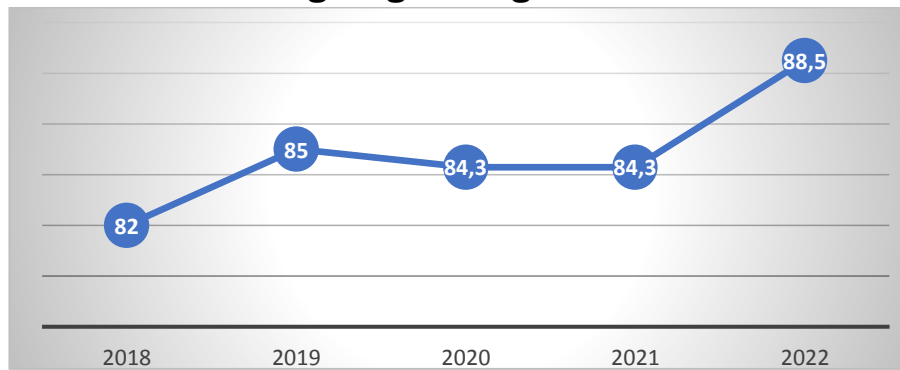
Indikator presentase kantor perangkat daerah dalam kondisi baik baru di Tahun 2021 mencapai angka 66,15% kembali meningkat di Tahun 2022 dengan angka mencapai 80,96%. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat meningkatkan persentase kantor yaitu:

- Mengoptimalkan perbaikan-perbaikan Gedung pemerintah
- Membangun Gedung-gedung pemerintah
- Memelihara bangunan Gedung pemerintah

C.6. Persentase Kesesuaian Bangunan dan Lingkungan dengan RTRW

Presentase Kesesuaian Bangunan dan Lingkungan dengan RTRW Kota Pontianak terus meningkat sejak pembenahan data dan perumusan indikator yang dilaksanakan pada Tahun 2018 dan dilanjutkan dengan pengawasan dan pengendalian RTRW yang lebih baik. Dengan capaian Tahun 2018 mencapai 82% di Tahun 2019 mencapai 85%. namun sedikit menurun di Tahun 2020 dan 2021 menjadi 84,3% dan kembali meningkat di Tahun 2022 mencapai 88,5%.

Grafik 2.45.
Persentase Kesesuaian Bangunan dan Lingkungan dengan RTRW



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2023

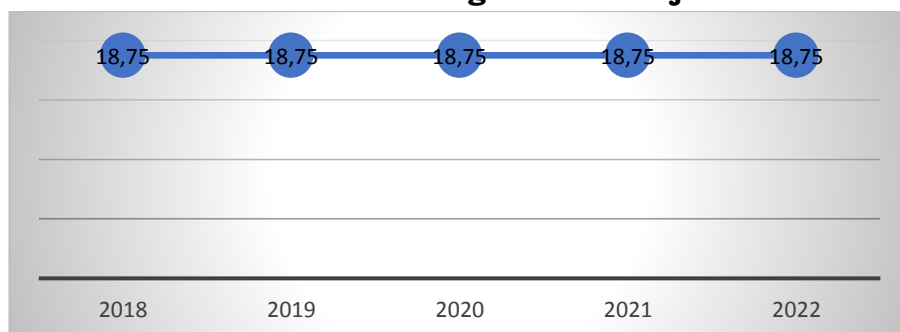
C.7. Persentase Ruang Terbuka Hijau

Persentase Ruang Terbuka Hijau di Tahun 2018 Ruang Terbuka Hijau hingga Tahun 2022 memiliki angka yang sama yaitu 18,75%. Hal ini dapat dijelaskan luasan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pontianak tidak pernah mengalami penambahan. Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak hasil Interpretasi meliputi Kota Jalur Hijau, Lapangan Olahraga, Pemakaman Umum dan Agrowisata/KSA.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak dapat meningkatkannya.

- Menetapkan Kawasan yang tidak boleh dibangun
- Membangun Lahan Hijau (Hub) Baru, perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pembelian lahan
- Mengembangkan Koridor Ruang Terbuka Hijau Kota
- Mengakui sisi Ruang Terbuka Hijau Privat, menjadi Bagian Ruang Terbuka Hijau Kota
- Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau Kota melalui refungsi Ruang Terbuka Hijau Eksisting
- Menghijaukan Bangunan
- Menyusun Kebijakan Hijau

Grafik 2.46.
Persentase Ruang Terbuka Hijau

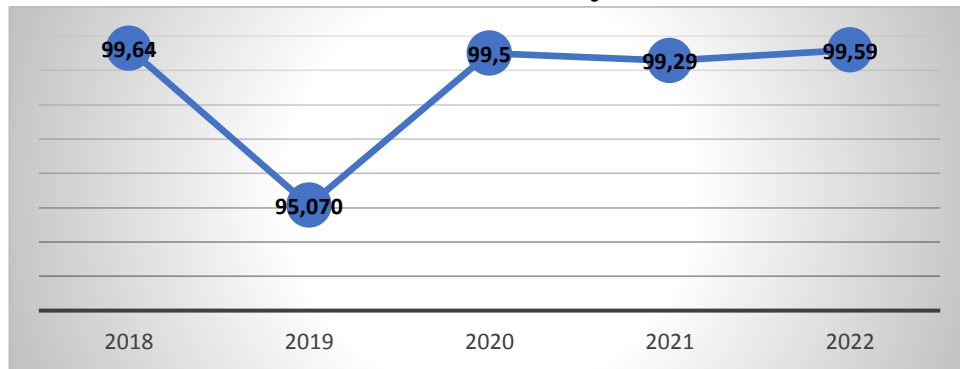


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2023

D. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

D.1. Persentase Rumah Layak Huni

Grafik 2.47.
Persentase Rumah Layak Huni

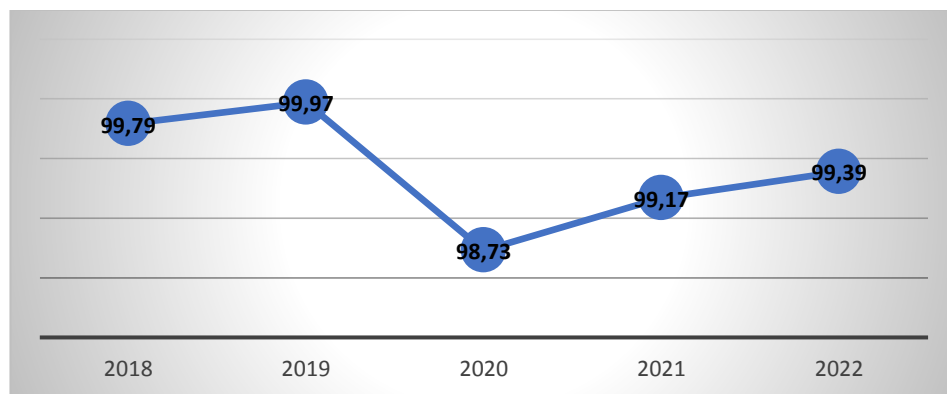


Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2023

Persentase Rumah Layak Huni Kota Pontianak mencapai 99,64% di Tahun 2018. Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2019 mencapai 95,07%, realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan update data pada Tahun 2022 yang dilakukan Bidang kawasan permukiman, jumlah rumah se-Kota Pontianak sebanyak 160.713 unit, dengan jumlah rumah layak huni sebanyak 160.059 unit. Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 1.169 unit, yang mendapat bantuan dari pemerintah sebanyak 515 unit dan tersisa sebanyak 654 unit. Sehingga persentase rumah layak huni yang diperoleh dengan membandingkan antara jumlah rumah layak huni 160.059 unit dengan jumlah rumah se-Kota Pontianak 160.713 unit maka persentasenya sebesar 99,59%.

D.2. Persentase Kawasan Tidak Kumuh

Grafik 2.48.
Persentase Kawasan Tidak Kumuh



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2022

Luas wilayah Kota Pontianak 11.830 Ha dengan luas wilayah tanpa kumuh sebesar 99,79% (11.805,38 Ha) Tahun 2018. Pada Tahun 2019 luas wilayah tanpa kumuh kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 99,97% (11.826,51 Ha). Berdasarkan SK nomor 910/D-PRKP/Tahun 2021 tentang penetapan lokasi

perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kota Pontianak Tahun 2021 bahwa Tahun 2020 luas wilayah tanpa kumuh sedikit menurun sebesar 98,73% (11.679,84 Ha) dan luas wilayah tanpa kumuh kembali meningkat di Tahun 2021 sebesar 99,17% (11.732.84 Ha). Di Tahun 2022 luas wilayah tanpa kumuh meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 99,39%(11.759,351 Ha).

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah, yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai implementasinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2005. Pelayanan umum urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat diukur melalui indikator sebagai berikut.

Tabel 2.27.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Kejadian bencana yang dapat ditanggulangi	0	0	0	0	0
2.	Persentase Kejadian kebakaran yang dapat ditanggulangi	100	100	100	100	100
3.	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA	100	100	100	100	100
4.	Persentase penduduk yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100
5.	Persentase Bencana yang ditanggulangi	100	100	100	100	100
6.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.43	0.47	0.47	0.45	0.45
7.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	85.66	85.66	85.66	85.66	90.63

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak dan Dinas BPBD Kota Pontianak, 2023

Capaian kinerja indikator Persentase Kejadian bencana yang dapat ditanggulangi selama Tahun 2018 sampai Tahun 2022 adalah 0%, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Persentase Kejadian kebakaran yang dapat ditanggulangi, Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA dan Persentase penduduk yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 telah mencapai 100%.

Sedangkan indeks kapasitas daerah (IKD) Tahun yang bertujuan untuk mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Tahun 2018 IKD mencapai angka 0,43 dan sedikit meningkat di Tahun 2019 dan 2020 masing-masing mencapai angka 0,47 sedangkan Tahun 2021 dan 2022 kembali menurun

dengan capaian masing-masing sama 0,45 artinya semakin tinggi (maksimal 1) nilai indeksinya, maka semakin tinggi juga ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana. Tahun 2018 hingga Tahun 2022 masuk dalam katagori sedang. Untuk capaian indeks resiko bencana dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021 sama-sama mencapai angka 85,66. Namun untuk Tahun 2022 indeks resiko bencana mencapai 90,63 capaian ini telah diatas target RPJMD yang ditetapkan 79,00.

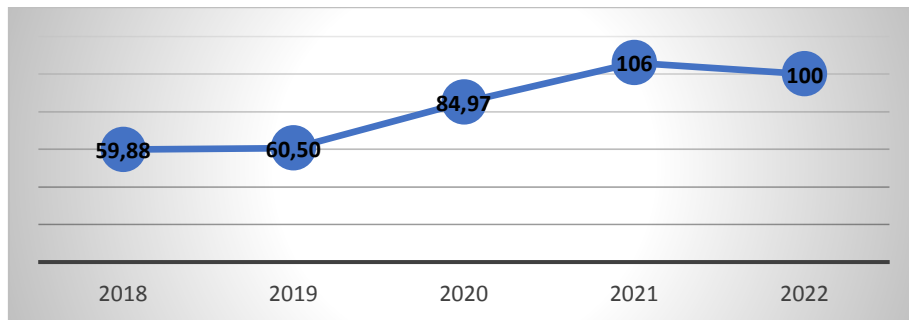
F. Urusan Sosial

F.1. Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terdapat pencapaiin yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2018 sebesar 59,88% meningkat di Tahun 2019 menjadi 60,50%, Tahun 2020 menjadi 84,97% dan 106% di Tahun 2021. Tahun 2022 menurun hingga 100%.

Grafik 2.49.

Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



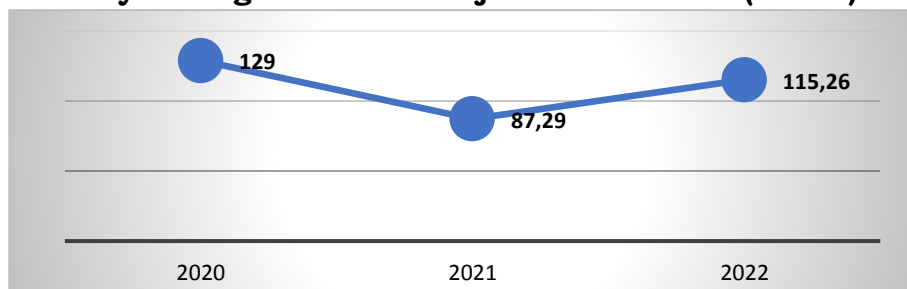
Sumber: Dinas Sosial Kota Pontianak, 2023

F.2. Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tahun 2020 dan 2021 indikator persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan capaian Tahun 2020 sebesar 129%, namun di Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 87,29%, sedangkan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 115,26%.

Grafik 2.50.

Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

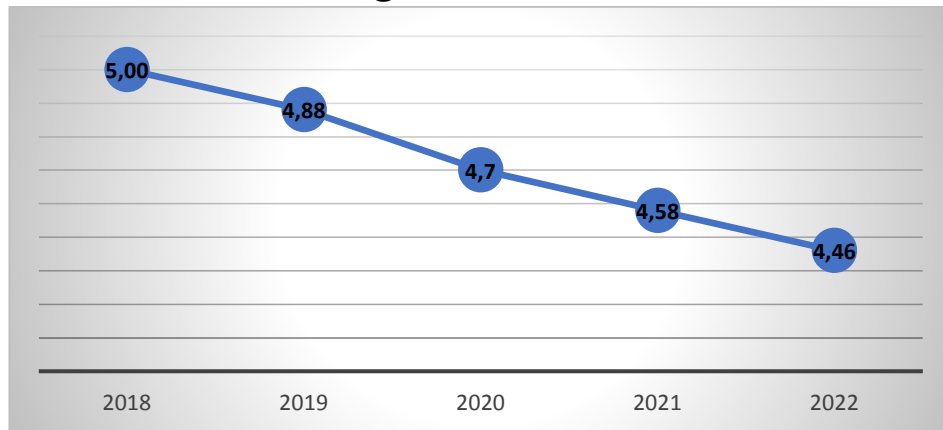


Sumber: Dinas Sosial Kota Pontianak, 2023

F.3. Angka Kemiskinan

Persentase Angka Kemiskinan pada Tahun 2018 sebesar 5,00%. Dalam kurun waktu 2018 sampai 2022 mengalami tren penurunan sebesar 0,54 poin menjadi 4,46%. Hal ini menunjukkan terjadinya pengurangan jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak dari 31.760 jiwa menjadi 29.610 jiwa atau turun sebesar 2.150 jiwa. Capaian ini sudah melebihi target RPJMD Kota Pontianak untuk Tahun 2022, yaitu sebesar 4,80%.

Grafik 2.51.
Angka Kemiskinan



Sumber: Dinas Sosial Kota Pontianak, 2023

2.4.2. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Indikator kinerja pelayanan umum urusan tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.28.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Ketenagakerjaan

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022
1.	IKM Lama Rata-Rata Waktu Pelayanan	1 Hari	6,5Jam	6,5 Jam	6,5 Jam	6,5 Jam
2.	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	50,53%	37,35%	59,45%	94,00%	86%
3.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan	42,07%	61,72%	28,28%	106,00%	99%
4.	Rasio Penduduk Bekerja	89,63%	90,87%	87,64%	87,62%	90,08%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Pontianak 2023

Indikator IKM Lama Rata-Rata Waktu Pelayanan di Tahun 2018 selama 1 hari, kemudian mengalami peningkatan lagi di Tahun 2019-2022 mencapai 6,5 jam. Sehingga untuk Tahun 2019-2022 cukup stabil. Indikator Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Tahun 2018 sebesar 50,53%, dan kemudian mengalami penurunan di Tahun 2019 menjadi 37,35%. Penurunan terjadi karena Kasus Perselisihan Hubungan Industrial pada Tahun 2019 telah dilimpahkan kepada Mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Barat. Pada Tahun 2020 dan 2021 kembali terjadi peningkatan besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama menjadi masing-masing 59,45% dan 94.00%. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 86%.

Indikator Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan di Tahun 2018 sebesar 42,07%, kemudian mengalami peningkatan lagi di Tahun 2019 menjadi 61,72%. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan cukup tajam besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program aktif BPJS ketenagakerjaan menjadi 28,28%, dan kemudian mengalami peningkatan menjadi 106,00% di Tahun 2021. Pada Tahun 2022 besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan mengalami penurunan sebesar 99%.

Indikator Rasio Penduduk Bekerja mengalami tren yang fluktuatif. Pada Tahun 2018 Rasio Penduduk Bekerja Kota Pontianak sebesar 89,63% dan kembali meningkat pada Tahun 2019 sebesar 90,87%. Tahun 2020 dan 2021 berturut-turut kembali menurun sebesar 87,64% dan 87,62%. sedangkan di Tahun 2022 rasio penduduk bekerja sebesar 90,08%.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam pelaksanaan aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan indikator kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, sebagai berikut.

Tabel 2.29.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Utama	Target	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,98%	93,32%	93,81%	93,73%	94,01%	94,10%
Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya	Pratama	Pratama	Pratama	Madya

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak dan BPS Kota Pontianak 2023

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak Tahun 2018 sebesar 93,32%, dan meningkat sedikit di Tahun 2019 dan Tahun 2020 menjadi 93,81% dan 93,73%, kembali meningkat di Tahun 2021 menjadi 94,01%. Namun meningkat di Tahun 2022 mencapai 94,10%. Capaian ini menunjukkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak yang cukup baik karena hampir mencapai target yang telah ditentukan yaitu 93,98%. Capaian indikator kinerja Tingkat Capaian Kota Layak Anak pada Tahun 2018 telah mencapai Madya, namun berturut-turut pada Tahun 2019,2020 dan 2021 menjadi Pratama. Di Tahun 2022 tingkat capaian kota layak anak mencapai madya.

Capaian ini disebabkan oleh belum terlaksananya Konveksi Hak Anak (KHA), sulitnya mengumpulkan basis data gender dan anak, karena data dimiliki oleh lintas sektoral, masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan, belum tersedianya informasi untuk callcenter pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta belum maksimalnya peran sektor swasta dan dunia usaha dalam mendukung pencapaian Pontianak sebagai Kota Layak Anak. Untuk memperbaiki capaian ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak perlu melakukan:

1. Mengadakan Konvensi Hak Anak (KHA) yang melibatkan seluruh stackholder terkait, termasuk dari kementerian;
2. Memaksimalkan peran swasta dan dunia usaha dengan membentuk wadah;
3. Memaksimalkan peran masyarakat untuk mengkampanyekan dan menerapkan nilai – nilai yang menjunjung tinggi hak – hak anak untuk pencapaian Pontianak Sebagai Kota Layak Anak;
4. Memaksimalkan peran kader pendamping anak;
5. Menggalakan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan Kampanye Perlindungan Anak, melalui forum PUSPA, Forum Anak Daerah;
6. Membuat Call Center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.30.
Data Pengaduan Kasus Anak Kota Pontianak

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak Jalanan	0	0	0	0	0
2	Kekerasan Seksual	5	0	13	40	29
3	Trafficking	0	1	51	31	2
4	KDRT	1	14	12	3	1
5	Mediasi Anak Asuh	0	0	0	0	0
6	Anak Terlantar	2	0	1	0	18
7	Anak Punk	0	0	0	0	0
8	Pencurian	0	9	1	0	0
9	Kasus Media Sosial	0	1	0	0	0
10	Kabur dari Rumah	0	0	1	1	0
11	Pencabulan	0	37	38	0	0
12	Hak Kuasa Asuh	0	0	0	5	4
13	Bullying	0	8	3	0	0
14	Eksplotasi	0	2	0	32	9
15	Prostitusi	0	4	0	0	0
16	Fisik/Psikis	0	0	0	9	38
17	Lainnya	0	0	0	20	5
Jumlah		8	76	120	141	106

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2023

Data pengaduan kasus perempuan di Kota Pontianak terjadi 8 kasus pengaduan, dimana jumlah tersebut menurun dari Tahun 2022 yang mencapai 106 kasus dimana seluruhnya terjadi kasus di dalam rumah tangga (KDRT).

Tabel 2.31.
Data Pengaduan Kasus Perempuan Kota Pontianak

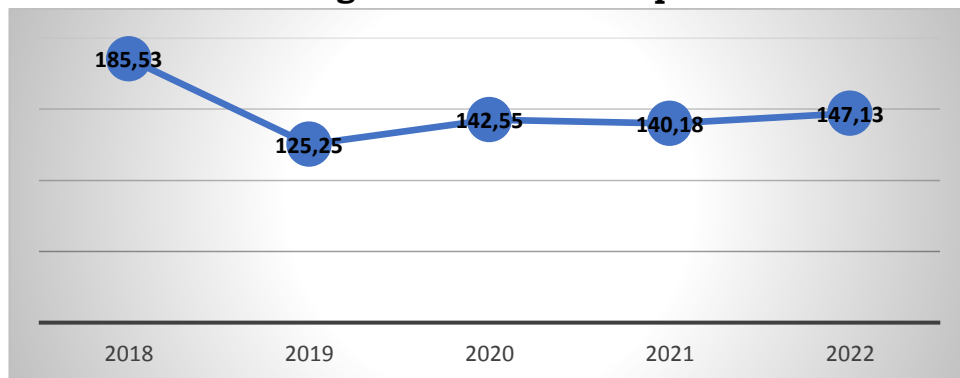
No	Jenis Kasus	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kekerasan Seksual	0	0	0	6	10
2	Trafficking	0	0	1	3	0
3	KDRT	4	13	4	18	6
4	Perempuan Terlantar	0	0	2	8	10
5	Pencabulan	0	0	0	0	0
6	Hak Kuasa Asuh	0	0	2	1	0
7	Fisik/Psikis	0	0	0	5	15
Jumlah		4	13	9	41	41

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2023

C. Urusan Pangan

Tahun 2018 persentase ketersediaan energi dan protein perkapita memiliki realisasi mencapai 185,53% dan kembali menunjukkan angka berfluktuatif di Tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan realisasi masing-masing mencapai 125,25%, 142,55% dan 140,18%. Dan Tahun 2022 ketersediaan energi dan protein mencapai 147,13% sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut maka ketersediaan energi dan protein di Kota Pontianak berada diatas ketersediaan pangan yang harus dipenuhi ketersediannya supaya tidak terjadi kekurangan ketersediaan pangan. Terjadinya fluktuasi ketersediaan pangan di Kota Pontianak dipengaruhi cuaca, produksi distribusi maupun kondisi perdagangan regional nasional maupun internasional.

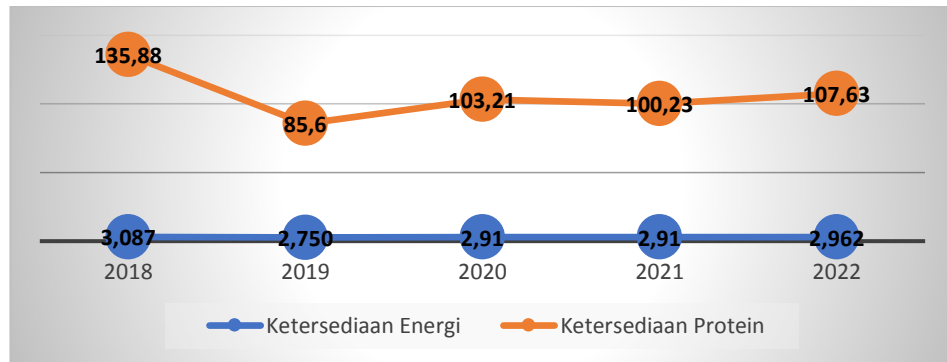
Grafik 2.52.
Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita



Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2023

Untuk mengetahui ketersediaan energi dan protein dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 mengalami fluktuasi, berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-X Tahun 2012 angka kecukupan gizi energi sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari dan Protein sebesar 63 gr/Kap/Hari.

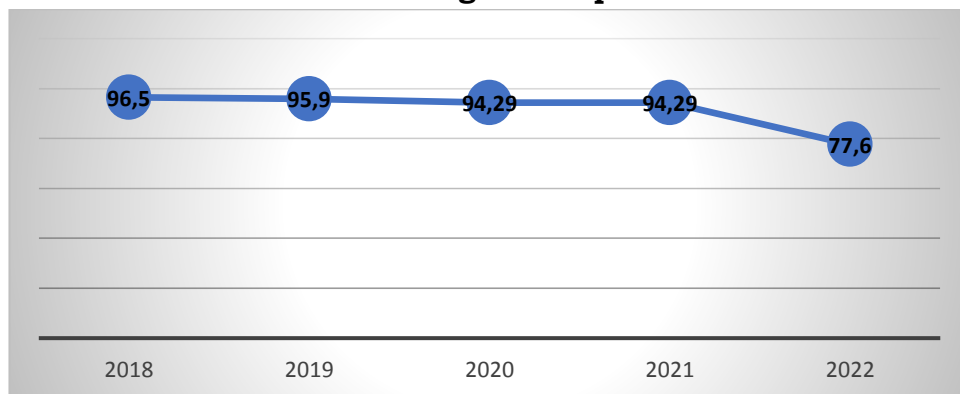
Grafik 2.53.
Ketersediaan Energi dan Protein



Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2023

Pada persentase peningkatan skor pola pangan harapan Tahun 2018 skor pola pangan harapan mencapai 96,50%. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 95,90% persentase peningkatan skor pola pangan harapan di Tahun 2020 dan 2021 sama masing-masing mencapai angka 94,29% dan di Tahun 2022 kembali menurun menjadi 77,6%. Indikator ini mengalami penurunan dikarenakan penurunan jumlah ketersediaan masing-masing jenis bahan pangan di Kota Pontianak yang antara lain disebabkan oleh penurunan jumlah pasokan akibat cuaca.

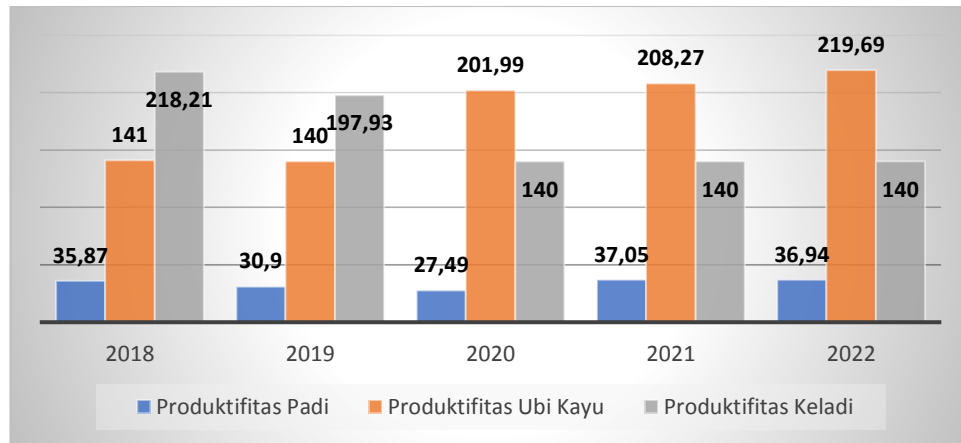
Grafik 2.54.
Persentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan



Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2023

Tahun 2021 indikator Produktivitas Padi memiliki realisasi 37,05% jika dibanding Tahun 2020 yaitu 27,49% dan realisasi Tahun 2022 yaitu 36,94% pencapaian kinerja indikator ini sudah melebihi target Kota Pontianak. Secara grafis untuk pencapaian di Tahun 2022 terus mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan salah satu upaya Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan produksi, produktivitas serta Indeks Pertanaman (IP) tanaman padi di Kota Pontianak adalah melalui penanaman padi di luar musim (padi gadu), dengan support sarana produksi pertanian kepada petani. Hal ini dilakukan karena petani, khususnya petani padi di Kota Pontianak hanya terbiasa menanam padi di musim besar (padi rendengan).

Grafik 2.55.
Produktivitas Tanaman Pangan



Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2023

Tahun 2018 sampai Tahun 2022 produksi padi, produksi ubi kayu dan produksi keladi pencapaian cukup stabil. Secara grafis untuk pencapaian di Tahun 2019 memang mengalami penurunan jika dibanding dengan Tahun 2018, hal ini dikarenakan Tanaman ubi kayu banyak ditanam di Kecamatan Pontianak Barat yang merupakan komoditas pangan yang banyak ditanam oleh petani selain padi. Manajemen kebun ubi kayu di Kecamatan Pontianak Barat sudah terbentuk sejak lama, sehingga petani dapat melakukan panen secara berjenjang sepanjang tahun. Salah satu ciri khas tanaman ubi kayu adalah rentan terhadap cuaca panas dalam jangka waktu lama terutama pada saat tanaman muda dan umbi ubi kayu yang tidak tahan terhadap cekaman air dalam jangka waktu yang lama. Hal ini yang menyebabkan produktivitas tanaman ubi kayu di Tahun 2019 mengalami penurunan dimana pada akhir tahun terdapat curah hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang menyebabkan beberapa petani gagal panen.

Indikator Produktivitas Keladi Tahun 2022 memiliki realisasi 140%, Tahun 2019 yaitu 140%. Secara grafis untuk pencapaian di Tahun 2022 memang mengalami tetap dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan tanaman keladi merupakan komoditas pangan unggulan bagi petani yang ada di Kecamatan Pontianak Utara. Mayoritas tanaman keladi yang ada di Kecamatan Pontianak Utara dibudidayakan di sekitaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Batu Layang. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 masing-masing mencapai 140 terjadi penurunan produktivitas keladi, disebabkan gagal panen sebagian lahan keladi yang ada di sebelah Barat TPA Batu Layang dikarenakan lahan tersebut terendam oleh air lindian dari TPA.

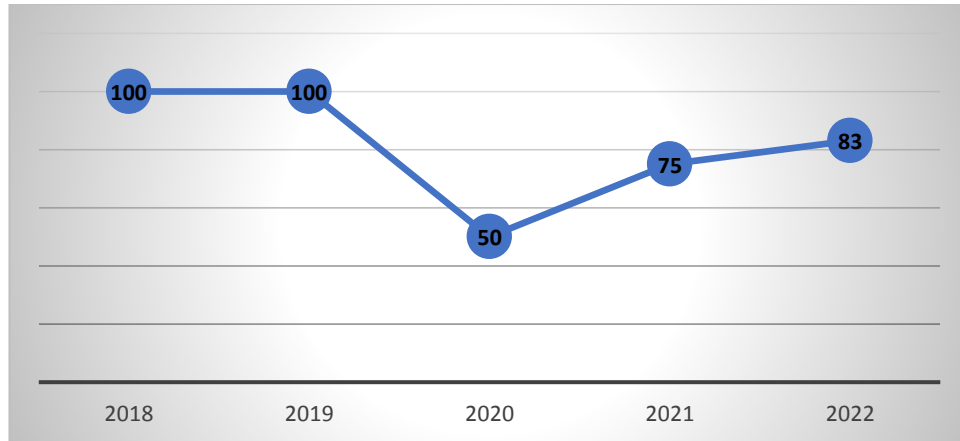
D. Urusan Pertanian

D.1 Persentase Penurunan Konflik, Sengketa dan Masalah Pertanian

Persentase penurunan konflik, sengketa dan masalah pertanian di Tahun 2018 dan 2019 yang masing-masing mencapai 100%, dan kembali menurun di Tahun 2020 mencapai 50%. Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 75%. Tahun

2022 permasalahan tanah sedikit meningkat menjadi 83%. Meningkatnya angka tersebut salah satunya adalah belum terselesaikan masalah sengketa tanah di pengadilan negeri dan masalah pengaduan jalan / pelebaran jalan dengan pemilik tanah.

Grafik 2.56.
Persentase Penurunan Konflik, Sengketa dan Masalah Pertanian



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2022

E. Urusan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya.

Pelayanan Umum Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dilaksanakan dengan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada Tahun 2020 yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Persentase Penanganan Sampah, dan Persentase Pengurangan Sampah dari Sumbernya. Capaian indikator kinerja tersebut Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.32.
Capaian Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	-	50,00	55,56	56,05	59.84
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	-	80,82	79,91	85,75	85.68
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	-	39,62	33,55	29.52	27.64
4	Indeks Kualitas Lingkungan HIDUP (IKLH)	Indeks		55,094	60,60	62,27	63.25
5	Persentase Pengelolaan Sampah	%	-	97,62	86,22	98.61	97.67
6	Persentase Pengurangan Sampah dari Sumbernya	%	-	5,51	8,30	22.66	24.20
7	Peresentase Sampah Yang Ditangani	%	-	92,11	77,92	75,94	73,47

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2023

Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh data capaian 55,56 meningkat

menjadi 56,05 dan 59,84 masing-masing di Tahun 2021 dan 2022. Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh data capaian 79,91 pada Tahun 2020 dan meningkat menjadi 85,75 pada Tahun 2021. Namun sedikit menurun di Tahun 2022 menjadi 85,68. Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diperoleh data capaian sebesar 33,55 pada Tahun 2020 dan 29,32 pada Tahun 2021. Namun di Tahun 2022 IKTL menurun menjadi 27,64. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kota Pontianak berada dalam tren meningkat. Pada Tahun 2019 mencapai 55,094 dan meningkat sebesar 5,51 poin pada Tahun 2020 menjadi 60,60 namun masih dibawah target RPJMD yang ditetapkan 66,3. Pada Tahun 2021 kembali meningkat sebesar 1,67 poin menjadi 62,27 dan berhasil melampaui target RPJMD yang ditetapkan sebesar 61,9. Tahun 2022 sedikit meningkat sebesar 63,25.

Capaian Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2019 sebesar 97,62 %, pada Tahun 2020 sebesar 86,22 %, Tahun 2021 sebesar 98,54% dan di Tahun 2022 menjadi 73,47%. Capaian Indikator Persentase Penanganan Sampah Tahun 2019 sebesar hingga 92,11, pada Tahun 2020 sebesar 77,92 %, Tahun 2021 sebesar 75,94% dan di Tahun 2022 menjadi 97,67%. Pengelolaan Sampah dibagi dua yaitu Pengurangan Sampah dan Penanganan sampah. Upaya Penanganan Sampah ini dilakukan oleh Pemerintah. Pengukuran pengurangan sampah dari sumber dilakukan untuk mengetahui jumlah sampah yang berkurang karena adanya upaya 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) yang dilakukan oleh Masyarakat. Pengurangan Sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, selama empat tahun terakhir pengurangan sampah dari sumbernya menunjukkan pergerakan yang berfluktuasi. Pada Tahun 2019 sampah yang berhasil dikurangi dari sumbernya hanya sebesar menjadi 5,51 %, pada tahun 2020 sebesar 8,30%. Pada Tahun 2021 terjadi pengurangan yang cukup signifikan menjadi 22,66 % dari Tahun sebelumnya yang hanya mengalami pengurangan sebesar 8,3% saja. Tahun 2022 pengurangan sampah dari sumbernya mencapai 24,20%. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Capaian persentase sampah yang ditangani di Kota Pontianak Jumlah sampah semakin bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Akibatnya, sampah menjadi menumpuk dan menimbulkan berbagai permasalahan. Untuk mengatasinya, diperlukan penanganan sampah dengan baik. Penangan sampah merupakan kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Kegiatan penanganan sampah dapat dimulai dari sumber sampah hingga tempat pemrosesan akhir. Data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan persentase sampah yang ditangani menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berhasilnya upaya pengurangan sampah di masyarakat. Pengurangan persentase

sampah yang ditangani ini diakibatkan karena semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya.

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didapatkan berdasarkan jumlah penduduk yang teregistrasi baik menggunakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun dari identitas lainnya yang tinggal di Kota Pontianak dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah penduduk Kota Pontianak berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 yaitu sebanyak 672.727 jiwa. Jika dilihat dari Kecamatannya, jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kecamatan Pontianak Barat yaitu sebanyak 150.898 jiwa dari jumlah penduduk total, dilanjutkan oleh Kecamatan Pontianak utara sebanyak 145.522 jiwa dari jumlah penduduk total, kemudian terbanyak ketiga adalah kecamatan Pontianak Kota sebanyak 126.560 jiwa dari jumlah penduduk total, keempat adalah Kecamatan Pontianak Timur dengan penduduk sebanyak 107.275 jiwa dari jumlah penduduk total, kelima adalah Kecamatan Pontianak Selatan dengan penduduk sebanyak 93.527 jiwa dari jumlah penduduk total dan terakhir adalah Kecamatan Pontianak Tenggara dengan penduduk sebanyak 49.097 jiwa atau sebesar dari jumlah penduduk total.

Tabel 2.33.

Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2018 hingga 2022

No	Indikator Kinerja Utama	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	98,19	98,04	96,00	100,00	99,81
2	Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	85,61	97,67	96,11	98,51	96,31
3	Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	94,08	90,19	98,01	96,62	99,98
4	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	79,76	79,08	32,61	99,31	99,43
5	Tingkat Keakurasian Data Kependudukan	99,58	99,97	0	100,00	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, 2022

Tabel 2.34.

Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja Utama	2021 %	2022 %
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK	98.02	99,81
2	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP	99.40	96,31
3	Persentase Anak Usia 0-16 Tahun yang Sudah Memiliki KIA	33.20	48,02
4	Persentase Penduduk Non Permanen yang Memiliki Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	97.56	100,00
5	Persentase Penduduk berusia 0-18 yang memiliki Akta Kelahiran	96.42	99,98
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	61.00	99,78
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai	74.65	44,14
8	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	22.80	99,74
9	Persentase Penduduk yang Meninggal yang memiliki Akta Kematian	98.22	94,43
10	Persentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	66.67	68,75
11	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk Kepentingan Pembangunan	100	100
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baik	Baik

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, 2023

1. Persentase Keluarga yang memiliki KK

Persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) sedikit meningkat ditahun sebelumnya dimana di Tahun 2021 mencapai 98.02% dan di Tahun 2022 mencapai 99.81%. Dengan target capaian di Tahun 2022 sebesar 96.00%.

2. Persentase Penduduk yang memiliki KTP

Persentase penduduk yang memiliki KTP jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menurun dimana Tahun 2021 mencapai 99.40% dan di Tahun 2022 mencapai 96.31%. Dengan target capaian di Tahun 2022 sebesar 96.00%.

3. Persentase anak usia 01-16 Tahun yang sudah memiliki KIA

Persentase anak usia 01-16 tahun yang sudah memiliki KIA jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Tahun 2021 33.20% dan di Tahun 2022 mencapai 48.02%. Dengan target capaian di Tahun 2022 sebesar 25.00%.

4. Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen

Persentase penduduk non permanen yang memiliki surat tanda bukti pendataan penduduk non permanen jika dibandingkan ditahun sebelumnya Tahun 2021 mencapai 33.20% dan Tahun 2022 mencapain 100%. Dengan target capaian di Tahun 2022 sebesar 98.00%.

5. Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran

Persentase penduduk berusia 0-18 tahun ang memiliki akta kelahiran jika dibandingkan ditahun sebelumnya Tahun 2021 mencapai 96.42% dan di Tahun 2022 mencapai 99,8%. Dengan target capaian di Tahun 2022 sebesar 93.00%.

6. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan jika dibandingkan ditahun sebelumnya Tahun 2021 mencapai 61,00% dan di Tahun 2022 mencapai 99,78%. Dengan target capaian di Tahun 2022 sebesar 55,00%.

7. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai

Persentase penduduk yang memiliki akta cerai jika dibandingkan di tahun sebelumnya Tahun 2021 mencapai 74,65% dan di Tahun 2022 mencapai 44,14%. Dengan capaian target capaian di Tahun 2022 sebesar 35,00%.

8. Persentase Anak yang memiliki Dokumen Perubahan Status

Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status jika dibandingkan dari tahun sebelumnya Tahun 2021 mencapai 22.80% dan di Tahun 2022 mencapai 99.74%. Dengan target capaian di Tahun 2022 sebesar 35.00%.

9. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian

Persentase penduduk yang meninggal yang memiliki akta kematian jika dibandingkan ditahun sebelumnya Tahun 2021 mencapai 98.22% dan di Tahun 2022 mencapai 94.43%. Dengan capaian target di Tahun 2022 sebesar 35.00%.

10. Persentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data
 Persentase jumlah instansi yang telah melakukan PKS pemanfaatan data jika dibandingkan ditahun sebelumnya Tahun 2021 mencapai 66,67% dan di Tahun 2022 mencapai 68,75%. Dengan capaian target di Tahun 2022 sebesar 60,00%.

11. Persentase pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan
 Persentase pemanfaatan database SIAK untuk kepentingan pembangunan jika dibandingkan ditahun sebelumnya Tahun 2021 dan Tahun 2022 masing-masing sama mencapai 100%. Dengan capaian target di Tahun 2022 sebesar 100%.

12. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Indeks kepuasan masyarakat dinas kependudukan dan pencatatan sipil jika dibandingkan ditahun sebelumnya Tahun 2021 dan di Tahun 2022 mencapai katagori baik.

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat merupakan Pusat Perhatian dalam Proses Pembangunan saat ini sebagaimana yang di atur dalam Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan, dalam rangka mendukung pelaksanaan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana Pembangunan yang dilaksanakan menggunakan Paradigma Pemberdayaan, artinya pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan partisipasi aktif masyarakat, baik dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pada umumnya.

Upaya pemberdayaan masyarakat Kota Pontianak dilakukan dengan melalui kegiatan pembinaan bulan bakti gotong royong masyarakat yang dilaksanakan selama bulan mei setiap tahunnya, yang terdiri dari 4 bidang yaitu;

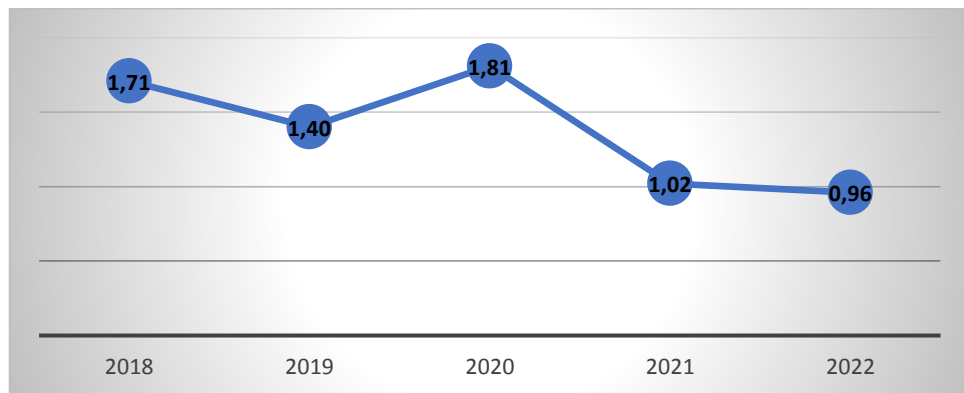
1. Bidang Kemasyarakatan yang dilakukan berupa rapat koordinasi, perbaikan 100 gang dan perbaikan MCK.
2. Bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan berupa rapat koordinasi, pengelolaan lingkungan, Amdal, UKL dan UPL serta pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau.
3. Bidang Sosial Budaya yang dilakukan berupa rapat koordinasi, penyuluhan tentang narkoba dan kenakalan remaja.
4. Bidang Ekonomi yang dilakukan berupa rapat koordinasi, kemitraan masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga penghasilan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Selain itu juga dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dilaksanakan berbagai macam kursus/diklat keahlian seperti kursus reparasi hp, kursus rias pengantin, tata rias rambut/salon dengan bekerjasama dengan praktisi/tenaga ahli di bidangnya. Diharapkan dengan bekal keahlian dan keterampilan tersebut dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk merintis usaha dan membuka lapangan kerja baru sehingga lebih berdaya.

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2018 dan 2019 berada pada 1,71% dan kembali menurun menjadi 1,40%. Sedangkan Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 1,81% . pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 kembali menurun menjadi 1,02% dan 0,96%. melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 1,63%. Kondisi ini disebabkan oleh: masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB, dan masih banyak PUS yang menggunakan ALKON Jangka pendek. Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak perlu mengencangkan penjarangan dan melakukan advokasi dan promosi lewat PLKB dan kelompok Tribina KB, Melakukan promosi yang efektif melalui media cetak dan elektronik serta promosi program KB melalui kampung-kampung KB yang telah terbentuk, dan Memaksimalkan peran kader dan PLKB dalam melakukan penjarangan PUS dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai menggunakan MKJP.

Grafik 2.57.
Persentase Laju pertumbuhan Penduduk



Sumber : DP2KBP3A, Tahun 2022

I. Urusan Perhubungan

Mengingat Sistem transportasi merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh suatu kota, yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Sistem transportasi juga merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat bergantung pada sistem transportasi. Kualitas pelayanan umum urusan perhubungan dapat dilihat diantaranya dari indikator sebagai berikut.

Tabel 2.35.
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 - 2022

NO	Indikator	Unit	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-Rata Waktu Tempuh	jam	-	-	0,049	0,044	0.035
2	Tingkat Kinerja Pelayanan Ruas Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak.	Tingkat Layanan	B	C	C	-	-
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas/Transportasi	%	83,79	90,56	93,95	-	-

NO	Indikator	Unit	2018	2019	2020	2021	2022
4	Persentase Angkutan Umum, Online dan Barang Yang Lulus Uji KIR	%	78,39	78,62	70,23	71,66	86,11
5	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan	%	70	73,34	-	-	-
6	Indek Penerangan Jalan Umum	-	-	-	99,97	-	-
7	Tingkat kinerja pelayanan kelancaran lintas Kota Pontianak				B	B	B
8	Tingkat kinerja pelayanan pelabuhan sungai dan dermaga penyeberangan	%			80%	80%	80%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pontianak, 2023

Berdasarkan tabel diatas rata-rata waktu tempuh mengalami peningkatan dimana target RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah 0,05 jam, sementara realisasi di Tahun 2022 mencapai 0,035 jam, meningkat 0,015 poin. Hal ini menunjukkan semakin lancarnya arus lalu lintas yang didukung dengan semakin baiknya infrastruktur jalan di Kota Pontianak.

Peningkatan jasa transportasi di Kota Pontianak juga berpengaruh terhadap indikator pengujian KIR kendaraan, dimana pada Tahun 2018 sebesar 78,39%, meningkat sebesar 7,72 poin pada Tahun 2022 dengan capaian 86,11%.

Beberapa indikator terkait dengan kinerja Dinas Perhubungan mengalami perubahan seiring dengan perubahan nomenklatur 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga capaian Tahun 2021 dan Tahun 2022 tidak terukur lagi.

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelayanan umum Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat capaiannya pada tabel indikator dibawah ini:

Tabel 2.36.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase (%) Perangkat Daeah (OPD) yang terintegrasi ke-E-Government	98,15%	100%	100%	100%	100%
Persentase (%) pelayanan online yang bisa di akses masyarakat	90,00%	70,00%	100%	100%	100%
Persentase penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	100%	100%	100%
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	-	-	169,26%	131.51%	131.51%

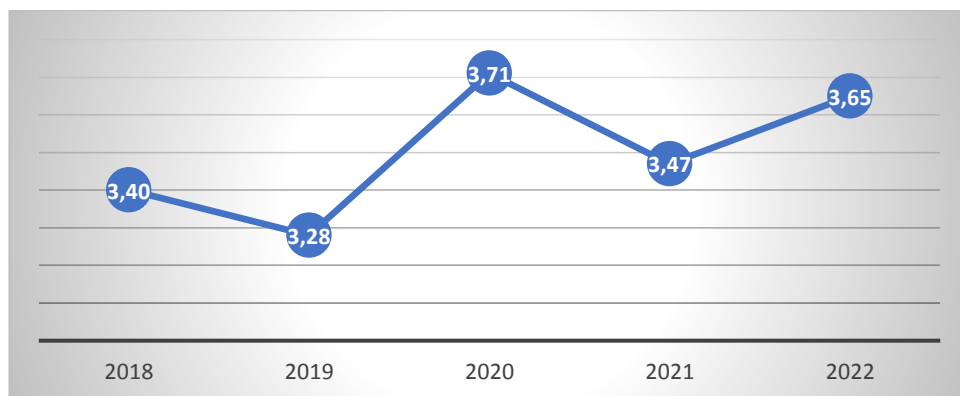
Sumber : Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak 2023

Persentase (%) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terintegrasi e-government dengan pencapaian kinerja dari Tahun 2018 sebesar 98,15% meningkat

Tahun 2019 hingga Tahun 2022 sebesar 100% ini menunjukkan bahwa kinerja pada sasaran ini dapat dicapai dengan sangat baik. Persentase pelayanan online yang bisa di akses masyarakat dalam perkembangan capaian dari Tahun 2018 sebesar 90% dan untuk Tahun 2019 capaian menurun menjadi 70%. Untuk Tahun 2020 dan 2022 indikator ini sudah tidak digunakan lagi karena sudah mengacu pada renstra yang baru. Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 ditetapkan Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan capaian Tahun 2020 yaitu sebesar 169,26%. Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 juga ditetapkan indikator baru yaitu Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021 yaitu sebesar 100. Persentase (%) masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah capaian untuk Tahun 2020 sebesar 169,26%, dan untuk Tahun 2021 capaian menurun sebesar 131,51%.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berada dalam tren dengan capaian 3,40% pada Tahun 2018, kemudian menurun sebesar 0,12% pada Tahun 2019 menjadi 3,28%. Pada Tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Kota Pontianak meningkat sebesar 0,43% dari tahun sebelumnya menjadi 3,71%, namun kembali menurun di Tahun 2021 sebesar 0,24% menjadi 3,47%. Pada Tahun 2022 indeks ini kembali meningkat menjadi 3,65%.

Grafik 2.58.
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, 2023

K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelayanan umum pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada beberapa indikator dibawah ini:

Tabel 2.37.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	-	-	64%	73%	72.55%
2	Persentase Usaha Mikro yang jadi Wirausaha	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	0.63%	2.47%	23.61%	7.17%	4.48%
4	Persentase koperasi aktif	95,90%	95,40%	94,36%	94,90%	94.72%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, 2023

Indikator kinerja persentase koperasi berkualitas Tahun 2020 sebesar 64%, Tahun 2021 sebesar 73% dan pada Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 72,55%. Penurunan persentase koperasi yang berkualitas akibat oleh adanya beberapa koperasi yang berkualitas di Kota Pontianak yang wewenangnya beralih ke Provinsi.

Pada indikator persentase usaha mikro yang jadi wirausaha Tahun 2022 adalah 100%, realisasi ditahun 2019 adalah sebesar 100% dan tahun 2020 sebesar 100%. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Pontianak untuk dapat meningkatkan persentase tersebut diantaranya terus memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil untuk melengkapi perizinan yang diperlukan untuk usaha, terus melaksanakan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku wirausaha dan terus meningkatkan kerjasama pemasaran baik secara online maupun offline.

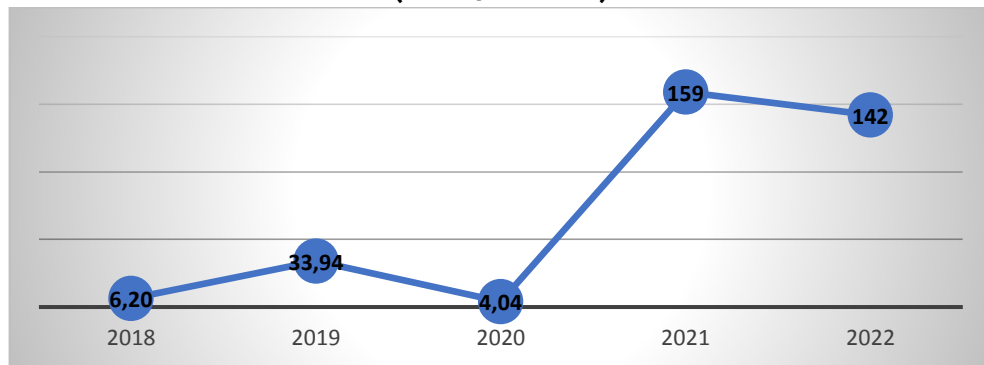
Persentase pertumbuhan usaha mikro baru Tahun 2018 mencapai sebesar 0.63% meningkat di Tahun 2019 dan 2020 masing-masing peningkatan mencapai sebesar 2.4% dan 23.61%. Tahun 2021 sebesar 7.17% dan Tahun 2022 terjadi penurunan mencapai 4,48%.

Persentase Koperasi aktif Tahun 2018 pencapaian indikator sebesar 95,90%, Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 95,40%, Tahun 2020 pencapaian indikator persentase koperasi aktif sebesar 94,36% sedangkan untuk tahun 2021 pencapaian indikator persentase koperasi aktif sebesar 94,90%. Namun sedikit menurun ditahun 2022 menjadi 94,72%.

L. Urusan Penanaman Modal

Kinerja pelayanan umum Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak melalui indikator Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/ PMDN) dan indeks kepuasan masyarakat pelayanan DPMTKPTSP pada sebagaimana grafik dibawah ini:

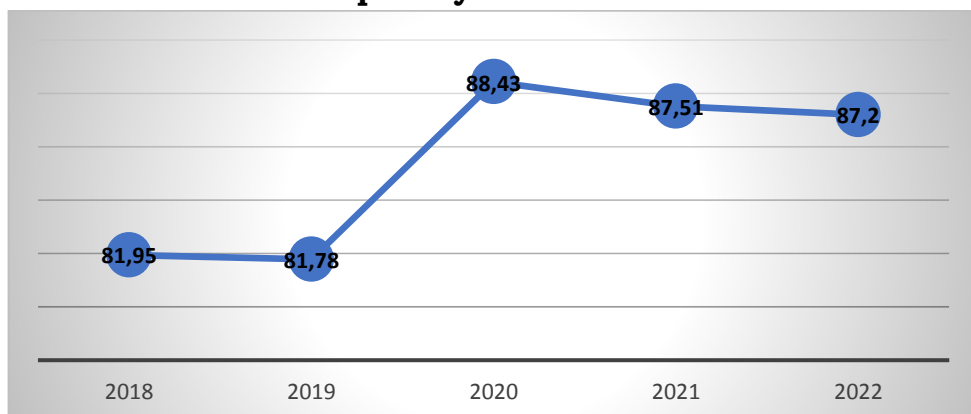
Grafik 2.59.
Persentase Peningkatan Investasi Daerah
(PMA/ PMDN)



Sumber: Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, 2023

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/ PMDN) di Tahun 2018 menjadi 6,20%, kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2019 sebesar 33,94%, namun kembali menurun menjadi 4,04% pada Tahun 2020. Sedangkan untuk Tahun 2021 mengalami peningkatan tajam sebesar 159%. Di Tahun 2022 terjadi penurunan 17 poin menjadi 142%.

Grafik 2.60.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terhadap Pelayanan DPMTKPTSP

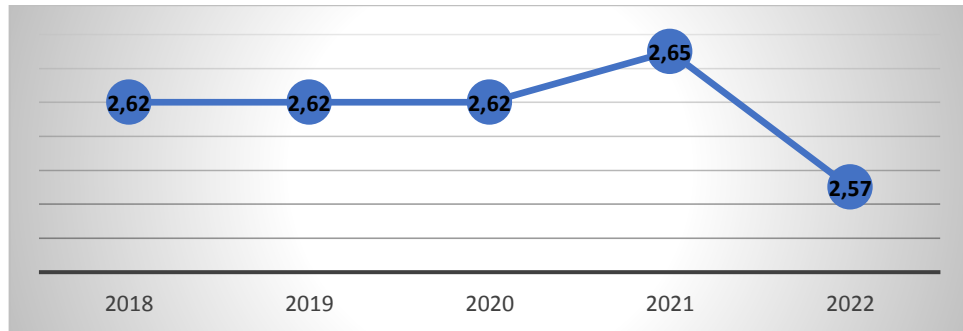


Sumber: Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, 2023

Dan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2018 sebesar 81,95%, dan sedikit menurun pada Tahun 2019 yaitu 81,78%, dan meningkat kembali pada Tahun 2020 yaitu sebesar 88,43, dan menurun kembali pada Tahun 2021 sebesar 87,51. Tahun 2022 mengalami sedikit penurunan sebesar 87,2%.

M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

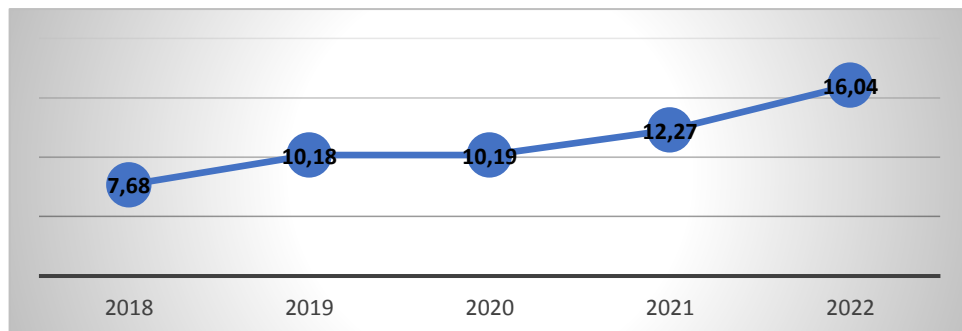
Grafik 2.61.
Peningkatan Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi dan Nasional



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2023

Peningkatan Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi dan Nasional selama Tahun 2018 hingga Tahun 2021 berada dalam tren meningkat. Pada Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020 masing-masing sama mencapai 2,62%. Pada Tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan menjadi 2,65%. Namun peningkatan prestasi pemuda menurun di Tahun 2022 mencapai 2,57%.

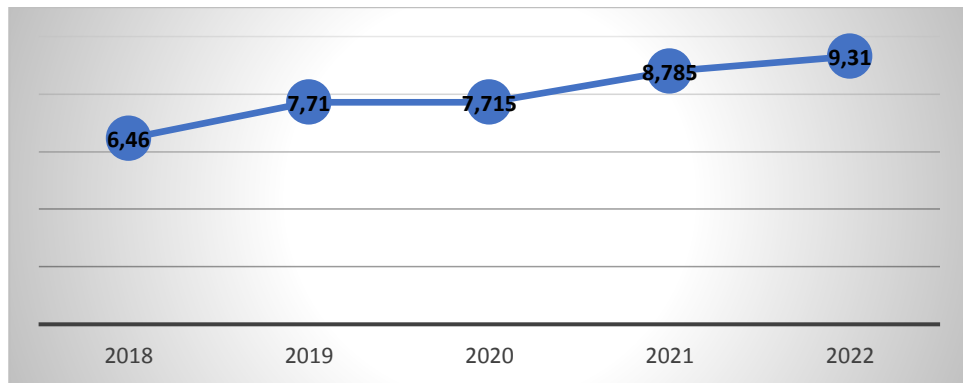
Grafik 2.62.
Peningkatan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2023

Peningkatan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional Kota Pontianak selama Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam tren meningkat. Pada Tahun 2018 Peningkatan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional Kota Pontianak tercapai 7,68% dan terjadi peningkatan kembali meningkat sebesar 2,5% pada Tahun 2019 menjadi 10,18%. Pada Tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan menjadi 10,19% dan kembali meningkat pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar 12,27% dan 16,04%.

Grafik 2.63.
Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Kota/Provinsi/Nasional



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2022

Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Kota/Provinsi/Nasional selama Tahun 2018 hingga Tahun 2022 dalam tren positif. Pada Tahun 2018 tercapai menjadi 6,46%, dan kembali meningkat di Tahun 2019 sebesar 1,25% menjadi 7,71%. Pada Tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan menjadi 7,715% dan terus meningkat hingga Tahun 2021 dan 2022 masing-masing mencapai 8,785% dan 9,31%.

N. Urusan Statistik

Kinerja pelayanan umum Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dan diukur dari indikator Persentase perangkat daerah yang data sektoralnya sudah terintegrasi dengan portal data Kota Pontianak, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.38.
Indikator Kinerja Urusan Statistik

No.	Indikator Kinerja Utama	2018	2019	2020	2020	2022
1.	Persentase perangkat daerah yang data sektoralnya sudah terintegrasi dengan portal data Kota Pontianak	99,33	84,6	100	100	100
2.	Persentase tingkat terselenggaranya kegiatan statistik Sektoral Kota Pontianak	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, 2023

Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang data sektoral sudah terintegrasi dengan portal data Kota Pontianak terus meningkat, dari capaian Tahun 2018 sebesar 93,33% dan terus meningkat hingga mencapai 100% di Tahun 2022 indikator ini telah mengikuti renstra 2020-2024 menjadi persentase tingkat terselenggaranya kegiatan statistik sektoral Kota Pontianak dengan capaian sebesar 100%.

O. Urusan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Kota Pontianak tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu,

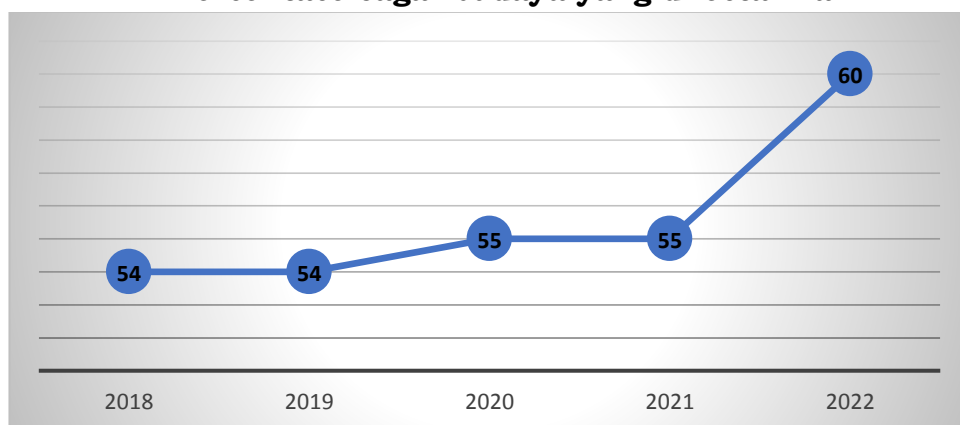
namun juga untuk memanfaatkan kekayaan khasanah seni dan budaya dalam bidang ekonomi khususnya pendukung pariwisata daerah. Kekayaan budaya merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Gelombang ekonomi keempat (*fourth wave economic*) yang kini tengah memasuki peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar dari karya budaya. Dalam rangka pengembangan nilai budaya, Pemerintah Kota Pontianak mendorong berdirinya berbagai macam sanggar seni budaya di masyarakat. Saat ini telah terbentuk sanggar seni dan budaya sejumlah 195 dengan 9 jenis sanggar dan seni budaya. Akan tetapi akibat keterbatasan sumberdaya dan sumber dana yang ada, baru 102 sanggar seni budaya atau 75% saja yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota Pontianak.

Pembangunan kebudayaan di Kota Pontianak tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu, namun juga untuk memanfaatkan kekayaan khasanah seni dan budaya dalam bidang ekonomi khususnya pendukung pariwisata daerah. Kekayaan budaya merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Selain melakukan pembinaan sanggar seni dan budaya, Pemerintah Kota Pontianak melakukan pendataan dan pemantauan terhadap benda-benda yang memiliki nilai sejarah.

Persentase cagar budaya Kota Pontianak yang dilestarikan selama Tahun 2018 hingga Tahun 2022 berada dalam tren meningkat. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 masing-masing sama mencapai 54% dan kembali sedikit meningkat di Tahun 2020 dan Tahun 2021 masing-masing mencapai 55%. Namun di Tahun 2022 peningkatan itu kembali meningkat menjadi 60%.

Grafik 2.64.
Persentase cagar budaya yang dilestarikan

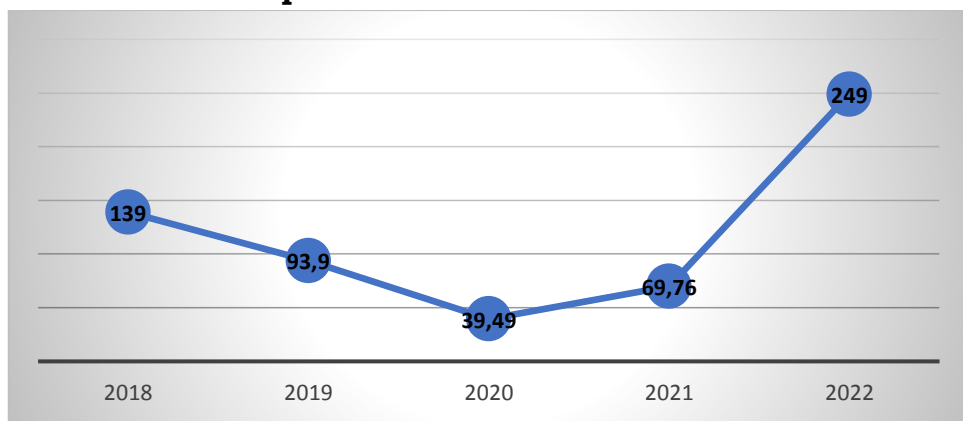


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2023

P. Urusan Perpustakaan

Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan Kota Pontianak sesuai Renstra Dinas Perpustakaan Kota Pontianak Tahun 2021-2024 ditetapkan melalui indikator kinerja Persentase Peningkatan Kunjungan ke Perpustakaan dan Tempat Baca di Kota Pontianak dengan capaian tahun 2018 tercatat capaian sebesar 139% dan Tahun 2019 dan 2020 masing-masing mencapai sebesar 27,55% dan 39,49%, namun Tahun 2021 meningkat mencapai sebesar 69,76%. Tahun 2022 kunjungan ini meningkat pesat menjadi capaian sebesar 249%. Nilai Tahun 2022 tersebut telah melebihi target RPJMD yaitu 80%.

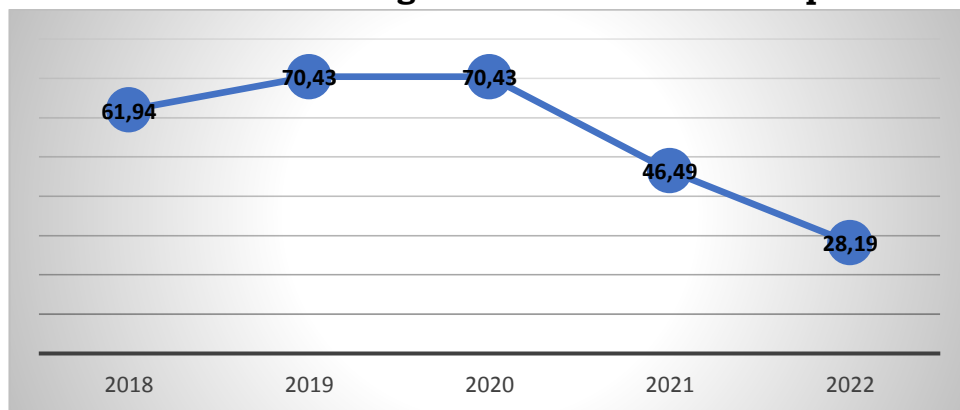
Grafik 2.65.
Persentase Pengunjung Pada Perpustakaan dan Tempat Baca di Kota Pontianak



Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Pontianak 2022

Nilai Hasil Pengawasan Eksternal Kearsipan Kota Pontianak mengalami tren menurun selama Tahun 2018 hingga Tahun 2022. Pada Tahun 2018 Nilai Hasil Pengawasan Eksternal Kearsipan Kota Pontianak menjadi 61,94 dan kembali meningkat pada Tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing sama menjadi 70,43 namun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2022 menjadi 28,19.

Grafik 2.66.
Nilai Hasil Pengawasan Eksternal Kearsipan

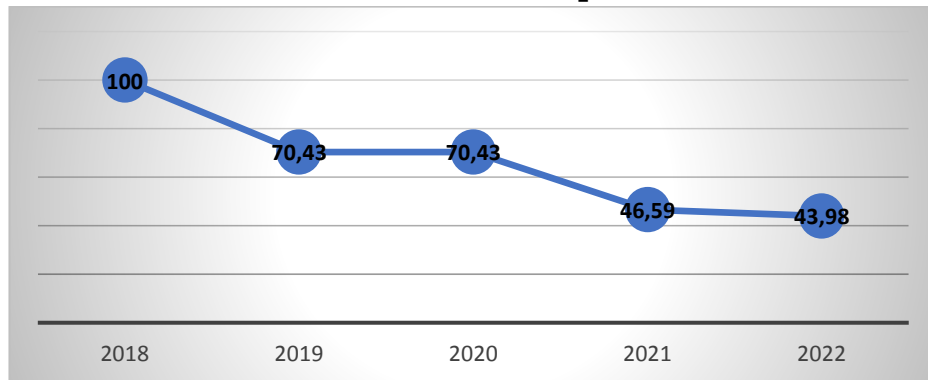


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2023

Q. Urusan Kearsipan

Pelaksanaan pelayanan umum urusan kearsipan dilaksanakan untuk Dinas Perpustakaan Kota Pontianak melalui kinerja persentase jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku. Tahun 2018 indeks kearsipan mencapai sebesar 100%. Pada Tahun 2019 indikator berubah nama menjadi Indeks Kearsipan dimana Tahun 2019 dan 2020 mendapat nilai sangat baik (BB) dengan nilai mencapai 70,43 namun Tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan masing-masing mendapat nilai kurang (C) dengan nilai mencapai 46,59 dan 43,98. Nilai tersebut masih dibawah target RPJMD yaitu 60.

Grafik 2.67.
Indeks Kearsipan



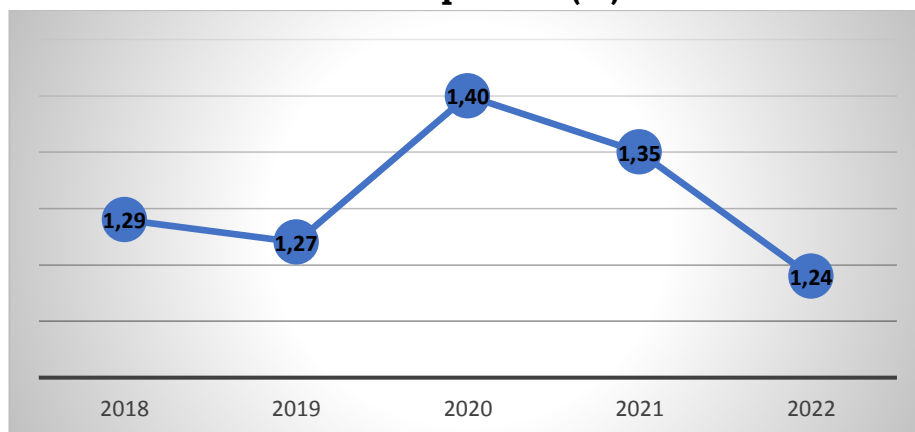
Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Pontianak 2023

2.4.3. Pelayanan Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan, Perikanan dan Urusan Pertanian

Mulai Tahun 2020 indikator Pelayanan Umum Urusan Kelautan, Perikanan dan urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak menggunakan Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB dan diperoleh data Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Grafik 2.68.
Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (%)



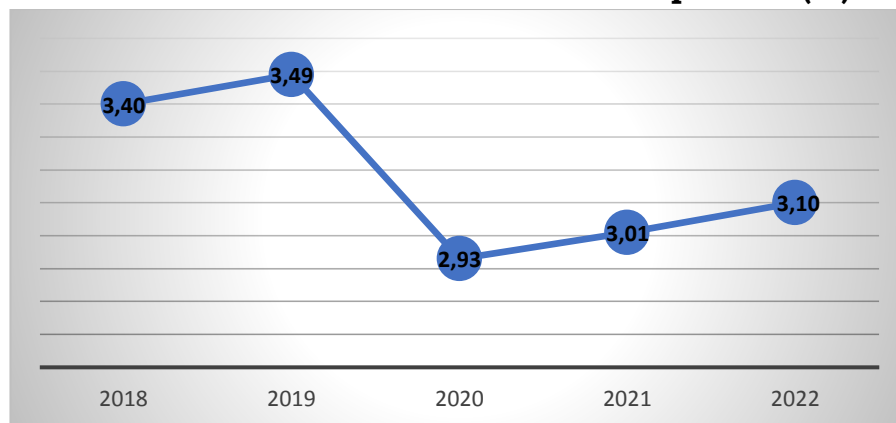
Sumber: Badan Pusat statistic Kota Pontianak, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB Kota Pontianak selama 5 tahun belakangan mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 kontribusi PDRB sektor pertanian dan perikanan sebesar 1,29%. Angka ini sempat mengalami penurunan pada Tahun 2019 sebesar 1,27%, namun dapat kembali ditingkatkan secara signifikan pada Tahun 2020 menjadi 1,40%. Hal ini diindikasikan karena pada tahun 2020 sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor yang tidak terdampak pandemi Covid-19. Di Tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi 1,35% dan 1,24%.

B. Urusan Pariwisata

Sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kota Pontianak pada saat ini telah cukup memadai antara lain dengan tersedianya 50 hotel (data Tahun 2020) dan sarana penunjang wisata lainnya seperti restoran/rumah makan sejumlah 162 unit (data Tahun 2021) meningkat 106 unit jika dibandingkan dengan data Tahun 2020 yang berjumlah 56 unit, dan souvenir shop dan fasilitas rekreasi dan hiburan umum lainnya.

Grafik 2.69.
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)



Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2023

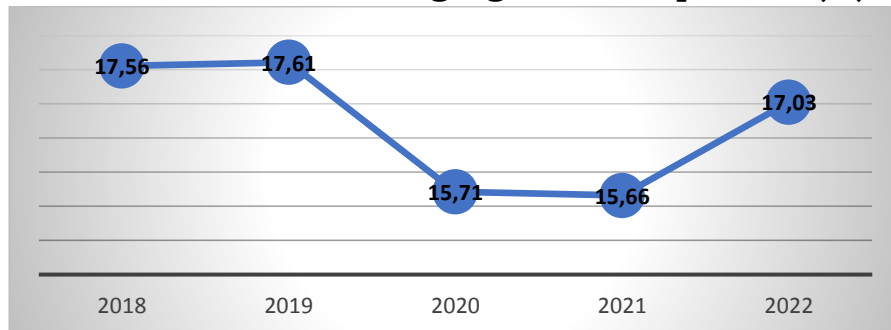
Jika diamati lebih lanjut grafik diatas menggambarkan bahwa tren kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB adalah menurun meskipun pada Tahun 2018 menjadi 3,40%, pada Tahun 2019 menjadi 3,49%. Tahun 2020 kembali menurun menjadi 2,93 Hal tersebut disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020 sehingga tingkat kunjunga wisata mengalami penurunan serta beberapa event-event pariwisata baik lokal nasional maupun internasional tidak dapat dilaksanakan. Meskipun pada Tahun 2021 dan 2022 kontribusi telah mulai merangkak naik masing-masing menjadi 3,01% dan 3,10%, namun capaiannya belum dapat mencapai target yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan RKPd Kota Pontianak Tahun 2022 yaitu 3,41%.

C. Urusan Perdagangan

Pelayanan umum urusan perdagangan Kota Pontianak dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, yang dapat dilihat dari capaian indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dan Tingkat Inflasi.

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Grafik 2.70.
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)

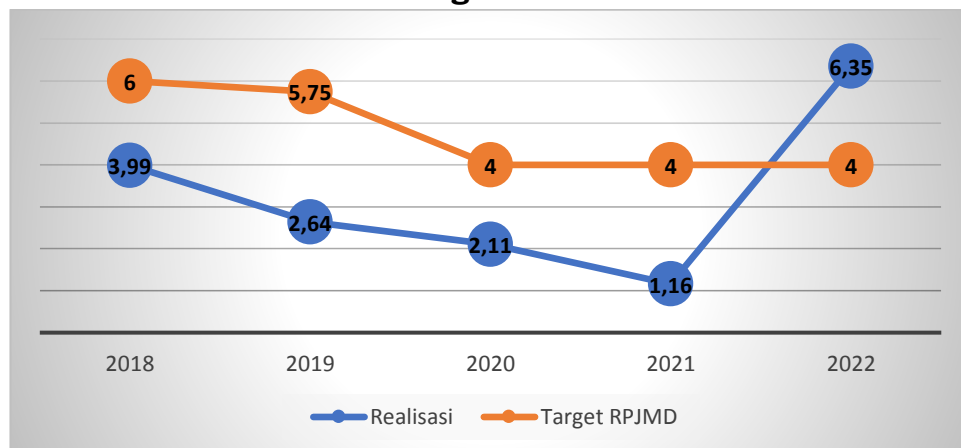


Sumber: Diolah dari Data BPS Kota Pontianak

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB mengalami tren yang naik dan menurun dari tahun 2018 menjadi 17,56% dan 17,61% pada Tahun 2019. Penurunan cukup jauh terjadi pada Tahun 2020 menjadi sebesar 15,71% dan Tahun 2021 kembali menurun tipis menjadi 15,66%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh meningkatnya indikator sektor lainnya, namun penurunan tajam pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 juga dipengaruhi oleh melemahnya perekonomian akibat dampak pandemic covid-19. Untuk Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 17,03%.

2. Tingkat Inflasi

Grafik 2.71.
Tingkat Inflasi



Sumber: Data BPS Kota Pontianak, RPJMD Kota Pontianak

Tingkat inflasi selalu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pontianak karena menyangkut daya beli masyarakat. inflasi adalah suatu keadaan disaat jumlah uang

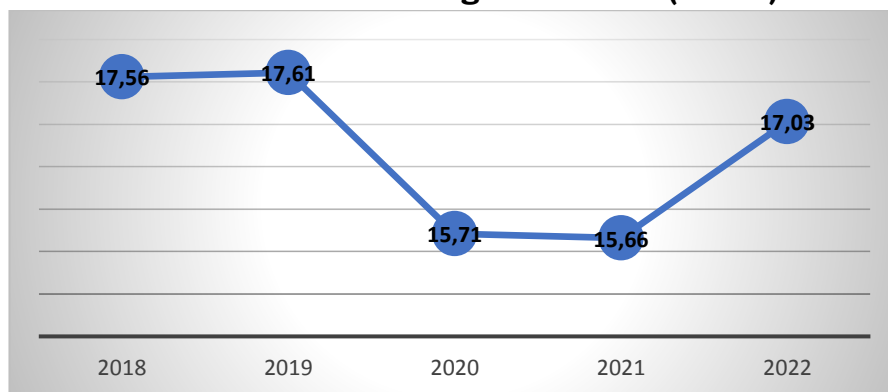
yang beredar melebihi jumlah barang yang beredar, sehingga harga barang-barang menjadi naik, dan nilai uang menjadi turun. Kenaikan ini akan mengakibatkan penurunan daya beli. Inflasi yang tinggi memberi gambaran tingginya tingkat krisis yang dialami suatu wilayah.

Sepanjang Tahun 2018 hingga Tahun 2021 Tingkat Inflasi Kota Pontianak mengalami cenderung menurun, dari 3,99% di Tahun 2018 sempat turun Tahun 2019 menjadi 2,64% terus turun menjadi 2,11 di Tahun 2020 menjadi 1,16% di Tahun 2021. Namun di Tahun 2022 inflasi meningkat dengan pesatnya menjadi 6,35%. Realisasi ini diatas target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 3 ± 1 , jadi target paling rendah adalah 2% dan target paling tinggi adalah 4%. Terlalu rendahnya tingkat inflasi tidak selalu berarti baik karena menunjukkan menurunnya daya beli masyarakat akibat berkurangnya jumlah uang yang beredar.

D. Urusan Perindustrian

Kualitas Pelayanan umum urusan perindustrian diukur dari capaian indikator Kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagaimana tergambar jelas pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.72.
Kontribusi Sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2023

Kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami tren meningkat. Tahun 2018 dan Tahun 2019 kontribusi sektor industri sebesar 17,56% dan 17,61%, namun Kembali menurun pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 masing-masing mencapai 15,71% dan 15,66%, namun di Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 17,03% jauh melampaui target RPJMD dan RKPD yang ditetapkan sebesar 16,17%.

2.4.4 Pelayanan Urusan Pendukung

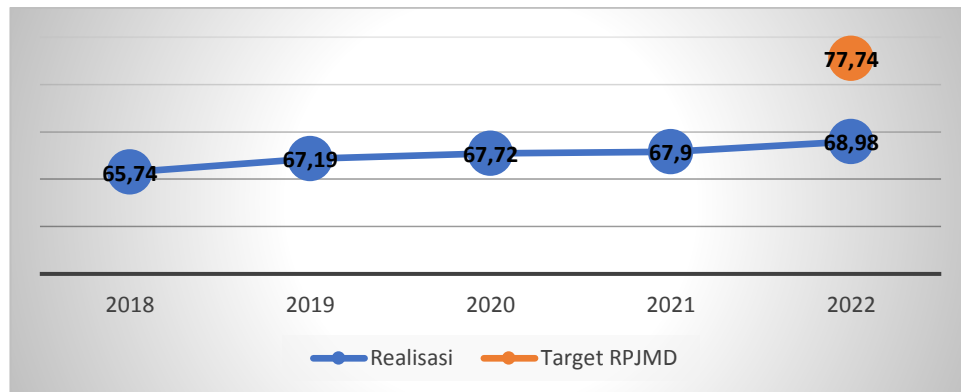
A. Urusan Sekretariat Daerah

Pelaksanaan pelayanan urusan pendukung unsur Sekretariat Daerah diukur melalui 3 (tiga) indikator dibawah ini:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pontianak dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.73.
Indeks Reformasi Birokrasi



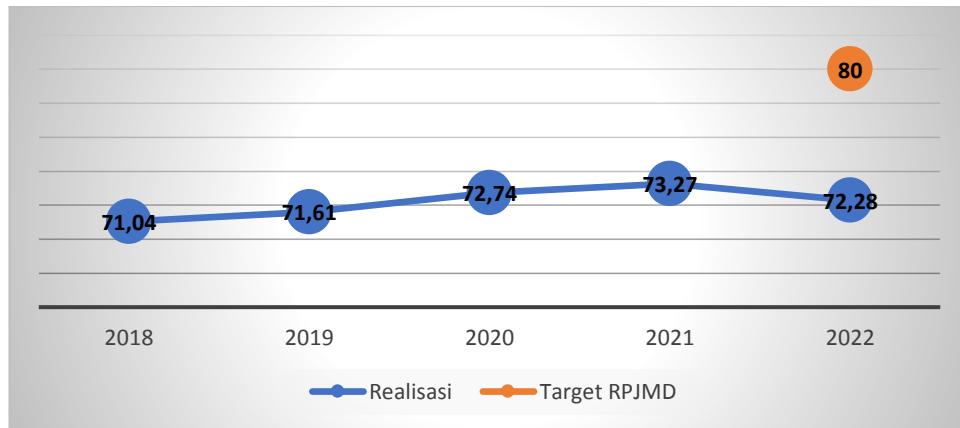
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2023

Dari grafik diatas terlihat bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pontianak mengalami tren meningkat dengan realisasi 65,74 pada Tahun 2018, meningkat menjadi 67,19 pada Tahun 2019 dan meningkat lagi menjadi 67,72 di Tahun 2020. Untuk realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 67,90 dan 68,98, namun belum mencapai target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024 dan RKPD yaitu sebesar 71,74.

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SAKIP) “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Realisasi Nilai Sakip Kota Pontianak dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.74.
Nilai SAKIP Kota Pontianak



Sumber: Sekretariat Daerah Kota Pontianak

Realisasi Nilai SAKIP Kota Pontianak menunjukkan tren meningkat, dimana realisasi pada Tahun 2018 menjadi 71,04, kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 71,61. Pada Tahun 2020 dan tahun 2021 masing-masing tercapai 72,74 dan 73,27. Tahun 2022 nilai SAKIP tersebut mengalami penurunan menjadi 72,28. Namun masih dibawah target Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan RKPD yang menetapkan predikat A dengan nilai minima 80. Jadi Nilai SAKIP Kota Pontianak hingga tahun 2021 masih berada dalam predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai 70-80.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

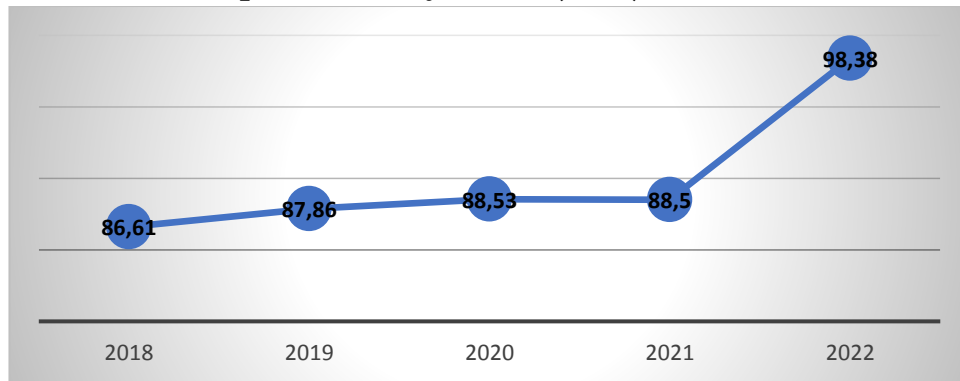
Realisasi pelayanan umum unsur Sekretariat Daerah diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan standar sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel 2.39.
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2023

Grafik 2.75.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Pontianak



Sumber: Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa IKM Kota Pontianak berada pada tren meningkat, dimana pada Tahun 2018 diperoleh realisasi 86,61 dengan kategori B (Baik) yang ditetapkan dalam range 76,61 hingga 88,30, meningkat menjadi 87,86 pada Tahun 2019 dan meningkat kembali pada Tahun 2020 menjadi 88,53 dan terus meningkat hingga Tahun 2021 memperoleh nilai 88,5 sehingga berhasil berada pada kategori A (Sangat Baik) yang ditetapkan range 88,31 hingga 100. Di Tahun 2022 IKM Kota Pontianak masih terus meningkat menjadi 98,38 tetap pada kategori A (Sangat Baik).

3. Nilai LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik di antara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing.

Tabel 2.40.
Nilai LPPD Kota Pontianak

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi	3,889	Belum ada surat resmi	Belum ada surat resmi	Belum ada surat resmi	Belum ada surat resmi
Target RPJMD dan RKPD	-	-	-	-	Bintang 2 (**)

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2023

Data realisasi nilai LPPD Kota Pontianak yang tersedia baru Tahun 2018 yaitu sebesar 3,889. Sedangkan data tahun 2019 hingga tahun 2022 nilai dari Kementerian Dalam Negeri.

B. Urusan Sekretariat DPRD

Urusan Sekretariat Dewan dilaksanakan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.41.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi	80,69	81,03	81,15	80,97	91,72
Target RPJMD				Baik (76,61-88,30)	Sangat Baik (88,31-100)

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Pontianak, 2023

Dari tabel diatas terlihat jelas pelayanan umum urusan Sekretariat Dewan melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami tren meningkat dimana pada Tahun 2018 menjadi 80,69%, dan terus meningkat hingga 81,03 di Tahun 2019 hingga 81,15% pada Tahun 2020, namun sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 80,97%, Tahun 2022 menjadi 91,72%. Namun masih dalam range target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 yaitu dalam kategori baik dengan range 88,31-100.

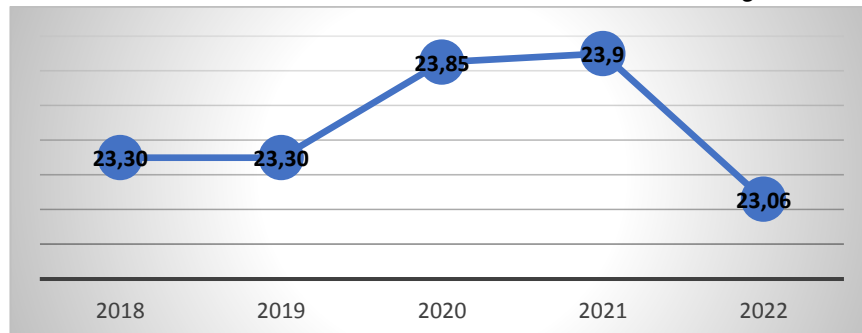
2.4.5. Pelayanan Urusan Penunjang

A. Urusan Perencanaan

Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak tidak terlepas dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah vital, karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan berawal dari perencanaan yang baik. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pendekatan teknokratik, demokratis, partisipatif, politis dan bottom-top down dilakukan secara simultan sehingga keterlibatan stakeholder, legislatif dan masyarakat merupakan keharusan. Pelayanan umum urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Pontianak dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Presentase Nilai Perencanaan Kinerja

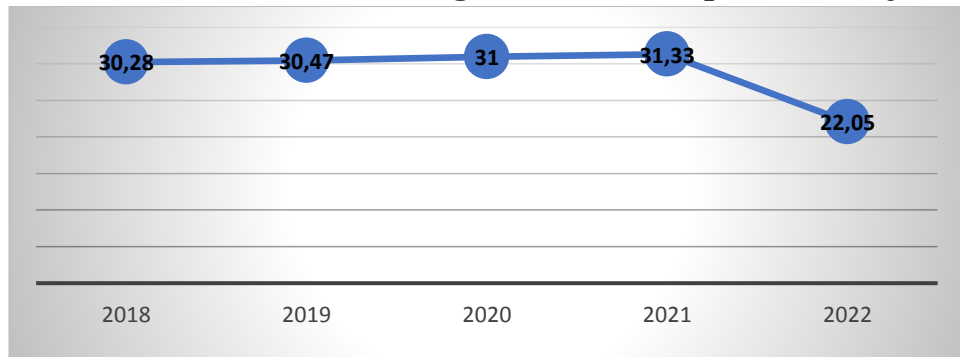
Grafik 2.76.
Persentase Nilai Perencanaan Kinerja



Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak

Dari grafik diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa indikator Persentase Nilai Perencanaan Kinerja mengalami tren meningkat, dari 23,30% pada Tahun 2018, meningkat menjadi 23,30% pada Tahun 2019, dan meningkat lagi pada Tahun 2020 menjadi 23,85%, terus meningkat hingga mencapai hingga 23,9% pada Tahun 2021. Tahun 2022 menurun hingga mencapai 23,06%.

Grafik 2.77.
Presentase Nilai Pengukuran dan Capaian Kinerja



Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Persentase Nilai Pengukuran dan Capaian Kinerja mencapai 30,28% pada Tahun 2018, meningkat menjadi 30,47 pada Tahun 2019 dan meningkat menjadi 31 pada Tahun 2020, terus meningkat menjadi 31,33% pada Tahun 2021. Tahun 2022 kembali menurun mencapai 22,05%.

B. Urusan Keuangan

Dalam pelaksanaan pelayanan umum Urusan Keuangan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak untuk mewujudkan Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD yang transparan dan tepat waktu diukur melalui indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan capaian WTP dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022.

Tabel 2.42.
Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2023

C. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

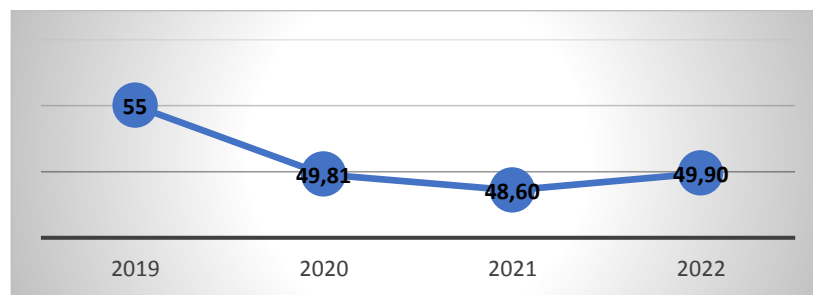
Aspek Pelayanan Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dapat dilihat dari pencapaian indikator Indeks Profesionalisme ASN, Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup: dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin. Kategori

tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91-100;
- b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81-90;
- c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71-80;
- d. Rentang yang memiliki rentang nilai antara 61-70;
- e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

Capaian indikator Indeks Profesionalisme ASN Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Grafik 2.78.
Realisasi Indeks Profesionalisme ASN



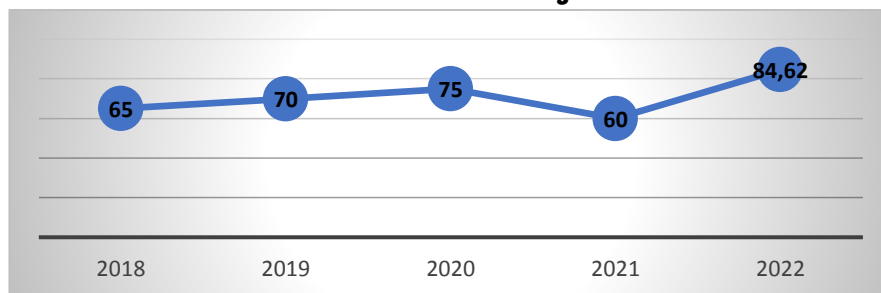
Sumber: BKPSM Kota Pontianak, 2023

Realisasi indikator Indeks Profesionalisme ASN mengalami tren menurun dimana pada Tahun 2019 adalah 55, menurun di Tahun 2020 menjadi 49,81 dan sedikit menurun pada Tahun 2021 menjadi 48,60 dan Tahun 2022 meningkat menjadi 49,90. Berdasarkan kategori tingkat Profesionalitas ASN, capaian Kota Pontianak masih dalam kategori rendah, hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus untuk mendapatkan penanganan lebih baik.

D. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak melalui indikator kinerja Persentase Hasil Litbang Yang Dimanfaatkan Dalam Urusan Kebijakan dengan pencapaian sebagaimana tabel dibawah ini:

Grafik 2.79.
Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Dalam Urusan Kebijakan



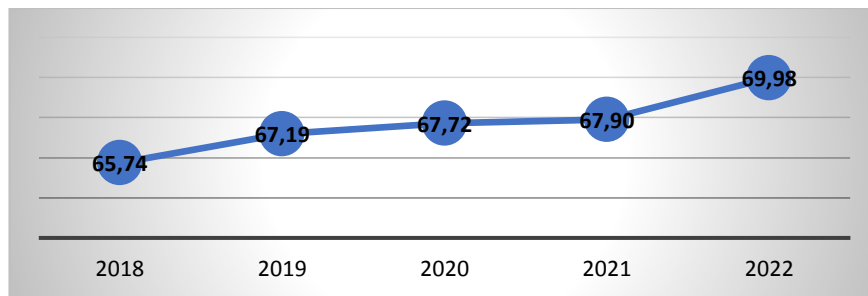
Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak

Dari data pada grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Dalam Urusan Kebijakan masih dalam tren meningkat, dengan capaian 65% pada Tahun 2018, dan terus meningkat hingga Tahun 2019 dan 2020 menjadi 70% dan 75%, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 60%. Namun di Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 84,62%.

2.4.6. Pelayanan Urusan Pengawasan

Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pontianak dengan indikator kinerja pembangunan daerah Indeks Reformasi Birokrasi, dengan realisasi sebagai berikut:

Grafik 2.80.
Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi



Sumber: Inspektorat Kota Pontianak, 2023

Dari grafik diatas terlihat bahwa indeks Reformasi Birokrasi Kota Pontianak mengalami tren meningkat dengan realisasi 65,74 pada Tahun 2018, meningkat menjadi 67,19 pada Tahun 2019 dan meningkat lagi menjadi 67,72 di Tahun 2020. Untuk realisasi Tahun 2021 dan 2022 masing-masing kembali meningkat menjadi 67,90 dan 69,98%.

2.4.7. Pelayanan Urusan Kewilayahan

Realisasi pelayanan urusan kewilayahan diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap wilayah, dengan standar sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai berikut :

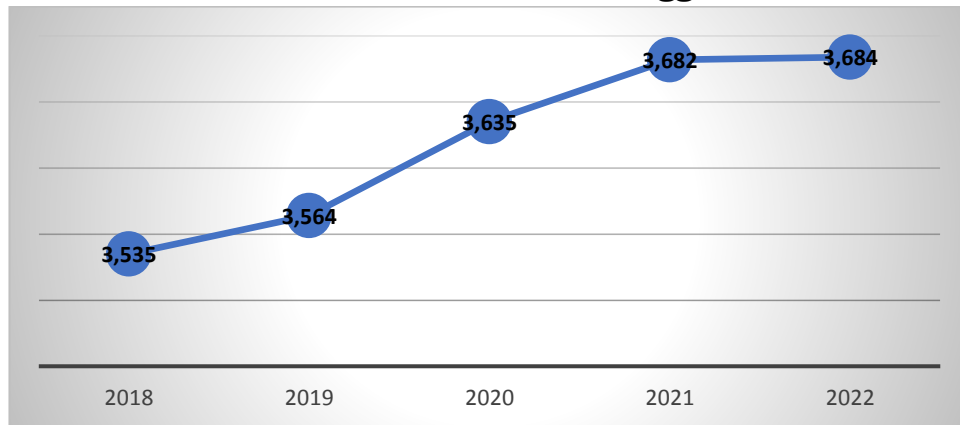
Tabel 2.43.
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Adapun capaian realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap wilayah sebagaimana data dalam grafik-grafik dibawah ini:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Tenggara

Grafik 2.81.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Pontianak Tenggara

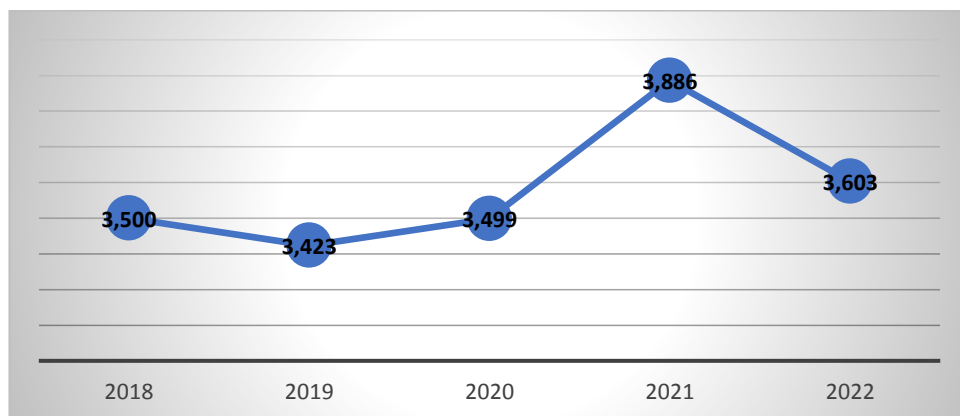


Sumber: Kecamatan Pontianak Tenggara

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Tenggara berada dalam tren meningkat, pada Tahun 2018 realisasi adalah 3,535 dengan kategori sangat baik, kemudian meningkat kembali menjadi 3,564 di Tahun 2019 dan terus meningkat pada Tahun 2020 menjadi 3,635 hingga Tahun 2021 dan Tahun 2022 masing-masing mencapai realisasi 3,682 dan 3,684 masih dalam kategori sangat baik.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Kota

Grafik 2.82.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Pontianak Kota



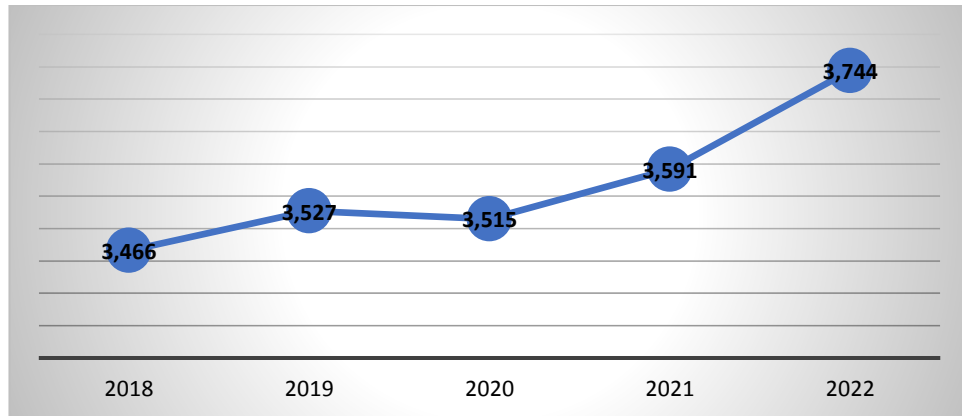
Sumber: Kecamatan Pontianak Kota

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Kota pada Tahun 2018 menjadi 3,500 dan turun kategori menjadi baik, dan masih menurun pada Tahun 2019 menjadi 3,423 dengan kategori baik. Pada Tahun 2020 mulai

meningkat kembali menjadi 3,499 masih di kategori baik, baru kemudian di Tahun 2021 dan 2022 masing-masing tercapai realisasi 3,886 dan 3,603 dan masuk kembali ke kategori sangat baik.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Timur

Grafik 2.83.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Pontianak Timur

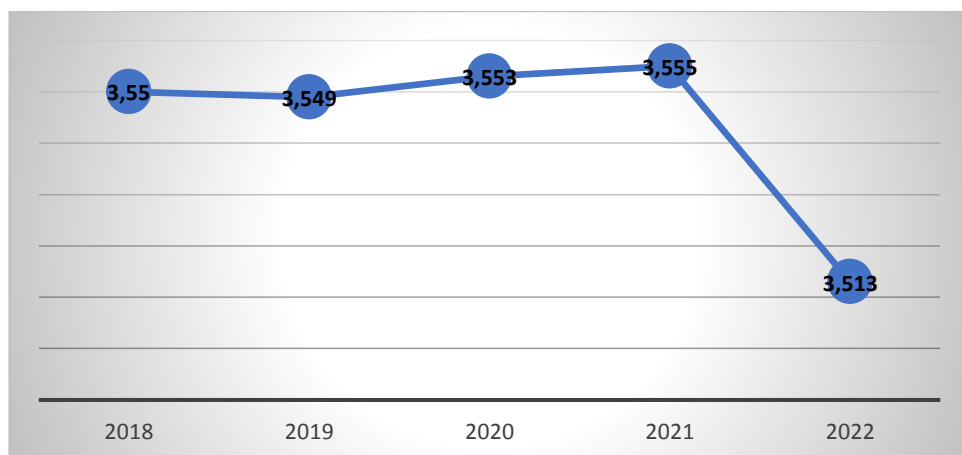


Sumber: Kecamatan Pontianak Timur

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Timur pada Tahun 2018 terjadi menjadi 3,466. Pada Tahun 2019 terjadi peningkatan kembali menjadi 3,527 dengan kategori baik. Pada Tahun 2020 terjadi sedikit penurunan menjadi 3,515 masih di kategori baik, baru kemudian di Tahun 2021 dan Tahun 2022 tercapai realisasi 3,591 dan 3,744 dan masuk ke kategori sangat baik.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Utara

Grafik 2.84.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Pontianak Utara



Sumber: Kecamatan Pontianak Utara

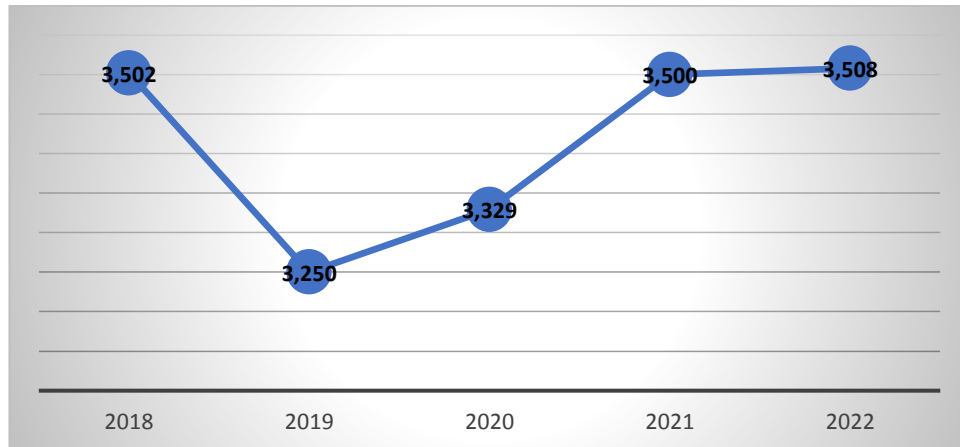
Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Utara berada dalam tren meningkat meskipun tipis, pada Tahun 2018 realisasi adalah

3,550 dengan kategori sangat baik, namun terjadi sedikit penurunan pada Tahun 2019 menjadi 3,549 tapi naik kembali pada Tahun 2020 menjadi 3,553 terus meningkat hingga Tahun 2021 dengan realisasi 3,555, namun di Tahun 2022 IKM kecamatan pontianak utara kembali menurun dengan realisasi 3,513 dengan kategori baik.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Barat

Grafik 2.85.

**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Pontianak Barat**



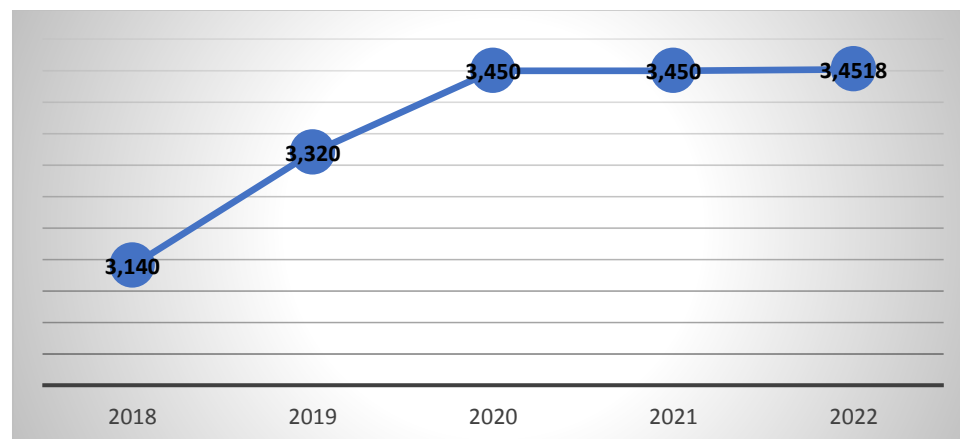
Sumber: Kecamatan Pontianak Barat

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Barat cukup fluktuatif, pada Tahun 2018 menjadi 3,502 dan masih di kategori baik. Pada Tahun 2019 terjadi penurunan cukup dalam menjadi 3,250 masih dalam kategori baik. Pada Tahun 2020 meningkat kembali menjadi 3,329 dalam kategori baik, dan meningkat kembali pada Tahun 2021 dan 2022 dengan mencapai masing-masing realisasi 3,500 dan 3,508 dan masih dalam kategori baik.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Selatan

Grafik 2.86.

**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Pontianak Selatan**



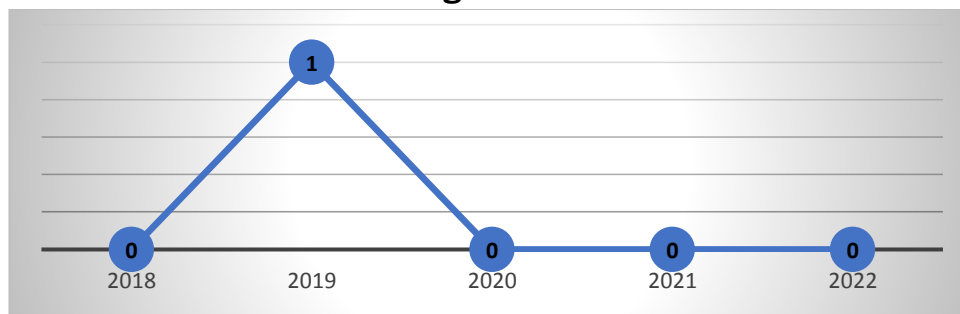
Sumber: Kecamatan Pontianak Selatan

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Selatan berada dalam tren meningkat, pada Tahun 2018 realisasi adalah 3,140 dengan kategori baik, meningkat kembali pada Tahun 2019 menjadi 3,320 dan terus meningkat hingga tercapai realisasi 3,450 pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 dan Tahun 2022 masing-masing mencapai realisasi 3,450 dan 3,4518 masih dalam kategori baik.

2.4.8. Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum

Pelayanan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dengan indikator Angka Konflik. Adapun realisasi Angka Konflik Tahun 2018 hingga Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.87.
Angka Konflik



Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Sosial dan Politik Kota Pontianak

Angka Konflik Kota Pontianak Tahun 2018 hingga Tahun 2022 mengalami tren yang stabil dengan angka konflik 0 (nol), hanya terjadi 1 kali konflik di Tahun 2019. Dengan struktur penduduk yang multi etnis di Kota Pontianak, keadaan yang aman dan tentram merupakan kerja keras seluruh elemen masyarakat (warga masyarakat, lembaga adat, aparat penegak hukum dan pemerintah kota) dalam melakukan komunikasi yang efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Keadaan Kota Pontianak yang aman dan tentram sangat berkontribusi dalam keberhasilan pembangunan dan peningkatan perhubungan ekonomi kota secara keseluruhan, sehingga tinggaknya kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

2.5 BUMD yang Berkontribusi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemda. Oleh karena itu, pemda harus mengoptimalkan peran BUMD.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 UU

Pemda. Pengaturan lebih *rigid* mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD).

BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda.

Saat ini ada 2 (dua) BUMD di bawah naungan Pemerintah Kota Pontianak, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Khatulistiwa (PDAM) dan Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Khatulistiwa Pontianak.

2.5.1 Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdiri dibawah Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa resmi didirikan pada tahun 1975 melalui Perda No. 03 Tahun 1975. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa mendapatkan sumber air untuk didistribusikan ke setiap rumah yang ada di Kota Pontianak dengan menjadikan air Sungai Kapuas dan Sungai Landak menjadi sumber utamanya dan dengan cadangan air dari waduk dengan luas waduk kurang lebih dua hektar dengan tampungan 54.000 meter kubik.

Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa memiliki aset berupa pipa-pipa yang tertanam di sekeliling Kota Pontianak sebagai fasilitas distribusi air bersih ke rumah-rumah penduduk Kota Pontianak. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa telah memiliki 7 (tujuh) Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yang tersebar di beberapa titik di Kota Pontianak. Lokasi titik IPAM ini berada disekitaran Sungai Kapuas kecil, Sungai Landak dan Kapuas besar. Hal ini menandakan bahwa Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa menjadikan air Sungai Kapuas dan Sungai Landak menjadi bahan baku utama dan sumber persediaan air untuk disebarkan ke tiap rumah yang ada di Kota Pontianak.

Dalam melaksanakan usahanya, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak turut memberikan kontribusi pada peningkatan PAD Kota Pontianak dalam bentuk dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak. Penyertaan modal dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

Tabel 2.44.
Perkembangan Kondisi Keuangan dan
Kinerja Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	TOTAL PENYERTAAN MODAL PEMKOT	208.314.945.8 76,00	217.314.945.8 76,00	245.378.474.9 86,00	253.475.192.0 26,00	260.975.192 .026,00
2	ASSET	373.084.671.0 39,00	380.046.597.5 01,00	391.544.305.1 11,00	386.815.452.3 24,00	392.933.241 .523,00
3	PENDAPATAN					
	Pendapatan Utama	172.923.971.1 02,00	184.772.586.4 89,00	193.907.660.8 70,00	184.788.843.1 00,00	196.632.507 .124,00
	Pendapatan Lain- lain	3.096.361.653, 00	5.269.060.038, 00	2.094.468.254, 00	2.227.203.696 ,00	1.290.482.4 15,00
4	LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	18.713.323.87 3,00	29.092.568.11 2,00	17.664.567.14 0,00	6.145.313.405 ,00	13.878.542. 334,00
5	BAGIAN LABA UNTUK DAERAH	10.292.328.13 0,00	16.000.912.46 2,00	9.715.511.927, 00	3.379.922.373 ,00	10.200.728. 615,49
6	SETOR PAD	5.443.264.674, 00	10.292.328.13 0,00	16.000.912.46 2,00	9.715.511.927 ,00	3.677.970.0 73,00
7	CAKUPAN LAYANAN					
	Cakupan Layanan_KEPMEN DAGRI	83,24%	87,74%	93,10%	83,35%	87,80%
	Cakupan Layanan_BPP SPAM	83,24%	77,20%	80,30%	83,35%	87,80%

Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2022

2.5.2 Perumda Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak

Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang sebelumnya bernama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak adalah perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang bergerak dibidang Jasa keuangan khususnya di bidang perbankan. Perumda BPR Khatulistiwa didirikan pada tanggal 18 Desember 1963 dengan landasan Perda Nomor 12 Tahun 1963 yang hingga saat ini sudah beberapa kali mengalami penyempurnaan dengan dilakukannya perubahan Perda.

Dalam menjalankan operasionalnya, Perumda BPR Khatulistiwa beralamatkan di Jalan Zainuddin No.10 Kelurahan Tengah, Pontianak, Kalimantan Barat 78111, Telp (0561) 7324514. Dalam menjalankan usahanya Perumda BPR Khatulistiwa Kota Pontianak memiliki perizinan berdasarkan Nomor Pokok Wajib pajak No.01.110.640.8.701.000 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak kantor Wilayah DJP Kalbar Kantor Pelayanan Pajak Pontianak.

Usaha yang dijalankan oleh Perumda BPR Khatulistiwa adalah sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito berjangka, Tabungan/ atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah.

- Melakukan kerjasama antar lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank perkreditan Rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan didirikannya Perusahaan daerah ini adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

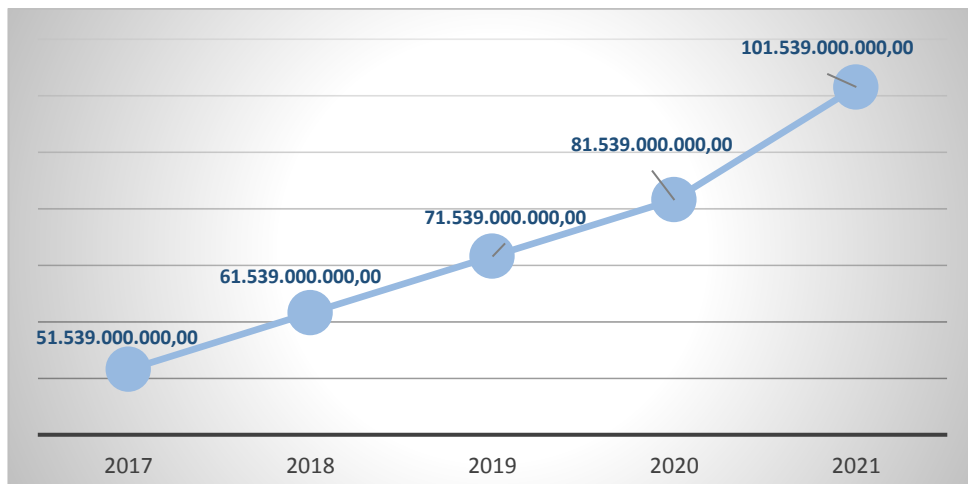
Tabel 2.45.
Perkembangan Kondisi Keuangan
dan Kinerja Perumda BPR Khatulistiwa
Kota Pontianak Tahun 2017-2021 (dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	ASSET	38.955.247.28 3,00	44.067.908.58 8,00	52.202.764.55 8,00	63.761.825.03 2,00	89.005.851.55 2,00
2	TOTAL PENYERTAAN MODAL PEMKOT	12.997.301.24 7,00	12.997.301.24 7,00	17.997.301.24 7,00	20.497.301.24 7,00	35.987.000.00 0,00
3	PENDAPATAN OPERASIONAL	6.416.206.543 ,00	7.369.662.594, 00	8.445.049.233, 00	9.636.212.063, 00	11.053.303.73 4,00
4	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	20.532.279,00	9.010.000,00	87.762.995,00	14.471.466,00	25.360.482,00
5	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN	1.396.525.641 ,00	1.455.989.711, 00	1.561.701.886, 00	1.698.754.152, 00	1.801.274.762, 00
6	BAGIAN LABA UNTUK DAERAH	698.262.821,0 0	727.994.855,0 0	780.850.943,0 0	385.122.570,6 2	1.408.776.991, 17
7	SETORAN PAD	1.282.372.320 ,00	698.262.821,0 0	727.994.856,0 0	780.850.943,0 0	385.122.571,0 0

Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2022

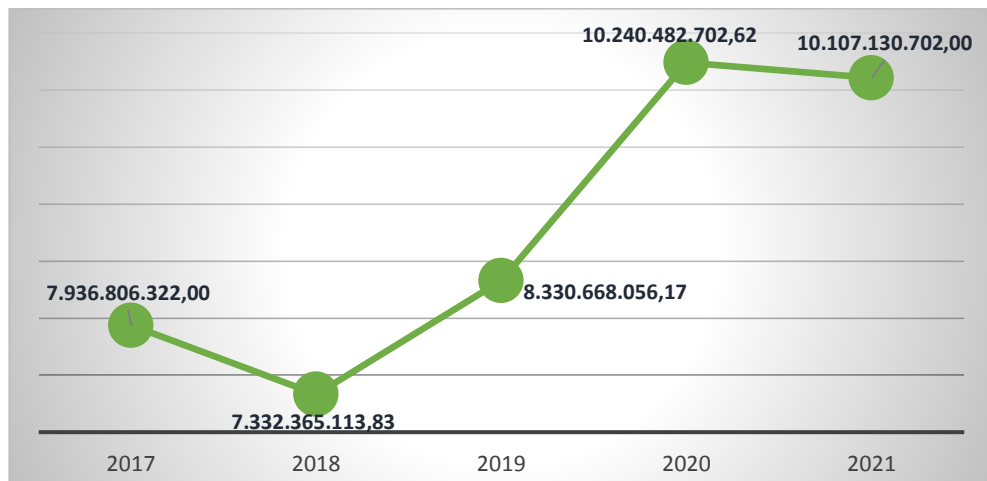
Selain kedua BUMD di atas, Pemerintah Kota Pontianak juga memiliki saham pada BUMD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yakni pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat. BPD Kalbar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Bank Kalbar. Dalam rangka memberikan dukungan kepada Bank Kalbar untuk memenuhi target kebutuhan modal guna menjadi BPD *Regional Champion*, Pemerintah Kota Pontianak turut memberikan penyertaan modal. Dari hasil penyertaan modal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan dividen yang berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Grafik 2.88.
Perkembangan Penyertaan Modal Pemerintah
Kota Pontianak pada Bank Kalbar
Tahun 2017-2021 (dalam Rupiah)



Sumber: Laporan Tahunan Bank Kalbar 2022

Grafik 2.89.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Kota Pontianak dari Dividen Bank Kalbar
Tahun 2017-2021 (dalam Rupiah)



Sumber: RKPD Kota Pontianak Tahun 2022

2.6 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kota Pontianak

2.6.1 Tahun 2020

1. Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perhitungan Indikator	Capaian Indikator
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	92,700	91.63%
		Jumlah Warga Negara usia 7-15 di Kota Pontianak	101,159	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1658	86.09%
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kota Pontianak	1926	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	16920	70.01%
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kota Pontianak	24168	

2. Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perhitungan Indikator	Capaian Indikator
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan		100%
		Jumlah ibu hamil di Kota Pontianak	11334	

2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan		100%
		Jumlah ibu bersalin di Kota Pontianak	11033	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan		100%
		Jumlah bayi baru lahir di Kota Pontianak	10483	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		100%
		Jumlah balita di Kota Pontianak	30954	
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan		47.54%
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Pontianak	96441	
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan		
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes mellitus</i>	Jumlah warga negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan		
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		

11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan		

3. Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perhitungan Indikator	Capaian Indikator
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	135,165	87.71%
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di Kota Pontianak	154,100	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	190,574	98.08%
		Jumlah rumah di Kota Pontianak	194,298	

4. Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perhitungan Indikator	Capaian Indikator
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kota Pontianak	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1113	100%
		Jumlah total unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	1113	

2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kota Pontianak	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1	100%
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	1	

5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perhitungan Indikator	Capaian Indikator
1	Pelayanan Ketenraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada		
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	670,859	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	670,859	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3896	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	33	100%
		Jumlah kejadian kebakaran Kota Pontianak	33	

6. Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perhitungan Indikator	Capaian Indikator
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	5	100%
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang ditargetkan	5	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	40	87%
		Jumlah Warga Negara anak terlantar yang ditargetkan	35	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	15	60%
		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang ditargetkan	25	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jjumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	24	80%
		Jumlah Warga Negara gelandang/pengemis yang ditargetkan	30	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana di Kota Pontianak	Jumlah Warga Negara korban bencana di Kota Pontianak yang meperoleh perlindungan dan jaminan sosial	925	97%
		Jumlah Warga Negara korban bencana	950	

Sumber Data: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2021

2.6.2 Tahun 2021

1. Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perhitungan Indikator	Capaian Indikator
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	66610	90.34%
		Jumlah Warga Negara usia 7-15 di Kota Pontianak	73733	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1246	100%
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kota Pontianak	1246	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	21433	90.51%
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kota Pontianak	23680	

2. Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perhitungan Indikator	Capaian Indikator
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	11798	93.81%
		Jumlah ibu hamil di Kota Pontianak	12576	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	11113	92.57%

		Jumlah ibu bersalin di Kota Pontianak	12005	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	10547	92.25%
		Jumlah bayi baru lahir di Kota Pontianak	11433	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	33090	83.15%
		Jumlah balita di Kota Pontianak	39797	
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	32270	36.33%
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Pontianak	88835	
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	132767	29.71%
		Jumlah warga negara usia produktif di Kota Pontianak	446808	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	36415	56.91%
		Jumlah warga negara usia lanjut di Kota Ponianak	63988	
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jjumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	34744	20.72%
		Jumlah penderita hipertens di Kota	167643	
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes mellitus</i>	Jumlah warga negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	5218	37.84%

		Jumlah penderita DM di kota	13791	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	803	58.06%
		Jumlah penderita ODGJ di kota	138	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	5028	62.07%
		Jumlah penderita TBC di kota	8100	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	15459	99.47%
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota	15542	

3. Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perhitungan Indikator	Capaian Indikator
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	589149	88.04%
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di Kota Pontianak	669174	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	720923	47.10%
		Jumlah seluruh rumah tangga di Kota Pontianak	1530650	

4. Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perhitungan Indikator	Capaian Indikator
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang	Jumlah warga Negara korban bencana yang	7	100%

	layak huni bagi korban bencana di Kota Pontianak	memperoleh rumah layak huni		
		Jumlah total unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	7	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kota Pontianak	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	10	100%
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	10	

5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perhitungan Indikator	Capaian Indikator
1	Pelayanan Ketenraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	-	-
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	672440	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	670,859	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	27	100%

5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	598	100%
		Jumlah kejadian kebakaran Kota Pontianak	598	

6. Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perhitungan Indikator	Capaian Indikator
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	116	99.15%
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang ditargetkan	117	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	18	90%
		Jumlah Warga Negara anak terlantar yang ditargetkan	20	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	38	95%
		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang ditargetkan	40	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	110	80%
		Jumlah Warga Negara gelandang/pengemis yang ditargetkan	111	

5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana di Kota Pontianak	Jumlah Warga Negara korban bencana di Kota Pontianak yang Memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1401	100%
		Jumlah Warga Negara korban bencana	1401	

Sumber Data: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2021

2.7 Kerja Sama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020 - 2021

NO.	JENIS KERJASAMA	NOMOR & TANGGAL KERJASAMA
TAHUN 2020		
1	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemkot Pontianak Dengan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan Barat (HIMPSI KALBAR) Tentang Pendampingan Psikologis Penanganan Kasus Kekerasan Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan Dan Anak Dikota	07.1 / SP - VIII / 2020 02 Agustus 2020
2	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Disdukcapil) Dengan Universitas Tanjungpura Tentang Pemutakhiran Data Penduduk Tamat Pendidikan Tinggi	07 / SP - V / 2020 19 Mei 2020
3	Perjanjian Kerja Sama Antara BAPPEDA Dengan Universitas Tanjungpura Tentang Kerjasama Pemanfaatan Dan Pengembangan Hasil Penelitian Bidang Sosial Dan Politik	09 / SP - IX / 2020 19 Agustus 2020
4	Kesepakatan Bersama Pemerintah KAL-BAR Pemkot Pontianak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tentang Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Dan Daya Saing Daerah	30 / SP - XII / 2020 15 Desember 2020
5	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemkot Pontianak Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak Tentang Penyimpanan Uang Daerah	01 / SP - I / 2020 02 Januari 2020

NO.	JENIS KERJASAMA	NOMOR & TANGGAL KERJASAMA
6	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemkot Pontianak Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tentang Pembuatan Kartu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pontianak	01 / SP - 1 / 2020 29 Januari 2020
7	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Komisi Penanggulangan Aids Kota Pontianak tentang Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Menular Tahun 2020.	1/SP-I/2020 2 Januari 2020
8	Kesepakatan Bersama antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak dengan Pemerintah Kota Pontianak tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kota Pontianak	2/SP-I/2020 2 Januari 2020
9	Kesepakatan Bersama antara BPJS Kesehatan Cabang Pontianak dengan Pemerintah Kota Pontianak tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kota Pontianak	2.1/SP-I/2020 2 Januari 2020
10	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Ditjen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota tentang Pembangunan Insprastruktur Persampahan (TPS 3 R) dan Air Limbah Domestik (sanimas) di Kota Pontianak	3/SP-II/2020 10 Februari 2020
11	Kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan kejaksaan Negeri Pontianak tentang pembangunan gedung Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak	5/SP-IV/2020 15 April 2020
12	Pemberian Jasa Advokasi dalam Penanganan dan penyelesaian perkara Pemerintah Kota Pontianak	6/SP-V/2020 4 Mei 2020
13	Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak 2020	8 /SP-VII/2020 8 Juli 2020
14	Prioritas Flapon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020	9/SP-VII/2020 8 Juli 2020

NO.	JENIS KERJASAMA	NOMOR & TANGGAL KERJASAMA
15	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang Addendum Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Tahun Tamat Pembangunan sekolah Polisi negara (SPN) Polda Kalbar	10/SP-VII/2020 8 Juli 2020
16	Nota kesepakatan antara pemerintah Kota dengan DPRD tentang Adendum Nota kesepakatan antara Pemerintah kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahun jamak pembangunan sekolah terpadu kecamatan Pontianak Selatan	11/SP-VIII/2020
17	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang Addendum Nota Kesepakatan antara Pemrintah Kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang Pelaksanaan pekerjaan kegiatan Tahunan Jamak penataan tepi sungai kapuas pembangunan Waterfront di Kota Pontianak Pontianak	12/SP-VII/2020 8 Juli 2020
18	Nota Kesepakatan antar Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang Addendum Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pontianak tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Tahun jamak Pembangunan Rumah Sakit Kota Pontianak WilayahKecamatan Pontianak Utara	13/SP-VII/2020 8 Juli 2020
19	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pontianak dengan DPRD Kota Pontianak tentang Pelaksanaan Pekerjaankegiatan tanah jamak pembangunan kantor kejaksaan Kota Pontianak	14/SP-VII/2020 30 Juli 2020
20	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pontianak dan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan barat tentang Pelayanan Umum dan pelayanan Klinik Kota Pontianak Priode Than 2020 s/d 2023	15/SP-VIII/2020 2 Agustus 2020
21	Perjanjian Kerjsa sama tentang pemberian jasa advokasi dalam penanganan dan penyelesaian perkara pemerintah Kota Pontianak	18 /SP-VIII/2020 24 Agustus 2020
22	perjanjian kerjsa sama tentang pemberian jasa advokasi dalam penanganan dan penyelesaian perkara pemerintah Kota Pontianak	20/SP-IX/2020 1 September 2020

NO.	JENIS KERJASAMA	NOMOR & TANGGAL KERJASAMA
23	Nota kesepahaman bersama antara STIS Syarif Abdurrahman Pontianak dengan Kantor WaliKota Pontianak	23/SP-IX/2020 12 September 2020
24	Nota kesepakatan tentang Rencana Awal perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024	25/SP-IX/2020 17 September 2020
25	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang Rencana Awal Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024	26/SP-IX/2020 17 September 2020
26	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Kantor Pertanahan Kota Pontianak tentang aAddendum atas Perjanjian Kerjsa Sama bo 8/sp-IV/2019 dan No 151/SK-up.04/IV/2019 tentang Sertifikasi Tanah Aset	28/SP-IX/2020 24 September 2020
27	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020	29/SP-XI/2020 6 Nopember 2020
28	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tentang Kerjasama dalam rangka peningkatan perekonomian dan daya saing daerah.	30/SP-XII/2020
29	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Pontianak Candra, SH tentang peralihan HGB No. 5000/Darat Sekip diatas HPL No. 1 Tahun 1984 yang terletak di Jalan Diponegoro Kel Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota	31/SP-XII/2020
30	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Pontianak	32/SP-XII/2020 28 Desember 2020
31	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah daerah Kota Pontianak dengan Universitas Tanjungpura	33/SP-XII/2020 28 Desember 2020
32	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Pontianak dengan Kepolisian Negeri Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan	34/SP-XII/2020 28 Desember 2020

NO.	JENIS KERJASAMA	NOMOR & TANGGAL KERJASAMA
33	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Pontianak dengan RS di Wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat Kota Pontianak	35/SP-XII/2020 28 Desember 2020

TAHUN 2021		
1	Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	7/SP-II/2021 23 Februari 2021
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat Kota Pontianak dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat	32/SP-XII/2021 28 Desember 2021
3	Pemanfaatan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa (Aksi Praja) Kota Pontianak dengan Provinsi Kalimantan Barat	415.4/01/SP-XII/2021 6 Desember 2021
4	Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kemetrolgian Legal di Kota Pontianak dengan Kabupaten Kayong Utara	38/SP-XII/2021 21 Desember 2021
5	Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Meterologi Legal di Kota Pontianak dengan Kabupaten Kayong Utara	415.4/01/SP-XII/2021 23 Desember 2021
6	Jasa Layanan Angkutan Penyebrangan Sungai Bardan Siantan Kota Pontianak dengan PT. Jembatan Nusantara	415.4/01/SP-III/2021 15 Maret 2021
7	Penyaluran Dana Bantuan Stimulsi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak Layak Kota Pontianak Tahun 2021 dengan PT. Bank Kalbar	415.4/02/SP-V/2021 5 Mei 2021
8	Penyaluran Dana Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pontianak Tahun 2021 dengan PT. Bank Kalbar	415.4/03/SP-V/2021 5 Mei 2021
9	Pemutahiran Data Penduduk Tamat Pendidikan Tinggi dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer	415.4/05/SP-VI/2021 2 Nopember 2021
10	Sistem Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kesehatan dalam Rangka mendukung Indikator Kinerja Pemerintah Daerah di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan RS. Anugrah Bunda	415.4/08/SP-XII/2021 28 Desember 2021
11	Sistem Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Mendukung Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Difasilitasi Kesehatan Rujuk Tingkat (FKRTL) dengan RS. Antonius	415.4/09/SP-XII/2021 28 Desember 2021
12	Sistem Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Mendukung Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Difasilitasi Kesehatan Rujuk Tingkat (FKRTL) dengan RS Umum Yarsi	415.4/10/SP-XII/2021 28 Desember 2021
13	Sistem Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Mendukung Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Difasilitasi Kesehatan Rujuk Tingkat (FKRTL) dengan RS. Sultan Syarif Mohammad Alkadrie	415.4/11/SP-XII/2021 28 Desember 2021

14	Sistem Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Mendukung Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Difasilitasi Kesehatan Rujuk Tingkat (FKRTL) dengan RS. Karitas Bakti	415.4/12/SP-XII/2021 28 Desember 2021
15	Sistem Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Mendukung Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Difasilitasi Kesehatan Rujuk Tingkat (FKRTL) dengan RS. Promedika	415.4/13/SP-XII/2021 28 Desember 2021
16	Sistem Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Mendukung Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Difasilitasi Kesehatan Rujuk Tingkat (FKRTL) dengan RS . Bersalin Nasaba	415.4/14/SP-VI/2021 28 Desember 2021
17	Sistem Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Mendukung Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Difasilitasi Kesehatan Rujuk Tingkat (FKRTL) dengan RS. Jiwa Sungai Bangkong	415.4/15/SP-XII/2021 28 Desember 2021
18	Sistem Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Mendukung Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Difasilitasi Kesehatan Rujuk Tingkat (FKRTL) dengan RS. Anto Soedjarwo	415.4/16/SP-XII/2021 28 Desember 2021
19	Sistem Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Mendukung Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Difasilitasi Kesehatan Rujuk Tingkat (FKRTL) dengan RS. Bersalin Jempa	415.4/17/SP-XII/2021 28 Desember 2021
20	Sistem Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Mendukung Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Difasilitasi Kesehatan Rujuk Tingkat (FKRTL) dengan RS. Mitra Medika	415.4/18/SP-XII/2021 28 Desember 2021
21	Sistem Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Mendukung Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Difasilitasi Kesehatan Rujuk Tingkat (FKRTL) dengan RS. Universitas Tanjung Pura	415.4/19/SP-XII/2021 28 Desember 2021
22	Kerjasama Saling Mendukung Pengelolaan Sampah di Kota Pontianak dengan Alam Kalimantan Barat Sukses Mandiri	1/SP-I/2021 20 Januari 2021
23	Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Wilayah Kota Pontianak dengan BPJS Kesehatan Cabang Pontianak	2/SP-I/2021 20 Januari 2021
24	Sinergi Pembangunan dan Pengembangan Ketenaga Listrikan Diwilayah Kota Pontianak dengan PT. PLN (Persero) Cabang Pontianak	8/SP-II/2021 24 Februari 2021

25	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemerintah Daerah dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Kota Pontianak	28/SP-X/2021 11 Oktober 2021
26	Layanan Elektronifikasi Transaksi Pemda guna mendukung Tata Kelola Keuangan di Kota Pontianak dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Pontianak	30/SP-X/2021 22 Oktober 2021
27	Pengelolaan Sampah di Kota Pontianak dengan CV. Mulliana Berkah	35/SP-XI/2021 22 November 2021
28	Prioritas dan plafon Anggaran sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dengan DPRD Kota Pontianak	14.1/SP-VIII/2021 13 Agustus 2021
29	Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan DPRD Kota Pontianak	14.1/SP-VIII/2021 13 Agustus 2021
30	Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dengan DPRD Kota Pontianak	16/SP-VIII/2021 13 Agustus 2021
31	Prioritas dan Flapon Anggaran Semetara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 dengan DPRD Kota Pontianak	17/SP-VIII/2021 13 Agustus 2021
32	Integrasi CCTV Polda dengan Pemerintah Kota Pontianak	18/SP-VIII/2021 13 Agustus 2021
33	Praperaperda Kota Pontianak dengan DPRD Kota Pontianak	32/SP-XI/2021 03 November 2021

Sumber Data: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2021

2.8. Rekapitulasi Permasalahan Kota Pontianak

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampunya.
		2 Pemerataan dan penataan tenaga pendidik pada mata pelajaran tertentu melebihi rasio guru dan rombongan belajar atau jumlah jam mengajar.

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
		3	Perbandingan antara alat pendukung dan media pembelajaran dengan jumlah siswa belum memadai.
		4	Kelayakan kualifikasi pendidikan pendidik dan tutor yang sesuai standar pelayanan minimal belum mencapai 100%.
		5	Rehabilitasi sarana dan prasarana pembelajaran serta layanan inklusi belum menjangkau seluruh sekolah.
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
	Dinas Kesehatan	1	Multitasking yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di lapangan. Selain menangani Wabah Covid-19 yang menjadi masalah di tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dinas Kesehatan juga diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan program prioritas Kementerian Kesehatan yang juga memiliki dampak yang besar dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera
		2	Kebijakan Refocusing anggaran yang berakibat terjadinya perubahan rencana kegiatan yang sudah dilakukan
		3	Keterbatasan sediaan BHP medis dan obat-obatan selama masa pandemi Covid-19.
		4	Kekhawatiran masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan di masa Pandemi Covid-19 sehingga berdampak kepada capaian realisasi program program prioritas
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Kurang optimalnya penanganan jalan dan jembatan karena tidak sebandingnya cakupan obyek yang ditangani dengan ketersediaan dana
		2	Belum optimalnya koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
			kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan dan perijinan pemanfaatan ruang jalan
		3	Perlunya data base sistem pengairan yang terintegrasi
		4	Belum optimalnya Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air
		5	Belum tersedianya masterplan drainase Kota Pontianak
		6	Masih minimnya kapasitas pengelolaan sampah, baik dari segi kuantitas timbulan sampah, rendahnya kualitas pengelolaan serta terbatasnya lahan TPA
		7	Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai peruntukan
		8	Kapasitas produksi air bersih oleh PDAM masih terbatas dan intrusi air laut menyebabkan air menjadi asin terutama pada musim kemarau Panjang
4	Urusan Pemerintahan Bidang Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan akibat urbanisasi penduduk. Kedudukan Kota Pontianak sebagai ibukota Propinsi (pusat ekonomi, perdagangan dan pendidikan) telah menjadi magnet tersendiri bagi penduduk untuk datang mencari penghidupan yang lebih layak ke Kota Pontianak

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
		2	Tumbuhnya Kawasan Kumuh dan Rumah Tak Layak Huni di tepian sungai dan tengah kota sebagai akibat dari tingginya harga lahan perkotaan, ketidak sesuaian rencana pemanfaatan lahan, dan makin meningkatnya jumlah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
		3	Penurunan kualitas PSU di kawasan Perumahan dan Permukiman akibat rendahnya komitmen dan kesadaran masyarakat untuk memelihara PSU yang sudah terbangun
		4	Mahalnya biaya konstruksi, akibat kondisi geografis berupa tanah gambut dengan daya dukung tanah yang rendah dan muka air tinggi
		5	Tumbuhnya Kawasan Permukiman dengan sanitasi yang buruk
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
	Satuan Polisi Pamong Praja	1	Kuranginya kuantitas personil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan banjir
		2	Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota berupa dataran flat, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrim
		3	Bencana asap pada musim kemarau karena pembakaran lahan yang terjadi di Kota Pontianak dan

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
			Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat lainnya berdampak pada kondisi udara di Kota Pontianak. Kebakaran lahan dipicu oleh pembukaan lahan untuk pemukiman dan pertanian
		4	Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran yang dapat menyebabkan genangan bahkan banjir
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
	Dinas Sosial	1	Belum adanya Updating Data terutama yang data urusan SPM
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		
7	Dinas Tenaga Kerja	1	Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal
		2	Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Rendahya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran
		2	Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		
	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	1	Ketergantungan ketersediaan/pasokan bahan pangan

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
			dari luar daerah (perdagangan antar pulau)
		2	Masih terdapat kawasan yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	Masih banyaknya status kepemilikan tanah yang sulit ditelusuri, sehingga menyulitkan pemerintah untuk membayar ganti rugi atas tanah yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan/fasilitas umum
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
	Dinas Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya kepadatan dan jumlah penduduk, pesatnya perkembangan aktivitas transportasi dan usaha/industri yang mengakibatkan meningkatnya volume limbah/sampah dan pencemaran lingkungan
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Belum semua penduduk memiliki Kartu Keluarga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KK SIAK)
		2	Masih belum semua penduduk wajib KTP yang melakukan perekaman KTP-el
		3	Belum semua penduduk wajib KTP yang sudah merekam KTP-el menerima KTP-el
		4	Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen pencatatan sipil
		5	Setiap ada aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri yang harus dilaksanakan di Daerah selalu menimbulkan kendala teknis, yang menyebabkan keharusan untuk mengimplementasikan hal tersebut tidak dapat terealisasi tepat waktu

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		-
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		-
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
	Dinas Perhubungan		
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	
		2	
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1	Kondisi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi sebanyak 106 unit dari jumlah koperasi aktif sebanyak 479 unit, UMKM mencapai 95% untuk skala usaha sulit berkembang, SDM pengelola Koperasi dan UMKM yang rendah, kurang pemahaman pengurus, pengelola maupun anggota koperasi tentang perkoperasian, kepastian berusaha, akses pada sumber daya produktif rendah merupakan tantangan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	Pelaksanaan sistem database penanaman modal belum optimal
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1	Belum optimalnya keterampilan dan kesempatan berwirausaha dikalangan Pemuda
		2	Belum adanya olahraga unggulan daerah yang bisa dapat memacu atlet

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
			berprestasi di tingkat yang lebih tinggi
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		
	Dinas Komunikasi Informatika	1	Belum adanya updating data statistik sektoral maupun statistik. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data terpadu dan terintegrasi sebagai suatu wujud kesatuan data pembangunan untuk mewujudkan visi daerah dan mendukung peningkatan layanan publik kepada masyarakat
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		
	Dinas Komunikasi Informatika	1	Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Belum semua kelompok sanggar seni mendaftarkan atau memperoleh tanda sah daftar
		2	Perlu dilengkapinya sarana dan prasarana pertunjukan sebagai penunjang kegiatan seni dan budaya
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		
	Dinas Perpustakaan	1	Kurangnya sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan dikarenakan bangunan kantor yang tidak sesuai standar Nasional
		2	Perlunya sarana publikasi yang lebih masif agar perpustakaan menjadi rujukan bagi masyarakat Kota Pontianak
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		
		1	Kurangnya sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan dikarenakan bangunan kantor yang tidak sesuai standar Nasional
		2	Rendahnya kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya arsip dan perpustakaan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		
	Dinas Pangan Pertanian dan	1	Belum optimalnya fasilitas sarana

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
	Perikanan		dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1	Salah satu permasalahan dalam pengembangan kawasan Tugu Khatulistiwa adalah kepemilikan lahan yang masih dimiliki oleh TNI-AD. Pemerintah Kota Pontianak telah berusaha agar kawasan di Tugu Khatulistiwa dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak
		2	Meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata di Kota Pontianak menjadi destinasi wisata yang menarik unggul dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	1	Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian
		2	Usaha peternakan rakyat umumnya masih ekstensif / tradisional dan belum menerapkan system agribisnis sehingga produksi dan produktivitas ternak masih rendah
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	1	Tingkat kesadaran pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar, manajemen pengelolaan pasar belum professional, merupakan tantangan tersendiri untuk mewujudkan pasar tradisional menjadi pasar sehat dengan kondisi tetap aman, nyaman, tertib untuk bertransaksi bagi masyarakat Kota Pontianak
		2	Kegiatan Perlindungan Konsumen Kota Pontianak masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
			misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penyebab lainnya adalah masih rendahnya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijaksana dan pintar, sehingga mau pro-aktif memberikan pengaduan indikasi / kemungkinan pelanggaran hak-hak konsumen baik dalam memperoleh barang dan jasa
		3	Sehubungan dengan terbentuknya UPTD Metrologi legal Kota Pontianak, maka pelayanan tertib UTTP perlu peralatan, SDM yang kompeten, anggaran operasional yang memadai, sehingga investasi ke peralatan, peningkatan SDM, dan biaya akreditasi dalam jangka menengah diperlukan untuk mempersiapkan laboratorium yang terakreditasi dan bersaing dengan laboratorium sejenis
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak, Tahun 2025 menuju Pontianak Kota Khatulistiwa yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa berwawasan Lingkungan, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/EAC) 2015, dan berlakunya Asean
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
1	Sekretariat Daerah	1	Kelembagaan Perangkat Daerah yang belum seluruhnya ideal
		2	Kurangannya Respon Perangkat Daerah terhadap pengembangan inovasi pelayanan
2	Sekretariat DPRD	1	-

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
1	Perencanaan		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu
		2	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan
		3	Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah
		4	Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah
2	Keuangan		
	Badan Keuangan Daerah	1	Penatausahaan barang milik daerah belum optimal
		2	Belum optimalnya pemungutan pendapatan asli daerah
		3	Laporan Keuangan Berbasis Akrual belum dapat menghasilkan laporan keuangan yang real time
3	Kepegawaian		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1	Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur masih belum ideal, terjadi kekurangan SDM aparatur
		2	Belum semua sumber daya aparatur yang ada bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya
4	Pendidikan dan Pelatihan		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1	Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
5	Penelitian dan Pengembangan		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
1	Inspektorat	1	Jumlah APIP yang ada belum memenuhi total kebutuhan APIP
		2	Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat
		3	Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi
		4	Ketersediaan Anggaran Pengawasan belum sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2020
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
1	Kecamatan Pontianak Barat	1	Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk Inovasi Kelurahan
		2	Rendahnya cakupan layanan persampahan
2	Kecamatan Pontianak Selatan	1	Kurangunya personel ASN pada seksi ketentraman dan ketertiban
		2	Kurangunya koordinasi antara seksi pemberdayaan masyarakat baik di kecamatan dan kelurahan dengan OPD terkait maupun sebaliknya sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas
3	Kecamatan Pontianak Utara	1	Perlu penataan lebih asri terhadap pedagang informal di lingkungan Tugu Khatulistiwa
		2	Masih kurangnya kesadaran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
4	Kecamatan Pontianak Kota	1	Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
5	Kecamatan Pontianak Tenggara	1	Tingginya pembukaan lahan dan pembangunan kawasan hunian perlu mendapat perhatian secara khusus dimana kawasan gambut yang seringkali mengalami kebakaran lahan dan berdampak cukup besar bagi lingkungan sekitar. Selain itu kawasan yang berkembang di wilayah sekitar Perguruan Tinggi Negeri yang banyak didirikan hunian kos dan café yang memerlukan pengawasan lebih sehingga tidak menimbulkan kerawanan sosial
6	Kecamatan Pontianak Timur	1	Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan daerah yang ada kepada masyarakat
		2	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan pelayanan prima
		3	Beban kerja yang terlalu banyak tidak didukung dengan SDM yang sesuai
8	UNSUR UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Minimnya alokasi dana yang diperuntukkan untuk program dan kegiatan pada Kantor Kesbangpol dan alokasi dana diperuntukkan untuk pos- pos tim
		2	Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah, politik dan kemasyarakatan, dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.

2.9. KESEPAKATAN BERSAMA (Mou) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) TAHUN 2020 Dan 2021

No.	Nomor/ Tanggal	Judul MoU	Para Pihak	Jangka Waktu	Fasilitasi OPD
1	07.1 / SP - VIII / 2020 02 Agustus 2020	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemkot Pontianak Dengan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan Barat (HIMPSI KALBAR) Tentang Pendampingan Psikologis Penanganan Kasus Kekerasan Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan Dan Anak Dikota		02-08-23	DP2KBP3A
2	07 / SP - V / 2020 19 Mei 2020	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Disdukcapil) Dengan Universitas Tanjungpura Tentang Pemutakhiran Data Penduduk Tamat Pendidikan Tinggi		19-05-23	Disdukcapil

No.	Nomor/ Tanggal	Judul MoU	Para Pihak	Jangka Waktu	Fasilitasi OPD
3	09 / SP - IX / 2020 19 Agustus 2020	Perjanjian Kerja Sama Antara BAPPEDA Dengan Universitas Tanjungpura Tentang Kerjasama Pemanfaatan Dan Pengembangan Hasil Penelitian Bidang Sosial Dan Politik		19-08-23	Bappeda
4	30 / SP - XII / 2020 15 Desember 2020	Kesepakatan Bersama Pemerintah KAL- BAR Pemkot Pontianak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tentang Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Dan Daya Saing Daerah		15-12-23	Pemerintah Provinsi KAL- BAR Pemkot Pontianak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Dan Pemerintah Kabupaten Mempawah
5	01 / SP - I / 2020 02 Januari 2020	Perjanjian Kerja Sama Antara Pekot Pontianak Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak Tentang Penyimpanan		31-12-20	Pemerintah Kota Pontianak

No.	Nomor/ Tanggal	Judul MoU	Para Pihak	Jangka Waktu	Fasilitasi OPD
		Uang Daerah			
6	01 / SP - 1 / 2020 29 Januari 2020	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemkot Pontianak Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tentang Pembuatan Kartu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pontianak		29-01-25	Pemerintah Kota Pontianak
7	1/SP-I/2020 2 Januari 2020	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Komisi Penanggulangan Aids Kota Pontianak tentang Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyeluran Menular Tahun 2020.			KPA

No.	Nomor/ Tanggal	Judul MoU	Para Pihak	Jangka Waktu	Fasilitasi OPD
8	2/SP-I/2020 2 Januari 2020	Kesepakatan Bersama antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak dengan Pemerintah Kota Pontianak tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kota Pontianak			BPJS Ketenaga kerjaan
9	2.1/SP-I/020 2 Januari 2020	Kesepakatan bersama antara BPJS			BPJS Kesehatan
10	3/SP-II/2020 10 Februari 2020	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Ditjen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota tentang Pembangunan Insprastruktur Persampahan (TPS 3 R) dan Air Limbah Domestik			Dinas Lingkungan Hidup

No.	Nomor/ Tanggal	Judul MoU	Para Pihak	Jangka Waktu	Fasilitasi OPD
		(sanimas) di Kota Pontianak			
11	5/SP-IV/2020 15 April 2020	Kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan kejaksaan Negeri Pontianak tentang pembangunan gedung Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak			PUPR
12	6/SP-V/2020 4 Mei 2020	Pemberian Jasa Advokasi dalam Penanganan dan penyelesaian perkara Pemerintah Kota Pontianak			Hukum B
13	8/SP-VII/2020 8 Juli 2020	Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak 2020			BKD
14	9/SP-VII/2020 8 Juli 2020	Prioritas Flapon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran			BKD

No.	Nomor/ Tanggal	Judul MoU	Para Pihak	Jangka Waktu	Fasilitasi OPD
		2020			
15	10/SP- VII/2020 8 Juli 2020	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang Addendum Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Tahun Tamat Pembangunan sekolah Polisi negara (SPN) Polda Kalbar			Bappeda
16	11/SP- VIII/2020	Nota kesepakatan antara pemerintah Kota dengan DPRD tentang Adendum Nota kesepakatan antara Pemerintah kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahun jamak pembangunan sekolah terpadu kecamatan Pontianak Selatan			Bappeda

No.	Nomor/ Tanggal	Judul MoU	Para Pihak	Jangka Waktu	Fasilitasi OPD
17	12/SP- VII/2020 8 Juli 2020	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang Addendum Nota Kesepakatan antara Pemrintah Kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang Pelaksanaan pekerjaan kegiatan Tahunan Jamak penataan tepi sungai kapuas pembangunan Waterfront di Kota Pontianak Pontianak			Bappeda
18	13/SP- VII/2020 8 Juli 2020	Nota Kesepakatan antar Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang Addendum Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pontianak tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Tahun jamak Pembangunan Rumah Sakit Kota Pontianak WilayahKecamatan Pontianak Utara			Bappeda

No.	Nomor/ Tanggal	Judul MoU	Para Pihak	Jangka Waktu	Fasilitasi OPD
19	14/SP- VII/2020 30 Juli 2020	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pontianak dengan DPRD Kota Pontianak tentang Pelaksanaan Pekerjaankegiatan tanah jamak pembangunan kantor kejaksaan Kota Pontianak			PUPR
20	15/SP- VIII/2020 2 Agustus 2020	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pontianak dan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan barat tentang Pelayanan Umum dan pelayanan Klinik Kota Pontianak Priode Than 2020 s/d 2023			BPMKB
21	18/SP- VIII/2020 24 Agustus 2020	Perjanjian Kerjasama tentang pemberian jasa advokasi dalam penanganan dan penyelesaian perkara pemerintah Kota Pontianak			Hukum
22	20/SP- IX/2020 1 September	perjanjian kerjasama tentang pemberian jasa			Hukum

No.	Nomor/ Tanggal	Judul MoU	Para Pihak	Jangka Waktu	Fasilitasi OPD
	2020	advokasi dalam penanganan dan penyelesaian perkara pemerintah Kota Pontianak			
23	23/SP-IX/2020 12 September 2020	Nota kesepahaman bersama antara STIS Syarif Abdurrahman Pontianak dengan Kantor WaliKota Pontianak			umum
24	25/SP-IX/2020 17 September 2020	Nota kesepakatan tentang Rencana Awal perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024			DPRD
25	26/SP-IX/020 17 September 2020	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang Rencana Awal Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024			Bappeda
26	28/SP-IX/2020 24 September 2020	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Kantor Pertanahan Kota Pontianak tentang aAddendum atas Perjanjian Kerjsa			

No.	Nomor/ Tanggal	Judul MoU	Para Pihak	Jangka Waktu	Fasilitasi OPD
		Sama bo 8/sp-IV/2019 dan No 151/SK-up.04/IV/2019 tentang Sertifikasi Tanah Aset			
27	29/SP-XI/2020 6 Nopember 2020	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Pontianak tentang program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020			
28	30/SP-XII/2020	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tentang Kerjasama dalam rangka peningkatan perekonomian dan daya saing daerah.			
29	31/SP-XII/2020	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Pontianak Candra, SH tentang peralihan HGB No.			BKD

No.	Nomor/ Tanggal	Judul MoU	Para Pihak	Jangka Waktu	Fasilitasi OPD
		5000/Darat Sekip diatas HPL No. 1 Tahun 1984 yang terletak di Jalan Diponegoro Kel Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota			
30	32/SP- XII/2020 28 Desember 2020	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Pontianak			Dinkes
31	33/SP- XII/2020 28 Desember 2020	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah daerah Kota Pontianak dengan Universitas Tanjungpura			
32	34/SP- XII/2020 28 Desember 20202	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Pontianak dengan Kepolisian Negeri Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan			

No.	Nomor/ Tanggal	Judul MoU	Para Pihak	Jangka Waktu	Fasilitasi OPD
33	35/SP- XII/2020 28 Desember 2020	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Pontianak dengan RS di Wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat Kota Pontianak			

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

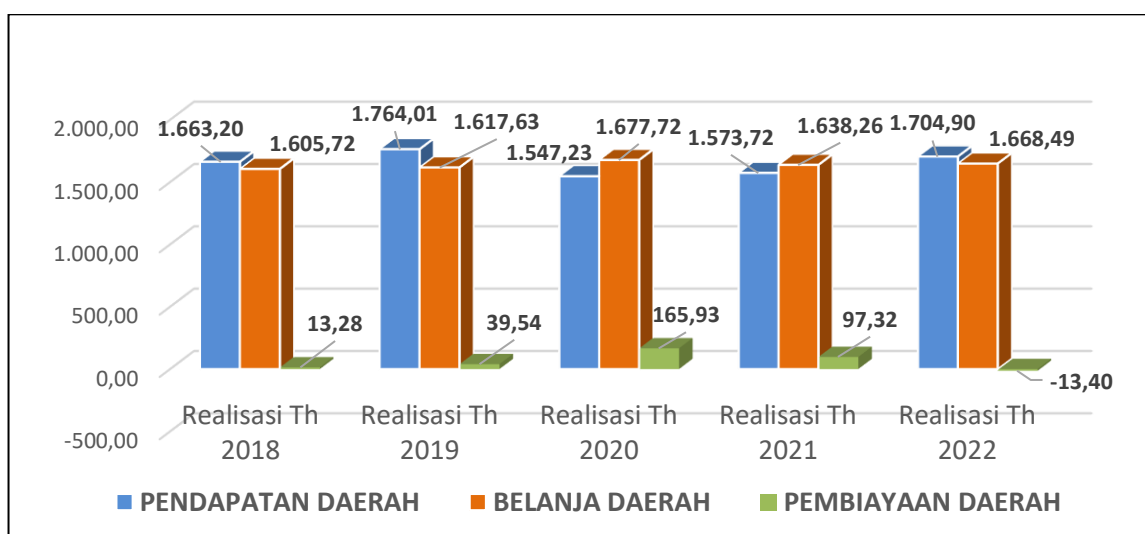
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah digambarkan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah dalam periode 5 (lima) tahun terakhir dapat menjadi salah satu informasi bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan daerah guna membiayai pembangunan di masa yang akan datang.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Secara umum kinerja pemerintah di bidang keuangan dianggap baik jika pendapatan asli daerah bisa meningkat dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pembiayaan pembangunan.

Perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kota Pontianak Tahun 2018 -2022 dapat dilihat pada grafik 3.1.

Grafik 3.1
Kinerja Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2018-2022
(dalam Rp. Milyar)



Keterangan :

- realisasi Tahun 2022 - unaudited

3.1.1. Pendapatan Daerah

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 adalah sebesar 5,37% (Tabel 3.1), dengan catatan bahwa perhitungan pertumbuhan rata-rata tidak memasukkan data pertumbuhan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 dengan pertimbangan adanya penurunan realisasi yang cukup besar akibat terjadinya pandemi covid-19.

Tabel 3.1
Realisasi pendapatan daerah Kota Pontianak
Tahun 2018 -2022 (Dalam Rp. Miliar)

KODE	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022*	r (%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.663,20	1.764,01	1.547,23	1.573,72	1.704,90	5,37
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	440,36	478,79	403,42	413,40	537,80	13,76
4.2	Pendapatan Transfer	1.158,05	1.216,10	1.062,59	1.090,81	1.159,92	4,66
4.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	64,79	69,12	81,22	69,51	7,50	-32,32

Keterangan :

* *Un-audited*

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah dengan proporsi terbesar, disusul dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah (Tabel 3.2).

Tabel 3.2
Proporsi Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Pontianak
Tahun 2018 -2022

KODE	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022*
4	PENDAPATAN DAERAH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26,48%	27,14%	26,07%	26,27%	31,54%
4.2	Pendapatan Transfer	69,63%	68,94%	68,68%	69,31%	68,02%
4.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3,90%	3,92%	5,25%	4,42%	0,44%

Keterangan :

* *Un-audited*

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Kota Pontianak Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak
Tahun 2018 -2022 (Dalam Rp. Miliar)

KODE	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022*	r (%)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	440,36	478,79	403,42	413,40	537,80	13,66
4.1.01	Pajak Daerah	308,90	332,14	258,83	273,92	349,56	13,66
4.1.02	Retribusi Daerah	36,04	39,52	40,15	36,79	44,57	7,48

4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	18,32	25,06	20,74	14,17	24,50	26,01
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	77,09	82,08	83,71	88,52	119,17	15,59

Keterangan :

* *Un-audited*

Pendapatan Asli Daerah, meliputi :

1. Pajak Daerah, yang terdiri atas :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak parkir
- 7) Pajak sarang burung walet
- 8) Pajak bumi dan bangunan
- 9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2. Retribusi Daerah, yang terdiri atas :

- 1) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
- 2) Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor
- 3) Retribusi Pelayanan Pasar
- 4) Retribusi kesehatan
- 5) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran
- 6) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 7) Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah
- 8) Retribusi Terminal
- 9) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 10) Retribusi Penyeberangan Air
- 11) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 12) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
- 13) Retribusi Tempat khusus Parkir
- 14) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 15) Retribusi Pelayanan Tera
- 16) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan / Persetujuan Bangunan Gedung
- 17) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 18) Retribusi Izin Usaha Perikanan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas :

- 1) Bagian laba dari PDAM Tirta Khatulistiwa
- 2) Bagian laba dari BPR Khatulistiwa
- 3) Bagian laba dari PT. BPD Bank Kalbar

4. Penganggaran lain-lain PAD yang sah, yang terdiri atas ;

- 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- 3) Hasil Kerja Sama Daerah
- 4) Penerimaan jasa giro

- 5) Pendapatan bunga
- 6) Pendapatan denda pajak daerah
- 7) Pendapatan denda retribusi daerah
- 8) Pendapatan BLUD
- 9) Pendapatan denda atas pelanggaran perda

Dari Tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan realisasi PAD pada Tahun 2020, tetapi pada Tahun 2022 kondisi realisasi PAD secara nominal sudah berada di atas Tahun 2019 (kondisi sebelum terjadinya Covid-19). Hal ini menandakan bahwa pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19 sudah cukup baik.

Sedangkan untuk Proporsi pembentuk PAD dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Proporsi Pembentuk PAD Kota Pontianak
Tahun 2018 -2022

KODE	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022*
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.1.01	Pajak Daerah	70,15%	69,37%	64,16%	66,26%	65,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	8,18%	8,25%	9,95%	8,90%	8,29%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4,16%	5,23%	5,14%	3,43%	4,56%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17,51%	17,14%	20,75%	21,41%	22,16%

Keterangan :

* *Un-audited*

Berdasarkan tabel 3.4 di atas (data realisasi Tahun 2022), dapat diketahui bahwa Pajak Daerah merupakan pemberi kontribusi terbesar dalam perolehan PAD Kota Pontianak (65,0% dari PAD), dan Lain-lain PAD (22,16% dari PAD).

Khusus untuk Lain-Lain PAD, pendapatan BLUD merupakan komponen terbesar yang memberikan kontribusi di dalam Lain-lain PAD.

Pendapatan Transfer

Untuk realisasi pendapatan transfer yang diterima Kota Pontianak Tahun 2018-2022 bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah provinsi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat, meliputi :
 - Dana Perimbangan, merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari :
 - Dana transfer umum berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
 - Dana transfer khusus berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik

- Dana Insentif Fiskal, merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

2. Pendapatan transfer antar daerah, meliputi :

- Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat , yang terdiri atas :
 - DBH Pajak Kendaraan Bermotor
 - DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - DBH Pajak Air Permukaan
 - DBH Pajak Rokok
- Bantuan Keuangan, dianggarkan sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lainnya yang penggunaannya sesuai peruntukannya.

Data realisasi pendapatan transfer Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Transfer Kota Pontianak
Tahun 2018 -2022 (Dalam Rp. Miliar)

KODE	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022*	r (%)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.158,05	1.216,10	1.062,59	1.090,81	1.159,92	4,66
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	959,31	1.002,55	896,32	912,75	979,64	4,54
	- Dana Bagi Hasil (DBH)	53,79	38,86	51,23	83,56	79,77	10,27
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	699,45	726,77	658,27	646,76	641,22	0,43
	- DAK Fisik	76,03	79,98	57,88	56,17	58,73	2,26
	- DAK Non Fisik	113,29	99,42	101,31	94,35	166,27	18,92
	- Dana Insentif Daerah (DID)	16,75	57,53	27,63	31,91	33,66	88,14
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	198,75	213,55	166,27	178,05	180,28	5,26
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	198,75	211,47	165,67	175,57	180,14	4,99
	- Bantuan Keuangan	0,00	2,08	0,60	2,48	0,14	33,42

Keterangan :

* Un-audited

Secara nominal terjadi penurunan realisasi transfer pada Tahun 2020. Hal ini diperkirakan karena terjadinya pandemi covid-19 pada Tahun 2020. Tetapi mulai Tahun 2021 sampai Tahun 2022 telah terjadi peningkatan pendapatan walaupun

jumlahnya belum bisa melampaui realisasi Tahun 2019 pada saat belum terjadinya pandemi covid-19.

DAU sebagai penyumbang terbesar dari Dana Transfer Pusat sejak Tahun 2020 terus mengalami penurunan.

Untuk DAK Fisik dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022 nilainya relatif sama, dan nilainya masih di bawah realisasi Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Untuk DAK Non Fisik, adanya penambahan yang cukup besar pada Tahun 2022 disebabkan karena adanya perubahan rekening anggaran BOSNAS. Sebelum Tahun 2022 BOSNAS dicatat sebagai pendapatan Hibah dari Provinsi, tetapi sejak Tahun 2022 di pindahkan pencatatannya pada Pendapatan DAK Non Fisik.

Berikut komponen pembentuk dana transfer Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Proporsi Pembentuk Dana Transfer Kota Pontianak
Tahun 2018 -2022

KODE	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022*
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	82,84%	82,44%	84,35%	83,68%	84,45%
	- Dana Bagi Hasil (DBH)	4,64%	3,20%	4,82%	7,66%	6,88%
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	60,40%	59,76%	61,95%	59,29%	55,30%
	- DAK Fisik	6,57%	6,58%	5,45%	5,15%	5,06%
	- DAK Non Fisik	9,78%	8,18%	9,53%	8,65%	14,31%
	- Dana Insentif Daerah (DID)	1,45%	4,73%	2,60%	2,93%	2,90%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah (dari Provinsi Kalbar)	17,16%	17,56%	15,65%	16,32%	15,55%
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	17,16%	17,39%	15,59%	16,10%	15,53%
	- Bantuan Keuangan	0,00%	0,17%	0,06%	0,23%	0,01%

Keterangan :

* *Un-audited*

Dari Tabel 3.6 di atas diketahui bahwa komponen dengan kontribusi terbesar di dalam dana transfer adalah dari DAU, selanjutnya adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah merupakan pendapatan daerah dari sumber lain, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi.

1. Pendapatan Hibah

Merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha

dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pelaksanaan APBD Tahun 2018 – 2021, terdapat Pendapatan Hibah dana BOSNAS dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tetapi semenjak APBD Tahun 2022 pendapatan tersebut telah dialihkan rekeningnya menjadi Pendapatan DAK Non Fisik (BOS), sehingga tampak penurunan yang cukup drastis di Tahun 2022.

Pendapatan hibah lainnya yang rutin diterima oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah Hibah untuk program sambungan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan syarat Pemerintah Daerah menganggarkan dan memberikan penyertaan modal kepada PDAM untuk pelaksanaan pemasangan sambungannya. Anggaran yang rutin diterima Pemerintah Kota Pontianak dari Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp. 7,50 Milyar.

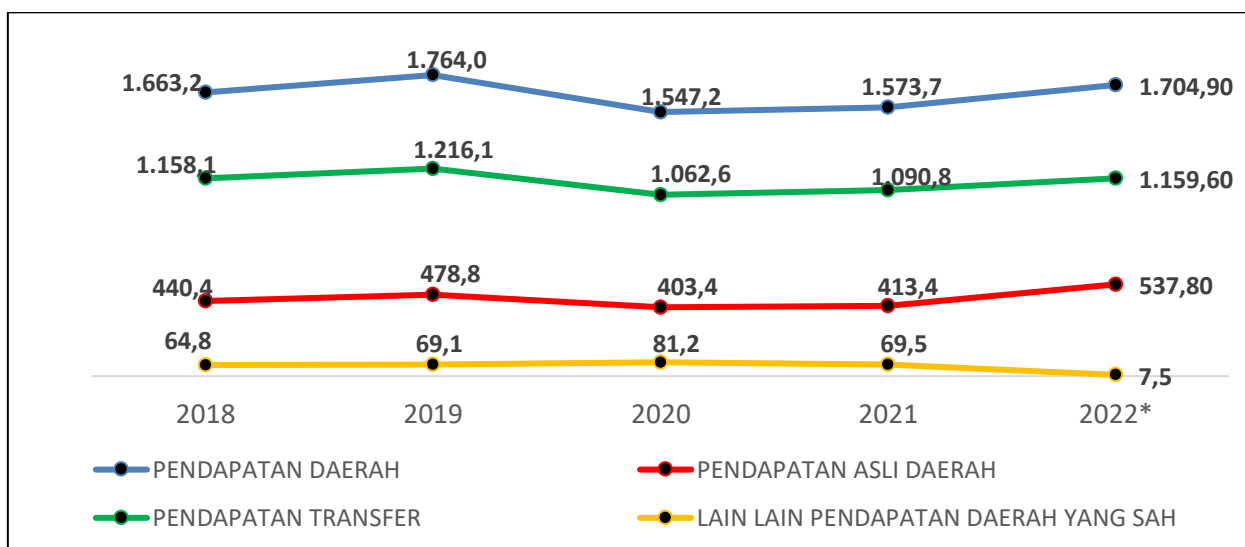
2. Dana Darurat

Merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selama ini Kota Pontianak belum pernah mendapatkan dana darurat.

3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara Keseluruhan perkembangan pendapatan daerah Kota Pontianak selama Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada Grafik 3.2.

Grafik 3.2
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pontianak
Tahun 2018-2022 (dalam Rp. Milyar)



Keterangan :

* Un-audited

3.1.2. Belanja Daerah

Pengukuran kinerja APBD suatu daerah juga dapat dilihat dari besaran realisasi belanja daerah yang telah terserap selama tahun anggaran APBD bersangkutan. Semakin banyak belanja yang terserap maka semakin bagus pula kinerja suatu daerah. Penting bagi suatu daerah untuk merasionalisasikan belanja yang dikeluarkan agar belanja dapat efektif dan efisien, maka formulasi kebijakan umum belanja daerah harus diarahkan pada program prioritas baik dalam rangka pemenuhan atas *mandatory* yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maupun belanja prioritas lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan daerah dan pencapaian target kinerja lainnya yang telah direncanakan.

Berikut data realisasi belanja daerah Kota Pontianak dari Tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Daerah Kota Pontianak
Tahun 2018 -2022 (Dalam Rp. Miliar)

KODE	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022*	r (%)
5	BELANJA DAERAH	1.605,72	1.617,63	1.677,72	1.638,26	1.668,49	3,95
5.1	BELANJA OPERASI	1.114,92	1.179,71	1.216,04	1.246,48	1.221,44	2,39
5.1.01	Belanja Pegawai	570,54	569,07	650,53	670,80	622,53	2,49
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469,69	586,97	528,96	549,56	543,14	4,45
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,80	1,02	26,70
5.1.05	Belanja Hibah	67,58	14,53	30,47	21,46	48,30	31,68
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7,11	7,40	6,08	3,86	6,46	4,29
5.2	BELANJA MODAL	490,80	437,34	423,88	388,56	446,33	-1,86
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,58	37,79	3,22	0,62	-86,09
5.3	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-

Keterangan :

* *Un-audited*

Belanja Daerah Pemerintah Kota Pontianak selama Tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,95%. Tidak terjadinya penurunan belanja di Tahun 2020 walaupun pada tahun tersebut sedang terjadi pandemi covid-19 dikarenakan cukup besarnya SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang bisa mendongkrak volume APBD 2022. Sedangkan untuk Tahun 2021 Pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan untuk melakukan pinjaman daerah sehingga penurunan belanja daerah pada Tahun tersebut secara umum tidak terlalu besar.

Adapun proporsi dari masing-masing komponen pembentuk belanja daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Proporsi Belanja Daerah Kota Pontianak
Tahun 2018 -2022

KODE	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022*
5	BELANJA DAERAH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.1	BELANJA OPERASI	69,43%	72,93%	72,48%	76,09%	73,21%
5.1.01	Belanja Pegawai	35,53%	35,18%	38,77%	40,95%	37,31%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29,25%	36,29%	31,53%	33,55%	32,55%
5.1.03	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,06%
5.1.05	Belanja Hibah	4,21%	0,90%	1,82%	1,31%	2,89%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,44%	0,46%	0,36%	0,24%	0,39%
5.2	BELANJA MODAL	30,57%	27,04%	25,27%	23,72%	26,75%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00%	0,04%	2,25%	0,20%	0,04%
5.3	BELANJA TRANSFER	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%

Keterangan :

* *Un-audited*

Berikut penjelasan terkait pelaksanaan belanja dalam APBD Tahun 2018 sampai Tahun 2022 :

Belanja Operasi

Secara rinci belanja operasi yang dikelola Pemerintah Kota Pontianak pada APBD Tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, yang terdiri dari :

Berdasarkan data di atas maka realisasi belanja pegawai Tahun 2022 adalah Rp.622,53 Miliar atau 37,31% dari total realisasi belanja yang ada. Belanja Pegawai sebagai mana tersebut di atas terdiri atas :

a. Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);

Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Termasuk di dalam tunjangan yaitu iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Penganggaran gaji dan tunjangan ASN ini juga sudah memperhitungkan asumsi adanya penambahan ASN baru di Tahun anggaran yang direncanakan.

b. Belanja tambahan penghasilan ASN;

Dianggarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, berdasarkan kondisi kerja, berdasarkan kelangkaan profesi, dan berdasarkan prestasi kerja.

c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif;

Termasuk didalamnya lainnya adalah tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan (tamsil) guru untuk guru yang belum berserifikasi, insentif pajak, insentif retribusi, jasa pelayanan kesehatan, honorarium pengelola

keuangan daerah, honorarium pengadaan barang/jasa serta honorarium pengelola barang milik daerah.

- d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDh/WKDh;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDh/WKDh.
2. Belanja Barang dan Jasa
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa tersebut adalah dalam rangka untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
3. Belanja Bunga
- Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Untuk Tahun 2022, belanja bunga yang direalisasikan adalah kepada PT. BPD Bank Kalbar dalam rangka pemenuhan kewajiban atas pinjaman daerah yang dilakukan pada Tahun 2021.
4. Belanja Subsidi
- Selama kurun Tahun 2018 – 2022, Pemerintah Kota Pontianak tidak ada penganggaran dan realisasi belanja subsidi.
5. Belanja Hibah
- Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Secara umum Belanja Hibah yang biasa direalisasi oleh Pemerintah Kota Pontianak kurun Tahun 2018 sampai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
- a. Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah untuk Partai Politik;
 - c. Belanja Hibah bagian dari DAK Non Fisik BOP PAU;
 - d. Belanja Hibah bagian dari DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - e. Belanja Hibah bagian dari DAK Non Fisik Biaya Operasional Sekolah (BOS);
 - f. Khusus Tahun 2018, realisasi anggaran Hibah secara nominal cukup besar karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan Hibah dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
6. Belanja Bantuan Sosial
- Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, yang meliputi :

1. Belanja tanah;
2. Belanja peralatan dan mesin;
3. Belanja bangunan dan gedung;
4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan;
5. Belanja aset tetap lainnya;
6. Belanja aset lainnya.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat meliputi :

1. Bencana alam non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik.

Sedangkan keperluan mendesak meliputi :

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan;
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan penganggaran dalam APBD yang meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dimanfaatkan untuk menyeimbangkan komponen belanja dan pendapatan, sehingga rencana penggunaan anggaran untuk kegiatan dapat dipenuhi seluruhnya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yakni penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagai berikut :

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

1. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan APBD dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022, komponen yang menjadi sumber dari penerimaan pembiayaan daerah adalah SiLPA Tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Untuk pencairan dana cadangan pernah diterima pada Tahun 2018 sebesar Rp. 10,06 Miliar yang digunakan untuk hibah pilkada kepada KPU dan Bawaslu.

Untuk Tahun 2021 Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan pinjaman daerah kepada PT. BPD Bank Kalbar sebesar Rp. 91,8 Milyar yang skema pembayarannya akan dilunasi paling lambat pada APBD Tahun 2023.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

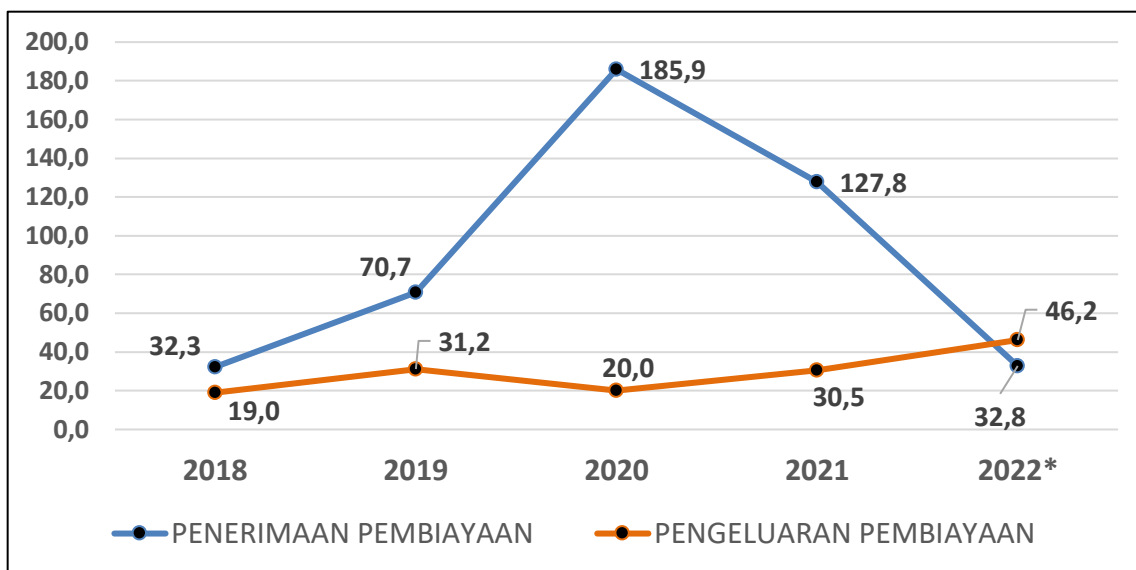
1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan modal daerah;
3. Pembentukan dana cadangan;
4. Pemberian pinjaman daerah;
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan daerah yang rutin dibiayai adalah penyertaan modal kepada BUMD. Khusus untuk pembayaran cicilan pokok utang dilaksanakan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 kepada PT BPD Bank Kalbar atas utang yang dilakukan pada Tahun 2021.

Untuk penyertaan modal daerah yang biasa diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah untuk PDAM Tirta Khatulistiwa (dalam rangka program hibah sambungan air bersih dari pemerintah pusat untuk masyarakat berpenghasilan rendah), kepada BPR Khatulistiwa, dan kepada PT. BPD Bank Kalbar.

Adapun perkembangan pembiayaan daerah Kota Pontianak Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3
Kinerja Pembiayaan Daerah Kota Pontianak
Tahun 2018-2022 (Dalam Rp. Milyar)



Keterangan :

* *Un-audited*

Data lengkap realisasi Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun 2018 hingga Tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Realisasi APBD Kota Pontianak Tahun 2018 - 2022

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN 2018	REALISASI APBD TAHUN 2019	REALISASI APBD TAHUN 2020	REALISASI APBD TAHUN 2021	REALISASI APBD TAHUN 2022*	Pertumbuhan rata-rata**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.663.204.429.560	1.764.013.422.654	1.547.232.307.256	1.573.721.427.451	1.704.897.506.230	5,37%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	440.358.120.031	478.790.894.895	403.422.945.219	413.401.586.270	537.797.747.855	13,76%
4.1.01	Pajak Daerah	308.900.825.494	332.139.762.217	258.825.643.687	273.921.641.197	349.602.716.908	13,66%
4.1.02	Retribusi Daerah	36.039.842.255	39.515.721.695	40.145.664.723	36.789.417.802	44.571.099.429	7,48%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	18.322.956.065	25.059.575.372	20.736.845.573	14.170.223.346	24.502.806.931	26,01%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	77.094.496.217	82.075.835.611	83.714.791.236	88.520.303.925	119.121.124.588	15,59%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.158.053.989.529	1.216.104.828.185	1.062.590.864.860	1.090.807.268.181	1.159.599.758.375	4,66%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	959.308.769.606	1.002.553.952.787	896.318.747.446	912.754.641.188	979.321.954.301	4,54%
	- Dana Bagi Hasil (DBH)	53.786.710.306	38.860.106.726	51.228.475.064	83.561.957.507	79.767.477.013	10,27%
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	699.448.985.000	726.769.846.000	658.270.110.000	646.760.997.000	641.217.989.619	0,43%
	- DAK Fisik	76.033.042.368	79.977.938.398	57.882.304.142	56.174.991.405	58.730.112.869	2,26%
	- DAK Non Fisik	113.290.031.932	99.419.221.663	101.309.889.240	94.349.816.276	165.949.695.800	18,92%
	- Dana Insentif Daerah (DID)	16.750.000.000	57.526.840.000	27.627.969.000	31.906.879.000	33.656.679.000	88,14%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	198.745.219.923	213.550.875.398	166.272.117.414	178.052.626.993	180.277.804.074	5,26%
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	198.745.219.923	211.469.117.798	165.672.117.414	175.572.626.993	180.137.804.074	4,99%
	- Bantuan Keuangan	0	2.081.757.600	600.000.000	2.480.000.000	140.000.000	33,42%

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN 2018	REALISASI APBD TAHUN 2019	REALISASI APBD TAHUN 2020	REALISASI APBD TAHUN 2021	REALISASI APBD TAHUN 2022*	Pertumbuhan rata-rata**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	64.792.320.000	69.117.699.574	81.218.497.177	69.512.573.000	7.500.000.000	-32,32%
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.913.000.000	69.117.699.574	81.218.497.177	69.512.223.000	7.500.000.000	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	55.879.320.000			350.000		
5	BELANJA DAERAH	1.605.719.399.876	1.617.630.806.976	1.677.716.207.957	1.638.258.591.232	1.668.494.785.328	3,95%
5.1	BELANJA OPERASI	1.114.915.345.738	1.179.713.012.341	1.216.040.457.903	1.246.476.217.669	1.221.444.695.727	2,39%
5.1.01	Belanja Pegawai	570.542.666.012	569.072.029.421	650.525.368.912	670.797.755.032	622.528.393.122	2,49%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.689.920.561	586.969.628.885	528.958.140.557	549.562.092.162	543.140.713.659	4,45%
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	803.250.000	1.017.745.067	26,70%
5.1.05	Belanja Hibah	67.576.427.131	14.530.988.613	30.473.684.583	21.457.197.141	48.302.130.176	31,68%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.106.332.035	7.404.443.756	6.083.263.851	3.855.923.334	6.455.713.703	4,29%
5.2	BELANJA MODAL	490.804.054.138	437.337.696.211	423.881.731.785	388.559.816.896	446.328.310.367	-1,86%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0	580.098.424	37.794.018.268	3.222.556.667	621.779.234	86,09%
5.4	BELANJA TRANSFER					100.000.000	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	13.284.313.609	39.540.062.206	165.925.637.885	97.316.887.133	-13.398.963.686	90,54%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.284.313.609	70.728.022.206	185.925.637.885	127.816.887.133	32.781.036.314	4,49%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	22.191.428.958	70.705.993.836	185.925.637.885	36.012.032.284	32.779.723.277	43,00%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	10.064.319.457	-	-	-		
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	91.800.000.000		

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN 2018	REALISASI APBD TAHUN 2019	REALISASI APBD TAHUN 2020	REALISASI APBD TAHUN 2021	REALISASI APBD TAHUN 2022*	Pertumbuhan rata-rata**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	28.565.194	22.028.370	0	4.854.849	1.313.037	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.000.000.000	31.185.000.000	20.000.000.000	30.500.000.000	46.180.000.000	56,01%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	19.000.000.000	31.185.000.000	20.000.000.000	30.500.000.000	12.500.000.000	19,21%
6.2.03	Pembayaran Pokok Hutang					33.680.000.000	

keterangan :

* *Un-audited*

** Khusus untuk rata-rata **pertumbuhan pendapatan** tidak memperhitungkan pertumbuhan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 karena adanya kasus pandemi covid-19

3.2. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Tabel 3.10
Neraca Aset Pemerintah Kota Pontianak
Per 31 Desember 2018 – 31 Desember 2021

NO	URAIAN	TAHUN				R
		2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.3.1	ASET					
5.3.1.1	ASET LANCAR					
5.3.1.1.1	Kas dan Setara Kas	70.738.001.087	185.954.006.232	36.014.770.384	32.783.699.452	24,42%
5.3.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	60.549.045.307	178.441.067.273	26.076.799.225	20.969.867.045	29,91%
5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	10.980.000	5.170.000	1.251.200	4.198.892	35,63%
5.3.1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	175.308.990	7.797.667	130.740.875	26.460.100	467,12%
5.3.1.1.1.4	Kas Lainnya di BLUD	8.177.063.891	2.417.354.577	5.233.924.734	8.864.906.742	38,48%
5.3.1.1.1.5	Kas Lainnya	1.825.602.899	5.082.616.715	4.572.054.350	2.918.266.673	44,06%
5.3.1.1.2	Piutang Pajak Daerah	90.404.117.295	100.743.129.211	107.438.586.430	129.874.166.832	12,99%
5.3.1.1.3	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-59.716.975.612	-65.033.284.937	-68.145.399.489	-77.256.919.037	9,02%
5.3.1.1.4	Piutang Retribusi Daerah	3.316.569.184	3.747.656.531	4.016.588.831	4.381.397.331	9,75%
5.3.1.1.5	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	-1.404.385.846	-2.146.838.611	-3.143.614.403	-3.004.075.936	31,62%
5.3.1.1.6	Piutang lainnya	85.675.389.997	80.507.048.541	47.883.645.499	106.187.526.998	25,07%
5.3.1.1.7	Penyisihan Piutang Lainnya	-7.151.405.228	-7.510.361.125	-8.218.364.708	-9.052.762.980	8,20%
5.3.1.1.8	Belanja /Biaya dibayar di muka	74.043.258	192.650.078	184.255.720	162.050.782	47,93%
5.3.1.1.9	Persediaan	31.595.540.005	47.608.140.106	83.950.761.019	121.431.465.810	57,22%
	JUMLAH ASET LANCAR	213.530.894.140	344.062.146.026	199.981.229.283	305.506.549.252	24,01%
5.3.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG					
5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	0	
5.3.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	294.099.548.818	338.267.304.057	356.386.493.273	412.661.465.248	12,05%
5.3.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	294.099.548.818	338.267.304.057	356.386.493.273	412.661.465.248	12,05%
5.3.1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	294.099.548.818	338.267.304.057	356.386.493.273	412.661.465.248	12,05%

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

NO	URAIAN	TAHUN				R
		2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.3.1.3	ASET TETAP					
5.3.1.3.1	Tanah	5.030.043.331.459	5.820.266.141.468	6.175.052.553.737	6.571.310.685.490	9,41%
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	437.139.793.757	539.541.059.246	621.608.129.369	631.643.867.831	13,42%
5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.369.324.305.660	1.497.137.732.463	1.545.075.862.177	1.603.581.046.648	5,44%
5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.678.838.052.234	2.925.766.870.962	3.155.301.132.408	3.348.847.761.122	7,73%
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	41.339.927.590	48.611.644.823	50.283.820.234	51.611.834.637	7,89%
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.648.959.169	7.633.560.766	36.258.269.989	129.853.875.718	199,55%
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-2.829.943.155.903	-3.264.841.224.065	-3.632.273.437.792	-3.933.279.967.461	11,64%
	JUMLAH ASET TETAP	6.738.391.213.965	7.574.115.785.663	7.951.306.330.122	8.403.569.103.986	7,69%
5.3.1.4	DANA CADANGAN					
5.3.1.4.1	Dana Cadangan	0	0	0	0	
	JUMLAH DANA CADANGAN	0	0	0	0	
5.3.1.5	ASET LAINNYA					
5.3.1.5.1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	90.916.467.141	90.916.467.141	96.616.481.941	96.616.481.941	2,09%
5.3.1.5.2	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	-9.718.701.317	-11.042.951.537	-12.367.201.756	-13.691.451.976	12,11%
5.3.1.5.3	Aset Tak Berwujud	10.556.235.601	12.082.109.151	15.903.009.251	17.768.843.939	19,27%
5.3.1.5.4	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-6.790.393.791	-8.851.328.832	-11.247.111.969	-13.633.377.483	26,21%
5.3.1.5.5	Aset Lain-Lain	228.318.719.598	230.274.113.550	232.726.567.379	228.791.095.778	0,08%
5.3.1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-156.506.145.776	-158.461.539.728	-160.929.195.833	-156.970.625.432	0,12%
	JUMLAH ASET LAINNYA	156.776.181.457	154.916.869.746	160.702.549.013	158.880.966.768	0,47%
	JUMLAH ASET	7.402.797.838.380	8.411.362.105.492	8.668.376.601.692	9.280.618.085.253	7,91%

keterangan :

Data Tahun 2022 belum tersedia

Aset tetap Pemerintah Daerah Kota Pontianak selama Tahun 2018 sampai dengan 2021 memperlihatkan kecenderungan kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 7,69 persen dengan total nilai aset tetap pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 8.403.569.103.986. Hal ini sejalan dengan berbagai kegiatan pembangunan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Sedangkan pada pos Aset Lainnya, penyumbang terbesar perkembangan nilai aset lainnya adalah pada Aset Lain-lain. Hal ini memberikan nilai positif sehingga perlu terus dikembangkan.

Secara kumulatif, jumlah aset Pemerintah Daerah Kota Pontianak selama kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan 2022 terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,91 persen dan nilai total aset pada Tahun 2021 adalah senilai Rp. 9.280.618.085.253.

Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah keharusan mentransfer aset sebagai akibat dari transaksi ataupun perjanjian dengan pihak lain di masa lalu. Secara umum kewajiban dalam neraca Pemerintah Kota Pontianak memperlihatkan tren pertumbuhan selama empat tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 152,25%. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik karena memperlihatkan bahwa kewajiban-kewajiban yang membebani keuangan daerah semakin bertambah.

Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek seperti utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka dan utang belanja serta utang jangka pendek lainnya. Porsi terbesar yang menjadi kewajiban jangka pendek selama lima tahun adalah pendapatan diterima dimuka dan utang belanja.

Kewajiban jangka panjang berupa utang jangka yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah sebesar 51.603.261.146,54. Namun Pemerintah Kota Pontianak dimasa mendatang tetap berharap tidak ada lagi kewajiban jangka panjang sehingga pemerintah Kota Pontianak dapat fokus untuk melaksanakan pembangunan dan tidak terbebani oleh kewajiban-kewajiban finansial lainnya.

Ekuitas dalam neraca pemerintah daerah dapat diartikan sebagai hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas juga dapat diartikan sebagai modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha. Secara umum kondisi ekuitas dana menunjukkan tren pertumbuhan tiap tahunnya selama empat tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,25 persen dengan nilai ekuitas senilai Rp. 9.077.107.571.357,45 pada Tahun 2021 dan secara kumulatif jumlah kewajiban dan ekuitas dana pada Tahun 2021 senilai Rp. 9.280.618.085.253,04. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kondisi kewajiban dan ekuitas dapat dilihat dalam tabel neraca kewajiban berikut :

Tabel 3.11
Neraca Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak
Per 31 Desember 2018 – 31 Desember 2021

NO	URAIAN	TAHUN				R
		2018	2019	2020	2021	
-1	-2					
5.3.2	KEWAJIBAN					
5.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	275.252.709,00	280.309.762,54	2.738.100,00	3.976.100,00	-17,32%
5.3.2.1.2	Utang Bunga				4.803.261.146,54	
5.3.2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				40.196.738.853,46	
5.3.2.1.4	Pendapatan Diterima di Muka	5.459.696.941,28	5.805.751.632,82	5.193.731.780,46	5.399.463.984,57	-0,08%
5.3.2.1.5	Utang Belanja	18.951.630.374,00	25.474.466.795,30	35.223.168.699,78	101.503.812.664,48	86,95%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	24.686.580.024,28	31.560.528.190,66	40.419.638.580,24	151.907.252.749,05	110,58%
5.3.2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
5.3.2.2.1	Utang Dalam Negeri			257.111.415,00	51.603.261.146,54	
5.3.2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		-33,33%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	20.000.000,00	20.000.000,00	277.111.415,00	51.603.261.146,54	6602,47%
	JUMLAH KEWAJIBAN	24.706.580.024,28	31.580.528.190,66	40.696.749.995,24	203.510.513.895,59	152,25%
5.3.3	EKUITAS DANA	7.378.091.258.356,00	8.379.781.577.301,73	8.627.679.851.696,31	9.077.107.571.357,45	7,25%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7.402.797.838.380,28	8.411.362.105.492,39	8.668.376.601.691,55	9.280.618.085.253,04	7,91%

keterangan :

Data Tahun 2022 belum tersedia

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total dari pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang sifatnya wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Dalam melakukan analisis atau proyeksi terhadap kebijakan keuangan ke depan, ada beberapa hal yang cukup signifikan memberikan pengaruh dalam perhitungannya, yaitu antara lain :

1. Terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebabkan adanya perubahan sbb :
 - Terdapatnya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsen Pajak ini masuk menjadi bagian dari Pajak Daerah.
Di sisi lain Bagi Hasil Pajak PKB dan Bagi Hasil Pajak BBNKB yang biasanya diberikan oleh Pemerintah Provinsi menjadi tidak ada lagi. Pemberlakuan opsen pajak ini terhitung 3 (tiga) Tahun sejak UU ini diundangkan atau Tahun 2025.
 - Terdapat beberapa jenis pajak yang dan retribusi yang nomenklaturnya tidak muncul lagi di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 ini.
 - Untuk Dana Alokasi Umum di bagi menjadi DAU yang belum ditentukan penggunaannya, dan DAU yang telah ditentukan penggunaannya.
 - Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai tersebut telah melebihi 30% (tiga puluh persen), maka daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal UU No.1 Tahun 2022 ini diundangkan.
 - Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut belum mencapai 40% (empat puluh persen), maka daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU No.1 Tahun 2022 ini diundangkan.
2. Adanya kebijakan pemerintah terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi posisi yang dibutuhkan oleh daerah dalam formasi PPPK Tahun 2022 dan formasi PPPK Tahun 2023. Hal ini menyebabkan sebagian besar penganggaran yang biasaya di rekening belanja barang dan jasa akan beralih ke belanja pegawai. Selain itu kebutuhan anggarannya juga akan bertambah.

3. Adanya pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024, juga menyebabkan pemerintah daerah harus menyediakan alokasi anggaran dari APBD dalam bentuk hibah kepada penyelenggara Pilkada.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 - 2026

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sentosa. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Proyeksi pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah.

A. Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat harus berdasarkan pada peraturan daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan PAD difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
4. Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
8. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah lainnya. Untuk Kota

Pontianak pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus Fisik/non Fisik), dan insentif fiskal. Sedangkan Pendapatan Transfer dari pemerintah daerah lainnya berasal Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil dan Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan.

Proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.12

Tabel 3.12.
Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan
Kota Pontianak Tahun 2024 -2026

KODE	URAIAN	PROYEKSI		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1.945.998.315.000	1.999.652.844.000	2.061.312.978.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	633.483.100.000	803.319.209.000	847.976.306.000
4.1.01	Pajak Daerah	423.100.000.000	584.704.989.000	620.764.274.000
4.1.02	Retribusi Daerah	57.368.400.000	54.105.300.000	57.142.200.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	37.229.200.000	39.673.420.000	42.258.082.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.785.500.000	124.835.500.000	127.811.750.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.305.015.215.000	1.188.833.635.000	1.205.836.672.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.052.882.545.000	1.057.942.076.000	1.068.504.584.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.052.882.545.000	1.057.942.076.000	1.068.504.584.000
	1. Dana Bagi Hasil (DBH)	60.880.142.000	63.110.248.000	65.451.859.000
	2. Dana Alokasi Umum	752.607.246.000	752.607.246.000	752.607.246.000
	- DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	537.344.776.000	537.344.776.000	537.344.776.000
	- Penggajian Formasi P3K	83.742.315.000	83.742.315.000	83.742.315.000
	- Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000
	- DAU Bidang Pendidikan	79.515.912.000	79.515.912.000	79.515.912.000
	- DAU Bidang Kesehatan	38.904.243.000	38.904.243.000	38.904.243.000
	- DAU Bidang Pekerjaan Umum	7.300.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000
	3. DAK Fisik	49.635.429.000	44.635.429.000	44.635.429.000
	- Bidang Jalan	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	- Bidang Pendidikan	18.128.357.000	8.128.357.000	8.128.357.000
	- Bidang kesehatan dan KB	15.290.766.000	15.290.766.000	15.290.766.000
	- Bidang Air Minum	3.216.306.000	3.216.306.000	3.216.306.000
	- Bidang Sanitasi	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	4. DAK Non Fisik	189.759.728.000	197.589.153.000	205.810.050.000
	- BOS Reguler	90.541.797.000	95.068.887.000	99.822.332.000
	- BOS Kinerja	2.540.000.000	2.540.000.000	2.540.000.000
	- Tunjangan Profesi Guru	59.937.080.000	62.933.934.000	66.080.631.000
	- Tamsil Guru	1.870.500.000	1.870.500.000	1.870.500.000
	- BOP PAUD reguler	6.109.614.000	6.415.095.000	6.735.850.000
	- BOP PAUD kinerja	345.000.000	345.000.000	345.000.000
	- BOP Pendidikan Kesetaraan reguler	1.810.170.000	1.810.170.000	1.810.170.000

KODE	URAIAN	PROYEKSI		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
	- BOP Pendidikan Kesetaraan kinerja	135.000.000	135.000.000	135.000.000
	- BOK Kesehatan dan KB	21.117.740.000	21.117.740.000	21.117.740.000
	- Peningkatan Kapasitas koperasi dan UKM	410.170.000	410.170.000	410.170.000
	- Pelayanan Kepariwisata	548.772.000	548.772.000	548.772.000
	- Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000	438.800.000	438.800.000
	- Dana Fasilitas Penanaman Modal	333.900.000	333.900.000	333.900.000
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	548.575.000	548.575.000	548.575.000
4.2.01.02	Insentif Fiskal / DID	0	0	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	252.132.670.000	130.891.559.000	137.332.088.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	250.051.670.000	128.810.559.000	135.251.088.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.081.000.000	2.081.000.000	2.081.000.000
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.050.000.000	12.550.000.000	12.550.000.000
6.1.01	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	10.000.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000
	- SILPA yang sifatnya umum	2.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	- SILPA BLUD	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
	- SILPA BOS	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
6.1.04	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	VOLUME	1.956.048.315.000	2.012.202.844.000	2.073.862.978.000

Beberapa penjelasan terkait proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan adalah di atas adalah sebagai berikut :

- Terdapat kenaikan pajak daerah pada Tahun 2025, hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut sudah diberlakukan pendapatan opsen pajak PKB dan opsen pajak BBNKB, sebagai amanat dari UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

- Berkurangnya target retribusi daerah pada Tahun 2025 disebabkan karena beralihnya rekening Retribusi kesehatan pada RS di Kecamatan Pontianak Utara menjadi Pendapatan BLUD (lain-lain PAD yang sah).
- Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai hasil dari laba BUMD tahun sebelumnya. Adapaun BUMD yang memberikan laba yaitu PT. BPD Bank Kalbar, PDAM Tirta Khatulistiwa dan PUD BPR Khatulistiwa.
- Untuk pendapatan DAU yang telah ditentukan peruntukannya, merupakan pendapatan yang harus dialokasikan anggarannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Nominal dan peruntukannya akan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku pada saat penyusunan dokumen tahunan.
- Insentif Fiskal atau yang dahulu dikenal dengan Dana Insentif Daerah akan dialokasikan pada saat telah terbit pengumuman atas alokasi dana tersebut.
- Untuk bagi hasil pajak dari provinsi terdapat penurunan pada Tahun 2025 disebabkan pada tahun itu Bagi hasil PKB dan Bagi hasil BBNKB pada tahun tersebut beralih ke Pajak Daerah Kabupaten/Kota sebagai Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- Pendapatan hibah, merupakan hibah yang berhadapan dengan pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal) kepada PDAM Tirta Khatulistiwa, untuk program sambungan air bersih untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Untuk SiLPA terdiri dari SiLPA yang bersifat umum (yang peruntukannya tidak berhadapan dengan belanja tertentu), dan SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya (SiLPA BOS harus dianggarkan kembali untuk kegiatan BOS, dan SiLPA BLUD harus digunakan untuk kegiatan pada UPT BLUD tersebut masih ada sisa).

3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*) dalam perencanaan 3 (tiga) tahun ke depan. Belanja daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah.

Berdasarkan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi, merupakan anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja operasi terdiri dari :
 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang dan Jasa;
 - Belanja Bunga;
 - Belanja Subsidi;
 - Belanja Hibah; dan
 - Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja Transfer, yang merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, merupakan penganggaran di dalam APBD berupa dikeluarkannya anggaran Pemerintah daerah yang disebabkan atau akan menyebabkan telah/akan diterimanya suatu penerimaan daerah baik pada tahun anggaran sebelumnya maupun tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran yang akan datang.

Belanja dan Pengeluaran yang bersifat Wajib dan Mengikat

Dalam melakukan perumusan proyeksi Belanja Daerah, maka hal pertama yang pertama dialokasikan adalah pengeluaran (Belanja dan pengeluaran pembiayaan) untuk hal-hal yang sifatnya wajib dan mengikat antara lain :

1. Belanja gaji dan tunjangan ASN
Dihitung berdasarkan data realisasi Tahun 2022 dengan memperhatikan rencana jumlah pensiun PNS Tahun 2023, 2024 dan 2025.
2. Belanja gaji dan tunjangan PPPK
Dihitung berdasarkan data rencana penerimaan PPPK formasi Tahun 2022, hasil proyeksi jumlah PPPK formasi Tahun 2023.
3. Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dianggarkan sesuai ketentuan dan realisasi tahun sebelumnya.
4. Belanja gaji dan tunjangan DPRD
Dianggarkan sesuai ketentuan dan realisasi tahun sebelumnya.
5. Tambahan penghasilan ASN (PNS dan PPPK) termasuk insentif dan penghasilan lainnya yang telah ditentukan sesuai peraturan perundangan.

- Dianggarkan berdasarkan data realisasi Tahun 2022 dan berdasarkan data rencana penerimaan PPPK formasi Tahun 2022 dan formasi Tahun 2023.
6. Penerimaan lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dianggarkan sesuai ketentuan dan realisasi tahun sebelumnya.
 7. Penerimaan Lainnya DPRD
Dianggarkan sesuai ketentuan dan realisasi tahun sebelumnya.
 8. Belanja yang sifatnya earmarked atau berhadapan dengan sumber pendanaan. Belanja ini terdiri atas :
 - Belanja dengan sumber dana berasal dari BLUD;
 - Belanja dengan sumber dana berasal dari DAU yang telah ditentukan penggunaannya;
 - Belanja dengan sumber dana berasal dari DAK Fisik;
 - Belanja dengan sumber dana berasal dari DAK Non Fisik;
 - Belanja dengan sumber dana berasal dari Insentif Fiskal/Dana Insentif Daerah;
 - Belanja dengan sumber dana berasal dari Bagi Hasil Pajak Rokok;
 - Belanja dengan sumber dana berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi;
 - Belanja dengan sumber dana berasal dari SiLPA tertentu (SiLPA BLUD dan SiLPA BOS).
 9. Perkiraan alokasi anggaran untuk belanja hibah, baik yang sifatnya rutin maupun dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024.
 10. Perkiraan alokasi anggaran belanja bantuan sosial.
 11. Alokasi anggaran belanja tidak terduga.
 12. Alokasi kebijakan penyertaan modal daerah.

Tabel 3.13.
Proyeksi pengeluaran yang sifatnya wajib dan mengikat
Tahun 2024 - 2026

No	URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	TOTAL PENGELUARAN (WAJIB DAN MENGIKAT) :	1.227.385.718.000	1.202.114.095.000	1.204.835.577.000
1	Belanja pegawai			
	a Gaji dan Tunjangan ASN	<i>391.909.915.000</i>	<i>382.465.715.000</i>	<i>375.727.315.000</i>
	- Gaji & Tunjangan PNS	<i>308.167.600.000</i>	<i>298.723.400.000</i>	<i>291.985.000.000</i>
	- Gaji & Tunjangan PPPK	<i>83.742.315.000</i>	<i>83.742.315.000</i>	<i>83.742.315.000</i>
	b Belanja Tambahan Penghasilan ASN	<i>194.770.521.000</i>	<i>189.394.449.000</i>	<i>185.208.057.000</i>
	- TPP PNS	<i>174.155.147.000</i>	<i>168.779.075.000</i>	<i>164.592.683.000</i>
	- TPP PPPK	<i>20.615.374.000</i>	<i>20.615.374.000</i>	<i>20.615.374.000</i>
	c Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	<i>14.742.288.000</i>	<i>15.164.107.000</i>	<i>15.920.927.000</i>

No	URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	- Insentif Pajak	12.000.000.000	12.600.000.000	13.230.000.000
	- Insentif Retribusi	2.742.288.000	2.564.107.000	2.690.927.000
	d Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.365.000.000	28.365.000.000	28.365.000.000
	e Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180.000.000	180.000.000	180.000.000
	f Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.108.370.000	1.108.370.000	1.108.370.000
2	Belanja Hibah			
	a Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.900.000.000	11.900.000.000	11.900.000.000
	b Hibah Kepada KPU	15.000.000.000	-	-
	c Hibah Kepada Bawaslu	5.000.000.000	-	-
	d Hibah Untuk Pengamanan Pilkada	5.100.000.000	-	-
	e Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000	3.314.590.000	3.314.590.000
3	Belanja Bantuan Sosial	8.200.000.000	8.200.000.000	8.200.000.000
4	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
5	Belanja Earmarked (berhadapan dengan sumber pendanaan tertentu)			
	a Belanja Pendapatan BLUD	110.000.000.000	119.050.000.000	122.026.250.000
	b Belanja DAK Fisik	49.635.429.000	44.635.429.000	44.635.429.000
	c Belanja DAK Non Fisik	189.759.728.000	197.589.153.000	205.810.050.000
	d Belanja DID	0	0	0
	e Belanja DBH Pajak Rokok	31.298.722.000	33.646.127.000	35.328.434.000
	f Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi	2.081.000.000	2.081.000.000	2.081.000.000
	g Belanja SiLPA BLUD	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
	h Belanja SiLPA BOSNAS	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
	i DAU Kelurahan	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000
	j DAU bidang Pendidikan	79.515.912.000	79.515.912.000	79.515.912.000
	k DAU Bidang Kesehatan	38.904.243.000	38.904.243.000	38.904.243.000
	l DAU Bidang Pekerjaan umum	7.300.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000
6	Pengeluaran Pembiayaan			
	a Untuk PDAM (Program Air Bersih bagi MBR)	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
	b Penyertaan Modal Untuk Bank Kalbar	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000

No	URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	c Penyertaan Modal Untuk BPR Khatulistiwa	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	d Penyertaan Modal Untuk BUMD Aneka Usaha	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah merupakan gambaran atas keleluasaan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan selisih dari total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang sifatnya wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Berikut perkiraan kapasitas riil keuangan daerah Tahun 2024 -2026 :

Tabel 3.14
Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Tahun 2024-2026

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
I	TOTAL PENERIMAAN	1.956.048.315.000	2.012.202.844.000	2.073.862.978.000
II	TOTAL PENGELUARAN (WAJIB DAN MENGIKAT)	1.227.385.718.000	1.202.114.095.000	1.204.835.577.000
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH (I - II)	728.662.597.000	810.088.749.000	869.027.401.000

Selanjutnya angka kapasitas riil keuangan daerah tersebutlah yang akan di jabarkan dan dialokasikan sesuai prioritas daerah pada Perangkat Daerah untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah di luar belanja wajib dan mengikat sebagaimana tersebut di atas.

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan

Secara lengkap proyeksi belanja daerah dan pembiayaan daerah Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tahun 2024 - 2026

KODE	URAIAN	PROYEKSI		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
5	BELANJA DAERAH	1.935.048.315.000	1.991.202.844.000	2.052.862.978.000
5.1	BELANJA OPERASI	1.317.360.073.000	1.287.628.736.000	1.287.528.286.000

KODE	URAIAN	PROYEKSI		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
5.1.01	Belanja Pegawai	734.484.504.000	724.598.948.000	719.179.518.000
	1. Belanja Gaji & Tunjangan ASN	391.909.915.000	382.465.715.000	375.727.315.000
	- PNS	308.167.600.000	298.723.400.000	291.985.000.000
	- PPPK	83.742.315.000	83.742.315.000	83.742.315.000
	2. Belanja Tambahan Penghasilan (TPP) ASN	194.770.521.000	189.394.449.000	185.208.057.000
	- PNS	174.155.147.000	168.779.075.000	164.592.683.000
	- PPPK	20.615.374.000	20.615.374.000	20.615.374.000
	3 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	87.829.848.000	91.248.521.000	95.152.038.000
	- Insentif Pajak Daerah	12.000.000.000	12.600.000.000	13.230.000.000
	- Insentif Retribusi Daerah	2.742.288.000	2.564.107.000	2.690.927.000
	- Tunjangan Profesi Guru	59.937.080.000	62.933.934.000	66.080.631.000
	- tambahan Penghasilan Guru	1.870.500.000	1.870.500.000	1.870.500.000
	- Jasa Pelayanan Kesehatan	1.121.980.000	1.121.980.000	1.121.980.000
	- Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
	- Jasa Pengelolaan BMD	1.158.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000
	6 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.365.000.000	28.365.000.000	28.365.000.000
	7 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	180.000.000	180.000.000	180.000.000
	8 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD & KDH/WKDH	1.108.370.000	1.108.370.000	1.108.370.000
	- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000	393.120.000	393.120.000
	- Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	715.250.000	715.250.000	715.250.000
	11 Belanja Pegawai BLUD	30.320.850.000	31.836.893.000	33.428.738.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.873.733.000	499.822.471.000	504.820.696.000
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	79.801.836.000	55.007.317.000	55.328.072.000
	- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.900.000.000	11.900.000.000	11.900.000.000
	- Hibah BOP PAUD	6.454.614.000	6.760.095.000	7.080.850.000
	- Hibah Kepada KPU	15.000.000.000	0	0
	- Hibah Kepada Bawaslu	5.000.000.000	0	0
	- Hibah Pengamanan Pilkada	5.100.000.000	0	0
	- Hibah BOP Kesetaraan	1.945.170.000	1.945.170.000	1.945.170.000
	- Hibah Dana BOS	31.087.462.000	31.087.462.000	31.087.462.000

KODE	URAIAN	PROYEKSI		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
	- Belanja Hibah Bantuan Keuangan untuk Partai Politik	3.314.590.000	3.314.590.000	3.314.590.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.200.000.000	8.200.000.000	8.200.000.000
5.2	BELANJA MODAL	612.688.242.000	698.574.108.000	760.334.692.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	0	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21.000.000.000	21.000.000.000	21.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	21.000.000.000	21.000.000.000	21.000.000.000
	1 Bank Kalbar	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	2 BPR Khatulistiwa	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	3 Penyertaan Modal kepada PDAM untuk Program Air Bersih kepada MBR	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
	4 Penyertaan Modal untuk BUMD Aneka Usaha	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
6.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-
	TOTAL / VOLUME	1.956.048.315.000	2.012.202.844.000	2.073.862.978.000

3.3.3 Proyeksi Rencana APBD Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026

Secara keseluruhan proyeksi dari ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2024-2026

KODE	URAIAN	Proyeksi Th 2024	Proyeksi Th 2025	Proyeksi Th 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1.945.998.315.000	1.999.652.844.000	2.061.312.978.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	633.483.100.000	803.319.209.000	847.976.306.000
4.1.01	Pajak Daerah	423.100.000.000	584.704.989.000	620.764.274.000
4.1.02	Retribusi Daerah	57.368.400.000	54.105.300.000	57.142.200.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	37.229.200.000	39.673.420.000	42.258.082.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.785.500.000	124.835.500.000	127.811.750.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.305.015.215.000	1.188.833.635.000	1.205.836.672.000
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.052.882.545.000	1.057.942.076.000	1.068.504.584.000
4.2.02	Transfer Antar Daerah	252.132.670.000	130.891.559.000	137.332.088.000
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-

KODE	URAIAN	Proyeksi Th 2024	Proyeksi Th 2025	Proyeksi Th 2026
5	BELANJA DAERAH	1.935.048.315.000	1.991.202.844.000	2.052.862.978.000
5.1	BELANJA OPERASI	1.317.360.073.000	1.287.628.736.000	1.287.528.286.000
5.1.01	Belanja Pegawai	734.484.504.000	724.598.948.000	719.179.518.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.873.733.000	499.822.471.000	504.820.696.000
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	79.801.836.000	55.007.317.000	55.328.072.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.200.000.000	8.200.000.000	8.200.000.000
5.2	BELANJA MODAL	612.688.242.000	698.574.108.000	760.334.692.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH	-10.950.000.000	-8.450.000.000	-8.450.000.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.050.000.000	12.550.000.000	12.550.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	10.000.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah			
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21.000.000.000	21.000.000.000	21.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	21.000.000.000	21.000.000.000	21.000.000.000
6.2.3	Pembayaran Pokok Hutang			
	VOLUME ANGGARAN	1.956.048.315.000	2.012.202.844.000	2.073.862.978.000

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka permasalahan dalam dokumen ini disusun berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah pada Bab II Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) ini yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

Berikut disajikan permasalahan Kota Pontianak berdasarkan keempat aspek tersebut di atas.

4.1.1. Permasalahan dari aspek Geografi dan Demografi

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kota Pontianak yang berkaitan dengan kondisi geografi dan demografi antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau

Dengan luas Kota Pontianak yang relatif kecil (\pm 118,31 km²) dengan penduduk di Tahun 2022 sebanyak 673.400 jiwa atau 5.691 jiwa/km², sudah tentu memerlukan *space* yang cukup luas baik itu untuk permukiman, aktivitas usaha dan perkantoran, fasilitas-fasilitas umum dan lain-lain. Hal ini menyebabkan berkurangnya kawasan hijau (hutan, kebun, sawah, lahan hijau lainnya) untuk keperluan pembangunan di Kota Pontianak. Berdasarkan tabel 2.4 maka diketahui Luasan RTH di Kota Pontianak masih kurang dari 20%. Semakin kecilnya ruang terbuka hijau yang diharapkan dapat menjadi penopang ekosistem lingkungan hidup di perkotaan dan sebagai penyerap polutan tentunya bisa mengurangi kenyamanan hidup masyarakat serta bisa berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.

2. Banjir dan Genangan

Dengan topografi yang relatif rendah (rata-rata 1 – 2 m di atas permukaan laut) serta dengan posisi berada di muara sungai kapuas dan dengan curah hujan sering berada dalam level ekstrem ($>$ 150 mm / hari), kondisi ini merupakan faktor dominan terjadinya banjir dan genangan di beberapa wilayah di Kota Pontianak.

Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk secara langsung dan tidak langsung juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya banjir dan genangan dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bertambahnya kawasan pemukiman terbangun dan bangunan-bangunan penunjang aktivitas masyarakat menyebabkan semakin berkurangnya daerah resapan.
- Kebutuhan ruang untuk aktivitas akibat pertumbuhan penduduk juga mengakibatkan berkurangnya fungsi saluran drainase yang ada, baik karena ditutup, dikecilkan maupun akibat tersumbat oleh sampah.

3. Kemacetan

Perpaduan kondisi geografi Kota Pontianak yang dilalui 2 (dua) sungai besar dengan ditambah jumlah penduduk yang banyak serta merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan dan jalur lintasan antar wilayah tentunya juga mengakibatkan terjadinya kemacetan pada titik tertentu dan pada jam tertentu (contoh kemacetan di jembatan kapuas rutin terjadi pada pagi dan sore hari).

4. Kebakaran Lahan

Terutama terjadi pada musim kering/kemarau di beberapa bagian kota yang lahannya adalah tanah gambut. Kebakaran ini juga dipicu oleh faktor kelalaian dan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

5. Cuaca Ekstrem Lainnya

Cuaca ekstrem lain yang sering terjadi dan diperkirakan erat kaitannya dengan kondisi geografi dan demografi antara lain adalah berupa angin kencang dan puting beliung. Angin puting beliung di Kota Pontianak sering terjadi pada Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Barat, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada kecamatan lain.

Jika dikaitkan dengan bencana alam, maka permasalahan tersebut diatas juga sinkron dengan tingkat risiko bencana di Kota Pontianak yang juga telah dijelaskan pada Bab II sebagai berikut:

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Resiko
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang
3	Cuaca Ekstrem	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi

4.1.2. Permasalahan dari aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kota Pontianak yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi di Kota Pontianak. Permasalahan kemiskinan ini menjadi perhatian dalam pembangunan setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak Tahun 2022 adalah sekitar 29.610 orang atau sekitar 4,46% dari penduduk Kota Pontianak. Walaupun angka kemiskinan (% penduduk miskin) dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 terus menunjuk penurunan, selama kemiskinan masih ada, maka kemiskinan tetap menjadi salah satu permasalahan utama yang harus ditangani oleh semua level pemerintahan, termasuk pemerintah Kota Pontianak. Termasuk yang memperparah kondisi kemiskinan masyarakat adalah terjadinya inflasi yang cukup tinggi di Tahun 2022 mencapai 6,35%.

2. Pengangguran

Pengangguran secara umum juga dapat berdampak negatif kepada banyak aspek kehidupan masyarakat antara lain dapat menyebabkan kemiskinan, masalah keamanan dan ketertiban serta beberapa permasalahan sosial juga dipicu karena faktor menganggur. Pada Tahun 2021 jumlah tingkat pengangguran terbuka Kota Pontianak adalah 9,92% atau sekitar 33.452 orang dari 337.068 angkatan kerja. Angka ini sudah menunjukkan adanya penurunan dari kondisi di Tahun 2020 dan Tahun 2021 dimana angka pengangguran sempat naik yang diakibatkan oleh terjadinya pandemi covid-19. Walaupun demikian angka yang ada sekarang masih lebih tinggi dari kondisi Tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi covid-19.

3. Rata-rata lama sekolah masih di bawah 12 tahun

Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years School*) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah di Kota Pontianak adalah 10,44 tahun atau tidak lebih dari kelas 11 (kelas 2 SMA/ sederajat). Angka tersebut bisa jadi juga berasal dari akumulasi anak yang putus sekolah sebelum lulus SMP atau SD.

4. Masih terdapat balita dengan gizi buruk

Gizi buruk merupakan kondisi gizi kurang hingga tingkat yang berat dan disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan data yang ada, masih terdapat balita dengan gizi buruk di Kota Pontianak. Tahun 2020 sebanyak 0,39%, Tahun 2021 meningkat menjadi 0,70 dan di Tahun 2022 sebanyak 1,30%.

4.1.3. Permasalahan dari aspek Daya Saing Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kota Pontianak yang berkaitan dengan aspek Daya Saing Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya infrastruktur yang belum mantap

Berdasarkan data yang ada di Tahun 2022, dari total jalan yang ada di Kota Pontianak sepanjang 286,08 km, masih terdapat jalan dengan kondisi rusak ringan sepanjang 11,98 km (4,19%) dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 17,41 km (6,09%).

Sedangkan berdasarkan data Tahun 2021 terhadap kondisi jalan berdasarkan permukaannya, maka masih terdapat sekitar 1% jalan permukaannya adalah tanah, dan sekitar 3% jalan permukaannya adalah kerikil/gravel.

2. Masih cukup tingginya angka kriminalitas/kejahatan

Kriminalitas atau kejahatan merupakan segala bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan baik secara ekonomis maupun psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Sedangkan angka kriminalitas adalah suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu.

Berdasarkan data yang ada, maka di Tahun 2022 ada 1.007 kasus yang dilaporkan ke kepolisian di wilayah Kota Pontianak. Angka ini memang menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.079 kasus, tetapi tetap menjadi permasalahan yang wajib diperhatikan dalam penyusunan perencanaan daerah.

4.1.4. Permasalahan dari aspek Pelayanan Umum

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kota Pontianak yang berkaitan dengan aspek Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Beberapa permasalahan di bidang pendidikan antara lain :

- Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar Tahun 2022, maka dapat diketahui bahwa sekitar 95,93% penduduk berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD/MI, sekitar 72,23% penduduk berusia 13 -15 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SLTP/MTs dan sekitar 61,66% penduduk berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMA/SMK/MA. Ini menandakan SPM untuk Pendidikan Dasar belum bisa mencapai 100% sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.

- Masih terdapat adanya angka putus sekolah ditingkat SD/MI sebesar 0,22%, di tingkat SMP/MTs sebesar 0,52% dan di tingkat SMA/MA sebesar 3,25%.
- Masih kurangnya jumlah Tenaga Pendidik dengan status ASN yang ada di Kota Pontianak.
- Masih terdapat sekolah yang sarana prasarana nya (pagar, halaman, saluran, kantin, dll) dalam kondisi tidak/kurang baik.

2. Urusan Kesehatan

Beberapa permasalahan di bidang ini antara lain :

- Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan di Tahun 2022 yaitu sebanyak 7 kasus, meningkat dari Tahun 2021 sebesar 6 kasus.
- Masih adanya kasus kematian bayi di Tahun 2022 yaitu sebanyak 24 kasus, meningkat dari Tahun 2021 sebesar 21 kasus.
- Penyakit TBC.

Terkait TBC dapat dilihat dari 2 sisi yaitu jumlah penderita TBC yang pada Tahun 2022 adalah sebanyak 9.010 orang atau naik dari Tahun 2021 yang berjumlah 5.028 orang. Sisi lainnya adalah dari persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Tahun 2022 adalah sebesar 81,37%. Artinya masih terdapat sekitar 18,63% penderita TBC masih belum mendapatkan pelayanan sesuai standar.

- HIV – AIDS

Terdapat kenaikan jumlah penderita HIV di Tahun 2022 (72) dibanding tahun sebelumnya (56).

- Demam Berdarah

Sepanjang Tahun 2022 telah terjadi 37 kasus dengan 3 orang meninggal dunia. Jumlah ini meningkat dari kasus di tahun sebelumnya yaitu 16 kasus dan tidak ada yang meninggal.

- Angka Stunting Balita

Stunting juga masih menjadi permasalahan kesehatan di Kota Pontianak. Capaian indikator angka stunting di Tahun 2020 sebesar 8.73%, meningkat di Tahun 2021 menjadi 12,38%, dan di Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 15.77%.

- Masih kurangnya jumlah Tenaga Kesehatan dengan status ASN yang ada di Kota Pontianak.
- Masih terdapat sarana prasarana kesehatan yang kondisinya sudah tidak/kurang baik.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain sebagai berikut :

- Masih terdapat 10,27% jalan yang kondisinya masih belum baik.
- Masih terdapat 46,93% saluran drainase yang kondisinya kurang baik atau tidak baik.
- Belum semua ruas jalan memiliki pedestrian/ trotoar. Untuk ruas jalan yang telah memiliki trotoar, belum semuanya dalam kondisi baik.
- Luasan ruang terbuka hijau yang ada sekarang sekitar 18,75% dan berpotensi cenderung berkurang sebagai dampak dari kebutuhan ruang untuk pembangunan.
- Beberapa bangunan kantor pemerintahan sebagai fasilitas pelayanan umum sudah memerlukan peningkatan/pembangunan kembali. Hal ini dikarenakan faktor kondisi fisiknya yang sudah kurang/ tidak baik atau karena kapasitas bangunan dan lingkungannya yang sudah tidak sesuai untuk difungsikan sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat.

4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Beberapa permasalahan pada urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut :

- Masih terdapat rumah dengan kondisi tidak layak huni sebanyak 654 unit rumah di Tahun 2022 dari total unit rumah tinggal adalah sebanyak 160.713 unit.
- Data Tahun 2021 menunjukkan data kawasan kumuh adalah sekitar 97 Ha atau 0,82% dari total luas Kota Pontianak.
- Masih terdapat jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang kondisinya tidak baik.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Beberapa permasalahan di bidang ini antara lain sebagai berikut :

- Pedagang kaki lima sebagai salah satu sektor informal sebenarnya memberikan banyak kontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Tetapi dari sisi legalitas, penataan ruang, kelancaran lalu lintas dan kebersihan kadang kala bisa menyebabkan permasalahan ikutan lain apabila salah dalam pengaturannya.
- Bencana kebakaran rumah dan kebakaran lahan juga masih banyak terjadi setiap tahunnya, yang sebagian merupakan akibat *human eror* atau kelalaian manusia.
- Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat dengan berbagai macam aktivitasnya baik perekonomian, pendidikan, dan lain-lain menyebabkan

Kota Pontianak rawan akan praktek prostitusi baik di hotel/penginapan maupun di rumah kost.

6. Urusan Sosial

Beberapa permasalahan di bidang ini antara lain sebagai berikut :

- Masih terdapat penduduk miskin di Kota Pontianak. Data Tahun 2022 adalah sekitar 29.610 orang atau sekitar 4,46% dari penduduk Kota Pontianak.
- Masih adanya gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak dan masih cukup banyak pasangan suami istri yang belum memiliki akta perkawinan.
- Updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum berjalan dengan lancar (proses memasukkan data baru sudah mulai berjalan sesuai aturan, tetapi untuk mengeluarkan data lama belum berjalan dengan lancar).

7. Urusan Tenaga Kerja

Beberapa permasalahan di bidang ini antara lain sebagai berikut :

- Masih terdapat pengangguran di Kota Pontianak.
- Sebagian dari pengangguran yang ada di Kota Pontianak merupakan pengangguran yang memiliki pendidikan tinggi.
- Belum semua kasus ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Pada Tahun 2022 kasus yang dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama adalah 86%.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa permasalahan di bidang ini antara lain sebagai berikut :

- Masih cukup banyaknya kasus anak di Kota Pontianak (berdasarkan data di Tahun 2022 terdapat 106 pengaduan kasus di Kota Pontianak).
- Masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan.
- Belum tersedianya informasi untuk *call center* pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

9. Urusan Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan di bidang ini antara lain sebagai berikut :

- Masih kurangnya ruang terbuka hijau dengan jenis tanaman keras yang dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah cukup banyak, untuk mengimbangi polusi udara dan menurunkan suhu / temperatur udara.
- Masih sering terdapat penumpukan sampah hasil aktivitas masyarakat terutama di saluran -saluran di kota.

- Masih rendahnya kualitas air pada saluran-saluran tertentu di Kota Pontianak, terutama terlihat pada saat musim kemarau dan air sedang tidak pasang laut.
- Beberapa TPS kondisinya masih *over volume*. Hal ini terlihat dari sering terjadinya penumpukan sampah di luar container sampah pada beberapa titik TPS di Kota Pontianak.

10. Urusan Perhubungan

Beberapa permasalahan di bidang ini antara lain sebagai berikut :

- Masih terjadi (secara rutin) kemacetan pada ruas jalan tertentu dan waktu-waktu tertentu.
- Belum semua jalan (baik jalan utama maupun jalan lingkungan) terlayani sarana dan prasarana berupa penerangan jalan umum/lampu jalan.
- Semakin berkurangnya angkutan umum massa (oplet dan sejenisnya) yang beroperasi.

11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Beberapa permasalahan di bidang ini antara lain sebagai berikut :

- Minimnya prestasi olahraga Kota Pontianak di Tingkat Nasional.

12. Urusan Kebudayaan

Beberapa permasalahan di bidang ini antara lain sebagai berikut :

- Tantangan era modernisasi dan globalisasi menyebabkan adat budaya dan tradisi lokal dalam kehidupan sehari-hari atau acara-acara tertentu semakin berkurang.
- Masih terdapat cagar budaya di Kota Pontianak yang belum dilestarikan.

13. Urusan Perpustakaan

Beberapa permasalahan di bidang ini antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan data yang ada, selama Tahun 2020 dan Tahun 2021 telah terjadi penurunan pengunjung perpustakaan milik pemerintah jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Diperkirakan adalah akibat terjadinya pandemi.
- Dimasa *gadget* telah menjadi barang yang umum di gunakan oleh setiap orang, dan hiburan begitu gampang untuk didapatkan melalui gadget tersebut, maka permasalahan yang cukup serius adalah bagaimana meningkatkan kembali literasi dan minat baca masyarakat terhadap hal-hal yang bermanfaat.

14. Urusan Kearsipan

Beberapa permasalahan di bidang ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa untuk beberapa Perangkat Daerah yang memiliki berkas-berkas penting seperti berkas perizinan, berkas kontrak pekerjaan dan lain-lain, kesulitan dalam hal pengelolaan dan penyimpanan arsip-arsip penting tersebut.

15. Urusan Pariwisata

Beberapa permasalahan di bidang ini antara lain sebagai berikut :

- Beberapa destinasi wisata/tempat yang berpotensi wisata yang ada di Kota Pontianak masih belum memiliki pengelola yang bertanggung jawab terhadap destinasi tersebut.
- Masih kecilnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB di Kota Pontianak juga menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata secara menyeluruh di Kota Pontianak belum maksimal. Hal ini tersirat dari data kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kota Pontianak yang masih rendah.

16. Urusan Pertanian

Beberapa permasalahan di bidang ini antara lain sebagai berikut :

- Kecilnya luasan lahan pertanian.
- Jumlah rumah potong hewan di Kota Pontianak yang belum memadai.

17. Urusan Perdagangan

Beberapa permasalahan di bidang ini antara lain sebagai berikut :

- Beberapa pasar tradisioanl yang ada masih perlu perhatian terutama dalam hal pengelolaan, kebersihan dan sarana prasarana yang ada.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Berikut ini adalah isu strategis untuk tahun perencanaan 2024 - 2026 yang dirumuskan dari permasalahan pembangunan :

1. Isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, meliputi :
 - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - Peningkatan kualitas pendidikan;

- Peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak;
 - Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga.
2. Isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan Kota yang berkelanjutan, meliputi :
- Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan;
 - Kelancaran berlalu lintas;
- Salah satu alternatif solusi yang sedang giat didukung oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah rencana Pembangunan Jembatan yang menghubungkan dari Pontianak Kota ke Pontianak Utara (Bardan Nadi ke Siantan);
- Mewujudkan kota yang bersih, berwawasan lingkungan dan sesuai tata ruang;
- Salah satunya mendukung kebijakan Pemerintah Pusat berupa kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
- Mewujudkan ketahanan, ketertiban dan keamanan kota;
 - Mendukung penyuksesan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.
3. Isu strategis yang berkaitan dengan Kesejahteraan masyarakat, meliputi :
- Peningkatan perekonomian;
 - Pengurangan kemiskinan;
 - Pengurangan pengangguran.
4. Isu strategis yang berkaitan dengan pemerintahan, meliputi :
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - Peningkatan profesionalisme pegawai;
 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 penyusunannya didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD, dan isu strategis aktual.

5.1. Visi dan Misi RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah **“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”**. Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia;
2. Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga;
3. Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain untuk dapat tercapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri.

5.2. Analisa Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025

Sasaran-sasaran pokok pada RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025 yang merupakan ukuran tercapainya pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, berbudaya, berahlak mulia dan berwawasan kebangsaan;
2. Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah kemiskinan dan PMKS, kesetaraan gender, makin berdaya dan terjaminnya hak-hak warga;

3. Terwujudnya perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan;
4. Terwujudnya sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan;
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib.

Arah kebijakan pada tahap ke-empat RPJMD ini dititik beratkan pada upaya: meningkatkan kualitas lingkungan agar air, udara dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan; adanya ruang terbuka hijau dan memasyarakatkan unit pengolahan limbah (UPL) kepada pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran; sarana dan prasarana fisik kota yang dimungkinkan dibangun dan dikelola oleh swasta untuk menghasilkan profit terus didorong dan dilaksanakan agar beban pemerintah tidak semakin berat; terwujudnya pembangunan transportasi umum kota yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien; Perencanaan tata ruang dan wilayah lebih merata dan berorientasi lingkungan serta *hinterland* Kota Pontianak lebih serasi dan sinergitas antar wilayah kota dan kabupaten; semakin mantap dan kuatnya pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hukumnya; keamanan dan ketertiban sudah semakin mantap dan kondusif bagi perwujudan iklim investasi yang kondusif; angka kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Peran Pemerintah di tahap ini sudah bergeser ke peran regulator, fasilitator dan simulator, sedangkan peran sebagai investor pada sarana dan prasarana publik sudah bisa diperankan oleh swasta.

5.3. Isu Strategis Aktual

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Berikut ini adalah isu strategis untuk tahun perencanaan 2024 - 2026 yang dirumuskan dari permasalahan pembangunan :

1. Isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, meliputi :
 - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - Peningkatan kualitas pendidikan;
 - Peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak;
 - Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga;
2. Isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan kota yang berkelanjutan, meliputi :
 - Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan;
 - Kelancaran berlalu lintas;

- Mewujudkan kota yang bersih, berwawasan lingkungan dan sesuai tata ruang;
 - Mewujudkan ketahanan, ketertiban dan keamanan kota.
3. Isu strategis yang berkaitan dengan Kesejahteraan masyarakat, meliputi :
- Peningkatan perekonomian;
 - Pengurangan kemiskinan;
 - Pengurangan pengangguran.
4. Isu strategis yang berkaitan dengan pemerintahan, meliputi :
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - Peningkatan profesionalisme pegawai;
 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kota Pontianak 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sedangkan sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025, dan isu strategis aktual yang ada. Proses penyandingan dasar tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1.
Proses Penyandingan Dasar Muatan Tujuan dan Sasaran

Misi RPJPD 2005-2025 Perda No. 10 Tahun 2008	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025	Isu strategis Aktual Tahun 2024-2026	RPD 2024-2026
<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, berbudaya, berahlak mulia dan berwawasan kebangsaan 	Pembangunan sumberdaya manusia (kualitas SDM)	HUMAN DIMENSION
<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga Terwujudnya perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan 	Pembangunan di bidang ekonomi (kemiskinan, pengangguran dll) dan masalah sosial	ECONOMIC DIMENSION
<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan 	Pembangunan di bidang infrastruktur (jalan, drainase, fasilitas publik dll)	BUILT ENVIRONMENT DIMENSION
<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib 	<i>Good governance and clean government</i> (kualitas pelayanan publik dll)	GOVERNANCE DIMENSION

Sumber : Analisa Bappeda, 2023

Dari proses penyandingan dasar muatan tujuan dan sasaran teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan selanjutnya. Keempat dimensi tersebut dimensi lingkungan-bangun (*built environment*), dimensi perekonomian (*economic*), dimensi manusia (*human*), dan dimensi pemerintahan (*governance*).

Dimensi lingkungan-bangun adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan ruang fisik kota yang dibangun dalam rangka menyediakan sarana bagi segala kegiatan manusia dalam bertinggal dan berusaha. Dimensi perekonomian merupakan dimensi perencanaan yang menyentuh upaya-upaya manusia dalam meningkatkan derajat hidupnya melalui kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi. Dimensi manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan dan interaksi manusia dengan sesama. Sedangkan dimensi pemerintahan adalah dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak warga dalam bertinggal di kota dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif.

Keempat dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan tujuan dan sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tiga tahun dijabarkan dalam Tabel 5.2. berikut:

Tabel 5.2.

Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026

Visi RPJPD: “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”

No.	Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target		
							2024	2025	2026
1.	Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			80,48	81,20	81,60	82,00
				Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,46	73,65	73,74	73,90
					Angka Stunting Balita	19,7	14,00	13,00	12,00
				Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan	Indeks Pendidikan	0,765	0,768	0,769	0,770
				Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,96	0,94	0,93	0,92
				Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,10	94,20	94,25	94,30
					Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Nindya	Utama

RPD Kota Pontianak [2024 - 2026]

No.	Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target		
							2024	2025	2026
				Meningkatnya prestasi atlet olahraga dan pemuda	Persentase Atlet Olah Raga dan Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi/ Nasional dan Internasional	45	46,70	49,16	55,00
2.	Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertip	Indeks Infrastruktur			88,07	89,36	90,66	91,88
			Indeks Risiko Bencana			90,63	77,09	70,09	64,25
				Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	89,33	90,42	91,32	92,07
					Pengurangan luas genangan	48,61	28	24	20
					Persentase Akses Air Minum Aman	7	11	13	15

RPD Kota Pontianak [2024 - 2026]

No.	Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target		
							2024	2025	2026
					Persentase fasilitas pemerintah dalam kondisi baik	66,15	70	75	80
					Persentase Lingkungan Pemukiman yang Layak	85,39	86,95	88,06	89,04
				Meningkatnya Kualitas Transportasi dan kelancaran berlalu lintas	Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	0,035	0,035	0,035	0,035
				Terwujudnya Kota Yang bersih, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,27	63,40	63,90	63,96
				Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,45	0,50	0,55	0,60
				Meningkatnya Toleransi Di kalangan Masyarakat	Indeks Kota Toleran	4,75	4,85	4,95	5,0

RPD Kota Pontianak [2024 - 2026]

No.	Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target		
							2024	2025	2026
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			68,98 (B)	73 (BB)	75 (BB)	77 (BB)
				Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	49,90	71	73	75
				Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
				Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat Dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Baik	Baik

RPD Kota Pontianak [2024 - 2026]

No.	Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target		
							2024	2025	2026
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	72,28 (BB)	80 (A)	81 (A)	82 (A)
4.	Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga								
5.	Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan								
		Terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan bardaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)			6,08	6,45	6,58	6,71

RPD Kota Pontianak [2024 - 2026]

No.	Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target		
							2024	2025	2026
				Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,98	4,5-5,1	4,6-5,2	4,7-5,3
					Tingkat Inflasi	6,35	3±1	3±1	3±1
				Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,92	8,35 - 10,25	8,20 - 10,20	8,15 - 10,15
				Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4,46	4,3 - 4,4	4,2 - 4,3	4,1 - 4,2
					Gini Rasio	0,36	0,322	0,317	0,312
				Meningkatnya daya saing kota, melalui inovasi dan kolaborasi	Indeks Daya Saing daerah	3,37 (Tinggi)	3,76 (Sangat Tinggi)	3,80 (Sangat Tinggi)	3,84 (Sangat Tinggi)

Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dan formulasi dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagaimana tabel 5.3 dan table 5.4.

Tabel 5.3.
Definisi Operasional Indikator Tujuan dan Sasaran

No Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Definisi Operasional
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (<i>a process of enlarging the choice of people</i>). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak.
1.1	Angka Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.
1.2	Angka Stunting Balita	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1. Sangat pendek : Zscore <-3,0 2. Pendek : Zscore ≥ - 3,0 s/d Zscore < -2,0
1.3	Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
1.4	Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.
1.5	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.
1.6	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
1.7	Persentase Atlet Olah Raga dan Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi/ Nasional dan Internasional	Indikator untuk mengukur atlet olahraga dan pemuda yang berprestasi/ memperoleh medali/penghargaan atas total atlet olahraga dan pemuda yang dikirim ke Tingkat Provinsi/ Nasional dan Internasional .

No Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Definisi Operasional
2.	Indeks Infrastruktur	Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan 5 komponen yang diberi bobot sebagai berikut , 1. Presentase Infrastruktur Jalan Mantap dengan bobot 30%, 2. Persentase pencapaian target pengurangan luas genangan dengan bobot 20%, 3. Persentase pencapaian target persentase akses air minum aman dengan bobot 10%, 4. Persentase fasilitas pemerintah dalam kondisi baik dengan bobot 15% dan 5. Persentase Lingkungan Pemukiman yang Layak dengan bobot 25%
	Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana masing-masing kab/kota yang dinilai oleh BNPB melalui pendekatan kajian risiko bencana berdasarkan analisa bahaya, kerentanan dan kapasitas dari suatu daerah.
2.1	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	Indikator untuk mengukur tingkat capaian kinerja kondisi jalan mantap di perkotaan termasuk jalan lingkungan.
2.2	Pengurangan Luas Genangan	Indikator untuk mengukur pengurangan luas genangan di Kota Pontianak
2.3	Persentase Akses Air Minum Aman	Presentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum aman. Sumber air minum aman adalah yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan). Kualitas, sudah memenuhi Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/ 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Buku Pedoman Pengukuran Capaian Perumahan dan Permukiman oleh Bappenas 2019).
2.4	Persentase fasilitas pemerintah dalam kondisi baik	Indikator untuk mengukur tingkat capaian kinerja kondisi fasilitas pemerintah Kota Pontianak.
2.5	Persentase Lingkungan Pemukiman yang Layak	Pemenuhan terhadap perumahan dan kawasan permukiman layak huni, Penurunan luasan permukiman kumuh dan Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
2.6	Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	Rata-rata waktu tempuh adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari satu titik ke titik yang lain.
2.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.
2.8	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Sebagai komponen utama dalam pengukuran Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Pontianak, IKD memuat indikator-indikator yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengantisipasi terjadinya bencana.
2.9	Indeks Kota Toleransi	Hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia.
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, IRB adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: a. Manajemen Perubahan, b. Penguatan pengawasan, c. Penguatan akuntabilitas, d. Penataan Organisasi, e. Penataan tatalaksana, f. Penataan manajemen SDM, g. Deregulasi Kebijakan, h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian IRB dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.
3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.


No Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Definisi Operasional
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3.3	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan.
3.4	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE, memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. (KEMENPAN-RB NO 59 Tahun 2020).
3.5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Republik Indonesia atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Pontianak
4.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	Mwnurut BAPPENAS Indeks Ekonomi Inklusif adalah Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.
4.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.
4.2	Tingkat Inflasi	Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Karena berlaku secara umum, kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali kenaikan itu meluas sehingga mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.
4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurut BPS Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
4.4	Tingkat Kemiskinan	Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

No Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Definisi Operasional
4.5	Gini Rasio	Gini ratio adalah mnggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Rentang skor 0-1. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total sedangkan1 terjadi ketidak merataan atau ketimpangan sama sekali. (Pengukuran oleh BPS)
4.6	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks daya saing daerah adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan (Penilaian dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional / BRIN).

Tabel 5.4.

Formulasi Indikator Tujuan dan Sasaran

No Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Formulasi
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indek kesehatan, pendidikan dan pengeluaran $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$
1.1	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup di hitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.
1.2	Angka Stunting Balita	Jumlah balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek berdasarkan hasil survey Pemantauan Status Gizi di satu wilayah kerja dibagi jumlah seluruh sampel balita dalam survey Pemantauan Status Gizi di satu wilayah kerja dikali 100%.
1.3	Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan dihitung dengan rumus dibawah ini; Dimensi Pendidikan $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$
1.4	Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk dihitung dengan rumus dibawah ini; $r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$ Metode geometri r : Laju pertumbuhan penduduk P _t : Jumlah penduduk tahun t P ₀ : Jumlah penduduk tahun awal t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

No Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Formulasi
1.5	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	Indeks Pembangunan Gender dihitung dengan rumus dibawah ini; $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki - Laki}}$
1.6	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	<p>Penilaian kota layak didasari oleh faktor - faktor berikut dibawah ini, pengisian capaian indikator melalui juknis dan di upload dalam website penilaian kota layak anak</p> 
1.7	Persentase Atlet Olah Raga dan Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi/ Nasional dan Internasional	Jumlah medali /penghargaan yang diterima atlet dan pemuda dibagi jumlah lomba yang diikuti (atlet + (pemuda pelopor + PPAN))
2.	Indeks Infrastruktur	Presentase Infrastruktur Jalan Mantap x 30% + Presentase pencapaian target pengurangan luas genangan x 20% + Presentase pencapaian target persentase akses air minum aman x 10% + Presentase fasilitas pemerintah dalam kondisi baik x 15% + Presentase Lingkungan Pemukiman yang Layak x 25%
	Indeks Risiko Bencana	Risk = Hazard x Vulnerability / Capacity
2.1	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	(Persentase Jalan Kota berstatus baik + Presentase Jalan lingkungan bersatus baik Status Baik) / 2
2.2	Pengurangan Luas Genangan	(Luasan Genangan / Luas Kota Pontianak) x 100
2.3	Persentase Akses Air Minum Aman	Akses Air Minum Aman = (Jumlah rumah tangga menggunakan sumber air minum aman tahun n / Jumlah rumah tangga pada Kabupaten/Kota tahun n) x 100%
2.4	Persentase fasilitas pemerintah dalam kondisi baik	(Jumlah seluruh fasilitas Pemerintah dalam kondisi baik / Total fasilitas Pemerintah Kota Pontianak) x 100%
2.5	Persentase Lingkungan Pemukiman yang Layak	(Persentase jumlah jalan lingkungan dalam kondisi mantap + presentase jumlah drainase lingkungan dalam kondisi mantap) / 2
2.6	Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	Rata-rata jarak tempuh / Rata-rata kecepatan (Lokasi survei 12 Jalan)
2.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$
2.8	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Penilaian dilakukan sesuai Perangkat Penilaian Kapasitas Daerah berupa kuesioner dengan 71 Indikator yang dikeluarkan oleh BNPD
2.9	Indeks Kota Toleransi	Penilaian oleh SETARA Institute

No Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Formulasi																									
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi																									
3.1	Indeks Profesionalitas ASN	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$																									
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<table border="1" data-bbox="679 465 1217 734"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (x)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)																							
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																							
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																							
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																							
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																							
3.3	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan, BPK memiliki 4 jenis opini, antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMT) dan Tidak Wajar (TW)																									
3.4	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil penilaian 4 domain evaluasi SPBE, yaitu: 1. Domain Kebijakan (13%) 2. Domain Tata Kelola SPBE (25%) 3. Domain Manajemen SPBE (16,5%) 4. Domain Layanan SPBE (45,5%)																									
3.5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai yang dicantumkan tahun-n merupakan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun n-1 yang dikeluarkan pada tahun n. <table border="1" data-bbox="651 1115 1225 1294"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komponen Yang Dinilai</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nilai Hasil Evaluasi</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	1.	Perencanaan Kinerja	30	2.	Pengukuran Kinerja	30	3.	Pelaporan Kinerja	15	4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25		Nilai Hasil Evaluasi	100							
No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot																									
1.	Perencanaan Kinerja	30																									
2.	Pengukuran Kinerja	30																									
3.	Pelaporan Kinerja	15																									
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25																									
	Nilai Hasil Evaluasi	100																									
4.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.																									
4.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$ <p>dimana:</p> <p>r = Laju pertumbuhan ekonomi</p> <p>Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)</p> <p>$Y_{i(t-1)}$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)</p>																									
4.2	Tingkat Inflasi	$\text{Inflasi}_n = \frac{IHK_n - IHK_{(n-1)}}{IHK_{(n-1)}} \times 100$																									
4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja.																									
4.4	Tingkat Kemiskinan	Persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.																									

No Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Formulasi
4.5	Gini Rasio	Pengukuran oleh BPS
4.6	Indeks Daya Saing Daerah	Penilaian dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional / BRIN

5.5. Penyelarasan Indikator Makro

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 mengamanatkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 memperhatikan penyelarasan target indikator makro dengan RPJMN 2020-2024 dan RPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.5.

Penyelarasan Target Indikator Makro

No.	Indikator Pembangunan	Target RPJMN Tahun 2020-2024					Target Provinsi Kalimantan Barat			Target Kota Pontianak		
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30%	5,4% - 5,7%	5,7% - 6,0%	5,3% - 5,9%	6,2% - 6,5%	5,82	6,16	6,45	4,5 - 5,1	4,6 - 5,2	4,7 - 5,3
2	Persentase Penduduk Miskin (%)				7,0% - 8,0%		6,55	6,37	6,19	4,3 - 4,4	4,2 - 4,3	4,1 - 4,2
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				5,3% - 6,0%		4,32	3,53	2,78	8,35 - 10,25	8,20 - 10,20	8,15 - 10,15
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				73,29 - 73,35		70,98	71,61	72,13	81,20	81,60	82,00
5	Gini Rasio				0,375 - 0,378					0,322	0,317	0,312

Sumber : Hasil Olahan, 2023

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan. Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama tiga tahun kedepan.

6. 1. Strategi Pembangunan

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan penasehat aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

Strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran disajikan pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1.
Strategi Pembangunan sebagai Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Penguatan Pelayanan Kesehatan
		Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan
		Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Farmasi dan Alat Kesehatan
		Penguatan Tata kelola, Pembiayaan Kesehatan, dan Sistem Informasi Kesehatan
		Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Pengelolaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
		Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB, dan Kesehatan Reproduksi;
		Percepatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat untuk Pencegahan dan Penanggulangan Permasalahan Gizi;
		Pembudayaan Prilaku Hidup Sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Mutu Pendidikan
		Meningkatkan Perkembangan Kurikulum Pendidikan
		Meningkatkan Kompetensi dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatkan Pengembangan Bahasa dan sastra
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Meningkatkan Implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk
		Meningkatkan Kesertaan Keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
		Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)
Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pmberdayaan Perempuan
		Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan
		Meningkatkan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak
Meningkatnya prestasi atlet olahraga dan pemuda	Meningkatnya prestasi atlet olahraga dan pemuda	Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi
		Meningkatkan presentase atlet berprestasi tingkat kota/provinsi/nasional/Internasional

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Membangun jaringan jalan baru dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang ada, serta terus melaksanakan pemeliharaan jalan agar kelancaran dan kenyamanan berlalu-lintas atau aksesibilitas kawasan tercapai
		Membangun dan meningkatkan kualitas konstruksi saluran drainase, serta memelihara fungsi jaringan drainase untuk melancarkan aliran air
		Menjaga sumber air baku dari pencemaran dengan membangun sistem sanitasi yang baik, serta meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih ke kawasan permukiman yang jauh dari sumber air bersih
		Membangun dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan ketentuan
		Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni Korban Bencana /Relokasi dan Peningkatan Pembangunan PSU Perumahan
		Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
		Penyediaan lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum
		Melakukan penataan bangunan dan lingkungan
		Melaksanakan tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan
		Meningkatnya Kualitas Transportasi dan kelancaran berlalu lintas
Meningkatkan kinerja lalu lintas		
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta kinerja angkutan sungai dan penyebrangan		
Terwujudnya Kota Yang bersih, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Terwujudnya Kota Yang bersih, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatkan Pembangunan IPAL Komunal di Kawasan Permukiman
		Menyediakan alat Pemulihan Air yang ditempatkan di Badan Parit/Sungai
		Meningkatkan Fasilitas dan sarana dalam pemantauan kualitas air permukaan di badan sungai/parit
		Menerapkan Sanksi terhadap pelanggaran terhadap perda pengelolaan air limbah
		Melakukan Penataan Ruang Terbuka Hijau
		Melaksanakan Program Keanekaragaman hayati
		Penegakan hukum lingkungan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah dan operasional kebersihan
		Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya
		Mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan regional

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota	Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif
		Menegakkan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota
		Melaksanakan Upaya Penanggulangan Bencana Sesuai standar
		Meningkatkan penanganan dan pelayanan tanggap darurat bencana kebakaran
	Meningkatnya Toleransi Di kalangan Masyarakat	Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan bagi masyarakat
		Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
		Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Meningkatkan Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Meningkatkan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Meningkatkan kompetensi ASN Kota Pontianak
		Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		Meningkatkan integritas ASN terhadap peraturan kepegawaian
		Meningkatkan kemampuan manajerial ASN
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan prima dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
		Meningkatkan Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait
		Meningkatkan Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota
		Meningkatkan mutu pembinaan kepada perpustakaan di Kota Pontianak.
Meningkatkan mutu pengelolaan arsip Perangkat Daerah		
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		
Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		
Meningkatkan koordinasi penanganan gangguan trantibum		
Meningkatkan Lembaga/ Masyarakat yang Aktif		
Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		

RPD Kota Pontianak [2024 - 2026]

		Meningkatkan fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat Dan Akuntabel	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
		Meningkatkan Layanan Informasi Publik
		Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak dan Kualitas Informasi Pembangunan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Mewujudkan Koordinasi dan Dinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang intensif
		Meningkatkan rata-rata nilai capaian penataan dan penguatan organisasi, penataan perundang-undangan dan penataan ketatalaksanaan
		Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kelembagaan OPD
		Meningkatkan Pelaporan Kinerja Pemerintahan
		Meningkatkan kerjasama Pemerintah Kota Pontianak dengan Kota-kota lainnya
		Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala daerah
		Meningkatkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Pemerintah yang profesional dan kompeten
Terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan bardaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
		Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan
		Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan
		Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
		Optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya
		Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
		Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
		Meningkatkan penyuluhan pertanian

RPD Kota Pontianak [2024 - 2026]

		Meningkatkan dukungan kesehatan dan jumlah ternak untuk mendukung swasembada daging
		Optimalisasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Pengembangan Ekspor
		Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
		Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam
		Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Peningkatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
		Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi
		Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro
		Pengembangan Usaha Mikro
		Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata
		Meningkatkan pemasaran pariwisata
		Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Melaksanakan pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja
		Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja
	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Sosial, Bantuan Sosial, Perlindungan Jaminan Sosial dan Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		Meningkatkan Penanganan Warga Negara Migran Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
		Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar

RPD Kota Pontianak [2024 - 2026]

		Meningkatkan Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana Alam
	Meningkatnya daya saing kota, melalui inovasi dan kolaborasi	Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
		Menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal
		Melaksanakan promosi penanaman modal
		Meningkatkan pelayanan penanaman modal
		Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
		Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Penelitian, Inovasi dan Pengembangan daerah

6. 2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan juga merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 6.2.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2024-2026

Tahun Pertama (2024)	Tahun Kedua (2025)	Tahun Ketiga (2026)
Penguatan Kolaborasi untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif yang didukung Kondisi aman dan Tertib	Pemantapan Kolaborasi untuk pembangunan Ekonomi Inklusif menuju Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan	Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan

6. 3. Program Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan rangkaian program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas :

1. Program penunjang urusan Pemerintah daerah;
2. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
4. Urusan pilihan;

5. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
6. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
7. Unsur pengawas;
8. Unsur kewilayahan;
9. Unsur pemerintahan umum; dan
10. Unsur kekhususan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 6 (enam) urusan yaitu :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 18 (delapan belas) urusan yaitu :
 - a. Tenaga Kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan Informatika;
 - k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

1. Penanaman Modal;
 - m. Kepemudaan dan Olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 (delapan) urusan yaitu :
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Perdagangan; dan
 - e. Perindustrian.

Terdapat 3 (tiga) urusan pilihan yang ada dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 namun tidak masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak yaitu (1) urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, (2) urusan Kehutanan, dan (3) urusan Transmigrasi. Hal ini dikarenakan Kota Pontianak tidak memiliki pemanfaatan langsung terhadap sumber daya alam baik minyak dan gas bumi yang dapat dikelola lebih lanjut, tidak memiliki luasan taman hutan raya yang harus dikelola lebih lanjut, serta Kota Pontianak tidak mengelola secara langsung urusan ketransmigrasian.

4. Unsur pendukung urusan pemerintahan meliputi 2 (dua) unsur yaitu :
 - a. Unsur Sekretariat Daerah; dan
 - b. Unsur Sekretariat DPRD.
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi 7 (unsur) yaitu :
 - a. Unsur Perencanaan;
 - b. Unsur Keuangan;
 - c. Unsur Kepegawaian;
 - d. Unsur Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Unsur Penelitian dan Pengembangan.

Terdapat 2 (dua) unsur penunjang yang tidak masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak yaitu (1) Unsur Penghubung, dan (2) Unsur Pengelolaan Perbatasan Daerah.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yaitu Inspektorat Daerah;
7. Unsur Kewilayahan yaitu Kecamatan;
8. Unsur Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan dapat dilihat pada Tabel 6.3. berikut :

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kota Pontianak 2024 - 2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan								
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Misi 1 RPJPD : MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERWAWASAN KEBANGSAAN YANG SEHAT, CERDAS, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA													
1		TUJUAN 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang Berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,48	81,20		81,60		82,00		82,00	
1	1	SASARAN 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	73,46	73,65		73,74		73,90		73,90	
			2. Angka Stunting Balita	Persen	19,70	14,00		13,00		12,00		12,00	
DINAS KESEHATAN													
1	2	2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi	Persen	90	100	114.081.377.483	100	149.123.831.103	100	159.812.555.544	100	423.017.764.130
1	2	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Rasio Dokter, Perawat dan Bidan per 1.000 penduduk	Jumlah personil per 1.000 penduduk	2,3 per 1.000 Penduduk	2,3 per 1.000 Penduduk	1.450.425.700	2,3 per 1.000 Penduduk	214.676.051	2,3 per 1.000 Penduduk	229.202.401	2,3 per 1.000 Penduduk	
			2. Jumlah Faskes yang Memenuhi SDM Berkualitas Sesuai Standar	Persen	90	90		90		90		90	
1	2	4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1. Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar	Persen	80	80	440.627.440	80	843.794.939	80	807.770.642	80	2.092.193.021
1	2	5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Bidang Kesehatan yang dibina	Persen	90	90	1.002.115.500	90	820.800.000	90	853.955.000	90	2.676.870.500

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2	14	4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Tahun	22,35	22,1	933.300.000	22,56	933.300.000	23,1	933.300.000	23,1	2.799.900.000
2	14	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Presentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	Persen	70,53	71,5	865.900.000	71,8	865.900.000	72	865.900.000	72	2.597.700.000
1	2		SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan	1. Indeks Pendidikan	Indeks	0,765	0,768		0,769		0,770		0,770	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Persentase SD yang Terakreditasi	Persen	98,22	99	170.507.343.780	99	176.339.914.780	100	181.414.114.780	100	528.261.373.340
				2. Persentase SMP yang Terakreditasi	Persen	95	97		98		100		100	
				3. Persentase Paud yang Terakreditasi	Persen	86,08	95		98		100		100	
				4. Persentase Paud dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Terakreditasi	Persen	100	100		100		100		100	
1	1	4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Rasio Guru SD terhadap murid	Rasio	1 : 20	1 : 18	207965900	1 : 17	207965900	1 : 16	207965900	1 : 16	623.897.700
				2. Persentase Guru yang bersertifikasi	Persen	58,27	61		63		64		64	
2	22	2	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Presentase Kebudayaan lokal daerah yang mengalami perkembangan	Persen	93,65	100	2.667.865.800	100	2.667.865.800	100	2.667.865.800	100	8.003.597.400
2	22	3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1. Persentase kesenian tradisional yang	Persen	100	100	196.633.800	100	196.633.800	100	196.633.800	100	589.901.400
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	1. Persentase objek sejarah yang dibina	Persen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	225.000.000
2	22	5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Persentase pelestarian cagar budaya	Persen	99	100	137.776.600	100	137.776.600	100	137.776.600	100	413.329.800
1	3		SASARAN 3 : Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,96	0,94		0,93		0,92		0,92	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2	14	2	Program Pengendalian Penduduk	1. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun	14	18	245.180.000	17	240.200.000	15	258.611.629	15	743.991.628,88
2	14	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	70,50	70,75	3.417.942.450	70,8	3.449.193.873	70,85	3.458.804.316	70,85	10.325.940.639
2	14	4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Tahun	22,35	22,10	54.160.000	22,56	56.868.000	23,10	59.771.400	23,10	170.799.400
1	4		SASARAN 4 : Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	Indeks	94,10	94,20		94,25		94,30		94,30	
				2. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkatan	Madya	Nindya		Nindya		Utama		Utama	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2	8	2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	39,16	13,56	217.687.550	15	184.810.000	20	194.810.000	20	597.307.550,00
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	1. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	7,7	7,3	148.000.000	7,2	183.755.100	7,1	173.755.100	7,1	505.510.200,00
2	8	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1. Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	Persen	100	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	105.000.000,00
2	8	6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Persentase Forum Anak Daerah Aktif	Persen	100	100	188.693.000	100	188.693.000	100	188.693.000	100	566.079.000,00
2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak	1. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pendampingan	Persen	100	100	859.100.000	100	870.981.478	100	885.981.478	100	2.616.062.955,00

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	5	SASARAN 5 : Meningkatnya Prestasi Atlet Olahraga dan Pemuda	1. Persentase Atlet Olahraga dan Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi / Nasional dan Internasional	Persen	45,00	46,70		49,16		55,00		55,00		
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA														
2	19	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Indeks pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Indeks	70	70	1.240.597.250	70	1.305.457.250	70	1.319.426.266	70	3.865.480.766
2	19	3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Indeks pengembangan kapasitas daya saing olahraga	Indeks	70	70	5.284.486.324	70	5.334.486.324	70	5.464.486.324	70	16.083.458.972
2	19	4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1. Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwardcab	Orang	90	90	150.000.000	90	150.000.000	90	150.000.000	70	450.000.000
Misi 2 RPJPD : MEWUJUDKAN SARANA, PRASARANA, TATA RUANG DAN WILAYAH PERKOTAAN UNTUK PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN														
2			TUJUAN 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	1. Indeks Infrstruktur	Indeks	88,07	89,36		90,66		91,88		91,88	
				2. Indeks Resiko Bencana	Indeks	90,63	77,09		70,09		64,25		64,25	
2	1		SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	1. Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	Persen	89,33	90,42		91,32		92,07		92,07	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Persentase perbaikan jalan rusak	Persen	1	1	160.770.890.000	1	195.990.000.000	1	218.044.860.000	3	574.805.750.000
				2. Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	Persen	86,37	90,37		92,37		94,37		94,37	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2	1	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	2. Pengurangan Luas Genangan	Persen	48,61	28,00		24,00		20,00		20,00		
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Persentase Panjang Saluran yang dipelihara	Persen	50	59	27.290.000.000	61	31.290.000.000	63	36.290.000.000	63	94.870.000.000
1	3	6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1. Persentase Panjang Saluran Berkonstruksi Baik	Persen	53,03	56,03	33.270.000.000	57,53	47.770.000.000	59,03	51.270.000.000	59,03	132.310.000.000
2	1	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	3. Persentase Akses Air Minum Aman	Persen	7,00	11,00		13,00		15,00		15,00		
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	3	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Persentase Sarana Prasarana Perpipaan Terakses ke Rumah Tangga	Persen	90,00	90,23	9.500.000.000	90,36	10.050.000.000	90,49	10.550.000.000	90,49	30.100.000.000,00
2	1	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	4. Persentase Fasilitas Pemerintah dalam Kondisi Baik	Persen	66,15	70,00		75,00		80,00		80,00		
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	1. Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	Persen	80,45	83	31.950.000.000	84	58.821.100.000	85	71.100.000.000	85	161.871.100.000,00
1	3	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1. Persentase kualitas tenaga kerja jasa konstruksi	Persen	67,5	72,5	650.000.000	75	650.000.000	77,5	650.000.000	77,5	1.950.000.000,00
2	1	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	5. Persentase Lingkungan Pemukiman yang Layak	Persen	85,39	86,95		88,06		89,04		89,04		
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	1. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	2.683.330.000	100	2.683.330.000	100	2.683.330.000	100	8.049.990.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	1. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani	Persen	15,23	9,5	7.282.640.070	4,75	7.282.640.070	2,37	7.282.640.070	16,62	21.847.920.210
1	04	04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Presentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Persen	2,47	11,59	1.580.000.000	11,59	1.580.000.000	11,59	1.580.000.000	34,78	4.740.000.000
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1. Persentase Jumlah Jalan Lingkungan dan jumlah drainase lingkungan dalam kondisi mantap	Persen	71,45	74,4	129.949.786.730	76,6	139.871.796.730	78,55	141.831.796.730	78,55	411.653.380.190
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1. Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	Persen	100	100	109.440.000	100	150.000.000	100	165.000.000	100	424.440.000
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1. Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	Persen	85	80	25.000.000.000	80	10.000.000.000	80	8.000.000.000	80	43.000.000.000
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	1. Persentase penatagunaan tanah	Persen	100	100	162.570.000	100	195.000.000	100	205.000.000	100	562.570.000
2	2		SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Transportasi dan Kelancaran Berlalu Lintas	1. Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam kota	Jam	0,035	0,035		0,035		0,035		0,035	
DINAS PERHUBUNGAN														
2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	Indeks	80	83	29.190.280.000	84	30.349.780.000	85	31.434.780.000	85	90.974.840.000
				2. Presentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Persen	80	85	3.028.000.000	86	2.978.000.000	87	2.978.000.000	87	8.984.000.000
				3. Presentase Kendaraan bermotor Laik Jalan	Persen	80	82	331.500.000	83	331.500.000	84	431.500.000	84	1.094.500.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2	15	3	Program Pengelolaan Pelayaran	1. Persentase Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Persen	80	87	860.000.000	88	980.000.000	90	1.050.000.000	90	2.890.000.000
2	3		SASARAN 3 : Terwujudnya Kota yang Bersih Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	62,27	63,40		63,90		63,96		63,96	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP														
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Persentase perencanaan lingkungan hidup	Persen	100	100	462.275.000	100	62.275.000	100	62.275.000	100	586.825.000
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	60	65	1.083.184.855	70	1.083.184.855	75	1.083.184.855	75	3.249.554.565
2	11	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persen	100	100	62.672.500	100	62.672.500	100	62.672.500	100	188.017.500
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persen	100	100	127.587.000	100	127.587.000	100	127.587.000	100	382.761.000
2	11	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH	Persen	100	100	219.999.300	100	219.999.300	100	219.999.300	100	659.997.900
2	11	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1. Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen	60	80	2.251.234.150	90	2.251.234.150	100	2.251.234.150	100	6.753.702.450
2	11	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1. Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen	50	60	263.339.800	65	263.339.800	68	263.339.800	68	790.019.400

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1. Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	48.023.500	100	48.023.500	100	48.023.500	100	144.070.500
2	11	11	Program Pengelolaan Sampah	1. Persentase pengurangan sampah	Persen	24,2	28	43.516.017.294	30	44.690.816.294	30	45.530.816.294	30	133.737.649.882
				2. Persentase penanganan sampah	Persen	73,47	71		70		70		70	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Persentase Ketaatan pembangunan terhadap RT RW di Kota Pontianak	Persen	98,18	80	1.520.000.000	85	1.985.000.000	90	2.295.000.000	90	5.800.000.000,00
1	3	9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1. Persentase bangunan / lingkungan yang dikelola pemerintah kota pontianak yang tertata baik	Persen	80,96	85	30.906.000.000	87	33.662.000.000	89	36.422.000.000	89	100.990.000.000,00
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1. persentase cakupan rumah tangga yang terlayani fasilitas persampahan	Persen	60	65	963.000.000	70	4.610.000.000	70	3.850.000.000	70	9.423.000.000,00
1	3	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi	Persen	100	100	3.750.000.000	100	3.750.000.000	100	3.750.000.000	100	11.250.000.000,00
2	4		SASARAN 4 : Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Kemanan Kota	1. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,45	0,50		0,55		0,60		0,60	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														
1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	1. Tingkat Waktu Tanggap (response Time Rate) Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	1.598.537.900	100	1.406.007.900	100	1.405.084.200	100	4.409.630.000
				2. Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	100	100		100		100		100	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA														
1	5	2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi	Persen	100	100	1.879.496.850	100	2.027.000.000	100	2.125.000.000	100	6.031.496.850
1	5	4	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Persen	100	100	267.150.000	100	350.000.000	100	370.000.000	100	987.150.000
2	5		SASARAN 5 : Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat	1. Indeks Kota Toleran	Indeks	4,75	4,85		4,95		5,00		5,00	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK														
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Persentase tingkat pemahaman nilai pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	90	90	919.000.000	90	819.000.000	90	819.000.000	90	2.557.000.000
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1. Persentase tingkat pemahaman politik	Persen	90	90	28.534.089.000	90	3.434.089.000	90	3.434.089.000	90	35.402.267.000
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	1. Persentase pemberdayaan ormas	Persen	85	85	420.000.000	85	420.000.000	85	420.000.000	85	1.260.000.000
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Persentase tingkat pemahaman ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	90	90	100.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	90	300.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1. Persentase fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persen	100	100	728.000.000	100	728.000.000	100	728.000.000	100	2.184.000.000
Misi 3 RPJPD : MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG (GOOD GOVERNANCE), MASYARAKAT YANG PAHAM POLITIK, TAAT HUKUM, TENTRAM DAN TERTIB														
3			TUJUAN 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,98 (BB)	73 (BB)		75 (BB)		77 (BB)		77 (BB)	
3	1		SASARAN 1 : Meningkatnya Profesionalitas ASN	1. Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	49,90	71		73		75		75	
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	1. Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Persen	96,61	80	4.938.808.049	80	4.938.808.049	80	4.938.808.049	80	14.816.424.147
5	4	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	Persen	77,59	80	1.246.629.772	80	1.246.629.772	80	1.246.629.772	80	3.739.889.316
3	2		SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
SEKRETARIAT DAERAH														
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Nilai IKM Sekretariat Daerah	Nilai	98,386	98,5	3.510.670.883	98,6	3.310.670.883	98,7	3.310.670.883	98,7	10.132.012.649
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra	Persen	100	100	10.453.840.540	100	10.253.790.140	100	10.253.790.140	100	30.961.420.820

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
4	1	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Persentase implementasi kebijakan Perekonomian	Persen	100	100	1.309.311.250	100	1.209.311.250	100	1.209.311.250	100	3.727.933.750
				2. Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Persen	95,16	97,10	1.210.933.875	98,06	1.010.933.875	99,03	1.010.933.875	99,03	3.232.801.625
				3. Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	Persen	91,72	93	1.997.303.240	94	1.897.303.240	95	1.897.303.240	95	5.791.909.720
SEKRETARIAT DPRD														
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Persentase Agenda Kerja DPRD yang Terasilitasi	Persen	100	100	13.768.697.838	100	14.236.697.838	100	14.236.697.838	100	42.242.093.514
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	Persen	100	99	91.459.200	99,25	116.104.200	99,50	118.659.410	99,50	326.222.810
				2. Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	Persen	99,12	90		95		96		96	
				3. Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	Persen	38,28	87		87,50		88		88	
				4. Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	Persen	100,04	82		82,50		83		83	
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	1. Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	Persen	99,74	40	233.042.400	42,5	257.687.400	45	267.321.770	45	758.051.570
				2. Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	Persen	98,83	55		60		65		65	
				3. Persentase Penerbitan Akte Perceraian (Non Muslim)	Persen	43,68	40		42,5		45		45	
				4. Persentase Penerbitan Akte Perkawinan (Non Muslim)	Persen	99,78	60		62,5		65		65	
				5. Persentase Penerbitan Akte Kematian	Persen	99,12	40		42,5		45		45	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Agregat Kependudukan	Persen	68,75	85	232.140.020	85	244.155.080	85	256.362.834	85	732.657.934
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Persentase Penyajian Komponen Data dalam Profil Kependudukan	Persen	100	100	16.944.600	100	16.944.600	100	17.791.830	100	51.681.030
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN														
2	23	2	Program Pembinaan Perpustakaan	1. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	73.155	150 judul (300 eksemplar)	11.755.319.400	150 judul (300 eksemplar)	717.814.400	150 judul (300 eksemplar)	755.319.400	150 judul (300 eksemplar)	13.228.453.200
				2. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Persen	25,10	36,30	47,50	58,70	58,70				
2	24	2	Program Pengelolaan Arsip	1. Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	74,65	74	291.000.000	75	292.600.000	76	292.600.000	76	876.200.000
2	24	3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	Persen	50	50	28.000.000	60	28.000.000	70	28.000.000	70	84.000.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Sesuai Dengan SOP	Persen	100	100	174.520.000	100	240.540.000	100	200.540.000	100	615.600.000
2	18	6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Simyandu	Persen	100	100	75.000.000	100	100.000.000	100	123.000.000	100	298.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
KECAMATAN PONTIANAK BARAT														
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90	92	1.170.500.000	95	1.168.500.000	95	1.168.500.000	100	3.507.500.000
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	90	95	1.551.682.420	92	1.350.000.000	95	1.350.000.000	100	4.251.682.420
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	Persen	90	95	150.000.000	90	120.000.000	90	120.000.000	100	390.000.000
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Persen	82	90	585.110.363	92	540.000.000	95	540.000.000	100	1.665.110.363
KECAMATAN PONTIANAK TIMUR														
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	82	90	884.100.000	92	890.500.000	95	899.000.000	95	899.000.000
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	82	90	970.000.000	92	1.005.000.000	95	1.050.000.000	95	1.050.000.000
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	Persen	82	90	100.000.000	92	110.000.000	95	120.000.000	95	120.000.000
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Persen	80	85	2.991.000.000	88	3.140.000.000	90	3.299.000.000	90	3.299.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN														
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90	100	782.875.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	2.382.875.000
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	90	90	2.130.008.000	90	2.155.000.000	95	2.210.000.000	95	6.495.008.000
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	Persen	90	90	161.130.000	90	175.000.000	95	185.000.000	95	521.130.000
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Persen	90	90	583.000.000	90	600.000.000	95	625.000.000	95	1.808.000.000
KECAMATAN PONTIANAK UTARA														
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	95	100	1.155.500.000	100	1.194.165.000	100	1.253.873.250	95	3.603.538.250
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Persen	100	100	1.475.000.000	100	1.548.750.000	100	1.655.325.000	95	4.679.075.000
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	Persen	100	100	205.000.000	100	215.250.000	100	232.575.000	95	652.825.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	95	100	730.000.000	100	702.900.000	100	773.190.000	95	2.206.090.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
KECAMATAN PONTIANAK KOTA														
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	95	100	1.155.500.000	100	1.194.165.000	100	1.253.873.250	100	3.603.538.250
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	1.475.000.000	100	1.548.750.000	100	1.655.325.000	100	4.679.075.000
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	Persen	100	100	205.000.000	100	215.250.000	100	232.575.000	100	652.825.000
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Persen	95	100	730.000.000	100	702.900.000	100	773.190.000	100	2.206.090.000
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA														
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90	95	457.000.000	96	462.000.000	97	470.000.000	97	1.389.000.000
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	90	95	490.000.000	96	540.000.000	97	552.800.000	97	1.582.800.000
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	Persen	90	95	144.000.000	96	159.118.000	97	169.000.000	97	472.118.000
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Persen	90	95	1.223.000.000	96	1.235.000.000	97	1.323.800.000	97	3.781.800.000
3	3		Sasaran 3 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat dan Akuntabel	1. Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat									

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH														
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	Persen	100	100	11.856.773.000	100	12.312.211.000	100	12.496.773.000	100	36.665.757.000
				2. Persentase penatausahaan keuangan dan manajemen kas dilaksanakan sesuai ketentuan	Persen	100	100		100		100		100	
				3. Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100	
				4. Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	78	100		100		100		100	
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik	Persen	100	100	3.743.000.000	100	3.098.979.000	100	3.223.000.000	100	10.064.979.000
3	4		Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2	16	2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan komunikasi Publik	Persen	58,23	70	719.466.920	80	748.613.612	90	891.974.974	90	2.360.055.506
2	16	3	Program Aplikasi Informatika	1. Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	Persen	91,79	95,52	3.529.530.000	97,01	2.684.630.000	98,51	2.603.630.000	98,51	8.817.790.000
2	20	2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Persentase pemenuhan data prioritas daerah	Persen	38,46	53,85	461.799.740	61,54	492.912.433	69,23	569.639.071	69,23	1.524.351.244
2	21	2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	Persen	16	21,88	81.450.000	28,13	95.500.000	34,38	106.000.000	34,38	282.950.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	5	Sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	72,28 (BB)	80 (BB)		81 (BB)		82 (BB)		82 (BB)		
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase keselarasan kinerja pembangunan pada dokumen perencanaan daerah dengan DPA-APBD	Persen	65	70	1.360.000.000	75	1.563.793.490	80	1.174.347.190	80	4.098.140.680
				2. Indeks Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Indeks (dengan nilai maksimal sebesar 100)	80	80		81		82		82	
5	1	3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	1. Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan DPA-APBD	Persen	65	70	900.000.000	75	940.000.000	80	807.851.280	80	2.647.851.280
SEKRETARIAT DAERAH														
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Nilai	11,11	12	404.114.350	12,1	304.114.350	12,2	304.114.350	12,2	1.012.343.050
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase implementasi kebijakan Pemerintahan	Persen	100	100	2.217.814.700	100	2.082.814.700	100	2.082.814.700	100	6.383.444.100

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
INSPEKTORAT														
6	01	02	Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP	Persen	100	100	469.498.000	100	567.798.000	100	469.498.000	100	1.506.794.000
				2. Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	Persen	100	100		100		100		100	
6	01	03	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	541.685.000	3	561.685.000	3	541.685.000	3	1.645.055.000
				2. Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	Persen	63,33	80		90		100		100	
Misi 4 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI, MANUSIAWI, BERKURANGNYA MASALAH SOSIAL, MAKIN BERDAYA DAN TERJAMIN HAK HAK WARGA														
Misi 5 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG STABIL, TUMBUH DAN MERATA BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN														
4			Tujuan 1 : Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Kesejahteraan	1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	Indeks	6,08	6,45		6,58		6,71		6,71	
4	1		Sasaran 1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,98	4,5 - 5,1		4,6 - 5,2		4,7 - 5,3		4,7 - 5,3	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN														
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persen	142,01	142,5	334.087.980	143	414.834.812	143,5	495.751.637	143,5	1.244.674.429
				2. Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	Persen	47,50	20		22		24		24	
				3. Persentase Target Konsumsi Pangan	Persen	98,95	99		99,05		99,1		99,1	
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1. Persentase Peningkatan Tahan Pangan	Persen	90,76	92,5	15.000.000	93	15.000.000	93,5	15.000.000	93,5	45.000.000
2	9	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1. Persentase Kasus Pangan yang tidak sesuai standar Mutu yang telah ditetapkan	Persen	19,3	18	75.895.348	17,5	75.895.348	17	75.895.348	17	227.686.044
3	25	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	Persen	118	100	54.000.000	100	93.000.000	100	105.000.000	100	252.000.000
3	25	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Persentase kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi	Persen	50	50	300.149.984	75	330.338.481	100	382.672.638	100	1.013.161.103
3	25	6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Persentase jumlah pelaku Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang difasilitasi	Persen	83	100	10.000.000	100	10.000.000	100	15.000.000	100	35.000.000
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/ rekomendasi	Persen	20	30	1.118.211.984	40	1.233.000.000	50	1.307.967.437	50	3.659.179.421
				2. Persentase peningkatan kunjungan di UPTD Agribisnis	Persen	15	15		15		15		15	
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	persen	100	100	-	100	-	100	-	100	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persen	12	20	233.291.632	30	316.772.603	40	658.536.220	40	1.208.600.455
				2. Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana di UPTD Agribisnis	Persen	2	2		2		2		6	
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi	Nilai	90	95	4.195.341.648	95	423.636.561	95	480.078.411	95	5.099.056.620
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen	30	30	802.655.167	30	958.279.889	30	1.111.909.471	90	2.872.844.527
3	27	05	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen		50	0	60	55.000.000	70	40.000.000	70	95000000
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	1. Persentase peningkatan unit usaha pengecer obat hewan yang memiliki izin	Persen		100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.100.000	100	33.100.000
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	1. Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis	Persen	10	20	458.070.000	30	473.000.000	40	488.000.000	40	1.419.070.000
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA														
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Meningkatnya persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persen	78	85	846.901.600	85	851.941.700	90	851.941.700	90	2.550.785.000
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	1. Meningkatnya persentase Program Pemasaran Pariwisata	Persen	30	95	658.897.520	100	658.897.520	100	700.000.000	100	2.017.795.040
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Persen	60	64	50.000.000	66	50.000.000	68	50.000.000	70	150.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	26	05	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Persentase Pelaku Ekonomi Kraetif Yang Mengikuti Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	25	30	821.276.996	32	880.276.996	35	900.005.400	50	2.601.559.392
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN														
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	100	100	0	100	0	100	15.000.000	100	15.000.000
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	1. Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan	Persen	29	35	21.500.000	40	33.500.000	45	45.500.000	45	100.500.000
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	1. Persentase KSP/USP yang dinilai SEHAT	Persen	4	5	3.000.000	6	30.500.000	6	42.500.000	6	76.000.000
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1. Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian	Persen	32	35	410.170.000	40	410.170.000	40	410.170.000	40	1.230.510.000
2	17	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1. Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Persen	94	95	4.000.000	95	5.500.000	96	10.000.000	96	19.500.000
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Persen	2,65	2,85	13.000.000	2,95	24.000.000	3	50.000.000	3	87.000.000
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	1. Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	Persen	0,26	0,34	1.147.800.000	0,37	1.315.800.000	0,42	1.419.800.000	0,42	3.883.400.000
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	Persen	50	100	746.673.600	100	1.143.873.600	100	1.207.273.600	100	3.097.820.800
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	100	100	1.076.500.000	100	1.085.000.000	100	1.200.000.000	100	3.361.500.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	1. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait	Persen	78	80	1.500.000	80	5.000.000	85	20.000.000	85	26.500.000
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1. Nilai Kelengkapan dan Keterkinian Informasi Industri	Persen	90	90	6.000.000	90	30.000.000	90	50.000.000	90	86.000.000
4	1		Sasaran 1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	2 Tingkat Inflasi	Persen	6,35	3±1		3±1		3±1		3±1	
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN														
3	30	02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100	16.000.000	100	38.654.930	100	83.000.000	100	137.654.930
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	Persen	2	2	349.445.600	3	405.000.000	3	459.000.000	3	1.213.445.600
				2. Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	50	60		60		70		70	
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	1. Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	Persen	50	60	0	60	0	70	130.000.000	70	130.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1. Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	100	100	102.037.710	100	137.037.710	100	147.037.710	100	386.113.130
3	30	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1. Persentase usaha mikro yang melakukan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persen	0,27	0,27	300.000.000	0,40	300.000.000	0,53	375.000.000	0,53	975.000.000
4	2		Sasaran 2 Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,92	8,35-10,25		8,2-10,20		8,15-10,15		8,15-10,15	
DINAS TENAGA KERJA														
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen		65	38.000.000	67	52.000.000	69	70.000.000	69	160.000.000
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Besaran Tenaga Kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	50	54	556.000.000	56	575.000.000	58	597.000.000	58	1.728.000.000
2	07	04	Program Penempatan tenaga Kerja	1. Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja yang lulus seleksi	Persen	36	10	284.000.000	15	383.000.000	20	451.000.000	20	1.118.000.000
2	07	05	Program Hubungan Industri	1. Besaran Kasus yang diselesaikan dergan perjanjian bersama (PB)	Persen	53	55	290.858.000	56	365.000.000	57	407.000.000	57	1.062.858.000
4	3		Sasaran 3 Menurunnya Kemiskinan	1. Tingkat Kemiskinan	Persen	4,46	4,3-4,4		4,2-4,3		4,1-4,2		4,1-4,2	
DINAS SOSIAL														
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1. Persentase tingkat penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	50	100	2.480.000	100	2.480.000	100	10.000.000	100	14.960.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	957.253.400	100	1.009.273.400	100	1.185.250.400	100	3.151.777.200
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan dengan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persen	100	100	200.000.000	100	172.974.550	100	181.623.278	100	554.597.827,50
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1. Peresentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/ pemberdayaan	Persen	60	65	1.359.491.000	70	1.404.491.000	75	1.414.715.550	75	4.178.697.550,00
4	3		Sasaran 3 Menurunnya Kemiskinan	2. Gini Rasio	Nilai	0,360	0,322		0,317		0,312		0,312	
DINAS SOSIAL														
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persen	87	100	1.321.407.500	100	1.493.066.500	100	1.562.465.700	100	4.376.939.700
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM	Persen	100	100	3.437.961.400	100	3.023.935.100	100	3.023.935.100	100	9.485.831.600
1	06	06	Program Penanganan Bencana	1. Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	Persen	100	100	496.380.700	100	410.680.600	100	410.680.600	100	1.317.741.900
4	4		Sasaran 4 Meningkatnya Daya Saing Kota, Melalui Inovasi dan Kolaborasi	1. Indeks Daya saing Daerah	Tingkatan	3,37 (Tinggi)	3,76 (Sangat Tinggi)		3,80 (Sangat Tinggi)		3,84 (Sangat Tinggi)		3,84 (Sangat Tinggi)	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan									
					2024		2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
5	05	02	Program penelitian dan pengembangan daerah	1. Indeks Kebermanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	Persen	80	80	800.000.000	85	800.000.000	90	730.000.000	90	2.330.000.000
BADAN PENDAPATAN DAERAH														
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	Persen	88,94	100	3.969.480.000	100	4.167.953.250	100	4.376.347.500	100	12.513.780.750
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Persentase penetapan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal	Persen	100	100	74.250.000	100	472.530.000	100	132.530.000	100	679.310.000
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	1. Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan	Persen	100	100	87.978.000	100	130.000.000	100	233.357.000	100	451.335.000
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Persentase perusahaan PMA / PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP	Persen	100	100	417.476.000	100	463.376.000	100	463.376.000	100	1.344.228.000

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kota Pontianak serta target pembangunan nasional. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, kerangka pendanaan ini bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Secara umum, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III tentang Gambaran Keuangan Daerah, maka kemampuan keuangan daerah untuk mendanai Belanja Daerah secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 7.1. Khusus untuk anggaran Belanja Daerah pada Tabel 7.1. merupakan gambaran kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan Tahun 2024-2026.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 diuraikan dalam Tabel 7.1. berikut :

Tabel 7. 1.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026

KODE	URAIAN BELANJA	APBD-P 2022	APBD 2023	PROYEKSI RPD 2024-2026				
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
5		BELANJA DAERAH	1.781.968.414.131	1.776.736.185.305	1.935.048.315.000	1.991.202.844.000	2.052.862.978.000	
5	1	BELANJA OPERASI	1.294.067.500.978	1.258.070.896.764	1.317.360.073.000	1.287.628.736.000	1.287.528.286.000	
5	1	1	Belanja Pegawai	645.733.585.176	642.824.524.724	734.484.504.000	724.598.948.000	719.179.518.000
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	590.031.155.818	536.419.718.840	494.873.733.000	499.822.471.000	504.820.696.000
5	1	3	Belanja Bunga	1.020.000.000	1.200.000.000	-	-	-
5	1	4	Belanja Hibah	49.218.635.817	71.115.353.200	79.801.836.000	55.007.317.000	55.328.072.000
5	1	5	Belanja Bantuan Sosial	8.064.124.167	6.511.300.000	8.200.000.000	8.200.000.000	8.200.000.000
5	2	BELANJA MODAL	485.518.540.564	516.665.288.541	612.688.242.000	698.574.108.000	760.334.692.000	
5	3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.282.372.589	2.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
5	4	BELANJA TRANSFER	100.000.000	-	-	-	-	

7.2. Rencana Program Perangkat Daerah

Adapun rencana program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah Penanggung jawab berdasarkan bidang urusan dijabarkan dalam Tabel 7.2. berikut:

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Pontianak Tahun 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Rencana RPD 2024-2026						Kondisi Akhir Periode RPD
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1 1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					456.699.003.800		457.173.828.800,00		458.331.325.800	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					456.699.003.800		457.173.828.800,00		458.331.325.800
1 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	285.983.694.120	95	280.625.948.120	95	276.709.245.120	95
1 01 02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SD yang terakreditasi	Persen	98,22	99	170.507.343.780	99	176.339.914.780	100	181.414.114.780	100
		Persentase SMP yang terakreditasi	Persen	95	97		98		100		100
		Persentase PAUD yang terakreditasi	Persen	86,1	95		98		100		100
		Persentase PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terakreditasi	Persen	100	100		100		100		100
1 01 04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru SD terhadap murid	Rasio	1 : 20	1 : 18	207.965.900	1 : 17	207.965.900	1 : 16	207.965.900	1 : 16
		Persentase Guru yang bersertifikasi	Persen	58,27	61		63		64		64
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					395.696.097.000		406.166.486.001		411.663.351.001	
		Dinas Kesehatan					395.696.097.000		406.166.486.001		411.663.351.001
1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	278.721.550.877	95	255.163.383.908	95	249.959.867.414	95
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi	Persen	90	100	114.081.377.483	100	149.123.831.103	100	159.812.555.544	100
1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	per 1.000 Penduduk	2,3 per 1.000 Penduduk	2,3 per 1.000 Penduduk	1.450.425.700	2,3 per 1.000 Penduduk	214.676.051	2,3 per 1.000 Penduduk	229.202.401	2,3 per 1.000 Penduduk
		Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	Persen	90	90		90		90		
1 02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum)sesuai standar	Persen	80	80	440.627.440	80	843.794.939	80	807.770.642	80

1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di bidang Kesehatan yang di bina	Persen	90	90	1.002.115.500	90	820.800.000	90	853.955.000	90
1 03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								323.244.233.000		411.626.288.000		461.809.730.000	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								323.244.233.000		411.626.288.000		461.809.730.000	
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	22.674.343.000	95	23.048.188.000	95	27.587.870.000	95
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Saluran yang dipelihara	Persen	50	59	27.290.000.000	61	31.290.000.000	63	36.290.000.000	63
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga	Persen	90	90,23	9.500.000.000	90,36	10.050.000.000	90,49	10.550.000.000	90,49
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	persentase cakupan rumah tangga yang terlayani fasilitas persampahan	Persen	60	65	963.000.000	70	4.610.000.000	70	3.850.000.000	70
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi	Persen	100	100	3.750.000.000	100	3.750.000.000	100	3.750.000.000	100
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang saluran berkonstruksi baik	Persen	53,03	56,03	33.270.000.000	57,53	47.770.000.000	59,03	51.270.000.000	59,03
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Persen	80,45	83	31.950.000.000	84	58.821.100.000	85	71.100.000.000	85
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase bangunan / lingkungan yang dikelola pemerintah kota pontianak yang tertata baik	Persen	80,96	85	30.906.000.000	87	33.662.000.000	89	36.422.000.000	89
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase perbaikan jalan rusak	Persen	1	1	160.770.890.000	1	195.990.000.000	1	218.044.860.000	3
				persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	Persen	86,37	90,37						
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase kualitas tenaga kerja jasa konstruksi	Persen	67,5	72,5	650.000.000	75	650.000.000	77,5	650.000.000	77,5
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW di Kota Pontianak	Persen	98,18	80	1.520.000.000	85	1.985.000.000	90	2.295.000.000	90
1 04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								148.732.400.000		158.713.710.000		160.618.826.000	
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								148.732.400.000		158.713.710.000		160.618.826.000	
1	04	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	7.236.643.200	95	7.295.943.200	95	7.241.059.200	95
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	2.683.330.000	100	2.683.330.000	100	2.683.330.000	100
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani	Persen	15,23	9,5	7.282.640.070	4,75	7.282.640.070	2,37	7.282.640.070	16,62

1	04	04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Persen	2,47	11,59	1.580.000.000	11,59	1.580.000.000	11,59	1.580.000.000	34,78
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Jumlah Jalan Lingkungan dan jumlah drainase lingkungan dalam kondisi mantap	Persen	71,45	74,4	129.949.786.730	76,6	139.871.796.730	78,55	141.831.796.730	78,55
1 05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								23.782.724.000		23.798.568.000		23.896.506.000	
Satuan Polisi Pamong Praja								18.426.647.000		18.611.391.000		18.803.073.000	
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	16.280.000.150	95	16.234.391.000	95	16.308.073.000	95
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi	Persen	100	100	1.879.496.850	100	2.027.000.000	100	2.125.000.000	100
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Persen	100	100	267.150.000	100	350.000.000	100	370.000.000	100
Badan Penanggulangan Bencana Daerah								5.356.077.000		5.187.177.000		5.093.433.000	
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Nilai		BB	3.757.539.100	BB	3.781.169.100	BB	3.688.348.800	BB
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) penanggulangan bencana	Persen	100	100	1.598.537.900	100	1.406.007.900	100	1.405.084.200	100
				Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100		100		100		
1 06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								13.664.757.000		13.713.957.000		13.764.357.000	
Dinas Sosial								13.664.757.000		13.713.957.000		13.764.357.000	
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	7.449.274.000	95	7.774.521.400	95	7.572.025.200	95
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	persen	87	100	1.321.407.500	100	1.493.066.500	100	1.562.465.700	100
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase tingkat penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	50	100	2.480.000	100	2.480.000	100	10.000.000	100
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	957.253.400	100	1.009.273.400	100	1.185.250.400	100
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM	Persen	100	100	3.437.961.400	100	3.023.935.100	100	3.023.935.100	100

1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	Persen	100	100	496.380.700	100	410.680.600	100	410.680.600	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						4.704.246.000		5.232.746.000		5.761.946.000	
Dinas Tenaga Kerja													
								4.704.246.000		5.232.746.000		5.761.946.000	
2	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	3.535.388.000	95	3.857.746.000	95	4.236.946.000	95
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	0	65	38.000.000	67	52.000.000	69	70.000.000	69
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	50	54	556.000.000	56	575.000.000	58	597.000.000	58
2	07	04	Program Penempatan tenaga Kerja	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja yang lulus seleksi	Persen	36	10	284.000.000	15	383.000.000	20	451.000.000	20
2	07	05	Program Hubungan Industriial	Besaran Kasus yang diselesaikan dergan perjanjian bersama (PB)	Persen	53	55	290.858.000	56	365.000.000	57	407.000.000	57
2	08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						7.570.534.550		7.211.842.578		6.851.165.828	
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
								7.570.534.550		7.211.842.578		6.851.165.828	
2	08	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	6.122.054.000	95	5.748.603.000	95	5.372.926.250	95
2	08	02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	39,16	13,56	217.687.550	15	184.810.000	20	194.810.000	20
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	7,7	7,3	148.000.000	7,2	183.755.100	7,1	173.755.100	7,1
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	Persen	100	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif	Persen	100	100	188.693.000	100	188.693.000	100	188.693.000	100
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pendampingan	Persen	100	100	859.100.000	100	870.981.478	100	885.981.478	100
2	09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan						10.668.647.585		10.867.687.466		11.293.550.823	
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan													
								10.668.647.585		10.867.687.466		11.293.550.823	
2	09	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	10.243.664.257	95	10.361.957.306	95	10.706.903.838	95
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persen	142,01	142,5	334.087.980	143	414.834.812	143,5	495.751.637	142,5

				Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	Persen	47,5	20		22		24		24
				Persentase Target Konsumsi Pangan	Persen	98,95	99		99,05		99,1		99,1
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Peningkatan Tahan Pangan	Persen	90,76	92,5	15.000.000	93	15.000.000	93,5	15.000.000	93,5
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	Persen	19,3	18	75.895.348	17,5	75.895.348	17	75.895.348	17
2	10	Usuran Pemerintahan Bidang Pertanian						25.272.010.000		10.345.000.000		8.370.000.000	
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						25.272.010.000		10.345.000.000		8.370.000.000	
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	Persen	100	100	109.440.000	100	150.000.000	100	165.000.000	100
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	Persen	85	80	25.000.000.000	80	10.000.000.000	80	8.000.000.000	80
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah	Persen	100	100	162.570.000	100	195.000.000	100	205.000.000	100
2	11	Usuran Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						62.755.779.000		63.264.531.000		63.846.999.000	
		Dinas Lingkungan Hidup						62.755.779.000		63.264.531.000		63.846.999.000	
2	11	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	14.721.445.601	95	14.455.398.601	95	14.197.866.601	95
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	Persen	100	100	462.275.000	100	62.275.000	100	62.275.000	100
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	60	65	1.083.184.855	70	1.083.184.855	75	1.083.184.855	75
2	11	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persen	100	100	62.672.500	100	62.672.500	100	62.672.500	100
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persen	100	100	127.587.000	100	127.587.000	100	127.587.000	100
2	11	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH	Persen	100	100	219.999.300	100	219.999.300	100	219.999.300	100
2	11	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen	60	80	2.251.234.150	90	2.251.234.150	100	2.251.234.150	100
2	11	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen	50	60	263.339.800	65	263.339.800	68	263.339.800	68

2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	48.023.500	100	48.023.500	100	48.023.500	100
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	persentase pengurangan sampah	Persen	24,2	28	43.516.017.294	30	44.690.816.294	30	45.530.816.294	30
				Persentase penanganan sampah	Persen	73,47	71		70		70		
2 12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								11.169.172.000		10.940.949.000		11.219.308.000	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								11.169.172.000		10.940.949.000		11.219.308.000	
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	10.595.585.780	95	10.306.057.720	95	10.559.172.156	95
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	Persen	100	99	91.459.200	99,25	116.104.200	99,50	118.659.410	99,50
				Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	Persen	99,12	90		95		96		
				Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	Persen	38,28	87		87,50		88		
				Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	Persen	100,04	82		82,50		83		
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	Persen	99,74	40	233.042.400	42,50	257.687.400	45	267.321.770	45
				Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	Persen	98,83	55		60		65		
				Persentase Penerbitan Akte Perceraian (Non Muslim)	Persen	43,68	40		42,50		45		
				Persentase Penerbitan Akte Perkawinan (Non Muslim)	Persen	99,78	60		62,50		65		
				Persentase Penerbitan Akte Kematian	Persen	99,12	40		42,50		45		
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Agregat Kependudukan	Persen	68,75	85	232.140.020	85	244.155.080	85	256.362.834	85
2	12	05	Program Pengelolaan Profil	Persentase penyajian komponen data dalam profil kependudukan	Persen	100	100	16.944.600	100	16.944.600	100	17.791.830	100
2 13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								1.559.491.000		1.577.465.550		1.596.338.828	
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								1.559.491.000		1.577.465.550		1.596.338.828	
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan dengan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persen	100	100	200.000.000	100	172.974.550	100	181.623.278	100
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Peresentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/pemberdayaan	Persen	60	65	1.359.491.000	70	1.404.491.000	75	1.414.715.550	75

2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					5.516.482.450		5.545.461.873		5.576.387.348		
		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					5.516.482.450		5.545.461.873		5.576.387.348		
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	14	18	245.180.000	17	240.200.000	15	258.611.629	15
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	70,50	70,75	3.417.942.450	70,8	3.449.193.873	70,85	3.458.804.319	70,85
				Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	Persen	70,53	71,5	865.900.000	71,8	865.900.000	72	865.900.000	72
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Tahun	22,35	22,1	933.300.000	22,56	933.300.000	23,1	933.300.000	23,1
								54.160.000		56.868.000		59.771.400	
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					45.399.908.000		46.370.456.000		47.147.236.000		
		Dinas Perhubungan					45.399.908.000		46.370.456.000		47.147.236.000		
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	11.990.128.000	95	11.731.176.000	95	11.252.956.000	95
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	Persen	80	83	29.190.280.000	84	30.349.780.000	85	31.434.780.000	85
				Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Persen	80	85	3.028.000.000	86	2.978.000.000	87	2.978.000.000	87
				Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Persen	80	82	331.500.000	83	331.500.000	84	431.500.000	84
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Persen	80	87	860.000.000	88	980.000.000	90	1.050.000.000	90
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					11.694.837.260		10.504.250.567		10.608.031.929		
		Dinas Komunikasi dan Informatika					11.694.837.260		10.504.250.567		10.608.031.929		
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	7.445.840.340	95	7.071.006.955	95	7.112.426.955	95
2	16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	Persen	58,23	70	719.466.920	80	748.613.612	90	891.974.974	90
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	Persen	91,79	95,52	3.529.530.000	97,01	2.684.630.000	98,51	2.603.630.000	98,51

2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					14.029.172.090		14.334.194.760		14.709.881.690		
		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan					14.029.172.090		14.334.194.760		14.709.881.690		
2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	12.429.702.090	95	12.514.724.760	95	12.716.911.690	95
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	100	100	0	100	-	100	15.000.000	100
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan	Persen	29	35	21.500.000	40	33.500.000	45	45.500.000	45
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang dinilai SEHAT	Persen	4	5	3.000.000	6	30.500.000	6	42.500.000	6
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian	Persen	32	35	410.170.000	40	410.170.000	40	410.170.000	40
2	17	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Persen	94	95	4.000.000	95	5.500.000	96	10.000.000	96
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Persen	2,65	2,85	13.000.000	2,95	24.000.000	3	50.000.000	3
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	Persen	0,26	0,34	1.147.800.000	0,37	1.315.800.000	0,42	1.419.800.000	0,42
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					9.590.246.000		9.907.678.000		10.097.726.000		
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP					9.590.246.000		9.907.678.000		10.097.726.000		
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	8.761.022.000	95	8.501.232.000	95	8.944.923.000	95
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase penetapan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal	Persen	100	100	74.250.000	100	472.530.000	100	132.530.000	100
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan	Persen	100	100	87.978.000	100	130.000.000	100	233.357.000	100
2	18	04	Program pelayanan penanaman modal	Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP	Persen	100	100	174.520.000	100	240.540.000	100	200.540.000	100
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan PMA / PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP	Persen	100	100	417.476.000	100	463.376.000	100	463.376.000	100
2	18	06	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Simyandu	Persen	100	100	75.000.000	100	100.000.000	100	123.000.000	100

2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					13.762.922.884		14.032.282.784		14.055.583.900		
		Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata					13.762.922.884		14.032.282.784		14.055.583.900		
2	19	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	7.087.839.310	95	7.242.339.210	95	7.121.671.310	95
2	19	02	Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Indeks pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Indeks	70	70	1.240.597.250	70	1.305.457.250	70	1.319.426.266	70
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Indeks pengembangan kapasitas daya saing olahraga	Indeks	70	70	5.284.486.324	70	5.334.486.324	70	5.464.486.324	70
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwardab	Orang	90	90	150.000.000	90	150.000.000	90	150.000.000	70
2	20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					461.799.740		492.912.433		569.639.071		
		Dinas Komunikasi Informatika					461.799.740		492.912.433		569.639.071		
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	Persen	38,46	53,85	461.799.740	61,54	492.912.433	69,23	569.639.071	69,23
2	21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					81.450.000		95.500.000		106.000.000		
		Dinas Komunikasi Informatika					81.450.000		95.500.000		106.000.000		
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	Persen	16	21,88	81.450.000	28,13	95.500.000	34,38	106.000.000	34,38
2	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					3.077.276.200		3.077.276.200		3.077.276.200		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					3.077.276.200		3.077.276.200		3.077.276.200		
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase Kebudayaan lokal daerah yang mengalami perkembangan	Persen	93,65	100	2.667.865.800	100	2.667.865.800	100	2.667.865.800	100
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Persen	100	100	196.633.800	100	196.633.800	100	196.633.800	100
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase objek sejarah yang dibina	Persen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100
2	22	05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase pelestarian cagar budaya	Persen	99	100	137.776.600	100	137.776.600	100	137.776.600	100
2	23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					19.355.950.000		8.553.418.000		8.617.102.000		
		Dinas Perpustakaan					19.355.950.000		8.553.418.000		8.617.102.000		
2	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	7.600.630.600	95	7.835.603.600	95	7.861.782.600	95
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Ketercukupan koleksi Perpustakaan	Eksemplar	73,155	150 judul (300 eksemplar)	11.755.319.400	150 judul (300 eksemplar)	717.814.400	150 judul (300 eksemplar)	755.319.400	150 judul (300 eksemplar)
				Ketercukupan tenaga perpustakaan	Persen	25,10	36,30		47,50		58,70	58,70	

2	24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				319.000.000		320.600.000		320.600.000			
		Dinas Perpustakaan				319.000.000		320.600.000		320.600.000			
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	74,65	74	291.000.000	75	292.600.000	76	292.600.000	76
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Persen	50	50	28.000.000	60	28.000.000	70	28.000.000	70
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				364.149.984		433.338.481		502.672.638			
		Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan				364.149.984		433.338.481		502.672.638			
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	Persen	118	100	54.000.000	100	93.000.000	100	105.000.000	100
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi	Persen	50	50	300.149.984	75	330.338.481	100	382.672.638	100
3	25	06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase jumlah pelaku Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang difasilitasi	Persen	83	100	10.000.000	100	10.000.000	100	15.000.000	100
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				2.377.076.116		2.441.116.216		2.501.947.100			
		Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata				2.377.076.116		2.441.116.216		2.501.947.100			
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persen	78	85	846.901.600	85	851.941.700	90	851.941.700	90
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya persentase Program Pemasaran Pariwisata	Persen	30	95	658.897.520	100	658.897.520	100	700.000.000	100
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Persen	60	64	50.000.000	66	50.000.000	68	50.000.000	70
3	26	05	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	25	30	821.276.996	32	880.276.996	35	900.005.400	50
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				6.817.570.431		3.470.689.053		4.098.591.539			
		Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan				6.817.570.431		3.470.689.053		4.098.591.539			
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/rekomendasi	Persen	20	30	1.118.211.984	40	1.233.000.000	50	1.307.967.437	50
				Persentase peningkatan kunjungan di UPTD Agribisnis	Persen	15	15		15		15	15	
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persen	12	20	233.291.632	30	316.772.603	40	658.536.220	40

				Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana di UPTD Agribisnis	Persen	2	2		2		2		6
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi	Nilai	90	95	4.195.341.648	95	423.636.561	95	480.078.411	95
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen	30	30	802.655.167	30	958.279.889	30	1.111.909.471	90
3	27	05	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen		50	-	60	55.000.000	70	40.000.000	70
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan unit usaha pengecer obat hewan yang memiliki izin	Persen		100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.100.000	100
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis	Persen	10	20	458.070.000	30	473.000.000	40	488.000.000	40
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						1.514.156.910		2.024.566.240		2.401.311.310	
		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan						1.514.156.910		2.024.566.240		2.401.311.310	
3	30	02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100	16.000.000	100	38.654.930	100	83.000.000	100
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	Persen	50	100	746.673.600	100	1.143.873.600	100	1.207.273.600	100
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	Persen	2	2	349.445.600	3	405.000.000	3	459.000.000	3
				Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	50	60	0	60	-	70	0	70
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	Persen	50	60	0	60	-	70	130.000.000	70
3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	100	100	102.037.710	100	137.037.710	100	147.037.710	100
3	30	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase usaha mikro yang melakukan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persen	0,27	0,27	300.000.000	0,40	300.000.000	0,53	375.000.000	0,53

3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				1.084.000.000		1.120.000.000		1.270.000.000			
		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan				1.084.000.000		1.120.000.000		1.270.000.000			
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	100	100	1.076.500.000	100	1.085.000.000	100	1.200.000.000	100
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait	Persen	78	80	1.500.000	80	5.000.000	85	20.000.000	85
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri	Persen	90	90	6.000.000	90	30.000.000	90	50.000.000	90
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01	Sekretariat Daerah				56.907.781.000		56.119.109.000		55.823.573.000			
		Sekretariat Daerah				56.907.781.000		56.119.109.000		55.823.573.000			
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	35.803.792.162	95	36.050.170.562	95	35.754.634.562	95
				Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Nilai	11,11	12	404.114.350	12,1	304.114.350	12,2	304.114.350	12,2
				Nilai IKM Sekretariat Daerah	Nilai	98,386	98,5	3.510.670.883	98,6	3.310.670.883	98,7	3.310.670.883	98,7
4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra	Persen	100	100	10.453.840.540	100	10.253.790.140	100	10.253.790.140	100
				Persentase implementasi kebijakan Pemerintahan	Persen	100	100	2.217.814.700	100	2.082.814.700	100	2.082.814.700	100
4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase implementasi kebijakan Perekonomian	Persen	100	100	1.309.311.250	100	1.209.311.250	100	1.209.311.250	100
				Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Persen	95,16	97,1	1.210.933.875	98,06	1.010.933.875	99,03	1.010.933.875	99,03
				Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	Persen	91,72	93	1.997.303.240	94	1.897.303.240	95	1.897.303.240	95
4	02	Sekretariat DPRD				55.793.937.000		55.728.953.000		55.663.669.000			
		Sekretariat DPRD				55.793.937.000		55.728.953.000		55.663.669.000			
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	42.025.239.162	95	41.492.255.162	95	41.426.971.162	95
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	Persen	100	100	13.768.697.838	100	14.236.697.838	100	14.236.697.838	100

5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	01		Perencanaan				9.793.951.000		10.070.051.000		9.502.167.000		
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				9.793.951.000		10.070.051.000		9.502.167.000		
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	7.533.951.000	95	7.566.257.510	95	7.519.968.530	95
5	01	02	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja pembangunan pada dokumen perencanaan daerah dengan DPA-APBD	Persen	65	70	1.360.000.000	75	1.563.793.490	80	1.174.347.190	80
				Indeks Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Indeks (dengan nilai maksimal sebesar 100)	80	80		81		82		82
5	01	03	Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan DPA-APBD	Persen	65	70	900.000.000	75	940.000.000	80	807.851.280	80
5	02		Keuangan				51.673.962.000		52.618.652.000		53.359.706.000		
			Badan Keuangan dan Aset Daerah				29.966.282.000		29.965.798.000		29.715.546.000		
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95	95	14.366.509.000	95	14.554.608.000	95	13.995.773.000	95
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran		100	100	11.856.773.000	100	12.312.211.000	100	12.496.773.000	100
				Persentase penatausahaan keuangan dan manajemen kas dilaksanakan sesuai ketentuan		100	100						
				Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu		100	100						
				Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah		78	100						
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik		100	100	3.743.000.000	100	3.098.979.000	100	3.223.000.000	100
			Badan Pendapatan Daerah				21.707.680.000		22.652.854.000		23.644.160.000		
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	17.738.200.000	95	18.484.900.750	95	19.267.812.500	95
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	Persen	88,94	100	3.969.480.000	100	4.167.953.250	100	4.376.347.500	100

5	03	Kepegawaian				14.409.797.228		14.248.929.228		14.337.829.228			
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM				14.409.797.228		14.248.929.228		14.337.829.228			
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	9.470.989.179	95	9.310.121.179	95	9.399.021.179	95
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Persen	96,61	80	4.938.808.049	80	4.938.808.049	80	4.938.808.049	80
5	04	Pendidikan dan Pelatihan				1.246.629.772		1.246.629.772		1.246.629.772			
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM				1.246.629.772		1.246.629.772		1.246.629.772			
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Manajerial fungsional	Persen	77,59	80	1.246.629.772	80	1.246.629.772	80	1.246.629.772	80
5	05	Penelitian dan Pengembangan				800.000.000		800.000.000		730.000.000			
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				800.000.000		800.000.000		730.000.000			
5	05	02	Program penelitian dan pengembangan daerah	Indeks Kebermanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	Indeks (dengan nilai maksimal 100)	80	80	800.000.000	85	800.000.000	90	730.000.000	90
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	01	Inspektorat Daerah				10.814.744.000		10.669.522.000		10.653.774.000			
		Inspektorat Daerah				10.814.744.000		10.669.522.000		10.653.774.000			
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	9.803.561.000	95	9.540.039.000	95	9.642.591.000	95
6	01	02	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP	Persen	100	100	469.498.000	100	567.798.000	100	469.498.000	100
				Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	Persen	100	100		100		100		100
6	01	03	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	541.685.000	3	561.685.000	3	541.685.000	3
				Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	Persen	63,33	80		90		100		100
7	UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01	Kecamatan				78.651.304.000		78.340.280.000		78.834.962.000			
		Kecamatan Pontianak Barat				12.681.877.000		12.241.990.000		12.432.751.000			
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	9.224.584.217	95	9.063.490.000	95	9.254.251.000	95

7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90	92	1.170.500.000	95	1.168.500.000	95	1.168.500.000	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Persen	90	95	1.551.682.420	92	1.350.000.000	95	1.350.000.000	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	Persen	90	95	150.000.000	90	120.000.000	90	120.000.000	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	82	90	585.110.363	92	540.000.000	95	540.000.000	100
Kecamatan Pontianak Selatan								13.744.019.000		13.701.732.000		13.668.443.000	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	10.087.006.000	95	9.971.732.000	95	9.848.443.000	95
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90	100	782.875.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Persen	90	90	2.130.008.000	90	2.155.000.000	95	2.210.000.000	95
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	Persen	90	90	161.130.000	90	175.000.000	95	185.000.000	95
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	90	90	583.000.000	90	600.000.000	95	625.000.000	95
Kecamatan Pontianak Utara								12.829.527.000		12.652.666.000		12.482.934.000	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	8.898.502.450	95	8.604.467.790	95	8.292.187.000	95
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90	95	1.305.589.500	95	1.335.550.000	95	1.380.000.000	95
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Persen	90	95	1.698.435.050	95	1.747.859.510	95	1.814.682.000	95
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	Persen	90	95	132.000.000	95	146.654.700	95	152.475.000	95
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	90	95	795.000.000	100	818.134.000	95	843.590.000	95

			Kecamatan Pontianak Kota				13.790.877.000		14.012.461.000		14.121.929.000		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	10.225.377.000	95	10.351.396.000	95	10.206.965.750	95
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	95	100	1.155.500.000	100	1.194.165.000	100	1.253.873.250	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Persen	100	100	1.475.000.000	100	1.548.750.000	100	1.655.325.000	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	Persen	100	100	205.000.000	100	215.250.000	100	232.575.000	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	95	100	730.000.000	100	702.900.000	100	773.190.000	100
			Kecamatan Pontianak Tenggara					9.650.577.000		9.875.295.000		10.109.519.000	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	7.336.577.000	95	7.479.177.000	95	7.593.919.000	95
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90	95	457.000.000	96	462.000.000	97	470.000.000	97
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Persen	90	95	1.223.000.000	96	1.235.000.000	97	1.323.800.000	97
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	Persen	90	95	144.000.000	96	159.118.000	97	169.000.000	97
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	90	95	490.000.000	96	540.000.000	97	552.800.000	97
			Kecamatan Pontianak Timur					15.954.427.000		15.856.136.000		16.019.386.000	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95	11.009.327.000	95	10.710.636.000	95	10.651.386.000	95
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	82	90	884.100.000	92	890.500.000	95	899.000.000	95
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Persen	80	85	2.991.000.000	88	3.140.000.000	90	3.299.000.000	90
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	Persen	82	90	100.000.000	92	110.000.000	95	120.000.000	95
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	82	90	970.000.000	92	1.005.000.000	95	1.050.000.000	95

8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik			33.991.116.000		8.413.917.000		8.437.217.000					
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			33.991.116.000		8.413.917.000		8.437.217.000					
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		95		95	3.290.027.000		2.912.828.000	95	2.936.128.000	95
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tingkat pemahaman nilai pancasila dan karakter kebangsaan	Persen		90	90	90	919.000.000		819.000.000	90	819.000.000	90
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase tingkat pemahaman politik	Persen		90	90	90%	28.534.089.000		3.434.089.000	90	3.434.089.000	90
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan ormas	Persen		85	85	85	420.000.000		420.000.000	85	420.000.000	85
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase tingkat pemahaman ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen		90	90	90%	100.000.000		100.000.000	90	100.000.000	90
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persen		100	100	100	728.000.000		728.000.000	100	728.000.000	100
										1.935.048.315.000		1.991.202.844.000		2.052.862.978.000	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJPD dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap keempat dan/atau isu strategis aktual. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari keberhasilan pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah setiap tahun.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Dalam aspek kesejahteraan masyarakat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kebijakan pembangunan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta menentukan arah pembangunan Pemerintah Kota Pontianak tiga tahun kedepan. Dalam masa pasca pandemi ini Pemerintah Kota Pontianak cukup optimis untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7%-5,3% pada akhir tahun perencanaan. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak meningkat cukup signifikan dimana indeks Tahun 2022 mencapai sebesar 80,48, lebih tinggi dari IPM Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 68,63 dan IPM nasional sebesar 72,91, sehingga Pemerintah Kota Pontianak berani menetapkan target 82,00 pada akhir tahun perencanaan.

Peningkatan IPM ini dipicu oleh upaya peningkatan kualitas bidang kesehatan yaitu semakin meratanya sarana dan prasarana kesehatan dan kemudahan untuk mengakses persalinan medis. Bidang pendidikan didukung oleh peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta terjaganya kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dengan IPM Kota Pontianak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dapat diartikan bahwa pembangunan manusia di Kota Pontianak semakin baik. Penetapan indikator kinerja utama Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ditunjukkan pada Tabel 8.1.

Selain adanya penetapan indikator kinerja utama terdapat juga penetapan indikator kinerja perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan indikator kinerja perangkat daerah di Kota Pontianak ditunjukkan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pontianak Tahun 2024-2026

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target tahun ke -			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,48	81,2	81,6	82	82
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,46	73,65	73,74	73,9	73,9
2	Angka Stunting Balita	Persen	19,7	14	13	12	12
3	Indeks Pendidikan	Indeks	0,765	0,768	0,769	0,77	0,77
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,96	0,94	0,93	0,92	0,92
5	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	Indeks	94,10	94,20	94,25	94,3	94,3
6	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkatan	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama
7	Persentase Atlet Olah Raga dan Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi/Nasional dan Internasional	Persen	45	46,7	49,16	55	55
2	Indeks Infrastruktur	Persen	88,07	89,36	90,66	91,88	91,88
3	Indeks Risiko Bencana	Indeks	90,63	77,09	70,09	64,25	64,25
1	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	Persen	89,33	90,42	91,32	92,07	92,07
2	Pengurangan Luas Genangan	Persen	48,61	28	24	20	20
3	Persentase Akses Air Minum Aman	Persen	7	11	13	15	15
4	Persentase Fasilitas Pemerintah Dalam Kondisi Baik	Persen	66,15	70	75	80	80
5	Persentase Lingkungan Pemukiman yang Layak	Persen	85,39	86,95	88,06	89,04	89,04
6	Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	Jam	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	62,27	63,4	63,9	63,96	63,96
8	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,45	0,50	0,55	0,60	0,60
9	Indeks Kota Toleran	Indeks	4,75	4,85	4,95	5	5

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target tahun ke -			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,98 (B)	73 (BB)	75 (BB)	77 (BB)	77 (BB)
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	49,90	71	73	75	75
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tingkatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Predikat	72,28 (BB)	80 (A)	81 (A)	82 (A)	82 (A)
5	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	Indeks	6,08	6,45	6,58	6,71	6,71
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,98	4,5-5,1	4,6-5,2	4,7-5,3	4,7-5,3
2	Tingkat Inflasi	Persen	6,35	3±1	3±1	3±1	3±1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,92	8,35-10,25	8,20-10,20	8,15-10,15	8,15-10,15
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,46	4,3-4,4	4,2-4,3	4,1-4,2	4,1-4,2
5	Gini Rasio	Rasio	0,36	0,322	0,317	0,312	0,312
6	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.37 (Tinggi)	3,76 (Sangat Tinggi)	3,80 (Sangat Tinggi)	3,84 (Sangat Tinggi)	3,84 (Sangat Tinggi)

Sumber: Bappeda Kota Pontianak, 2023

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pontianak Tahun 2024-2026

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,98	4,5-5,1	4,6-5,2	4,7-5,3	4,7-5,3
2	Laju Inflasi	Persen	6,35	3±1	3±1	3±1	3±1
3	PDRB Perkapita ADHB	Rp./Kapita/tahun	66.169.963,20	74.000.000,00	78.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00
4	Indeks Gini	Rasio	0,36	0,322	0,317	0,312	0,312
5	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	Persen	95,54	95,60-95-70	95,70-95,80	95,80-95,90	95,80-95,90
6	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,49	0,47	0,46	0,45	0,45
7	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,48	81,2	81,6	82	82
9	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,44	10,5	10,53	10,55	10,55
10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,02	15,04	15,05	15,06	15,06
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,82	68,82	70,82	72,82	72,82
12	Rasio Penduduk Bekerja	Rasio	90,08	89,75-91,65	89,80-91,80	89,85-91,85	89,85-91,85

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	Pendidikan							
1.1	Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Dasar	Persen	101,53	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2	Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah Dasar	Persen	95,65	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.3	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Sekolah Dasar	Persen	98,53	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4	Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persen	101,28	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.5	Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persen	84,02	87	89	91	91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.6	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persen	94,37	96	97	98	98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.7	Angka Partisipasi Kasar Jenjang Paud	Persen	53,65	55	56	57	57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.8	Angka Partisipasi Murni Jenjang Paud	Persen	49,46	51	52	53	53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.9	Persentase Akreditasi Pendidikan Nonformal Dan Lembaga Kursus/Pelatihan Minimal C	Persen	93,75	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	61,47	166,84	158,06	149,28	149,28	Dinas Kesehatan
2.2	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	2,11	2,11	2,02	1,93	1,93	Dinas Kesehatan

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3	Persentase Penderita TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.4	Persentase Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan Hipertensi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.5	Persentase Wasting Balita	Persen	7,50	7,00	6,90	6,80	6,80	Dinas Kesehatan
2.6	Fasyankes Pemerintah yang Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.7	Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	Persen	13,14	90	92	95	95	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Persentase kualitas jalan perkotaan dalam kondisi mantap	Persen	89,73	90,63	91,23	91,83	91,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.2	Persentase Panjang saluran berfungsi baik	Persen	53,03	54,05	55	55,05	55,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.3	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM	Persen	89,08	92,7	94,6	95,7	95,7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.4	Persentase fasilitas publik pemerintah yang menjadi kewenangan PUPR dalam kondisi baik	Persen		91,5	92	92,5	92,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.5	Persentase pemanfaatan lahan sesuai tata ruang	Persen	88,5	85	87	89	89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.6	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik	Persen	99,7	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman							
4.2	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Persen	71,45	74,40	76,60	78,55	78,55	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.2	Persentase luas permukiman tidak kumuh	Persen	99,34	99,49	99,52	99,53	99,53	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Persentase pemenuhan 34 indikator IKD	Persen	36,03	44,12	52,21	69,12	69,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Sosial							
6.1	Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persen	98	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen		100	100	100	100	Dinas Sosial

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.3	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	Persen		100	100	100	100	Dinas Sosial
Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	Tenaga Kerja							
1.1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah	145,97	156,4	160,109	155,418	155,418	Dinas Tenga Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							
2.1	Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Tingkatan	Madya	Utama	Utama	Mentor	Mentor	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2	Rasio Anak Korban Kekerasan	Persen		0,05	0,04	0,02	0,02	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pangan							
3.1	Ketersediaan Energi per Kapita	Kkal/ Kapita/ Hari	2962	3010	3020	3030	3030	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.2	Ketersediaan protein perkapita	Gr/ Kapita/ Hari	107,63	108	109	110	110	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.3	Skor pola pangan harapan	Konsumsi	77,6	86,5	87	87,5	87,5	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.4	Produktivitas Tanaman Pangan							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Produktivitas Padi	Ku/ Ha	36,94	37,31	37,49	37,60	37,60	
	- Produktivitas Ubi Kayu	Ku/ Ha	219,69	222,33	223	223,64	223,64	
	- Produktivitas Keladi	Ku/ Ha	140	141,68	142,10	143,08	143,08	
3.5	Produksi Tanaman Hortikultura							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	- Produksi Sayuran	Ton		7.090,79	7.111,75	7.125,72	7.125,72	
	- Produksi Buah-buahan	Ton		23.550	23.667	23.783	23.783	
	- Produksi Biofarmaka	Kg		2.257.500	2.268.566	2.279.632	2.279.632	
4	Pertanahan							
4.1	Persentase Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Persen	95	93,33	93,33	93,33	93,33	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	59,84	54,50	55,00	55,50	55,50	Dinas Lingkungan Hidup
5.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	86,68	83,50	84,00	84,50	84,50	Dinas Lingkungan Hidup
5.3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	27,64	41,50	42,00	42,60	42,60	Dinas Lingkungan Hidup
5.4	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							
6.1	Persentase Keluarga yang memiliki KK	Persen	99,81	99,00	99,10	99,20	99,20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA	Persen	48,02	60	70	80	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.3	Persentase penduduk yang memiliki KTP	Persen	101,12	95	96	97	97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.4	Persentase penduduk yang memilki akta kelahiran	Persen	99,98	98,00	98,25	98,50	98,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.5	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan	Persen	99,78	60	62,5	65	65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.6	Persentase penduduk yang memiliki akta percerian	Persen	44,14	40	42,5	45	45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.7	Persentase penduduk meninggal yang memiliki akta kematian	Persen	99,15	97	97,25	97,50	97,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.8	Persentase pemanfaatan database SIAK untuk kepentingan pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							
7.1	Persentase keterlibatan lembaga Kemasyarakatan dalam program pembangunan di wilayah kelurahan	Persen		78,25	80	85	85	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
8.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak Perwanita	2,07	2,37	2,22	2,10	2,10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen		9,8	8,8	7,8	7,8	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Perhubungan							
9.1	Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Persen	B	78	79	80	80	Dinas Perhubungan
9.2	Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Persen	80	80	80	90	90	Dinas Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	Persen	90,32	93,55	96,77	100	100	Dinas Kominikasi dan Informatika
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	95	97	97.50	98	98	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
11.2	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru	Persen	4.30	5.00	5.50	6.00	6.00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
12	Penanaman Modal							
12.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan DPMPTSP	Mutu Pelayanan	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.2	Nilai Investasi Daerah	Rupiah	434.000.000.000	555.500.000.000	561.055.000.000	566.665.550.000	566.665.550.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Kepemudaan dan Olahraga							
13.1	Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi Tingkat Kota/Provinsi/Nasional/Internasional	Persen	45	60	65	70	70	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.2	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional/ Internasional	Persen	20	33,33	33,33	40	40	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
14	Statistik							
14.1	Persentase Pemenuhan data prioritas daerah	Persen	38	54	62	69	69	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Persandian							
15.1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	Persen	16,13	22,58	29,03	35,48	35,48	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Kebudayaan							
16.1	Persentase Warisan budaya yang dilestarikan	Persen	70	72	73	74	74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Perpustakaan							
17.1	Kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen		85	85	85	85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Kearsipan							
18.1	Indeks Kearsipan	Nilai Indeks	Baik	CC (cukup)	CC (cukup)	B (baik)	B (baik)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	Kelautan dan Perikanan							
1.1	Produksi Kelautan dan Perikanan							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	-Produksi Perikanan Tangkap	Ton	723,37	721	742	764	2.227	
	-Produksi Perikanan Budidaya	Ton	223,68	235	249	264	748	
	-Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	1.671,4	1.730	1.764	1.800	5.294	
2	Pariwisata							
2.1	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	78	85	85	90	90	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	Pertanian							
3.1	Produksi Daging Ternak	Kg		6.103.847,13	6.164.885,60	6.226.534,46	6.226.534,46	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
4	Perdagangan							
4.1	Persentase tingkat kecukupan stok sembako dan barang penting lainnya	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
4.2	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan	Persen		75	80	85	85	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
5	Perindustrian							
5.1	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil	Persen	2.36	2.50	2.60	2.80	2.80	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
1	Sekretariat Daerah							
1.1	Nilai rata-rata IKM Perangkat Daerah se-Kota Pontianak	Nilai	88.687	88.8	88.9	88	88	Sekretariat Daerah

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2	Indeks Perekonomian	Indeks	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
1.3	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Indeks	91,01	92,01	92,51	93,03	93,03	Sekretariat Daerah
1.4	Indeks Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Indeks	94	96,00	96,50	96,85	96,85	
1.5	Nilai AKIP Kota Pontianak	Nilai (Predikat)	72.28	80	81	82	82	Sekretariat Daerah
1.6	Nilai LPPD Kota Pontianak	Tingkatan	Belum Keluar	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD							
2.1	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Nilai	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sekretraiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sekretraiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
1	Perencanaan							
1.1	Nilai Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Nilai	45,11	48,5	49	49,5	49,5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Kuangan							
2.1	Persentase pemenuhan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan	Persen		100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.2	Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori		Kategori Sedang	Kategori Sedang	Kategori Sedang	Kategori Sedang	Badan Pendapatan Daerah

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	31,54	32,55	40,17	41,14	41,14	Badan Pendapatan Daerah
3	Kepegawaian							
3.1	Indeks Sistem Merit	Indeks	317	325	325	325	325	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Pendidikan dan Pelatihan							
4.1	Persentase ASN ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	Persen	78	80	85	90	90	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Penelitian dan Pengembangan							
5.1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks	55,10 (Inovatif)	66,01 (Sangat Inovatif)	61 (Sangat Inovatif)	62 (Sangat Inovatif)	62 (Sangat Inovatif)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
1	Inspektorat Daerah							
1.1	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	Persen	6,67% (2 PD)	31,25% (10 PD)	62,50% (20 PD)	100% (32 PD)	100% (32 PD)	Inspektorat
1.2	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,3	3,4	3,41	3,42	3,42	Inspektorat
Unsur Kewilayahan								
1	Kecamatan							
1.1	IKM kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)	Tingkatan	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Kecamatan Pontianak Barat
1.2	Indeks Gotong Royong	Nilai	80	85	88	90	90	Kecamatan Pontianak Barat

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3	Persentase partisipasi masyarakat	Persen	80	85	88	90	90	Kecamatan Pontianak Barat
1.4	IKM kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)	Tingkatan	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Kecamatan Pontianak Kota
1.5	Indeks Gotong Royong	Nilai	80	85	88	90	90	Kecamatan Pontianak Kota
1.6	Indeks partisipasi masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Pontianak Kota
1.7	IKM kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang Pelayanan Publik)	Tingkatan	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Kecamatan Pontianak Selatan
1.8	Indeks Gotong Royong	Nilai	90	95	95	97	97	Kecamatan Pontianak Selatan
1.9	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	Persen	90	95	95	97	97	Kecamatan Pontianak Selatan
1.10	IKM kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)	Tingkatan	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Kecamatan Pontianak Tenggara
1.11	Indeks Gotong Royong	Nilai	83	85	88	89	89	Kecamatan Pontianak Tenggara
1.12	Persentase partisipasi masyarakat	Persen	90	92	92	93	93	Kecamatan Pontianak Tenggara
1.13	IKM kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)	Tingkatan	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Kecamatan Pontianak Timur
1.14	Indeks Gotong Royong	Nilai	80	85	88	90	90	Kecamatan Pontianak Timur
1.15	Persentase partisipasi masyarakat	Persen	80	85	88	90	90	Kecamatan Pontianak Timur

RPD Kota Pontianak [2024 - 2026]

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.16	IKM kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)	Tingkatan	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Kecamatan Pontianak Utara
1.17	Indeks Gotong Royong	Nilai	90	95	95	95	95	Kecamatan Pontianak Utara
1.18	Persentase partisipasi masyarakat	Persen	90	95	95	95	95	Kecamatan Pontianak Utara
Unsur Pemerintahan Umum								
1	Kesatuan Bangsa Dan Politik							
1.1	Persentase Penyelesaian Konflik	Persen		100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	Rp./Tahun	15.141.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.000.000
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	Persen	54,68	55	56	57	57
3	Rasio Ekspor+Impor terhadap PDRB	Rasio	0,24	0,26	0,27	0,28	0,28
4	Rasio pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum	Rasio	0,62	0,58	0,56	0,54	0,54
5	Panjang jalan dalam kondisi baik	Km	226,62	238,62	244,62	250,62	250,62

RPD Kota Pontianak [2024 – 2026]

No.	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Persentase pemanfaatan lahan sesuai tata ruang	Persen	88,5	89,5	90	90,5	90,5
7	Jumlah Bank dan cabang	Unit	148	150	151	152	152
8	Persentase sampah yang ditangani	Persen	73,47	71,50	70	68	68
9	Persentase pengurangan sampah dari sumber	Persen	24,20	28	30	32	32
10	Angka kriminalitas yang diselesaikan	Laporan	93,32	94	94,5	95	95
11	Jumlah surat izin usaha yang diterbitkan	Surat	7.678	8.061	8.484	8.887	8.887
12	Rasio ketergantungan	Persen	42,60	42,38	42,27	42,16	42,16

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Pontianak, masyarakat dan *stakeholders* terkait lainnya dalam menyelenggarakan pembangunan Kota Pontianak selama periode Tahun 2024 - 2026, dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan Kota Pontianak selama periode Tahun 2024 - 2026.

Rencana Pembangunan Daerah berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah serentak pada Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah ini juga merupakan penjabaran kebijakan periode keempat RPJPD (2024-2025) yang selanjutnya menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Pontianak sampai dengan Tahun 2026. Oleh karena itu unsur Pemerintahan Daerah baik Eksekutif dan Legislatif, masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan program-program RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, integritas birokrasinya, infrastruktur yang berkelanjutan dan ekonomi yang maju dan inklusif. Dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah, diharapkan Kota Pontianak akan semakin dekat dalam pencapaian visi jangka panjangnya, yaitu Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025.

WALIKOTA
KOTA PONTIANAK

RUSDI KAMTONO